



**BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA**



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

LAPORAN KINERJA

2020

"Pancasila harus terus menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kita"



IR. H. JOKO WIDODO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020
Yang Dilaksanakan Secara Virtual (1/6/2020)

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2020

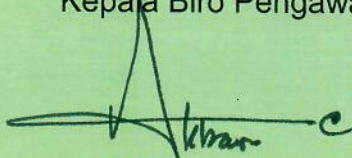
Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang telah disajikan di dalam laporan kinerja ini

Jakarta, Februari 2021

Kepala Biro Pengawasan Internal,



ABBAS

NIP. 19740330 199803 1 000

KATA PENGANTAR

Tahun 2020, BPIP memasuki usia ke-2 tahun sebagai Lembaga yang secara definitif mempunyai dan mengelola sumber daya sendiri. Sebuah usia yang cukup muda bagi upaya pembinaan ideologi Pancasila di Indonesia. Dengan usianya yang muda, BPIP bersemangat memberikan kontribusi dalam menjadikan Pancasila sebagai *leitstar* atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) negara agar nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam laku hidup rakyat Indonesia. Berbagai keluaran dan hasil kerja yang diberikan BPIP pada tahun 2020 dapat dilihat pada Laporan Kinerja BPIP tahun 2020 ini.

BPIP menyusun laporan kinerja sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Laporan ini memberikan gambaran akuntabilitas BPIP dalam upaya memenuhi setiap target kerja dan pemakaian sumber daya yang digunakan. Sebagai landasan penyusunan adalah Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024, Rencana Tahunan 2020, analisis antara target dan realisasi indikator kinerja utama sasaran strategis, sasaran program, dan kegiatan BPIP tahun 2020. Pedoman penyusunan laporan mengikuti Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, pun tak terelakkan menerpa Indonesia. Pemerintah berjuang mengedepankan keselamatan rakyat melalui instrument-instrumen yang ada. BPIP mendukung kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). BPIP turut mensosialisasikan kebijakan tersebut dan berkontribusi *refocusing* program dan anggaran tahun 2020 untuk PC-PEN.

Agar upaya pembinaan ideologi Pancasila semakin efektif dan efisien, BPIP sangat terbuka atas setiap saran dan masukan yang membangun. BPIP menyadari mewujudkan Pancasila dalam laku hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat adalah visi yang harus dicapai bersama setiap elemen bangsa Indonesia.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D

RINGKASAN EKSEKUTIF

Arah kebijakan dan strategi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 masuk dalam Program Prioritas Revolusi Mental dan PIP untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter dengan Kegiatan Prioritas berupa PIP, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Cakupan kebijakan dan strategi yang ditempuh, yaitu:

- (a) PIP, penguatan pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara;
- (b) peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai perumus kebijakan umum PIP;
- (b) harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan
- (c) membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara.

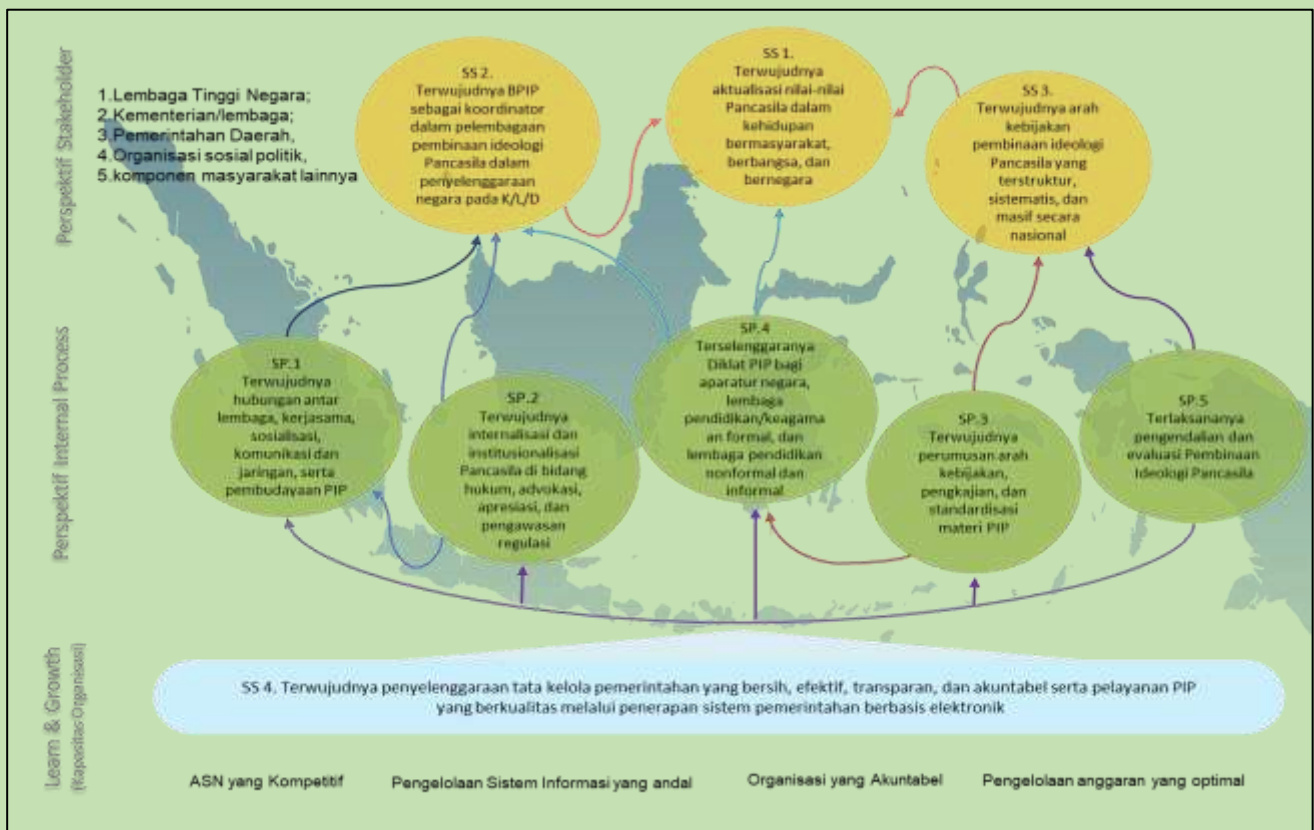
BPIP mendukung sepenuhnya pencapaian visi dan misi Presiden yaitu untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Program PIP oleh BPIP menghasilkan *output*, *outcome*, dan *impact* dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila menjadi satu-satunya ideologi negara dan teraktualisasikan dalam setiap kebijakan, peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelaksanaan Program PIP merupakan rencana strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024. Strategi PIP diarahkan mewujudkan 4 sasaran strategis BPIP, yaitu:

1. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelembaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada Kementerian/Lembaga/Daerah;
2. Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional;
3. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Ke empat sasaran strategis tersebut terwujud dengan dukungan sasaran program Kedeputan dan Sekretariat Utama. Sasaran Program dicapai dengan berbagai kegiatan teknis. Hubungan sasaran strategis dan sasaran program PIP dapat dipetakan, sebagai berikut.

PETA STRATEGIS BPIP



Upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila di seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah tanggung jawab bersama. BPIP sebagai salah satu *leading sektor* PIP akan mengukur terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang selanjutnya dapat menjadi dasar penentuan kebijakan, dan menjadikan Pancasila sebagai pegangan hidup masyarakat Indonesia. Capaian Strategis PIP oleh BPIP Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Mewujudkan BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah. Ukuran capaian sasaran strategis adalah Persentase Kementerian/Lembaga/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP. Institusionalisasi adalah proses suatu norma yang dilewati oleh masyarakat untuk menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan sehingga di kenal, diakui, dihargai, dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Sasarannya adalah Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. 100% keberhasilan diukur dari 61 K/L/D yang telah melakukan institusionalisasi yang dikoordinasikan oleh BPIP. Ruang lingkup institusionalisasi adalah hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, jaringan, pembudayaan, hukum, pengawasan regulasi, advokasi, apresiasi, perencanaan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan ideologi Pancasila.

BPIP berupaya menghasilkan arah kebijakan yang terstruktur, sistematis, dan massif dalam PIP secara Nasional. Ukuran kinerja terwujudnya arah kebijakan PIP adalah rekomendasi substansi atau rekomendasi kebijakan (peraturan perundang-undangan) yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Tahun 2020 capaian indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan massif secara nasional adalah substansi rekomendasi pada: (i) Penyampaian Usulan Penyempurnaan RPerPres tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); (ii) Mendorong Usulan RPerPres PIP kepada generasi muda melalui Program Paskibraka; (iii) Usulan konsep Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila; (iv) Pembahasan dan penyusunan Naskah Kebijakan Ekonomi Pancasila; (v) Launching Pancamain dengan keterlibatan Presiden RI.

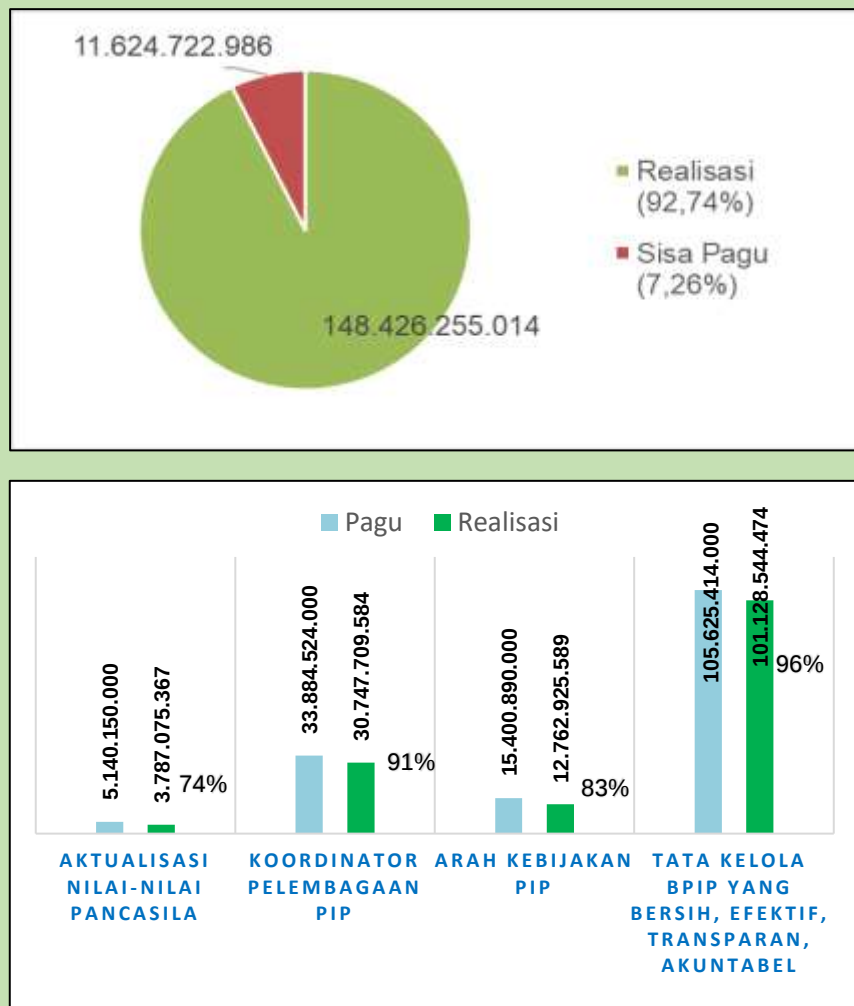
Capaian sasaran strategis berikutnya adalah terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ukuran keberhasilan sasaran ini adalah perkembangan penyusunan indeks aktualisasi Pancasila. Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai situasi dan kondisi terkini pengamalan (laku hidup, habituasi) Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan tersebut dilihat dari aspek realisasi nilai dan persepsi yang dibuat dalam bentuk indeks. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kerangka konsep IAP secara operasional didefinisikan sebagai: Ideologi yang nilai-nilainya aktual pada 3 lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: (1) rumah-tangga/komunitas/hubungan antar warga, (2) kelembagaan negara (hubungan antar kelembagaan negara), dan (3) regulasi/kebijakan.

Selain 3 capaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, salah satu sasaran strategis BPIP adalah terkait dengan dukungan manajemen dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan tata kelola BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan berbagai layanan, yaitu: layanan fasilitasi dewan pengarah & ketenagaahlian, layanan perencanaan dan keuangan, layanan hukum dan organisasi, layanan umum dan sumber daya manusia, layanan pengawasan internal; dan layanan data dan informasi.

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi metode dan pendekatan pencapaian indikator-indikator kinerja. BPIP dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah mendukung langkah refocusing anggaran, dan melakukan berbagai cara guna penanganan dan pencegahan paparan Covid-19 bagi seluruh pegawai BPIP. Langkah-langkah yang ditempuh, antara lain: penyelenggaraan rapid/swab test bagi pegawai BPIP, penempatan hand sanitizer di lingkungan kantor BPIP, pembagian masker bagi pegawai BPIP, pengukur suhu tubuh di pintu masuk gedung BPIP, penyediaan mesin bilik disinfektan di gedung kantor BPIP, penyediaan mesin cuci tangan di kantor BPIP, penyemprotan desinfektan di kantor BPIP dan Setwapres,

penyediaan banner & selebaran terkait pencegahan Covid 19, pengadaan mesin thermal pengukur suhu otomatis.

Evaluasi kinerja anggaran menunjukkan dari pagu awal anggaran BPIP TA 2020 sebesar Rp. 216.998.054.000,-. diefisiensi guna refokusing program Nasional penanganan Covid-19 menjadi Rp160.050.978.000,-. Realisasi anggaran hingga akhir tahun 2020 adalah sebesar 92.74% dengan alokasi dan realisasi guna mewujudkan perspektif stakeholder atau sasaran strategis, yaitu:



Evaluasi kinerja sasaran strategis pembinaan ideologi Pancasila menunjukkan 1 (satu) indikator kinerja utama pada sasaran terwujudnya arah kebijakan PIP belum tercapai secara optimal, yaitu 75%. Hal ini mengingat usulan rekomendasi kepada Presiden harus tepat sasaran dan dibahas secara intensif oleh Dewan Pengarah BPIP. Pada sasaran strategis perspektif kapasitas organisasi (program dukungan manajemen) terdapat 2 indikator kinerja utama yang belum menunjukkan hasil baik atau masih di bawah 80%, yaitu indikator nilai Reformasi Birokrasi, dan Indeks Profesionalitas Pegawai BPIP. Belum optimalnya capaian indikator kinerja utama tersebut disebabkan BPIP sebagai Lembaga yang baru berdiri masih dalam upaya pengembangan dan penguatan kelembagaan. Indeks

Profesionalitas Pegawai BPIP masih rendah karena belum dilakukannya pemutahiran data kompetensi dan kinerja pegawai BPIP. Ringkasan jumlah dan status capaian kinerja indikator kinerja utama BPIP tahun 2020 adalah sebagai berikut.



BPIP terus berbenah diri, khususnya dalam hal penguatan kelembagaan dan substansi PIP. Beberapa langkah dan rencana aksi dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja, antara lain: (i) memperkuat budaya organisasi dan pola pikir bekerja berbasis kinerja dengan peningkatan implementasi Program RB, (ii) penyelarasan antar sasaran program pada tingkat Eselon I dan sasaran kegiatan dengan penguatan penelaahan dan koordinasi antara BPIP, Bappenas, dan Kemenkeu, dan (iii) membudayakan pelaksanaan dialog kinerja tingkat pimpinan yang lebih terarah untuk memastikan capaian keluaran/hasil dan realisasi anggaran yang berkualitas yang memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat.

ooOOoo

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	ix
Daftar Istilah	xi
Daftar Tabel dan Gambar	xiii
Ikhtisar Kinerja	xiv
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
D. Aspek Strategis	9
E. Isu Strategis	9
F. Sistematika Penulisan	10
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	13
B. Rencana Kerja	15
C. Perjanjian Kinerja	16
D. Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja	17
Bab III CAPAIAN STRATEGIS TAHUN 2020	
A. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah	23
A.1. Terjalannya Hubungan Antar Lembaga, Kerjasama, Sosialisasi, dan Jaringan, serta Pembudayaan	25
A.1.1. Penguatan Sinergi Antar Lembaga yang Melaksanakan PIP	34
A.1.2. Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila	60
A.1.3. Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila	71
A.2. Internalisasi Dan Institusionalisasi Pancasila Di Bidang Hukum, Advokasi, Apresiasi, dan Pengawasan Regulasi..	82
A.2.1. Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional terhadap Nilai-Nilai Pancasila	85
A.2.2. Advokasi PIP	104
A.2.3. Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dan Rekomendasi Regulasi	116
B. Terwujudnya Arah Kebijakan PIP Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Secara Nasional	130
B.1. Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP	133

B.1.1. Pengkajian Materi Arah Kebijakan PIP	134
B.1.2. Pelaksanaan standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran bagi aparatur negara.....	
B.1.3. Pelaksanaan Standarisasi Materi, Bahan Ajar & Metode Pembelajaran Formal, Nonformal, & Informal PIP	140
B.2. Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi PIP	145
B.2.1. Pengendalian PIP.....	152
B.2.2. Evaluasi PIP	158
C. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	178
C.1. Terselenggaranya Diklat PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal	187
C.1.1. Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Diklat PIP	190
C.1.2. Penyusunan Standarisasi & Kurikulum Diklat PIP	193
C.1.3. Penyelenggaraan Diklat PIP	198
D. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Program PIP oleh Dewan Pengarah	202
E. Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola BPIP yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel	206
	209
Bab IV KINERJA ANGGARAN	223
Bab V EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN	
A. Nilai Kinerja Organisasi	228
B. Perbandingan Capaian Kinerja	231
C. Efisiensi Sumber Daya	233
D. Kendala/Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut	234
Bab VI PENUTUP	241
Lampiran-Lampiran	
I. Perjanjian Kinerja Kepala BPIP Tahun 2020	
II. Kandidat Indikator IAP	
III. Dokumentasi PIP Pada Media	
IV. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi	

DAFTAR ISTILAH

ADKASI	: Asosiasi DPRD kabupaten seluruh Indonesia
APIP	: Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BNPP	: Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BP7	: Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
BPIP	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
GBHIP	: Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
IAP	: Indeks Aktualisasi Pancasila
IPNU	: Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama
IPPNU	: Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendes	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenko Polhukam	: Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI
Kemenkop	: Kementerian Koperasi
Kemenpan RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
KPOTI	: Komunitas Permainan Olahraga Tradisional Indonesia
KUKM	: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
Lemhanas	: Lembaga Ketahanan Nasional
LTN	: Lembaga Ta'lim wan Nasyr
Mapel	: Mata Pelajaran

Medsos	: Media Sosial
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Orsospol	: Organisasi Sosial dan Politik
Paskbiraka	: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
PEMDA	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PIP	: Pembinaan Ideologi Pancasila
PKS	: Perjanjian Kerjasama
PMPRB	: Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPI	: Perhimpunan Pelajar Indonesia
PPKn	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PT	: Perseroan Terbatas
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPTC	: Rumah Perlindungan dan Trauma Center
RUU	: Rancangan Undang – Undang
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIGMA	: Simposium Nasional Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma
Si-PION	: Sistem Informasi Pengendalian Intern Online
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
TA	: Tahun Anggaran
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
ToT	: Training of Trainer
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR GAMBAR / TABEL

Gambar 1.	Struktur Organisasi BPIP – 3
Tabel 1.	Komposisi Sumber Daya Manusia BPIP – 3
Gambar 2.	Peta Potensi SDM BPIP – 8
Gambar 3.	Isu Statagis PIP – 9
Gambar 4.	Skema Laporan kinerja BPIP Tahun – 11
Gambar 5.	Ilustrasi penilaian kinerja - 18
Gambar 6.	Peta Strategis BPIP – 22
Tabel 2.	Capaian IKU Hubungan Antar Lembaga, Kerjasama, Sosialisasi, dan Jaringan, serta Pembudayaan – 25
Tabel 3.	Capaian IKU Penguatan Sinergi Antar Lembaga Yang Melaksanakan PIP – 35
Tabel 4.	Capaian IKU Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, Dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila – 60
Tabel 5.	Capaian IKU Penyelenggaraan pembudayaan ideologi Pancasila – 71
Tabel 6.	Capaian IKU Internalisasi Dan Institusionalisasi Pancasila Di Bidang Hukum, Advokasi, Apresiasi, dan Pengawasan Regulasi – 82
Tabel 7.	Indikator nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan – 86
Gambar 7.	Ilustrasi Aplikasi SI-LaRas - 89
Tabel 8.	Capaian IKU Analisis & Sinkronisasi Hukum Nasional terhadap Nilai-Nilai Pancasila – 90
Tabel 9.	Capaian IKU advokasi PIP – 104
Tabel 10.	Capaian IKU internalisasi dan institusionalisasi Pancasila, dan Rekomendasi Regulasi – 117
Tabel 11.	Capaian IKU perumusan arah kebijakan, pengkajian, & standardisasi materi PIP - 133
Tabel 12.	Capaian IKU pengkajian materi arah kebijakan PIP - 134
Tabel 13.	Capaian IKU standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran bagi aparatur negara - 140
Tabel 14.	Capaian IKU standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran formal, nonformal, & informal PIP - 145
Tabel 15.	Capaian IKU Pengendalian Dan Evaluasi PIP – 152
Tabel 16.	Capaian IKU Pengendalian PIP – 158
Tabel 17.	Capaian IKU Evaluasi PIP – 178
Gambar 8.	Sistematika Kerangka Penyusunan IAP – 188
Tabel 18.	Capaian IKU Pendidikan dan Pelatihan PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal & Informal – 191
Tabel 19.	Capaian IKU Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Diklat PIP – 193
Tabel 20.	Capaian IKU Standardisasi dan Kurikulum Diklat PIP – 199
Tabel 21.	Capaian IKU penyelenggaraan Diklat PIP - 202
Tabel 22.	Capaian IKU penyelenggaraan tata kelola BPIP - 209
Gambar 8.	Profil Website dan Media Sosial BPIP - 218
Gambar 9.	Dashboard Aplikasi BPIP berbasis Web/Jaringan (Online) - 210
Gambar 10.	Grafik Penyerapan dan Sisa Pagu Anggaran BPIP TA 2020 - 223
Gambar 11.	Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Perspektif Stakeholder - 224
Tabel 23.	Perbandingan Pagu Anggaran & Realisasi Tahun 2020 dan 2019 - 225
Gambar 12.	Grafik Alokasi dan Penyerapan Anggaran Per Sasaran Program - 225
Gambar 13.	Grafik Perkembangan Penyerapan Anggaran per Triwulan Tahun 2020 - 225
Gambar 14.	Dashboard Jumlah Indikator dan Status Capaian Indikator – 228
Gambar 15.	Grafik Nilai Kinerja Instansi/NKI - 229
Gambar 16.	Grafik Nilai Kinerja Organisasi/NKO - 229
Gambar 17.	Grafik Nilai Kinerja Unit Kerja/NKUK - 230
Gambar 18.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahunan dan Target Renstra – 232
Gambar 19.	Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) - 232
Gambar 20.	Grafik Efisiensi Anggaran untuk Penanggulangan Covid-19 dan PEN - 233
Gambar 21.	Grafik Penghematan Anggaran TA 2020 - 233



BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KINERJA

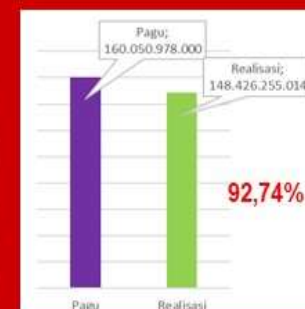
RANGKUMAN KINERJA

Terdapat **17 indikator sasaran program** **Pembinaan Ideologi Pancasila** dengan **9 indikator berkinerja 100%**, **1 indikator berkinerja 80% ≤ n < 100%**, dan **7 indikator berkinerja < 80%**.

Indikator kinerja kegiatan **Pembinaan Ideologi Pancasila** berjumlah **37** dengan capaian: **28 indikator berkinerja 100%**, **9 indikator berkinerja < 80%**

● = kinerja ≥ 100% ● = 80% ≤ kinerja < 100% ● = kinerja < 80%

KINERJA ANGGARAN



CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

SS.2

Terwujudnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai koordinator dalam pelebagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah

"Persentase Kementerian/Lembaga/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi pembinaan Ideologi Pancasila" (100%)

Koordinasi PIP (target)	Tindakanjua t (realisasi)	Keterangan
100%	100%	- Akselerasi PKS= 12
(61 K/LD)	(61 K/LD)	- MoU = 45
		- Pancamandala = 4 (Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung)

SS.3

Terwujudnya Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Secara Nasional

"Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden" (5 Rekomendasi)

Substansi Rekomendasi	Tindakanjua t	Keterangan
Riset dan Inovasi Nasional yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila	Penyampaian Usulan Penyempurnaan RPerPres tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Telah diusulkan disampaikan ke Presiden melalui Dewan Pengarah BPIP. (nilai : 75)
Penguatan nilai Pancasila pada generasi Muda (melalui Program Paskibraka)	Mendorong Usulan RPerPres PIP kepada Generasi Muda melalui Program Paskibraka	RPerPres telah disampaikan kepada Presiden RI. (nilai: 100)
Garis-garis besar haluan ideologi Pancasila	Usulan konsep GBHIP	dalam pertimbangan Dewan Pengarah. (nilai: 75)
Ekonomi berazas nilai-nilai Pancasila	Pembahasan dan penyusunan Naskah Kebijakan Ekonomi Pancasila	Penyusunan policy paper. (nilai: 25)
Aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui permainan tradisional	Launching Pancamain dengan keterlibatan Presiden RI	Presiden RI sebagai Keynote Speaker (nilai: 100)
Nilai Kinerja : (75+100+75+25+100) : 5 X100% = 75%		

Ket nilai : Penyusunan (25), Draft final (50), disampaikan ke DP (75), disampaikan ke Presiden (100).

SS.1

Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

"Indeks Aktualisasi Pancasila (Kerangka Pikir dan Dimensi Indikator Aktualisasi nilai-nilai Pancasila)"

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kerangka konsep IAP akan secara operasional didefinisikan sebagai Ideologi yang nilai-nilai-nya aktual pada 3 lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: (1) rumah-tangga/komunitas/ hubungan antar warga, (2) kelembagaan negara (hubungan antar kelembagaan negara), dan (3) Regulasi/Kebijakan.

SS.4

Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola BPIP yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel

- Nilai Reformasi Birokrasi ("44,14"-PMPRB)
- Indeks Sistem Merit (blm di evaluasi KASN)
- Opini Laporan Keuangan ("WTP")
- Nilai SAKIP ("B"-LHE RoWASNAL)
- Indeks Profesionalisme ASN ("30")
- Indeks Kepuasan Masyarakat (blm disurvei)

SASARAN PROGRAM 1: HAL, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN, SERTA PEMBUDAYAAN



BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

SASARAN dan INDIKATOR [Sasaran dan Indikator Program]-[Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan]	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			Ket	Penanggungjawab
	Target	Realisasi	Rincian Keluaran		
Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan pembinaan Ideologi Pancasila					
- Persentase penilaian atas efektivitas hubungan antar lembaga dan kerjasama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	50%	Tindaklanjuti MoU/PKS (12 K/L dan Orsospol)	Renstra BPIP	FX. Adji Samekto Pjt. Deputi I
- Efektivitas metode/media sosialisasi, komunikasi dan jaringan Media TV Media Cetak Media Online	Rating Program/Viewer/ Pembaca Subscriber/Like	Viewer > 1jt	Penyebarluasan nilai-nilai Pancasila secara elektronik/online		
- Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila (efektivitas = jumlah komunitas yang melakukan aktivitas aktualisasi Pancasila setelah kegiatan pembudayaan)	20%	20%	100%=100 komunitas, tercapai 20 komunitas di 9 kota		
Penguatan Sinergi Antar Lembaga Yang Melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila					
Terlaksananya hubungan antar Lembaga dan Kerjasama di Bidang PIP yang efektif					
- Jumlah dokumen kerjasama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya yg diselesaikan	41 Dokumen	45 Dokumen	45 MoU	Prioritas RPJMN (1 Paket Dokumen)	Elfrida Herawati. S Direktur I
- Jumlah kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga yang menerima bantuan	17 Komunitas	46 Komunitas	Bantuan berupa pendampingan membuat AD/ART, Proposal, PIP	Renstra BPIP	
Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila					
Terselenggaranya Sosialisasi, Komunikasi, & Jaringan PIP yang efektif hingga ke daerah & desa					
- Jumlah dokumen pelaksanaan sosialisasi yang diselesaikan	4 Dokumen	4 Dokumen	Online, Offline, Video, Infografis	Prioritas RPJMN (1 Paket Dokumen)	M. Akbar. H Direktur II
- Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan komunikasi yang diselesaikan	4 Dokumen	4 Dokumen	TV, Radio, Media Online, Media Offline		
- Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan Jaringan yang diselesaikan	2 Dokumen	2 Dokumen	Jaringan PT dan pesantran, Jaringan K/L		
Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila					
Terselenggaranya Pembudayaan Ideologi Pancasila					
- Jumlah Dokumen kebijakan strategis dan program teknis pemantapan pranata	1 Dokumen	1 Dokumen	Pemantapan pranata	Renstra BPIP	Irene Camelyn. S Direktur III
- Jumlah Dokumen kebijakan strategis dan program teknis inovasi pembudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Inovasi pembudayaan	Renstra BPIP	
Terselenggaranya penanaman nilai-nilai Pancasila pada Pranata					
- Jumlah dokumen penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila	Kerangka Pikir, Dimensi, Alternatif Indikator IAP	Kerangka Pikir, Dimensi, Alternatif Indikator IAP	Dokumen Kerangka pikir IAP	Renstra BPIP	
- Jumlah kelompok target yang melaksanakan aktualisasi Pancasila setelah pembudayaan	100 Kelompok	100 Kelompok	Dok laporan kegiatan pembudayaan	Renstra BPIP	


 BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA
 REPUBLIK INDONESIA

SASARAN PROGRAM 2: HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI

SASARAN dan INDIKATOR [Sasaran dan Indikator Program]-[Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan]	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			Ket	Penanggungjawab
	Target	Realisasi	Rincian Keluaran		
Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi					
- Jumlah dokumen internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, serta pengawasan regulasi yang dimanfaatkan	9 Dokumen	9 Dokumen	Dimanfaatkan K/L, peserta, internal BPIP	● Renstra BPIP	Ani Purwanti Plt. Deputy II
- Jumlah rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	20 Rekomendasi	25 Rekomendasi	ditindaklanjuti ke Kepala/Dewan Pengarah	● Prioritas RPJMN (100%)	
Pelaksanaan analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila					
Terlaksananya analisis dan sinkronisasi nilai-nilai Pancasila terhadap hukum nasional					
- Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila yang diselesaikan	3 Dokumen	3 Dokumen	Ansink PerUUan: Wil.I, Wil.II, dan Wil.III	● Prioritas RPJMN (1 Paket Dokumen)	Ani Purwanti Direktur I
Pelaksanaan Advokasi pembinaan ideologi Pancasila					
Terlaksananya Penyusunan dan pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila					
- Jumlah dokumen advokasi preventif pembinaan ideologi Pancasila yang diselesaikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Dok Lap. Keg. Advokasi	● Renstra BPIP	Ani Purwanti Plt. Deputy II
- Jumlah dokumen Pendampingan yang diselesaikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Dok Lap. Keg. Advokasi	● Renstra BPIP	
- Jumlah dokumen Apresiasi yang diselesaikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Dok Lap. Keg. Advokasi	● Renstra BPIP	
Pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan rekomendasi regulasi					
Terlaksananya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional					
- Jumlah dokumen hasil internalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan Perda yang diselesaikan	3 Dokumen	3 Dokumen	Dok Keg. Pelembagaan di Wil I, Wil II, Wil III	● Renstra BPIP	Ani Purwanti Plt. Deputy II
- Jumlah dokumen rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan	3 Dokumen	3 Dokumen	Pengawasan Per-UU-an: Wil I (9), Wil II (10), Wil III (6)	● Prioritas RPJMN (3 Dokumen)	



SASARAN PROGRAM 3: PENGKAJIAN DAN MATERI

SASARAN dan INDIKATOR [Sasaran dan Indikator Program]-[Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan]	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			Ket	Penanggungjawab		
	Target	Realisasi	Rincian Keluaran				
Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standarisasi materi PIP							
- Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan	84% (11 kajian)	46% (6 kajian)	Kinerja 55% (46/84) ● Dimanfaatkan Unsur Pimpinan dalam mempertimbangkan arah kebijakan PIP (100%=13 Kajian)	Renstra BPIP	FX. Adji Samekto Deputi III		
- Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	3 dokumen	1 dokumen	● GBHIP	Prioritas RPJMN			
- Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	100%	-	● Blm dilaksanakan				
- Persentase penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat yang diselesaikan	100%	-	● Blm dilaksanakan				
Pengkajian Materi Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila							
Terlaksananya kajian filosofis dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila							
- Jumlah dokumen hasil kajian filosofis dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila	7 Dokumen	2 Dokumen	● Data Fil dan His di Ende, NTT Ensiklopedia Pancasila	Renstra BPIP	Muhammad Sabri Direktur I		
Terlaksananya kajian kebijakan dan yuridis Pembinaan Ideologi Pancasila							
- Jumlah dokumen hasil kajian kebijakan dan yuridis Pembinaan Ideologi Pancasila	2 Dokumen	3 Dokumen	● Sigma Pancasila ● Arah Kebijakan PIP ● Naskah Kebijakan Ekonomi Pancasila	Renstra BPIP			
Terlaksananya kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila							
- Jumlah dokumen hasil kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila	4 Dokumen	1 Dokumen	● Ketuhanan Yang Maha Esa (Perspektif Lintas Iman)	Renstra BPIP			
Pelaksanaan standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran bagi aparatur negara							
Terlaksananya standarisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara							
- Jumlah dokumen standarisasi materi, bahan ajar dan metode Pejabat Negara	8 Dokumen	5 Dokumen	● Legislatif, Pemda, Pj. Negara, aparaturnegara, TNI, Polri, ASN	Renstra BPIP	Aris Heru Utomo Direktur II		
Terlaksananya standarisasi materi, bahan ajar dan metode TNI dan POLRI							
- Jumlah dokumen standarisasi materi, bahan ajar dan metode TNI dan POLRI	5 Dokumen	5 Dokumen		Renstra BPIP			
Terlaksananya standarisasi materi, bahan ajar dan metode Aparatur Sipil Negara							
- Jumlah dokumen standarisasi materi, bahan ajar dan metode Aparatur Sipil Negara	5 Dokumen	5 Dokumen	●	Renstra BPIP			
Pelaksanaan Standarisasi Materi, Bahan Ajar & Metode Pembelajaran Formal, Nonformal, & Informal PIP							
Terlaksananya SM, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Formal, Nonformal, dan Informal PIP							
- Jumlah dokumen Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Formal PIP yang terstandar	13 Dokumen	8 Dokumen	● TK/PAUD, SD, SMP, SMA, PT	Renstra BPIP	Toto Purbiyanto Direktur III		
- Jumlah dokumen Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Nonformal PIP yang terstandar	3 Dokumen	1 Dokumen	● 1 video ormas	Renstra BPIP			
- Jumlah dokumen Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Informal PIP yang terstandar	3 Dokumen	12 Dokumen	● 1 video, 11 komik pancasila	Renstra BPIP			

SASARAN PROGRAM 4: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

SASARAN dan INDIKATOR [Sasaran dan Indikator Program]-[Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan]		CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			Ket	Penanggungjawab	
Target	Realisasi	Rincian Keluaran					
Terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal							
- Persentase hasil perencanaan dan kerja sama Diklat PIP yang ditindaklanjuti (dokumen perencanaan kebijakan strategis & program teknis)	100%	100%	(i) koordinasi Renkerma diklat PIP (ii) kebijakan strategis dan program teknis Renkerma diklat PIP (iii) dokumen cetak biru sistem nasional diklat PIP bagi orsospol dan komponen masyarakat lainnya	Prioritas RPJMN	Baby Siti Salamah Deputi IV		
	3 Dokumen	3 Dokumen	 PIP berbasis standar dan kurikulum				
- Persentase pemanfaatan standarisasi dan kurikulum Diklat PIP	100%	97%	PIP berbasis standar dan kurikulum	Prioritas RPJMN			
- Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	40%	96%	 feedback peserta diklat setelah selesai diklat	Renstra BPIP			
	(100%=217 peserta)	(207 peserta)					
- Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi (ToT)	75%	-	 belum melakukan sertifikasi	Renstra BPIP			
	350 Peserta Per Thn	-					
- Sarana Diklat PIP yang dimanfaatkan	1 Paket	-	 belum mempunyai sarana atau bekerjasama dengan balai diklat lain	Renstra BPIP			
Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Diklat PIP							
Terlaksananya penyusunan Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP							
- Jumlah dokumen perencanaan dan kerjasama Diklat PIP	3 Dokumen	3 Dokumen	 Dok Koordinasi, Dok Kegiatan Renkerma, dok cetak biru Sisnas Diklat PIP	Prioritas RPJMN	Sadono S – Dir I		
Penyusunan Standardisasi dan kurikulum Diklat PIP							
Terlaksananya standarisasi dan kurikulum Diklat PIP untuk Lokus I, Lokus II, dan Lokus III							
- Jumlah dokumen standarisasi & kurikulum Diklat PIP (Kurikulum dan Metode)	10 Dokumen	10 Dokumen	 S dan K dlm Pedoman Diklat bagi: 1) Aparatur Sipil Negara, (2) TNI, (3) Polri, (4) Organisasi Kemasyarakatan, (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, (6) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, (7) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi, (8) Pendidik dan Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (9) Generasi Milenial, dan (10) Komponen Masyarakat Lainnya	Prioritas RPJMN (3 Paket Dokumen)	Baby Siti Salamah Deputi IV		
Penyelenggaraan Diklat PIP							
Terlaksananya layanan penyelenggaraan Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal							
- Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1 Layanan 6 Diklat	1 Layanan 2 Diklat	 Diklat bagi Guru SMU/SMK pelajaran PPKn, Diklat bagi anggota ormas provinsi DIY	Prioritas RPJMN (1 paket dok, 100%)	Marsudi Sarwono Plt. Dir III		
Tersedianya tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan PIP							
- Jumlah tenaga pengajar yang mengikuti TOT	100 Peserta/Tahun	-	 belum dilakukan ToT	Prioritas RPJMN (100%)			
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan PIP							
- Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan PIP yang tersedia	1 Paket	-	 belum mempunyai sarana atau bekerjasama dengan balai diklat lain	Prioritas RPJMN (100%)			

SASARAN PROGRAM 5: PENGENDALIAN DAN EVALUASI


 BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA
 REPUBLIK INDONESIA

SASARAN dan INDIKATOR [Sasaran dan Indikator Program]-[Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan]	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			Ket	Penanggungjawab	
	Target	Realisasi	Rincian Keluaran			
Terlaksananya pengendalian dan evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila						
- Persentase dokumen Pengendalian Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang dimanfaatkan	40%	40%	● Dimanfaatkan K/L, BPIP, Pemda, Komunitas (4 substansi pengendalian), [100%=10 dok termanaafkan]	Renstra BPIP	Rima Agristina Deputi V	
- Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang ditindaklanjuti	40%	40%	● Ditindaklanjuti Unit Teknis BPIP [100%=10 dok ditindaklanjuti] (4 substansi pengendalian di tindaklanjuti intern, 2 blm)	Renstra BPIP		
- Persentase sistem pengendalian dan evaluasi terpusat berbasis elektronik yang termanfaatkan	100%	100%	● Telah dibangun: - 2 Aplikasi (Aplikasi Perisai dan SiPendekar) - 2 alur pikir dan kerangka logis (Serdadu dan simpul kendali), aplikasi dibuat oleh Pusdatin	Renstra BPIP		
Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila						
Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila						
- Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	3 Dokumen	3 Dokumen	● Dok. Hasil pengendalian PIP bidang: SKJ dan HAL, bidang Hukum, advokasi dan Pengawasan regulasi, bidang kajian materi dan Diklat	Renstra BPIP	Muhammad Fahrurrozi Direktur I	
- Jumlah pembangunan dan pengembangan system pengendalian terpadu berbasis elektronik	1 Paket	1 Paket	● Aplikasi: 'SiPendekar Pancasila'	Renstra BPIP		
Terlaksananya Pengendalian Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila						
- Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Strategis Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen	● Dokumen hasil pengendalian aktualisasi ekonomi Pancasila	Renstra BPIP		
Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila						
Terlaksananya evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila						
- Jumlah Dokumen evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	3 Dokumen	3 Dokumen	● Dokumen hasil evaluasi PIP bidang: SKJ dan HAL, Hukum, advokasi dan Pengawasan regulasi, kajian materi dan diklat	Renstra BPIP	Edi Subowo Direktur II	
- Jumlah pembangunan dan pengembangan sistem evaluasi terpadu berbasis elektronik	1 Paket	1 Paket	● Aplikasi: 'Perisai Pancasila'	Renstra BPIP		
Terlaksananya Evaluasi Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila						
- Jumlah Dokumen evaluasi dan penanganan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menentang Ideologi Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	● Dokumen hasil evaluasi penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara	Prioritas RPJMN		
- Jumlah Dokumen evaluasi dan penanganan Penyelenggara Negara dan ASN yang menentang Ideologi Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	● Dokumen hasil evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara	Prioritas RPJMN		
- Jumlah Dokumen evaluasi dan penanganan Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang tidak bertentangan dengan Ideologi Negara/Pancasila	1 Dokumen	-	(perlu menyamakan persepsi dengan Bappenas terhadap indikator tersebut di Renstra BPIP)	Prioritas RPJMN		
- Jumlah Dokumen evaluasi dan penanganan Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang bertentangan dengan Ideologi Negara/Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen	● Dokumen hasil evaluasi dan penanganan organisasi masyarakat, organisasi dan perusahaan asing serta media yang bertentangan dengan ideologi negara/Pancasila	Renstra BPIP		

SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN : KAPASITAS ORGANISASI (1)


 BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA
 REPUBLIK INDONESIA

SASARAN dan INDIKATOR [Sasaran dan Indikator Program]-[Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan]	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			Ket	Penanggungjawab
	Target	Realisasi	Rincian Keluaran		
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik					
- Nilai Reformasi Birokrasi	81	44,14 (penilaian mandiri)	🔴 Peningkatan Tata Kelola BPIP	Renstra BPIP	Karjono Sekretaris Utama
- Indeks Sistem Merit	0,61	316.5 (penilaian mandiri)	🟢 Penataan manajemen SDM BPIP (250-324) – Indeks (0,61-0,8)=BAIK	Renstra BPIP	
- Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WTP	🟢 Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Per-UU-an	Renstra BPIP	
- Nilai SAKIP	BB	B (penilaian mandiri)	🟡 Implementasi akuntabilitas kinerja organisasi	Renstra BPIP	
- Indeks Profesionalisme ASN	81	30	🔴 Mengukur kualifikasi, kompetensi, kinerja, disiplin ASN BPIP https://ip-jasn.bkn.go.id/diolah	Renstra BPIP	
- Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	Tahap penyusunan peraturan juknis	Belum dilakukan Survey terhadap stakeholder yang mendapatkan manfaat dari BPIP	Renstra BPIP	
Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja					
Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan Akuntabilitas					
- Layanan Perencanaan	1 layanan	1 layanan	🟢 Renstra, Renja, RKAKL, DIPA, POK, Dok, Revisi Anggaran	Renstra BPIP	Tonny Agung Arifianto Karo Perencanaan dan Keuangan
- Opini Laporan Keuangan oleh BPK/ Layanan Manajemen Keuangan	WTP	WTP	🟢 Laporan Keuangan, SPM, Edaran/Juknis Pengelolaan Keuangan	Renstra BPIP	
- Nilai SAKIP/ Layanan Pemantauan dan Evaluasi	BB	B	🟡 PK, Renaksi PK, Pohon Kinerja, Lakip, Monev Bapp dan Keu	Renstra BPIP	
Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi					
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi					
- Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan produk hukum, organisasi dan tata laksana, dan RB	100%	Belum dilakukan survei	100% terpenuhinya permintaan layanan Hukum dan Organisasi (Pemenuhan Dokumen)	Renstra BPIP	Surahno Karo Hukum dan Organisasi
- Nilai Reformasi Birokrasi	81	44,14	🔴 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Renstra BPIP	
- Layanan Hukum	1 Layanan	1 Layanan	🟢 Dokumen Produk Peraturan Perundang-undangan BPIP dan Dokumentasi/informasi Hukum	Renstra BPIP	
- Layanan Manajemen Organisasi	1 Layanan	1 Layanan	🟢 Revisi OTK, SOP, Peta Proses Bisnis, Tata Naskah Dinas	Renstra BPIP	
- Layanan Reformasi Birokrasi	1 Layanan	1 Layanan	🟢 Dokumen 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Renstra BPIP	

SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN : KAPASITAS ORGANISASI (2)



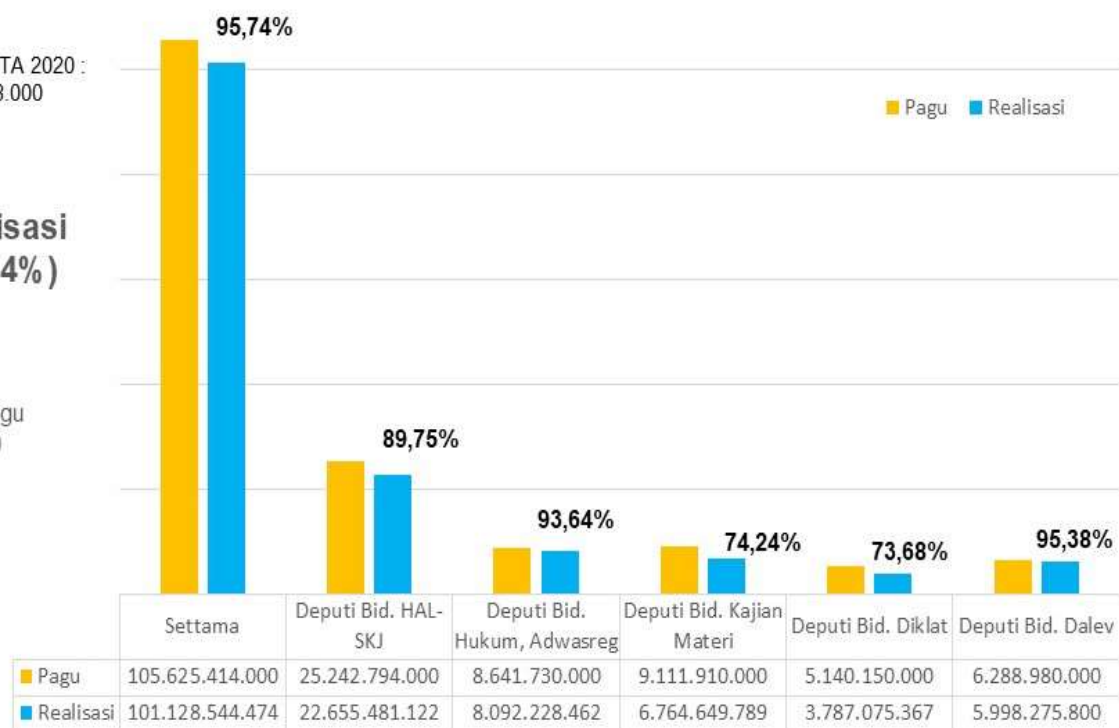
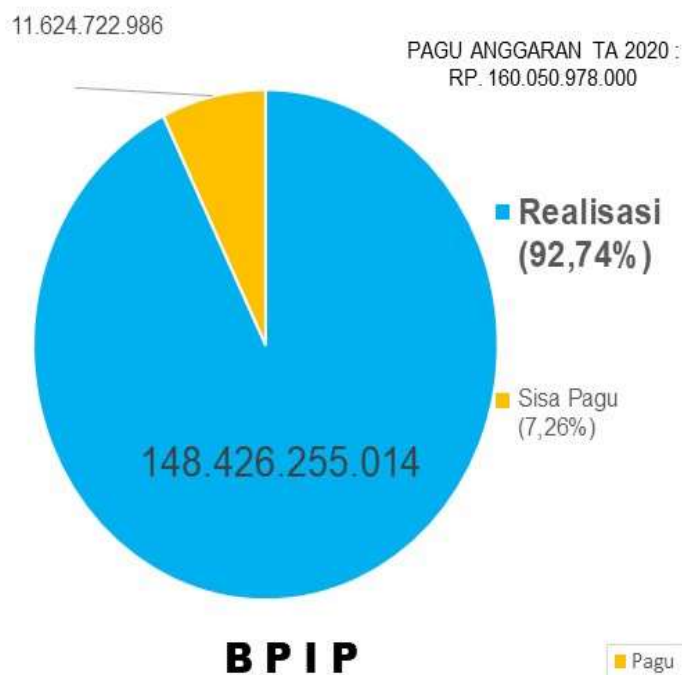
BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

SASARAN dan INDIKATOR [Sasaran dan Indikator Program]-[Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan]		CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			Ket	Penanggungjawab
Target	Realisasi	Rincian Keluaran				
Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, BMN, dan Ketatausahaan						
Terlaksananya koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan						
- Persentase kepuasan unit kerja terhadap pengelolaan Barang Milik Negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, perencanaan dan pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan, dan keprotokahn umum, pengamanan, dan kearsipan yang berkualitas	100%	Belum dilakukan survei	100% terpenuhinya permintaan layanan Umum dan SDM (Pemenuhan Dokumen)	Renstra BPIP	Tri Purno Utomo Karo Umum dan SDM	
- Indeks Merit	0,61	316.5 (penilaian mandiri)	Penataan manajemen SDM BPIP (250-324) – Indeks (0,61-0,8)=BAIK	Renstra BPIP		
- Indeks Profesionalisme ASN	81	30	Pemutahiran https://ip-jasn.bkn.go.id	Renstra BPIP		
- Layanan manajemen Sumber Daya Manusia	1 Layanan	1 Layanan	Kenaikan pangkat, KGB, Adm Kepegawaian, Gaji dan Tukin, hak keuangan	Renstra BPIP		
- Layanan manajemen Barang Milik Negara	1 Layanan	1 Layanan	Daftar inventaris barang, pemenuhan sarana prasarana	Renstra BPIP		
- Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	pemenuhan kerumahtanggan dan administrasi persuratan	Renstra BPIP		
- Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	pemenuhan kebutuhan perkantoran	Renstra BPIP		
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	pemenuhan belanja modal penunjang tusi	Renstra BPIP		
Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian						
Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli						
- Persentase tingkat kepuasan terhadap dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli yang diberikan	100%	Belum dilakukan survei	100% terpenuhinya dukungan/fasilitas 106 kegiatan Dewan Pengarah, Kepala, Waka, dan Staf khusus Dewan Pengarah	Renstra BPIP	Sunoto Setyo Karo Fas. DP dan TA	
Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal						
Terlaksananya pengawasan intern di lingkungan BPIP						
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	87,50%	14 temuan terdiri dari 24 rekomendasi. 21 selesai	Renstra BPIP	Abbas Karo Wasnal	
- Nilai Tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	2	2,75	Penilaian Mandiri (BPKP belum mengeluarkan hasil evaluasi)	Renstra BPIP		
Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi						
Terlaksananya pengelolaan data dan informasi dan pengembangan Sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila						
- tingkat Maturitas SPBE/Layanan data dan informasi	4	Belum dilakukan penilaian	Pembangunan infrastruktur SPBE	Renstra BPIP	Yakop - Kapusdatin	

KINERJA KEUANGANTA 2020



BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



BAB I | Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia yang multikultur membutuhkan konsepsi atau cita yang mampu merangkul keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai cita menjadi landasan statis, sekaligus sebagai *leitstar* atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar, falsafah, atau pandangan hidup (*weltanschauung*) negara Indonesia, Pancasila digali oleh para pendiri bangsa dan diwariskan kepada untuk menjadi penunjuk sekaligus pengarah. Namun sayangnya, kondisi sekarang ini, cita ideal tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini akibat deraan globalisasi, meningkatnya eksklusivisme, kesenjangan ekonomi, dan ancaman segregasi sosial. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan upaya melakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita hukum. Oleh karenanya, Pancasila harus menjadi “titik temu” yang mempersatukan keragaman bangsa, menjadi “titik pijak” yang mendasari ideologi dan norma negara, serta menjadi “titik tuju” yang memberi orientasi kenegaraan dan kebangsaan.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut BPIP yang dibentuk Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, berperan mendukung terwujudnya arah kebijakan dan strategi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 pada isu strategis melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, kedudukan, tugas, fungsi, dan pemangku kepentingan BPIP adalah sebagai berikut :

I. Kedudukan

BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia

II. Tugas

merumuskan arah kebijakan PIP, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi Diklat, menyelenggarakan Diklat, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

III. Fungsi

1. perumusan arah kebijakan PIP;
2. penyusunan peta jalan PIP;
3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program PIP;
4. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan PIP;
5. pengaturan PIP;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP;
7. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan PIP;
8. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
9. advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
10. penyusunan standardisasi Diklat Pancasila serta menyelenggarakan Diklat; dan
11. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

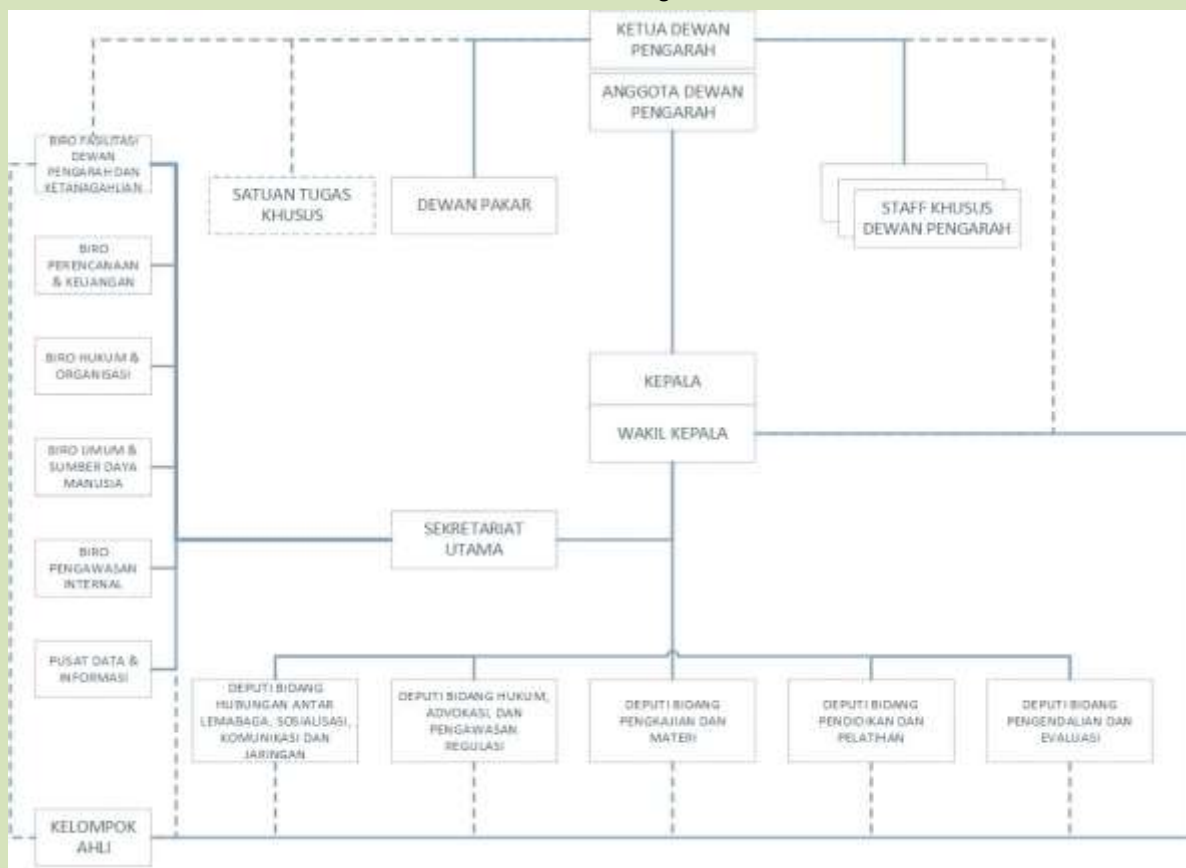
IV. Pemangku Kepentingan :

- a) lembaga tinggi negara;
- b) kementerian/Lembaga;
- c) pemerintahan daerah;
- d) organisasi sosial politik; dan
- e) komponen masyarakat lainnya.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan BPIP nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi BPIP



Sebaran sumber daya manusia pada unit organisasi di lingkungan BPIP adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia BPIP

No	Unit Kerja	JUMLAH									TOTAL
		Kepala Waka	JPT Madya	JPT Pratama	Staf Khusus	Adminis- trator	Penga- was	Pelaksana (PNS2018)	Pelaksana (CPNS20)	PTT	
1	Kepala dan Wakil Kepala	2									2
2	Staf Khusus				3						3
3	Sekretariat Utama		1	6		14	31	28	20	79	179
4	Deputi I		-	3		7	-	7	8	7	32
5	Deputi II		-	1		9	-	9	12	2	33
6	Deputi III		1	3		2	-	9	8	2	25
7	Deputi IV		1	2		8	-	9	6	3	29
8	Deputi V		1	2		6	-	6	6	3	24
	JUMLAH	2	4	17	3	46	31	68	60	96	327

Dewan Pengarah BPIP:



Dr.(H.C.) Hj. Megawati
Soekarnoputri
(Ketua)



Jenderal TNI (Purn.)
Try Sutrisno
(Wakil Ketua)



Mayjen.TNI (Purn.)
Wisnu Bawa Tenaya
(Sekretaris)



Prof. Dr. H. Ahmad
Syafii Maarif
(Anggota)



Prof. Dr. KH. Said
Aqil Siroj, M.A.
(Anggota)



Sudhamek Agoeng
Waspodo Soenjoto
(Anggota)



Pdt. Dr. Andreas
Anangguru Yewangoe
(Anggota)



Rikard Bagun
(Anggota)

Kepala dan Wakil Kepala BPIP:



Prof. K.H. Drs. Yudian
Wahyudi, M.A. Ph.D (Kepala)



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.
(Wakil Kepala)

Unit Eselon I:

Sekretariat Utama

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.



Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum (Sestama)

Fungsi Sekretariat Utama adalah:

- 1) koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;
- 2) koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPIP;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- 7) pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan



Mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila.

Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum (Plt.Deputi I)

Fungsi Kedeputian I adalah :

- 1) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja PIP dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- 2) pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
- 3) pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
- 4) pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- 5) pengembangan komunikasi dengan media massa;
- 6) peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;

- 7) pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

Mempunyai tugas melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.



Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum (Plt. Deputi II)

Fungsi Kedeputian II adalah:

- 1) perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
- 2) penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara;
- 3) pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
- 4) pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- 5) penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Pekajian dan Materi

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP.



Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum (Deputi III)

Fungsi Kedeputian III adalah:

- 1) perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- 2) penyusunan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- 3) pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- 4) perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila;
- 5) pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- 6) koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;

- 7) penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PIP.



Dr. Baby Siti Salamah, S.Psi., M.Psi. Psikolog (Deputi IV)

Fungsi Kedeputian IV adalah:

- 1) penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- 2) penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- 3) penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- 4) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi



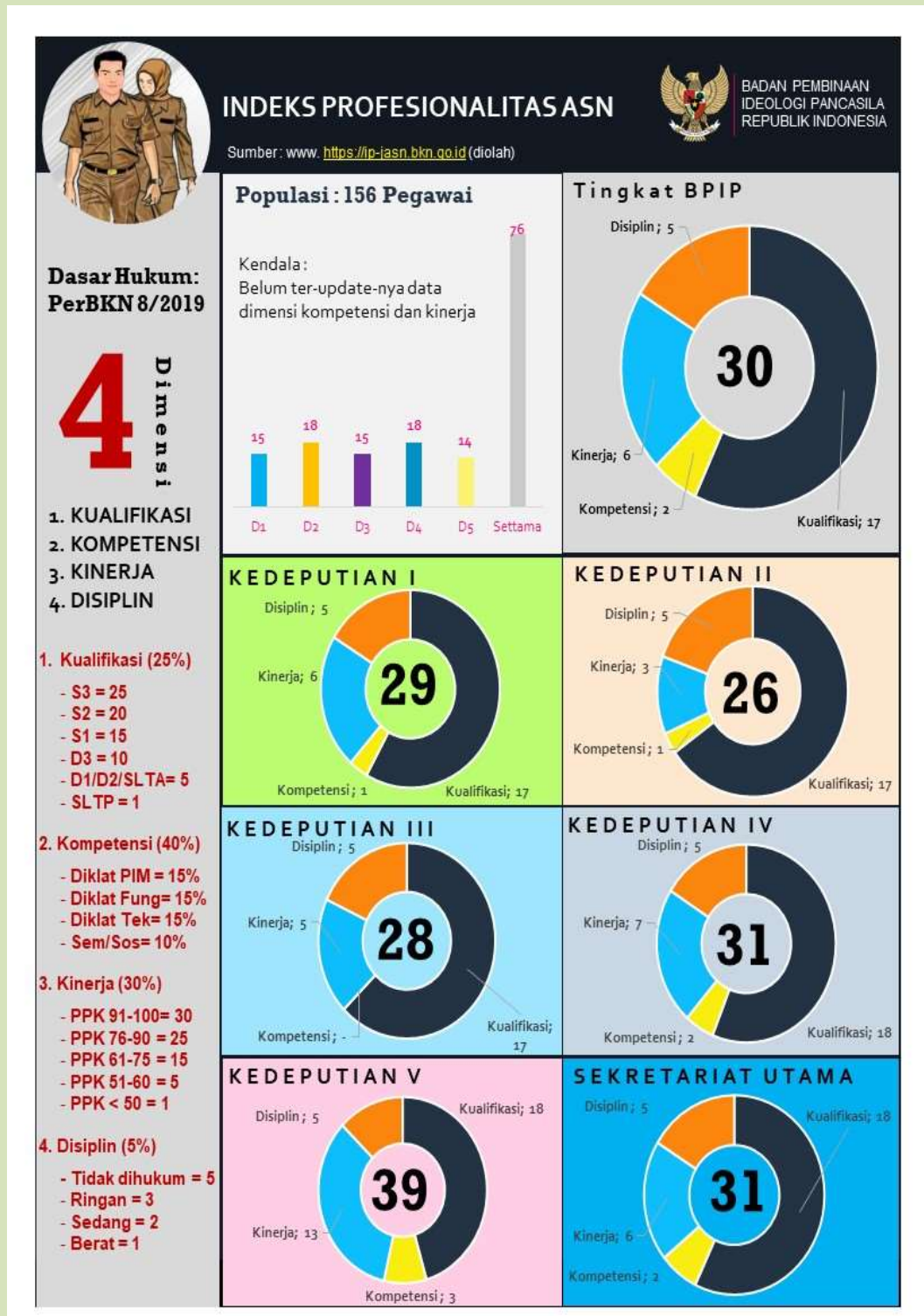
Mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan PIP.

Dr. Rima Agristina, S.H, S.E, M.M (Deputi V)

Fungsi Kedeputian V adalah:

- 1) pengendalian pelaksanaan PIP;
- 2) pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan PIP;
- 3) pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
- 4) pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Kapasitas SDM BPIP tercermin dari indeks profesionalitas yang dimonitor oleh Badan Kepegawaian Negara. Hingga November 2020, tingkat profesionalitas SDM BPIP adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Peta Potensi SDM BPIP

D. Aspek Strategis

Arah kebijakan dan strategi PIP dalam RPJMN 2020-2024 masuk dalam Program Prioritas Revolusi Mental dan PIP untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter dengan Kegiatan Prioritas berupa PIP, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Cakupan kebijakan dan strategi BPIP, yaitu:

- (a) PIP, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara;
- (b) peningkatan peran dan fungsi BPIP sebagai perumus kebijakan umum PIP;
- (c) harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan
- (d) membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara.

E. Isu Strategis



Gambar 3. Isu Strategis PIP

Aktualisasi nilai-nilai pancasila menjadi koreksi terhadap konsepsi pembangunan yang terlalu menekankan pembangunan infrastruktur

ekonomi dan politik dengan mengabaikan perhatian pada pembangunan ideologi. Dari serangkaian gatra ketahanan nasional, yakni: ideologi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, maka gatra yang paling rawan adalah gatra ideologi. Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menyebabkan munculnya permasalahan ketahanan ideologi, yaitu :

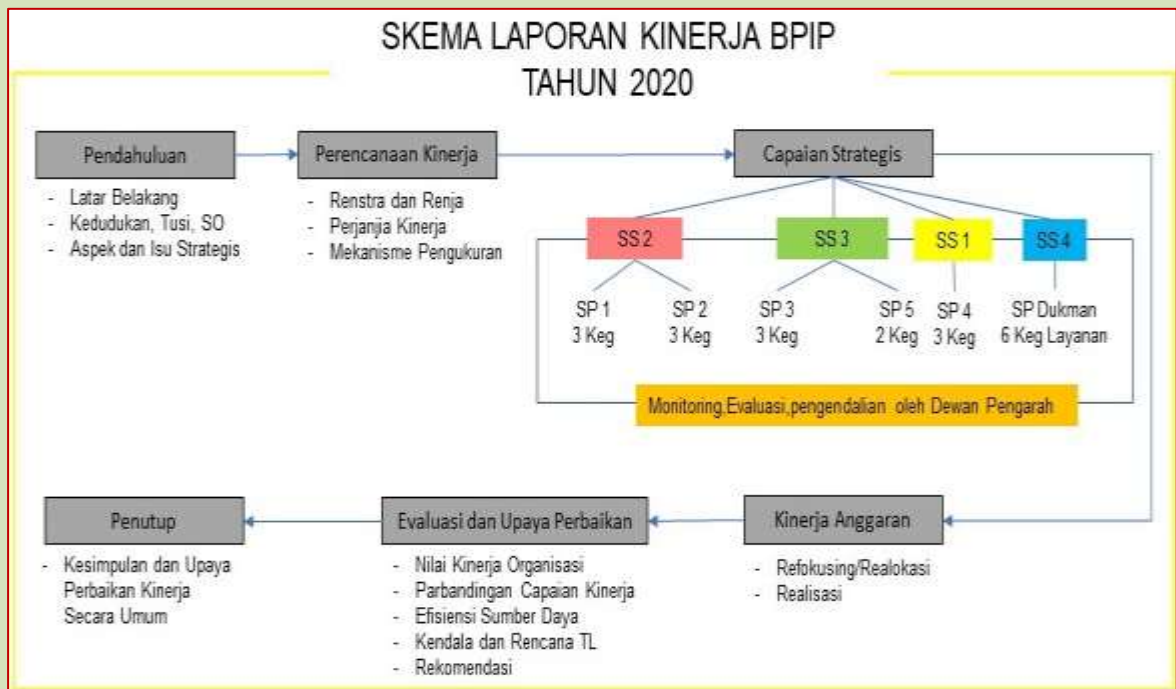
1. Kurangnya pemahaman Pancasila;
2. Terjadinya eksklusivisme sosial;
3. Masih tingginya kesenjangan sosial;
4. Belum terlembaganya Pancasila; dan
5. Belum diurusutamakannya keteladanan Pancasila,

Tugas BPIP memang tidak mudah di tengah skeptisisme masyarakat. Namun, kita tidak bisa memandang usaha pemantapan ideologi Pancasila sebagai sesuatu yang dengan sendirinya tercapai tanpa usaha-usaha secara sengaja. Kehadiran BPIP merupakan jawaban atas aspirasi banyak pihak mengenai pentingnya usaha PIP secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terstruktur.

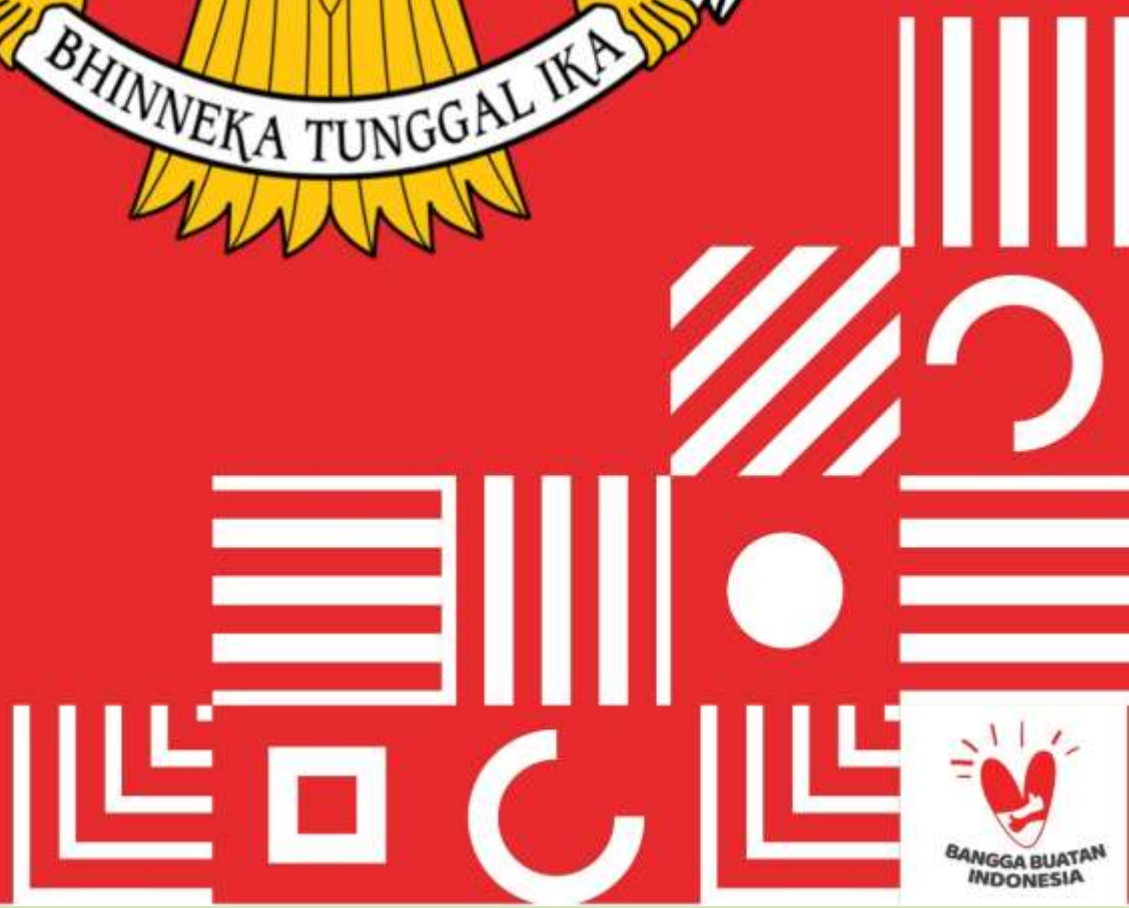
F. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja BPIP Tahun 2020 terdiri dari 6 (enam) bab. Bab I pendahuluan menjelaskan antara lain: latar belakang eksistensi Pancasila sebagai sebuah ideologi dan dasar berdirinya BPIP. Selanjutnya adalah kedudukan, tugas pokok, dan fungsi BPIP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Bab II adalah potret rencana kerja BPIP TA 2020. Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 menetapkan arah kebijakan, informasi kinerja sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan PIP yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja yang secara sistematis diukur dan dikelola. Bab III capaian strategis Tahun 2020 akan menjelaskan capaian-capaian BPIP selama Tahun 2020 . Capaian yang dijelaskan meliputi capaian sasaran dan indikator kinerja utama strategis, sasaran dan indikator kinerja utama program, dan sasaran dan indikator kinerja utama kegiatan. Skema penjelasan capaian strategis pada bab ini adalah setiap sasaran strategis didukung oleh sasaran program beserta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sasaran program tersebut. Bab IV kinerja anggaran menjelaskan perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi anggaran. Bab V evaluasi dan perbaikan menjelaskan nilai kinerja organisasi, perbandingan

capaian tahun sebelumnya, perbandingan dengan rencana lima tahunan dan sasaran nasional. Sebagai penutup laporan ada pada Bab VI yang menjelaskan kesimpulan dan upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Skema laporan kinerja adalah berikut ini.



Gambar 4. Skema Laporan kinerja BPIP Tahun 2020



BAB II | Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis BPIP disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk menghadapi persoalan kebangsaan yang cukup serius dengan melemahnya ideologi Pancasila. Semboyan *bhinneka tunggal ika* yang menjadi ruh bagi bangsa ini untuk tetap bersatu dalam perbedaan dan keragaman terganggu dengan menguatnya radikalisme, terorisme, dan ideologi transnasional lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menghadapi persoalan tersebut, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diperkuat, agar negara-bangsa Indonesia tetap berdiri dengan kokoh dan dapat mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk itu pembinaan dan aktualisasi Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan. BPIP bersama dengan kementerian/lembaga terkait menyusun arah kebijakan dan strategi PIP. Langkah maju ini perlu diikuti dengan pembinaan dan aktualisasi Pancasila bagi seluruh warga negara mulai dari lingkup keluarga dan masyarakat.

Rencana Strategis BPIP merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi BPIP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP yang kemudian disintesakan dengan hasil analisa situasi tentang kekuatan dan kelemahan internal berdasarkan hasil evaluasi yang akurat, serta hasil analisis peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan strategik eksternal. Rencana strategis BPIP 2018-2023 dituangkan dalam Peraturan BPIP nomor 1

Tahun 2020. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPIP adalah sebagai berikut :

VISI :

BPIP yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden di bidang PIP untuk mewujudkan visi dan misi Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

MISI :

BPIP mewujudkan misi Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi PIP sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan, sasaran, dan ukuran keberhasilan dalam menjalankan visi dan misi PIP adalah sebagaimana berikut ini.

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Mewujudkan arah kebijakan penguatan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional melalui undang-undang tentang Haluan PIP	Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional	Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden
Mewujudkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai koordinator dalam pelebagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah	Terwujudnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai koordinator dalam pelebagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat & Daerah	Persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi pembinaan Ideologi Pancasila
Menguatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: pembinaan Ideologi Pancasila; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)
Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi
		Indeks Sistem Merit
		Opini Laporan Keuangan BPK
		Nilai SAKIP
		Indeks Profesionalisme ASN
		Indeks Kepuasan Masyarakat

B. Rencana Kerja

Alokasi Anggaran BPIP Tahun 2020 pada awalnya adalah Rp216.998.054.000,-. Mendukung kebijakan pemerintah untuk optimalisasi dan *refocusing* anggaran guna pencegahan dan penanggulangan pandemic Covid-19, alokasi DIPA BPIP TA 2020 menjadi Rp160.050.978.000,-.

Alokasi DIPA TA 2020 diperuntukan mendukung pelaksanaan 2 program, yaitu :

- a. Program PIP, sebesar Rp54.425.564.000,-; dan
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya, sebesar Rp 105.625.414.000,-.

Rincian rencana kerja kedua program tersebut adalah :

No	Rencana Kerja	Anggaran (Rp)
Program PIP		54.425.564.000
1.	Dukungan Pelaksanaan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, Dan Jaringan PIP	23.136.623.000
2.	Dukungan Pelaksanaan Internalisasi Dan Institusional Pancasila Di Bidang Hukum, Advokasi, Dan Pengawasan Regulasi	9.335.451.000
3.	Dukungan Penyelenggaraan Perumusan Dan Penguatan Arah Kebijakan, Pengkajian, Dan Perumusan Standarisasi Materi PIP	8.744.360.000
4.	Dukungan Penyelenggaraan Diklat PIP	6.670.150.000
5.	Dukungan Pengendalian, Pemantauan, Dan Evaluasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan PIP	6.538.980.000
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya		105,625,414,000
1.	Layanan Fasilitas Dewan Pengarah (DP), Staf Khusus DP, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli	1,700,000,000
2.	Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, Pemantauan dan Evaluasi	4.600.000.000

No	Rencana Kerja	Anggaran (Rp)
3.	Layanan Sarpras Internal, Manajemen SDM, Manajemen BMN, Umum, Perkantoran	90.325.414.000
4.	Layanan Hukum, Manajemen Organisasi, Reformasi Birokrasi	2.000.000.000
5.	Layanan Audit Internal	1.000.000.000
6.	Layanan Data dan Informasi	6.000.000.000
Jumlah		160.050.978.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Melaksanakan mandat merumuskan arah kebijakan PIP, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi Diklat, menyelenggarakan Diklat, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila, BPIP menetapkan 3 sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPIP.

Sasaran strategis BPIP mendukung Program Prioritas Revolusi Mental dan PIP untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter. Perjanjian kinerja yang ditetapkan tahun 2020 berisi langkah-langkah strategis tahunan dari lima tahun strategi dalam rencana strategis Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja BPIP Tahun 2020 adalah sebagai berikut ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis dan masif secara nasional	Rekomendasi arah kebijakan yang disampaikan kepada Presiden	5 Rekomendasi
Terwujudnya BPIP sebagai coordinator dalam pelebagaan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah	Persentase K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	20%
Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Nilai indeks Aktualisasi Pancasila	Pedoman Indikator IAP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi	81
	Indeks Sistem Merit	0,61
	Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
	Nilai SAKIP	BB
	Indeks Profesionalisme ASN	81
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%

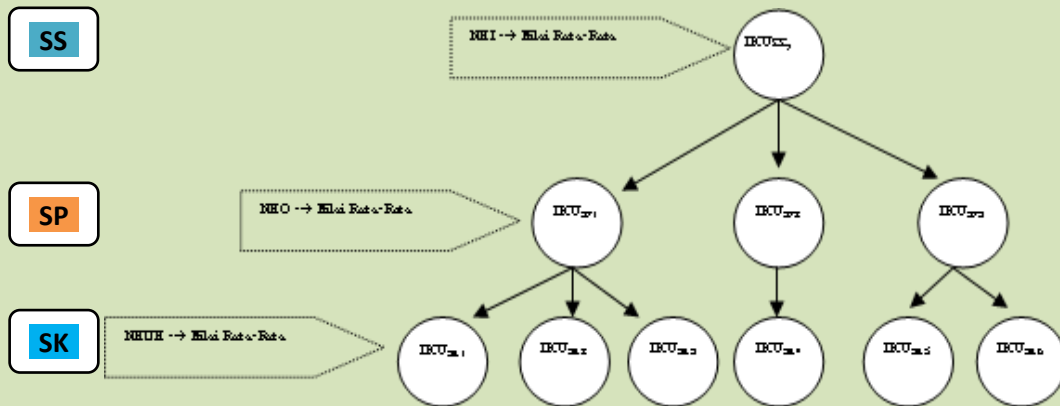
D. Pengukuran dan Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja disusun berdasarkan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran. Indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan acuan ukuran kinerja.

Ruang lingkup Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila meliputi pengumpulan data kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja, pengukuran data kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring dan evaluasi. Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja pada tingkat Badan, Unit Organisasi, dan Unit Kerja melakukan koordinasi pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pengumpulan dan penyampaian laporan data kinerja pada masing-masing tingkatan dan unit kerja dikoordinasikan oleh : (i) *KPIs Manager* tingkat BPIP; (ii) *KPIs Manager* tingkat Organisasi (eselon I); dan (iii) Koordinator Capaian IKU pada tingkat Unit Kerja (eselon II). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan; dan/atau
2. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis.
3. Penilaian kinerja dilakukan secara berjenjang sesuai dengan *cascading* indikator kinerja, yaitu:
 - a. Nilai Kinerja Unit Kinerja (NKUK) adalah rerata nilai kinerja dari indikator kinerja Tingkat Eselon II.

- b. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah rerata nilai kinerja dari indikator kinerja Tingkat Eselon I.
- c. Nilai Kinerja Instansi (NKI) rerata nilai kinerja dari indikator kinerja BPIP.



Gambar 5. Ilustrasi penilaian kinerja

Kriteria Status Nilai Capaian Kinerja di lingkungan BPIP, antara lain adalah:

Nilai (n)	kriteria	status
$n \geq 100$	baik	hijau
$80 \leq n < 100$	cukup	kuning
$n < 80$	kurang	merah

Aplikasi pendukung pengelolaan kinerja BPIP:



Hasil monitoring dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan rencana aksi perjanjian kinerja dituangkan dalam laporan kinerja triwulanan. Laporan triwulanan tahun 2020 seperti berikut.





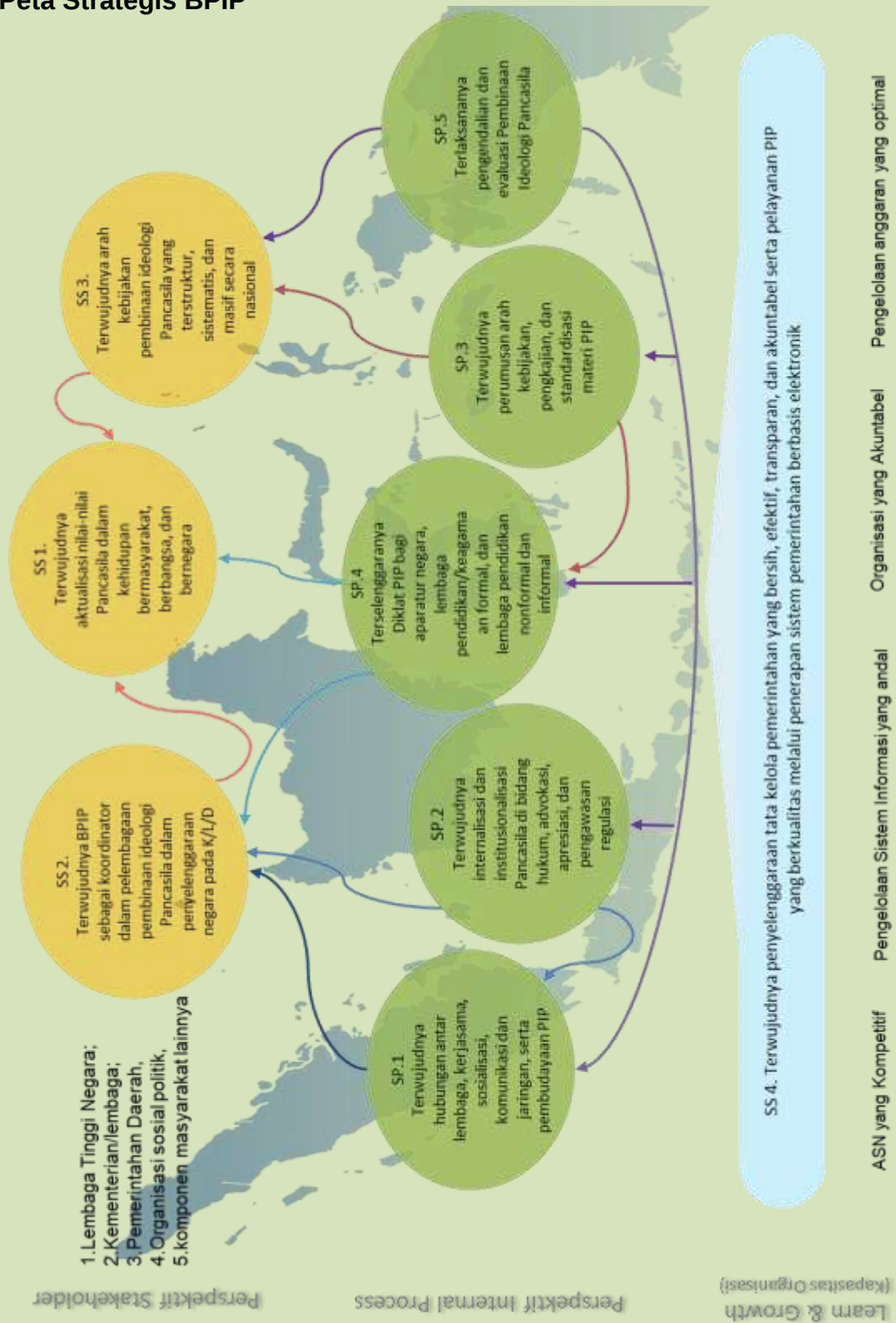
BAB III | **Capaian Strategis Tahun 2020**

Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024, menetapkan 4 sasaran strategis BPIP, yaitu:

1. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Daerah;
2. Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional;
3. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Ke empat sasaran strategis tersebut dapat terwujud dengan dukungan sasaran program Kedeputan dan Sekretariat Utama. Sasaran Program dicapai dengan berbagai kegiatan teknis. Hubungan sasaran strategis dan sasaran program PIP dapat dipetakan, sebagai berikut.

Peta Strategis BPIP



Gambar 6. Peta Strategis BPIP

A. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah

Indikator SS

Indikator keberhasilan **sasaran strategis** ini adalah :

Persentase Kementerian/Lembaga/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP (100%)



Institusionalisasi adalah proses suatu norma yang dilewati oleh masyarakat untuk menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan sehingga di kenal, diakui, dihargai, dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Sasarannya adalah K/L/Instansi Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Persentase diukur dari jumlah institusionalisasi yang berhasil, dibandingkan dengan seluruh berbagai upaya institusionalisasi yang dikoordinasikan oleh BPIP.

Ruang lingkup institusionalisasi adalah hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, jaringan, pembudayaan, hukum, pengawasan regulasi, advokasi, dan apresiasi.

Koordinasi PIP (target)	Tindaklanjut (realisasi)	Keterangan
100% (61 K/LD)	100% (61 K/LD)	- Akselerasi PKS= 12 - MoU = 45 - Pancamandala = 4 (Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung) 



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI TAHUN 2020



Halaman ini adalah ilustrasi. Tidak terkait langsung dengan penjelasan sebelum dan sesudah halaman ini.



DIREKTORAT ANALISIS DAN SINKRONISASI

SASARAN PROGRAM 1:

A.1. Terjalinnnya Hubungan Antar Lembaga, Kerjasama, Sosialisasi, dan Jaringan, serta Pembudayaan

Sebagai Lembaga yang diberi mandat dalam PIP maka fungsi koordinasi dan sinkronisasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ukuran keberhasilan Sasaran Program terjalinnnya hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, dan jaringan, serta pembudayaan:

Indikator SP 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KET
Persentase penilaian atas efektivitas HAL dan kerjasama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100% (24 K/L dan Orsospol)	50% (12 K/L Orsospol)	Tindaklanjut MoU/PKS (12 K/L dan Orsospol)
Efektivitas metode/media sosialisasi komunikasi & jaringan	Jumlah Rating/ Viewer/ Pembaca/ Like/ Subscriber	Viewer > 1jt	Penyebarluasan nilai-nilai Pancasila secara elektronik/online
% penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila	20%	20%	Target 100 kelompok (100%). Realisasi: 20 kelompok 1. Surabaya (Pendidik, Pembakti, Komunitas, Jejarang) 2. Badung (Pemda, Komunitas Seni dan Budaya) 3. Palembang (Pemda, Komunitas Seni dan Budaya) 4. Semarang (Pemda, Masy) 5. Magelang (Pemda, Masy) 6. Wonosobo (Pemda, Masy) 7. Tangerang (Pembakti) 8. Ende (Pemda, Masy) 9. Bali (Kom SB, Pembakti, Jejarang)

Tabel 2. Capaian IKU Sasaran Program Terjalinnnya Hubungan Antar Lembaga, Kerjasama, Sosialisasi, dan Jaringan, serta Pembudayaan

Akselerasi tindaklanjut kerjasama dengan K/L/Orsospol yang telah dilakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerjasama(PKS) yaitu : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), BKKBN, BNPT, Lemhanas, Adkasi, PKOTI, PPI, TVRI, Universitas Udayana, PT. Balai Pustaka Persero, Uni Papua. Matriks Berikut adalah akselerasi tindak lanjut.

No	Kementerian/ Lembaga Orsospol	Unit Kerja Terkait di BPIP	Tindaklanjut	
1	Kemendagri	Direktorat Sosialisais, Komunikasi dan Jaringan	a.1	Pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Sarasehan Hari Lahir Pancasila dengan Topik “Peran Ideologi Pancasila dalam menghadapi Pandemi Covid-19, Webiner dengan topik “Aktualisasi Pancasila ke dalam sistem pemerintahan Presidensil di tengah Pandemi Covid-19, Webiner dengan topik “Aktualisasi nilai Pancasila di kalangan generasi milenial dalam penanggulangan pandemi covid-19)
			a.2	Pekan sarasehan dan webiner dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila
		Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	b.1	Rapat Koordinasi dengan Pihak IPDN dalam rangka persiapan pelaksanaan Diklat PIP bagi calon wisudawan IPDN
			b.2	Penyelenggaraan Diklat pada Tahun 2021 menyasar Praja IPDN dan ASN Kemendagri
			b.3	Penyusunan sistem Diklat Nasional ideologi Pancasila yang memuat perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Diklat
		Deputi Bidang Hukum , Advokasi dan	c.1	Mengumpulkan data 12 Raperda / Perda yang dianggap masih bermasalah dan perlu dikaji kembali dari Dit. Produk Hukum

No	Kementerian/ Lembaga Orsospol	Unit Kerja Terkait di BPIP	Tindaklanjut	
		Pengawasan Regulasi		Daerah dan Dit. Politik Dalam Negeri Kemendagri
			c.2	Menargetkan terlibat dalam internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap materi muatan Raperda/Perda. Target setiap tahun adalah 514 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi.
		Deputi Penegendalian dan Evaluasi	d	Membuat PKS dengan Kemendagri dan BNPP yang meliputi ruang lingkup tentang: 1) Pelaksanaan pengendalian aktualisasi nilai Pancasila dengan calon praja, praja, dan alumni IPDN. 2) pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ASN lingkup Kemendagri dan Pemda; 3) Pelaksanaan pengendalian aktualisasi nilai Pancasila dengan calon praja, praja, dan alumni IPDN. 4) pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ASN lingkup Kemendagri dan Pemda; 5) bersama Ditjen Polpum bekerjasama dengan Kesbagpol melaksanakan pengendalian dan evaluasi aktualisasi nilai-nilai pancasila di masyarakat; 6) dalam jangka pendek (November 2020) bersama BNPP akan melaksanakan kegiatan menggali mutiara pancasila dan sosialisasi alat permainan tradisional di kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sambas; serta melaksanakan evaluasi aktualisasi nilai-nilai

No	Kementerian/ Lembaga Orsospol	Unit Kerja Terkait di BPIP	Tindaklanjut	
				Pancasila bagi para Camat di perbatasan negara
		Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama	e.1	Pembentukan jaringan Panca Mandala dalam PIP di daerah bersama Ditjen Polpum di 7 Provinsi pada tahun 2020 (Sumut, Lampung, Banten, Kalsel, Sulteng, NTB, Papua).
			e.2	Dalam 5 Tahun akan dibentuk jaringan Panca Mandala di seluruh Indonesia.
2	Kemenkumham	Deputi Hubungan antar Lembaga dan Kerjasama	a.1	Pembudayaan nilai-nilai Pancasila Bersama warga binaan Lapas Wirogunan
			a.2	Menargetkan terlibat dalam internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap materi muatan Raperda/Perda. Target setiap tahun adalah 514 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi.
		Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	b.1	Diklat/Sosialisasi PIP untuk jajaran Eselon I lingkup Polhukam
			b.2	Pelibatan Penyusunan Perban tentang Pendidikan dan Pelatihan. BPIP menjadi Narasumber pada Diklat BPSPDM Kemenkumham.
		Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi		Koordinasi terkait review peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila
				Penyelarasan rancangan peraturan badan BPIP tentang analisis dan sinkronisasi, kajian dan rekomendasi (agustus 2020) Institusionalisasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bangka Belitung
				Strategi Implementasi Nilai Pancasila terhadap Peraturan

No	Kementerian/ Lembaga Orsospol	Unit Kerja Terkait di BPIP	Tindaklanjut	
				Daerah di Semarang (kanwil kumham)
				Harmonisasi Peraturan PKPU
				Institusionalisasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di NTT
				Internalisasi dan institusionalisasi nilai pancasila di tanjung pinang
3	BKKBN	Deputi Hubungan antar Lembaga dan Kerjasama	a.1	Pemanfaatan jejaring fungsional BKKBN di daerah maupun pusat dalam PIP dan gotong royong, termasuk untuk pembudayaan, sosialisasi, kampanye dan diklat.
			a.2	Penyiapan standar materi dan metode PIP bagi SDM BKKBN, Organisasi fungsional penggerak Informal dan keluarga Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN BKKBN, penggerak, keluarga dan penduduk berdasarkan siklus hidup anggota keluarga.
			a.4	Pelaksanaan penelitian/pengkajian terhadap pembangunan karakter
			a.5	Pemutakhiran alat ukur pengendalian PIP
			a.6	Saling tukar menukar data dan informasi khususnya terkait keluarga dan kependudukan
			a.7	Melakukan pengukuran tingkat keberhasilan program di Lingkungan BKKBN dengan pembuatan command centre (Pusat Data dan Informasi yang terintegrasi)
			a.8	Penyusunan konsep dan management kerja sama secara keseluruhan yang menyangkut substansi kerja sama
			a.9	Pembentukan tim tindak lanjut kerja sama yang dibagi atas substansi
4	BNPT	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	a	Perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang dalam pengembangan

No	Kementerian/ Lembaga Orsospol	Unit Kerja Terkait di BPIP	Tindaklanjut	
				system nasional diklat PIP terkait pencegahan radikalisme dan terorisme kepada masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan ASN
		Deputi Pengkajian Materi	b.1	Pemberian materi dari masing2 pihak dalam kegiatan2 FGD yang dilaksanakan oleh BPIP dan BNPT
			b.2	Penyusunan dan pembuatan materi bahan ajar dan metode PIP dalam pencegahan terorisme
		Deputi sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan	c.1	Merealisasikan kerjasama dengan <i>branding</i> BNPT-BPIP
			c.2	Kerjasama sosialisasi serta penyusunan kontra propaganda, kontra narasi dan kontra ideologi dalam bentuk pemberitaan dan sosial media dengan memanfaatkan sumber daya para pihak
		Deputi Advokasi	d	Pelaksanaan program konseling dan intervensi terhadap pelaku terorisme
		Deputi Pengendalian dan Evaluasi	e	Pelaksanaan pengendalian aktualisasi nilai Pancasila di masyarakat bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 Provinsi sebagai agen pengendali; serta membantu pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan alat ukur aplikasi Perisai Pancasila
5	Lemhanas	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	a.1	FGD bahan/materi diklat
			a.2	Penyusunan draf perban tentang pendidikan dan pelatihan ideologi Pancasila

No	Kementerian/ Lembaga Orsospol	Unit Kerja Terkait di BPIP	Tindaklanjut	
6	ADKASI		a.3	Penyusunan modul bahan ajar diklat bagi Lembaga Negara, Lembaga Tinggi Negara, TNI/POLRI dan pendidikan non formal
		Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	a.1	Melaksanakan PKS antara Deputi Pengkajian dan Materi dengan ADKASI
			a.2	Rapat koordinasi dan Diklat Nasional Pemantapan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
		Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	b	Rapat koordinasi dan Diklat Nasional Pemantapan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
		Deputi Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	c	Daring Persiapan pemberian penghargaan prestasi Pancasila kepada anggota DPRD yang terbukti slalu memperjuangkan nilai2 Pancasila ditingkat legislasi
7	PKOTI	Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama		Koordinasi dan Fasilitasi pertemuan BPIP dengan ADKASI dalam rangka persiapan kegiatan Workshop Nasional DPRD Seluruh Indonesia
		Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	a	Penyusunan Panca Main
		Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama	b.1	Pembahasan tindak lanjut kerjasama dengan Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional (KPOTI), Purnapaskibraka (PPI), Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional (KPOTI), dan Perkumpulan Sepakbola Uni Papua
			b.2	Mengisi permainan tradisional pada kegiatan Menjalin Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila bersama Kesbangpol "Gotong Royong Membumikan Pancasila" di beberapa Provinsi di Indonesia.

No	Kementerian/ Lembaga Orsospol	Unit Kerja Terkait di BPIP	Tindaklanjut	
			b.3	Menjadi Narasumber pada webinar “membangun Sportivitas Memajukan Bangsa”
		Deputi Pendidikan dan Pelatihan	c	Ikut serta dalam kegiatan Pelaksanaan Diklat ToT bagi guru dan Pengajar
		Deputi Pengendalian dan Evaluasi	d.1	Penyusunan Panca Main
8	PPI	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	a	• Musyawarah Nasional dengan PPI seluruh Indonesia terkait Pembumih Pancasila • Mengikuti Musyawarah Nasional Pertama Komite Olahraga Tradisional Indonesia. • Mengikuti kegiatan “Kiat-Kiat Mengisi Ruang Publik dengan Konten Positif di Masa Pandemi”.
		Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama	b.1	Menjadi pelaksana kegiatan “Menjalin Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bersama Kesbangpol “Gotong Royong Membumih Pancasila” di beberapa Provinsi di Indonesia.
			b.2	Mengikuti kegiatan pertemuan dengan Perwakilan Pusat Studi Pancasila Seluruh Indonesia dalam rangka persiapan kegiatan “Membangun Sinergi, Membumi Pancasila”.
9	TVRI	Direktorat Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan	a.1	Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan Konser Ikon Prestasi Pancasila
			a.2	Kegiatan Susur Kampung di Bengkulu dan Ende
			a.3	Penayangan lagu Nyiur Hujau
			a.4	Kuis Siapa Berani “Kita Indonesia Kita Pancasila”
			a.5	Konser Sumpah Pemuda,
			a.6	Dialog Selamat Pagi Indonesia,
			a.7	Peliputan Pemberitaan Kegiatan Sosialisasi Pancasila di Malang,
			a.8	Program Indonesia Bicara,

No	Kementerian/ Lembaga Orsospol	Unit Kerja Terkait di BPIP	Tindaklanjut	
			a.9	Dialog dan Siaran Langsung Hari Lahir Pancasila
			a.10	Program Indonesia Damai
10	Universitas Udayana	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	a	Rapat pertemuan melibatkan peserta masyarakat umum (milenial) dan mahasiswa
11	PT Balai Pustaka	Deputi HALSKJ		Pembahasan tindak lanjut kerjasama dengan PT Balai Pustaka, Purnapaskibraka (PPI), Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional (KPOTI), dan Perkumpulan Sepakbola Uni Papua.
		Deputi Pengkajian dan Materi		Ikut serta dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Koordinasi dan Sinkronisasi Materi PIP formal, non formal dan informal.
				Penyusunan video bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila formal
12	Uni Papua	Direktorat Pembudayaan HLKS	a	Melibatkan Tim Uni Papua dalam kegiatan
			b	Persamuhan Nasional Pembakti Desa, Komunitas, dan Jejaring di Anyer Banten dan Kegiatan Persamuhan Nasional Pendidik Pancasila.: Narasi, Rasa, dan Laku Lampah,
		Deputi Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	c	Pemberian apresiasi Prestasi icon Pancasila

Kegiatan strategis mendukung tercapainya sasaran program terjalannya hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, dan jaringan, serta pembudayaan tahun 2020, adalah sebagai berikut.

A.1.1. Penguatan Sinergi Antar Lembaga Yang Melaksanakan PIP

BPIP memiliki posisi yang sangat strategis dan melibatkan banyak pihak dalam membumikan nilai-nilai Pancasila, untuk itu melalui Kedeputan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi Dan Jaringan, Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama mengembangkan jejaring kerja sama, baik dengan pemerintah maupun non pemerintah.

BPIP bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, organisasi sosial, politik, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, diaspora dan sebagainya. Kerja sama BPIP, ditujukan untuk dukungan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dan mendukung program revolusi mental.

Upaya penguatan sinergi antar lembaga yang melaksanakan PIP, yaitu :

1. Globalisasi

Globalisasi yang terjadi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasikan proses bisnis pada berbagai aspek kehidupan manusia secara revolusioner pada era Revolusi Industri 4.0 dewasa ini. Dalam era Revolusi Industri 4.0 tersebut, bangsa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius baik yang bersumber dari situasi global maupun situasi nasional, antara lain menguatnya individualisme, liberalisme pasar, radikalisme fundamentalisme agama, kosmopolitanisme, ideologi transnasional, dan dominasi sistem hukum modern yang menegasikan makna nasionalisme. Secara faktual bangsa Indonesia menghadapi kondisi melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berakibat pada melemahnya kelembagaan Pancasila secara signifikan. Untuk itu, penanaman nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan kepada masyarakat sebagai penyaring ideologi-ideologi yang masuk kepada masyarakat yang sesuai dengan Ideologi Pancasila dan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, sehingga pembinaan dan aktualisasi Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan.

2. Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Tinggi, Kementerian/ Lembaga, dan Pemerintah Daerah

Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila membutuhkan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait, antar lain Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. BPIP secara terpadu

meningkatkan kerja sama baik dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sehingga, melalui kerja sama tersebut terlaksana PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan mulai dari internalisasi dan institusionalisasi termasuk pelatihan dan PIP serta pengawasan regulasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Jejaring kemitraan kerja sama dengan Organisasi Sosial, Politik dan Masyarakat lainnya

Jejaring kemitraan kerja sama dengan Organisasi Sosial, Politik dan Masyarakat lainnya dilakukan agar PIP dilaksanakan secara *bottom up*. Penguatan jejaring kemitraan kerja sama diwujudkan melalui agenda pemberdayaan masyarakat dalam rangka PIP.

Capaian **indikator kinerja utama Kegiatan** (keluaran) penguatan sinergi antar lembaga yang melaksanakan PIP, yaitu :

Indikator Kegiatan 1.1			
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya hubungan antar Lembaga dan Kerjasama di Bidang PIP yang efektif			
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET
Jumlah dokumen kerjasama dan hubungan antar LTN, K/L, Pemda, dan Orsospol serta komponen masyarakat lainnya yang diselesaikan (PN)	41 Dok	45 Dok	 109%
Jumlah kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan/ lembaga yang menerima bantuan	17 Kom	46 Kom	

Tabel 3. Capaian IKU Penguatan Sinergi Antar Lembaga Yang Melaksanakan PIP

Kerjasama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, K/L, Pemda, dan Orsospol serta komponen masyarakat lainnya yang diselesaikan sebanyak 45 kesepakatan, sementara target adalah 41 Dokumen, sehingga pencapaian kinerja adalah 109%. Rincian 45 Kesepakatan, yaitu dengan:

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
3. Universitas Negeri Jakarta
4. Universitas Negeri Medan
5. Universitas Negeri Padang
6. Universitas Pendidikan Indonesia
7. Universitas Negeri Malang
8. Universitas Negeri Yogyakarta
9. Universitas Negeri Semarang
10. Universitas Negeri Surabaya

11. Universitas Pendidikan Ganesha
12. Universitas Negeri Manado
13. Universitas Negeri Makkasar
14. Universitas Negeri Gorontalo
15. Universitas Indonesia
16. Universitas Diponegoro
17. Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Internasional NGO Forum of Development (INFID) (1 Nota Kesepahaman terdiri dari 4 Pihak)
18. Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara Medan
19. IAIN Padang Sidempuan
20. IAIN Curup
21. IAIN Bengkulu
22. UIN Raden Fatah Palembang
23. UIN Raden Intan Lampung
24. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
25. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
26. UIN Walisongo Semarang
27. IAIN Kudus
28. IAIN Purwokerto
29. IAIN Salatiga
30. IAIN Pekalongan
31. IAIN Ponorogo
32. IAIN Surakarta
33. UIN Antasari Banjarmasin
34. IAIN Palangka Raya
35. IAIN Ternate
36. IAIN Ambon
37. IAIN Palu
38. IAIN Kendari
39. IAIN Sultan Amai Gorontalo
40. IAIN Fatahul Muluk Papua Jayapura
41. Universitas Pertahanan
42. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Dan Badan Narkotika Nasional
43. Badan Pengawas Pemilu
44. Arsip Nasional Republik Indonesia
45. Universitas Sains Al-Qur'an

Ukuran keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah jumlah kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan/ lembaga yang menerima bantuan berupa pendampingan: penyusunan AD/ART organisasi, pembuatan proposal kegiatan, cara pembinaan ideologi di lingkungan komunitas, dan pembuatan materi ideologi Pancasila.

No	Lokus Komunitas	Nama Komunitas
1.	Pemberdayaan Masyarakat Jawa Tengah (11 komunitas)	- Media : Persatuan Wartawan Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen - Dunia Usaha : Dewan Koperasi Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia - Ormas : Komunitas Permainan dan Olahraga Tradisional, Purna Paskibraka Indonesia dan Pusat Telaah dan Informasi Regional - ASN : Komunitas Abdi Muda dan Korps Pegawai Republik Indonesia - Dunia Pendidikan : Asosiasi Guru Sejarah Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia
2.	Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Selatan (13 komunitas)	- Media : Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia - Dunia Usaha : Dewan Koperasi Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia - Ormas : Komunitas Permainan dan Olahraga Tradisional, Purna Paskibraka Indonesia dan Pusat Telaah dan Informasi Regional - ASN : Komunitas Abdi Muda dan Korps Pegawai Republik Indonesia - Dunia Pendidikan : Asosiasi Guru Sejarah Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia
3.	Pemberdayaan Masyarakat Lampung (22 komunitas)	- Media : Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia - Dunia Usaha : Dewan Koperasi Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, katan Wanita Pengusaha Indonesia - Ormas : Komunitas Permainan dan Olahraga Tradisional, Purna Paskibraka Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewasapadaan Dini Masyarakat, Komunitas Pecinta Aksara Lampung, Mahasiswa Pancasila, Komunitas Penyandang Disabilitas Lampung, Yayasan Mitra Bentala, Komunitas Sosial Lampung. - ASN : Komunitas Abdi Muda dan Dharma Wanita - Dunia Pendidikan : Asosiasi Guru Sejarah

No	Lokus Komunitas	Nama Komunitas
		Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Akademi Berbagi Lampung, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah dan Universitas Lampung

Dukungan Aksi dalam rangka memenuhi target indikator kinerja penguatan sinergi antar lembaga yang melaksanakan PIP, yaitu:

No	Aksi	Output	Outcome
1	Koordinasi Sektor Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan 2020, Dirjen Infokom PMK Kementerian Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Sinergisitas hubungan antar lembaga	Memperkuat hubungan antar lembaga dalam rangka sinergisitas PIP
2	Diskusi Wawasan Kebangsaan dan Peran serta Ormas dalam mendukung Gerakan Pembumih Pancasila	Optimalisasi Sinergisitas hubungan antar lembaga	Memperkuat hubungan antar lembaga dalam rangka sinergisitas PIP
3	Audiensi dengan Tim Reaktualisasi dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Kota Bekasi, Tim Forum Ketahanan Nasional, Tim komunitas Pancasila Muda, Tim Lingkaran Studi Pancasila Ambon, dan Tim Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Penjajakan dalam rangka membangun hubungan dengan organisasi Sosial, Politik, dan masyarakat	Meningkatkan hubungan dengan organisasi sosial, politik dan masyarakat untuk membumih Pancasila
4	Keterpaduan Polhukam dan Ideologi Pancasila	Optimalisasi Sinergisitas hubungan antar lembaga	Memperkuat hubungan antar lembaga dalam rangka sinergisitas PIP
5	Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Inisiatif Baru Pemberdayaan Masyarakat di Hotel Margo	Optimalisasi kerja sama dengan Organisasi Sosial, Politik dan Masyarakat	Meningkatkan hubungan dengan organisasi sosial, politik dan masyarakat untuk membumih Pancasila
6	Review Anggaran dan Rencana Kegiatan Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama	Penguatan kinerja internal	Penentuan anggaran dan rencana kegiatan Direktorat Antar Lembaga dan Kerja Sama

No	Aksi	Output	Outcome
7	Pembahasan Arah Kerjasama Tindak Lanjut Mou Dengan Koti, PPI, Uni Papua dan Balai Pustaka di Hotel Morrissey	Optimalisasi kerja sama dengan Organisasi Sosial, Politik dan Masyarakat	Meningkatkan hubungan dengan organisasi sosial, politik dan masyarakat untuk membumikan Pancasila
8	Pembahasan Arah Kerjasama Antara BPIP dengan Beberapa Mitra yaitu Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdatul Ulama	Dokumen antara BPIP dengan beberapa mitra antara lain Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdatul Ulama	Optimalisasi kerja sama BPIP dengan beberapa mitra antara lain Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdatul Ulama
9	Keterpaduan Kemenag dan BPIP dalam PIP	Optimalisasi kerja sama dengan Organisasi Sosial, Politik dan Masyarakat	Memperkuat hubungan antar lembaga dalam rangka sinergisitas PIP
10	Koordinasi Pemerintah Daerah (Lampung)	Optimalisasi kerja sama dengan Organisasi Sosial, Politik dan Masyarakat	Memperkuat hubungan antar lembaga dalam rangka sinergisitas PIP
11	Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara BPIP dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pembahasan Tindak Lanjut Kerjasama	MoU antara BPIP dengan KEMENDES DT dan Transmigrasi	Optimalisasi kerjasama yang telah ditandatangani
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Gotong Royong Membumikan Pancasila bersama Jaringan Panca Mandala di Provinsi Papua	Dokumen Deklarasi JPM Papua	Terwujudnya penjajakan kerjasama dalam rangka kegiatan JPM di Provinsi Papua

No	Aksi	Output	Outcome
13	Pembahasan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021	Laporan hasil pembahasan kegiatan tahun anggaran 2020	Terlaksannya evaluasi kegiatan tahun 2020 dan pembahasan kegiatan 2021
14	Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pembahasan Tindak Lanjut Kerja Sama Antara BPIP dengan Universitas Gajah Mada, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta dan <i>Internasional Ngo Forum Of Development</i>	Dokumen MoU antara BPIP dengan Universitas Gajah Mada, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta dan <i>Internasional NGO Forum Of Development</i>	Optimalisasi kerjasama
15	Pembahasan Rencana Kerja Sama Kedeputan Hubungan antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan dengan Mitra Pemerintahan dan Non Pemerintahan Tahun 2020	Dokumen Rencana kerja sama antara BPIP dengan Pemerintah dan Non Pemerintah	Terwujudnya penjajakan kerjasama dengan pemerintahan dan non pemerintahan
16	Pembahasan Rencana Kerjasama Direktorat Pembudayaan dengan mitra Pemerintahan dan Non Pemerintahan	Dokumen Rencana kerja sama antara BPIP dengan Pemerintah dan Non Pemerintah	Terwujudnya penjajakan kerjasama dengan pemerintahan dan non pemerintahan
17	Pembahasan Penganggaran Kegiatan Kedeputan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan	Dokumen Rencana kerja sama antara BPIP dengan Pemerintah dan Non Pemerintah	Terwujudnya penjajakan kerjasama dengan pemerintahan dan non pemerintahan
18	Pembahasan Peraturan Penetapan IKU	Dokumen Renstra, indikator kegiatan utama (IKU)	Memiliki acuan/pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan
19	Pancasila Dalam Tindakan: Pancasila sebagai Kalimatun Sawa (Titik Temu Keberagaman dalam Menghadapi Persoalan Bangsa)"	Optimalisasi kerjasama dalam rangka pbumian nilai-nilai Pancasila	Memperkuat kerjasama optimalisasi pbumian nilai-nilai Pancasila

No	Aksi	Output	Outcome
20	Pancasila dalam tindakan : Keluarga, Beragama, Keluarga Berbudaya, Keluarga Produktif	Optimalisasi kerjasama dalam rangka pbumian nilai-nilai Pancasila	Memperkuat kerjasama optimalisasi pbumian nilai-nilai Pancasila
21	Persiapan Pemantapan Ideologi Pancasila	Optimalisasi kerjasama dalam rangka pbumian nilai-nilai Pancasila	Memperkuat kerjasama optimalisasi pbumian nilai-nilai Pancasila
22	Persiapan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Diskusi Kelompok Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara BPIP dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Diskusi Kelompok Terpumpun Sinergi Akademisi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	MoU antara BPIP dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	Optimalisasi MoU antara BPIP dengan PTKIN
23	Penandatanganan Nota Kesepahaman Dan Pembahasan Tindak Lanjut Kerjasama Antara BPIP Dengan PTKIN Dan Diskusi Kelompok Terpumpun Pbumian Pancasila Di Kampus	MoU antara BPIP dengan PTKIN	Optimalisasi kerja sama yang telah ditandani antara BPIP dengan PTKIN
24	Sinergi Akademisi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Penanganan Nilai-Nilai Pancasila	Optimalisasi kerja sama dengan Organisasi Sosial, Politik dan Masyarakat	Memperkuat kerjasama optimalisasi pbumian nilai-nilai Pancasila
25	Pancasila dalam tindakan : "Gotong Royong Mewujudkan Ekonomi Pancasila"	Optimalisasi kerjasama dalam rangka pbumian nilai-nilai Pancasila	Memperkuat kerjasama optimalisasi pbumian nilai-nilai Pancasila
26	Pembahasan arah kerjasama antara BPIP dengan Lemhannas dan BKKBN	Dokumen MoU antara BPIP dengan Lemhannas dan antara BPIP dengan BKKBN	Optimalisasi kerja sama antara BPIP dengan BKKBN

No	Aksi	Output	Outcome
27	Monitoring Evaluasi Kerjasama antara BPIP dengan ADKASI dan BPIP dengan Perkumpulan Sepak Bola Uni Papua	Hasil monitoring dan evaluasi kerjasama antara BPIP dengan ADKASI dan BPIP dengan Perkumpulan Sepak Bola Uni Papua	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi kerjasama BPIP dengan ADKASI dan BPIP dengan Perkumpulan sepak bola Uni Papua
28	Pancasila dalam Tindakan : Anak Indonesia Generasi Pancasila	Optimalisasi kerjasama dalam rangka pbumian nilai-nilai Pancasila	Memperkuat kerjasama optimalisasi pbumian nilai-nilai Pancasila
29	Rencana Penyusunan NSPK Tentang Pedoman Kerja Sama Antara BPIP Dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya dan Penyusunan NSPK Tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penggalangan Partisipasi Komunitas Dalam Rangka PIP	Dokumen NPSK tentang pedoman kerja sama antara BPIP dengan LTN, Kementerian/Le mbaga, Perda dan Orsospol	Optimalisasi hasil dokumen NPSK
30	Nalar Kerukunan, Merawat Keberagaman Bangsa, Mengawal NKRI	Optimalisasi kerjasama dalam rangka pbumian nilai-nilai Pancasila	Memperkuat kerjasama optimalisasi pbumian nilai-nilai Pancasila
31	Pembahasan mekanisme pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui peranan penggerak masyarakat	Optimalisasi pemberdayaan orsospol dalam rangka pbumian nilai-nilai Pancasila	Memperkuat kerjasama optimalisasi pbumian nilai-nilai Pancasila
32	Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPIP dengan Universitas Pertahanan	Dokumen MoU antara BPIP dengan Universitas Pertahanan	Optimalisasi MoU antara BPIP dengan Universitas Pertahanan
33	Pembahasan Mekanisme Penyusunan Desain Hubungan	Dokumen mekanisme desain	Optimalisasi desain hubungan

No	Aksi	Output	Outcome
	Kelembagaan BPIP Dalam Rangka PIP	hubungan kelembagaan BPIP dalam Rangka PIP	kelembagaan BPIP
34	Penyusunan kajian akademis awal sesi I pedoman kerja sama BPIP dengan lembaga Non Pemerintahan Dalam Rangka PIP,	Dokumen kajian akademis pedoman Kerjasama antara BPIP dengan lembaga Non Pemerintahan	Optimalisasi hasil kajian akademis pedoman Kerjasama antara BPIP dengan lembaga Non Pemerintahan
35	Membangun Sportivitas, Memajukan Bangsa	Optimalisasi Kerjasama dengan mitra dalam rangka PIP	Memperkuat kerjasama optimalisasi pembumian nilai-nilai Pancasila
36	Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama BPIP dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Desa Banurejo, Gorontalo	Dokumen Perjanjian Kerja Bersama antara BPIP dengan Kemendes	Optimalisasi MoU antara BPIP dengan Kemendes
37	Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi Pancasila	Optimalisasi kerja sama antara BPIP dengan Orsospol	Memperkuat kerjasama optimalisasi pembumian nilai-nilai Pancasila
38	Penyusunan kajian akademis antara sesi I Pedoman Kerja Sama BPIP dengan lembaga Non Pemerintahan Dalam Rangka PIP	Dokumen kajian pedoman kerja Sama BPIP dengan lembaga non Pemerintahan Dalam Rangka PIP	Optimalisasi hasil kajian akademis antara BPIP dengan lembaga Non Pemerintahan
39	Pembahasan arah kerjasama antara BPIP dengan BNPT dan KEMENDAGRI+C33	MoU antara BPIP dengan BNPT dan Kemendagri	Optimalisasi antara BPIP dengan BNPT dan Kemendagri
40	Persiapan Materi Kedeputan Hub antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan dalam rakor BPIP	Materi untuk rapat koordinasi BPIP	Tindak lanjut hasil rapat koordinasi BPIP

No	Aksi	Output	Outcome
41	Konsolidasi Evaluasi Kerjasama Kedeputan HALKS dengan Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan Bulan Januari s.d. September 2020 & Rencana Kerjasama Triwulan Akhir 2020	Dokumen hasil evaluasi Kerjasama Kedeputan HALKS dengan lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan	Tindak lanjut hasil evaluasi Kerjasama Kedeputan HALKS dengan Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan
42	Deklarasi Jejaring Panca Mandala Banten	Dokumen Deklarasi JPM Banten	Optimalisasi Deklarasi JPM Banten
43	Ekonomi Pancasila	Penjajakan kerja sama dalam rangka PIP	Memperkuat Kerjasama optimalisasi pembumian nilai-nilai Pancasila
44	Penyusunan kajian akademis awal sesi III pedoman kerja sama BPIP dengan lembaga Non Pemerintahan Dalam Rangka PIP,	Dokumen kajian akademis pedoman kerja sama BPIP dengan lembaga non pemerintahan Dalam Rangka PIP	Optimalisasi hasil kajian akademis pedomanan kerja sama BPIP dengan lembaga Non Pemerintahan
45	Penyusunan tindak lanjut kerjasama antara BPIP dengan Kemenag tentang Sigma Pancasila	Optimalisasi kerja sama antara BPIP dengan Kemenag	Optimalisasi kerja sama antara BPIP dengan Kemenag
46	Pembahasan Kerjasama BPIP dengan UIN Sunankalijaga dan Tokoh Masyarakat tentang Penyusunan Buku Materi PIP Perspektif Keagamaan	Buku Materi PIP Perspektif Keagamaan	Optimalisasi kerja sama antara BPIP dengan UIN Sunankalijaga dan Tokoh Masyarakat tentang Penyusunan Buku Materi PIP Perspektif Keagamaan

No	Aksi	Output	Outcome
47	Optimalisasi Kerjasama BPIP dengan Kementerian Hukum dan HAM & Pembahasan Arah Kerjasama BPIP dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Dokumen MoU BPIP dengan Kementerian Hukum dan HAM dan MoU antara BPIP dengan LPPRI	Optimalisasi Kerjasama BPIP dengan Kementerian Hukum dan HAM & Pembahasan Arah Kerjasama BPIP dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
48	Penyusunan Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penggalangan komunitas	Dokumen Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penggalangan komunitas	Optimalisasi pedoman pemberdayaan masyarakat dalam rangka penggalangan komunitas
50	Penyusunan Pedoman Kerja Sama BPIP dengan Lembaga Pemerintahan	Dokumen pedoman kerja sama BPIP dengan Lembaga Pemerintah	Optimalisasi Dokumen pedoman kerja sama BPIP dengan lembaga pemerintah
51	Deklarasi Jejaring Panca Mandala Yogyakarta	Dokumen Deklarasi JPM Yogyakarta	Optimalisasi deklarasi JPM Yogyakarta
52	Deklarasi Jejaring Panca Mandala Jawa Tengah	Dokumen Deklarasi JPM Jawa Tengah	Optimalisasi deklarasi JPM Jawa Tengah
53	Pemberdayaan masyarakat jawa tengah	Pemberdayaan masyarakat jawa tengah	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat jawa tengah
54	Deklarasi Jejaring Panca Mandala Sumatera Selatan	Dokumen Deklarasi JPM Sumatera Selatan	Optimalisasi deklarasi JPM sumatera selatan
55	Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Selatan	Pemberdayaan masyarakat Sumatera Selatan	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat Sumatera Selatan

No	Aksi	Output	Outcome
56	Rangkauan kegiatan Penandatanganan MoU BPIP dengan KPK, BNN dan BNPT	MoU BPIP dengan KPK, BNN dan BNPT	
57	Penyusunan Pedoman Kerja Sama antara BPIP dengan Lembaga Non Pemerintahan (Multi Pihak) dalam Rangka PIP oleh IPDN sesi 1	Dokumen Pedoman kerja sama antara BPIP dengan Lembaga Non Pemerintahan (Multi Pihak) dalam rangka PIP oleh IPDN	Optimalisasi dokumen pedoman kerja sama antara BPIP dengan Lembaga Non Pemerintahan (multi pihak)
58	Penyusunan Pedoman Kerja Sama antara BPIP dengan Lembaga Non Pemerintahan (Multi Pihak) dalam Rangka PIP oleh IPDN sesi 2	Dokumen Pedoman kerja sama antara BPIP dengan Lembaga Non Pemerintahan (Multi Pihak) dalam rangka PIP oleh IPDN	Optimalisasi dokumen pedoman kerja sama antara BPIP dengan Lembaga Non Pemerintahan (multi pihak)
59	Dialog dan Deklarasi Panca Mandala Lampung	Dokumen deklarasi JPM Lampung	Optimalisasi deklarasi JPM Lampung
60	Pemberdayaan Masyarakat Lampung	Pemberdayaan masyarakat lampung	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat Lampung
61	Persiapan Penandatanganan MoU BPIP dengan KPU dan Bawaslu	Dokumen MoU BPIP dengan KPU dan BPIP dengan BAWASLU	Optimalisasi MoU BPIP dengan KPU dan BPIP dengan BAWASLU yang telah ditandatangani
62	Penyusunan Desain Plat Form Jejaring Kerja Sama dengan Lembaga Non Pemerintah	Dokumen Desain Platform Jejaring kerja sama dengan lembaga Non Pemerintah	Optimalisasi dokumen desain platform jejaring Kerjasama dengan lembaga non pemerintah
63	Realisasi Monitoring dan Evaluasi Semarang	Laporan realisasi kegiatan, evaluasi kegiatan dan rencana kerja 2021	Tindak lanjut rencana kegiatan kerja 2021

Kilas peristiwa kegiatan penguatan sinergi antar lembaga yang melaksanakan PJP



Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pembahasan Tindak Lanjut Kerja Sama Antara BPIP dengan Universitas Gajah Mada, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Internasional NGO Forum Of Development, Yogyakarta pada 10 s.d. 13 Juni 2020.



Webinar "Pancasila Dalam Tindakan : Pancasila sebagai Kalimatun Sawa (Titik Temu Keberagaman dalam Menghadapi Persoalan Bangsa)", 6 Juli 2020



Webinar " Pancasila dalam tindakan : Keluarga, Beragama, Keluarga Berbudaya, Keluarga Produktif, 10 Juli 2020
Penandatanganan Nota Kesepahaman Pembahasan Tindak Lanjut Kerjasama antara BPIP



dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia Negeri, 12 s.d 13 Juli 2020



Diskusi Kelompok Terpumpun Sinergi Akademisi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Penanganan Nilai-Nilai Pancasila, 13 s.d 15 Juli 2020



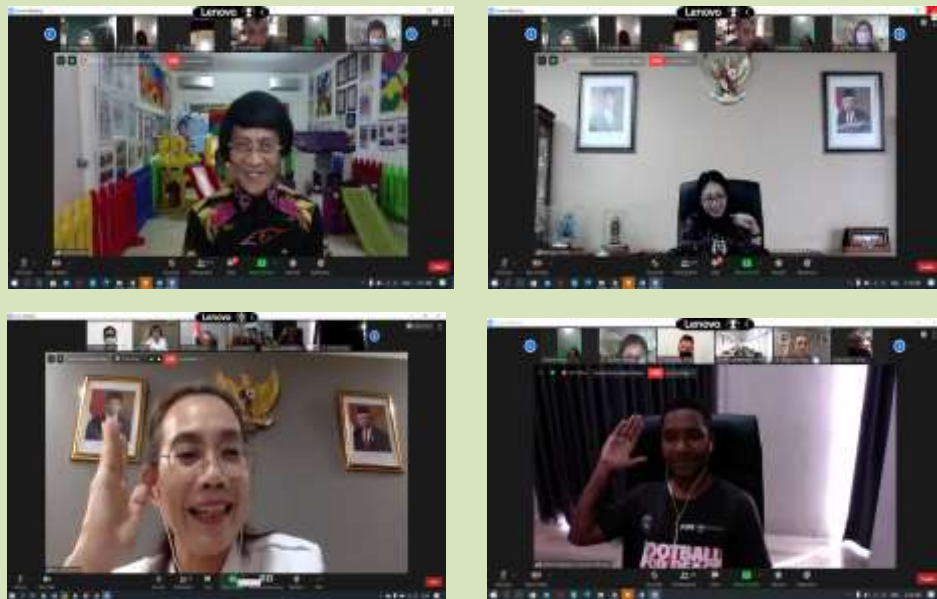
Webinar "Pancasila dalam tindakan : Gotong Royong Mewujudkan Ekonomi Pancasila", 30 Juli 2020



Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Pembahasan Arah Kerjasama antara BPIP dengan Lemhannas dan BKKBN, 26 s.d 29 Juli 2020



Diskusi Kelompok Terpumpun Optimalisasi Kerjasama antara BPIP dengan ADKASI dan BPIP dengan Perkumpulan Sepak Bola Uni Papua, 5 s.d 8 Agustus 2020



Webinar Pancasila dalam Tindakan : Anak Indonesia Generasi Pancasila, 10 Agustus 2020



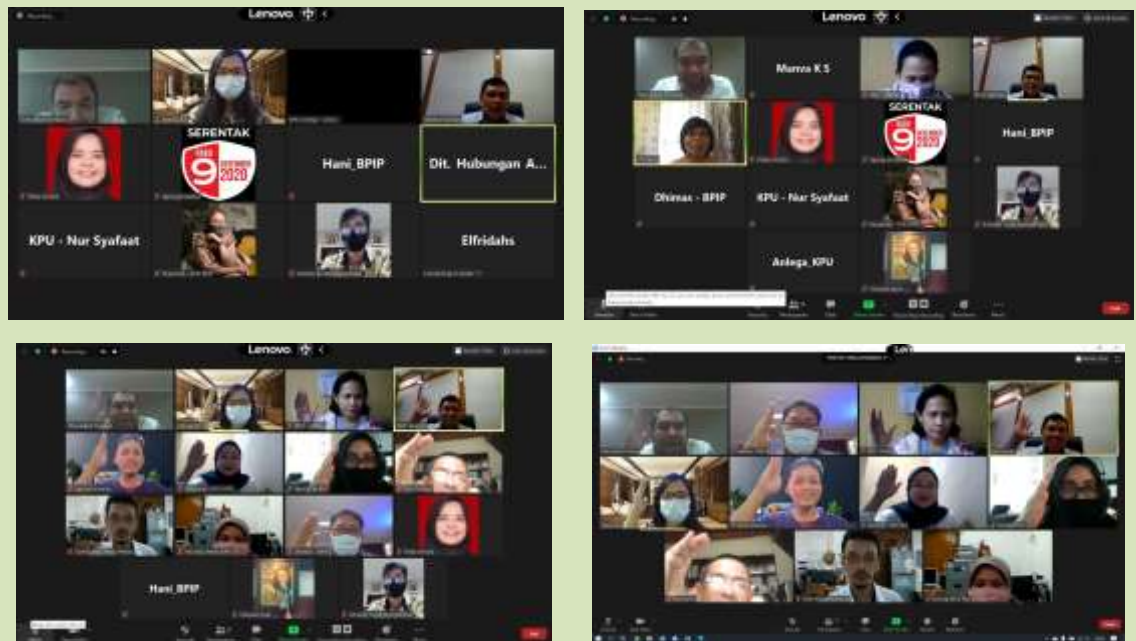
Diskusi Kelompok Terpumpun Rencana Penyusunan NSPK Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama, 18 s.d 19 Agustus 2020



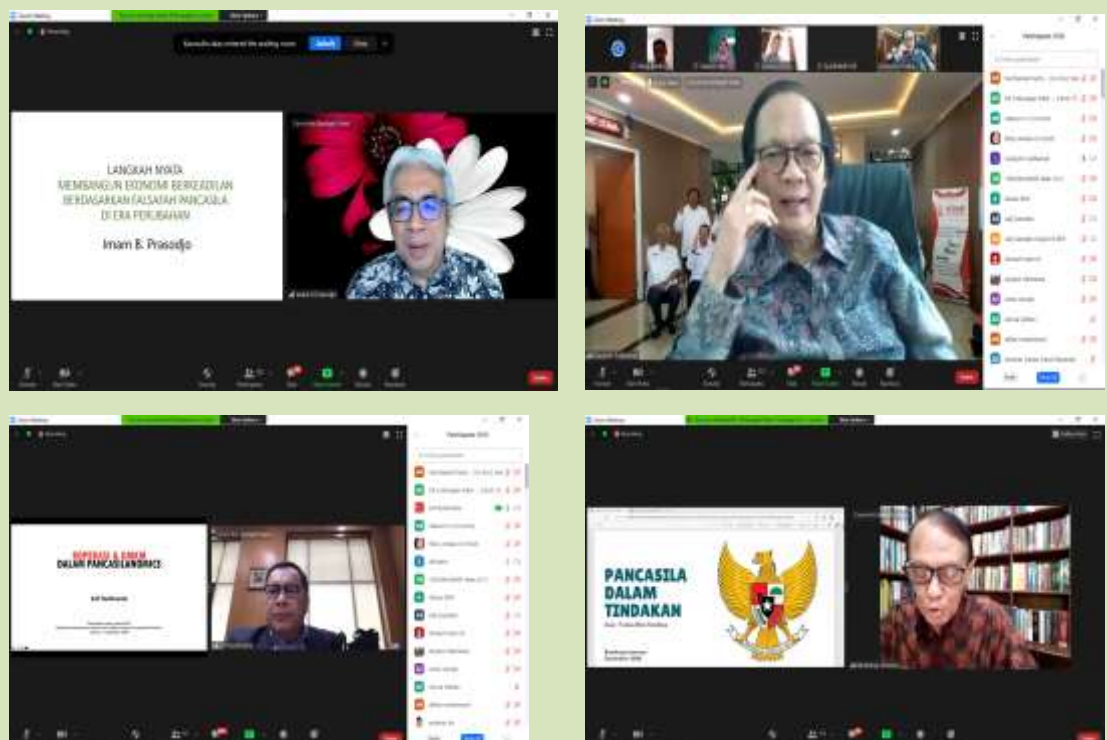
Webinar Nalar Kerukunan, Merawat Keberagaman Bangsa, Mengawal NKRI, 19 Agustus 2020



Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Optimalisasi Kerjasama antara BPIP dengan BNPT dan Kemendagri, 1-2 September 2020



Rapat daring penyusunan kajian akademis awal sesi I, 3 September 2020



Webinar Pancasila Dalam Tindakan : Koperasi dan UMKM Sebagai Perwujudan Ekonomi Pancasila, 11 September 2020



Diskusi Kelompok Terpumpun Optimalisasi Kerjasama BPIP dengan Radio Republik Indonesia serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 11-12 November 2020



Pembahasan Kerjasama BPIP dengan UIN Sunankalijaga dan Tokoh Masyarakat tentang Penyusunan Buku Materi PIP Perspektif Keagamaan, 5 s.d 7 November 2020



DKT dan Deklarasi Jejaring Panca Mandala Banten, 14-15 Oktober 2020



DKT dan Deklarasi Jejaring Panca Mandala Yogyakarta, 17-18 November 2020



DKT dan Deklarasi Jejaring Panca Mandala Jawa Tengah, 24-25 November 2020



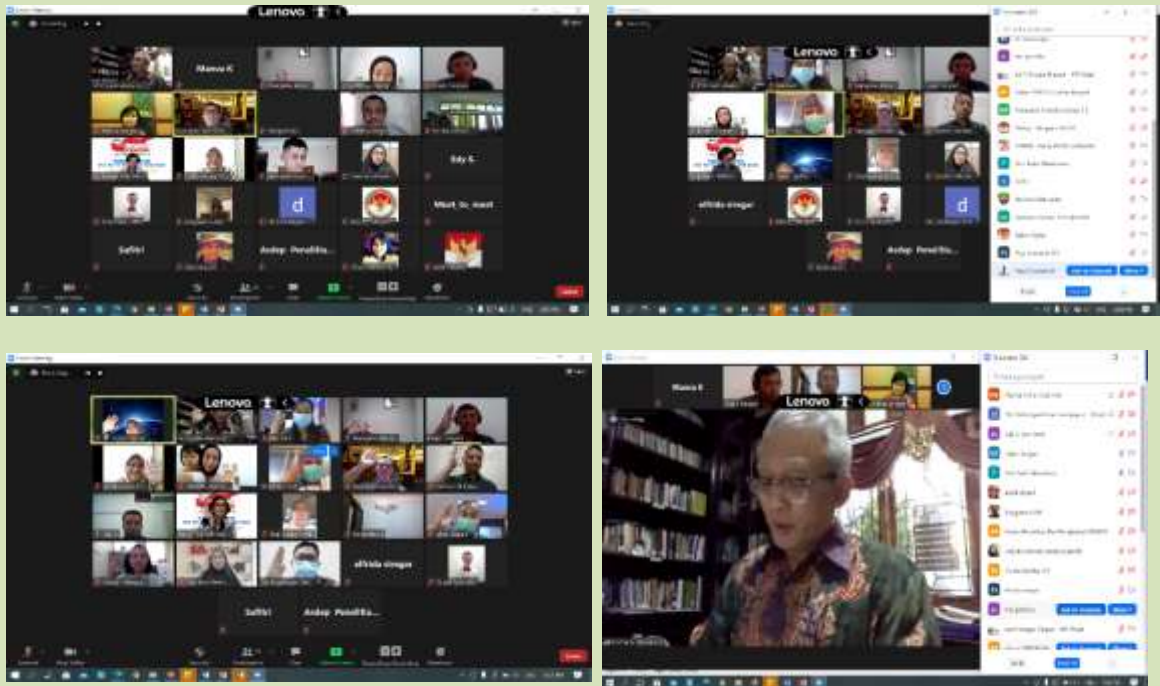
Pemberdayaan Masyarakat Jawa Tengah, 25-27 November 2020



DKT dan Deklarasi Jejaring Panca Mandala Sumatera Selatan, 1-2 Desember
Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Selatan, 7 s.d 9 November 2020



Pemaparan Hasil Penyusunan Pedoman Kerja Sama antara BPIP dengan Lembaga Non Pemerintahan (Multi Pihak) dalam Rangka PIP oleh IPDN sesi 1



Pemaparan Hasil Penyusunan Pedoman Kerja Sama antara BPIP dengan Lembaga Non Pemerintahan (Multi Pihak) dalam Rangka PIP oleh IPDN sesi 2



Deklarasi Jejaring Panca Mandala Lampung, 14 s.d 15 Desember 2020



Pembahasan Pemberdayaan Komunitas dalam rangka Pembumih Pancasila di Lampung

A.1.2. Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, Dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila

Capaian **indikator kinerja utama Kegiatan** (keluaran) sosialisasi, komunikasi, dan pengembangan jaringan, yaitu :

Indikator Kegiatan 2.1

Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan PIP yang efektif hingga ke daerah dan desa			
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET
Jumlah dokumen pelaksanaan sosialisasi yang diselesaikan	4 Dok	4 Dok	 100%
Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan komunikasi yang diselesaikan	4 Dok	4 Dok	 100%
Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan Jaringan yang diselesaikan	2 Dok	2 Dok	 100%

Tabel 4. Capaian IKU Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, Dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila

Ruang lingkup capaian sosialisasi Ideologi Pancasila yang telah dilakukan adalah:

1. Pembuatan Materi Sosialisasi, meliputi: Pembuatan video pendek dan infografis materi sosialisasi.
2. Sosialisasi Pancasila di Daerah/Desa, meliputi sosialisasi Pancasila di Pangandaran, Wonosobo, Yogyakarta, Nganjuk, dan bedah musik lagu Nasional dalam rangka membangkitkan nilai-nilai kebangsaan.
3. Sosialisasi Pancasila di lingkungan Kementerian, misalnya bekerja sama dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Ruang lingkup capaian pengembangan komunikasi Ideologi Pancasila yang telah dilakukan adalah:

1. Pengembangan Komunikasi Melalui Media TV, yaitu Talkshow dan Dialog Rancangan Haluan Ideologi Pancasila, Dialog di segmen E-Talk, FGD RUU dan Paket Publikasi (7 Media Televisi).
2. Pengembangan Komunikasi Melalui Media Cetak Online, yaitu: Pemberitaan dan infografis (9 media cetak dan online).
3. Pengembangan Komunikasi Melalui Radio, yaitu: Advetorial pada media radio (5 Dialog Interaktif/462 spot).

Dukungan Aksi dalam rangka memenuhi target indikator kinerja sosialisasi, komunikasi, dan pengembangan jaringan ideologi Pancasila, yaitu:

NO	Aksi	Sasaran (orang)	Output	Outcome
1-6	Kegiatan Webinar Bulan Pancasila	600	Laporan kegiatan	mereaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai <i>way of life</i> atau jatidiri bangsa Indonesia
	Sarasehan peran ideologi Pancasila dalam menghadapi covid-19	600	Kemenko polhukam & kemendagri	
	Aktualisasi nilai Pancasila dikalangan milenial dalam penanggulangan Covid-19	200	Kemenko polhukam & kemendagri	
	Modernasi beragama dan kebangsaan	463	IAIN Palangkaraya	
	Politik hukum reformasi hukum pidana berbasis Pancasila	75, dan 4,1 ribu viewer	Universitas Negeri Semarang	
	Mutiara Pancasila di Bumi Tadulako		Pemprov Sulteng, Pemko Palu dad GP Ansor Sulteng	
7	Pembuatan Video Nilai-nilai Pancasila	Lebih dari 4 ribu viewer	Laporan kegiatan 30 video pendek nilai-nilai Pancasila dan 2 video serta info grafis idul adha	memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi elemen masyarakat khususnya generasi milenial yang berada di dalam negeri dan di luar negeri melalui konten video
8	Penyebarluasan Nilai-nilai Pancasila melalui media massa	Lebih dari 2 juta viewer	Laporan kegiatan publikasi kegiatan BPIP	terciptanya ruang public untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila di media massa

NO	Aksi	Sasaran (orang)	Output	Outcome
9	Pembuatan video dan blocking time malam anugrah prestasi Pancasila	Lebih dari 700 viewer	Laporan kegiatan 5 segmen video, Blocking time	menjadi inspirasi keteladanan dan motivasi pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila
10	Mengikuti kegiatan diskusi terpumpun pola pembudayaan gotong royong dan pembuatan video Kabupaten Badung	40 orang	Laporan kegiatan Video nilai-nilai toleransi dan gotong royong di Badung	meningkatkan perekonomian pelaku usaha mikro dengan system ekonomi gotong royong
11	Pelaksanaan lomba dalam rangka hari lahir Pancasila 1 Juni 2020	Lebih dari 500 peserta perorangan dan kelompok	Laporan kegiatan	menumbuhkan semangat dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi bangsa melalui kegiatan lomba
12-13	Kegiatan Webinar Bulan Pancasila (Hari santri) Nasionalisme santri, ketahanan Pancasila, Indonesia kuat Merawat dan merawat: abdi santri untuk negeri	1.580 tayangan 356 viewer	Laporan kegiatan	Meningkatnya pengetahuan dasar serta informasi mengenai Pancasila dan relevansinya terhadap santri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
14	Sosialisasi Pancasila Bersama Kementerian Desa	25 ribu viewers	Laporan kegiatan	Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Desa
15-16	Pertemuan bulanan dengan pimpinan redaksi/wartawan/penggiat media sosial	35 partisipan 50 partisipan	Laporan kegiatan	strategi komunikasi pembinaan ideologi nilai-nilai Pancasila melalui media berita dan media social

NO	Aksi	Sasaran (orang)	Output	Outcome
17-18	Sosialisasi Pancasila di daerah Pendampingan kegiatan symposium nasional sigma Pancasila Pendampingan Diskusi Kebangsaan nilai-nilai Pancasila dalam dunia Pendidikan		Laporan kegiatan	Terbentuknya jejaring dengan para peserta kegiatan sebagai agen sosialisasi Pancasila di lokasi-lokasi penyelenggaraan kegiatan
19-22	Sosialisasi Pancasila di daerah kegiatan Sosialisasi Pembinaan Nilai-Nilai Pancasila di Pesantren, Persatuan Santri se Parahyangan Timur kegiatan Sosialisasi Pengajaran Pancasila untuk Guru Madrasah Aliyah se- Karesidenan Kedu kegiatan Sosialisasi Pancasila, seminar kebangsaan di Universitas Gajahmada, NU Fatayat, serta FGD bersama Universitas Nahdatul Ulama kegiatan halaqoh kebangsaan alim ulama se karasedinan kediri	50 orang per titik kegiatan	Laporan kegiatan	Terbentuknya jejaring dengan para peserta kegiatan sebagai agen sosialisasi Pancasila di lokasi-lokasi penyelenggaraan kegiatan
23-24	Sosialisasi Pancasila (bedah musik) Bedah musik di Uiniversitas Indonesia Bedah musik di Universitas Padjajaran	50 peserta 50 peserta	Laporan kegiatan	menanamkan jiwa dan semangat Kebangsaan kepada mahasiswa agar bisa menjadi agen yang dapat menyebarkan semangat tersebut kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya

NO	Aksi	Sasaran (orang)	Output	Outcome
25	Penyebarluasan nilai-nilai Pancasila melalui media massa	9 media	Laporan kegiatan	terciptanya ruang publik untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila di media massa
26	Penyebarluasan nilai-nilai Pancasila melalui media penyiaran/radio	RRI	Laporan kegiatan	tersebarluaskan nilai-nilai Pancasila untuk masyarakat melalui penyiaran media radio yang banyak didengarkan oleh seluruh masyarakat
27	Pembuatan Materi sosialisasi		15 Video pendek dan infografis materi sosialisasi 5 video animasi 1 video Launching program animasi lorang waktu si Aa	tersebarluaskan pengenalan, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila khususnya kepada generasi milenial dan seluruh komponen masyarakat lainnya. Disaksikan lebih dari 1 juta viewer.

Kilas peristiwa kegiatan sosialisasi, komunikasi, dan pengembangan jaringan ideologi Pancasila



Aktualisasi Nilai Pancasila dikalangan milenial dalam penanggulangan covid 19



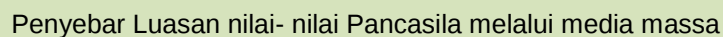
Politik hukum reformasi hukum pidana berbasiskan Pancasila



Mutiara Pancasila di Bumi Tadulako



Pembuatan Video dan infografis nilai-nilai Pancasila



www.bpip.go.id



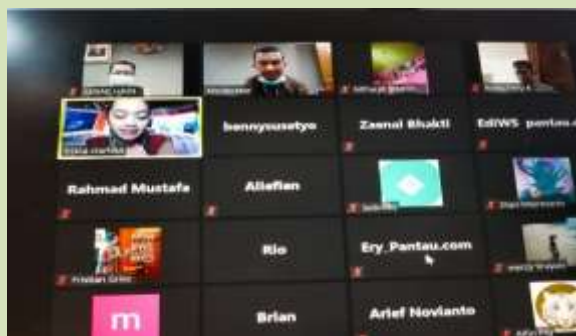
Salah satu aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang mengandung cipta, karsa, dan karya adalah melaksanakan kegiatan lomba dalam rangka memeriahkan hari lahir Pancasila 1 Juni 2020, yaitu lomba pembuatan cerita permainan tradisional dalam bentuk video, lomba orasi biografi Bung, lomba orasi 1 Juni, lomba cerita pendek, lomba film pendek.



Nasionalisme Santri, Ketahanan Pancasila, Indonesia yang kuat



Pengembangan jaringan dengan pimpinan Redaksi/Wartawan/Pegiat Media Sosial





Sosialisasi nilai-nilai Pancasila di daerah dan bedah musik nilai-nilai kebangsaan

A.1.3. Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila

Capaian indikator kinerja utama Kegiatan (keluaran) pembudayaan ideologi Pancasila, yaitu :

Indikator Kegiatan 3.1			
Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Terselenggaranya Pembudayaan Ideologi Pancasila			
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET
Jumlah Dokumen kebijakan strategis dan program teknis pemantapan pranata	1 Dok	1 Dok	 100%
Jumlah Dokumen kebijakan strategis dan program teknis inovasi pembudayaan	1 Dok	1 Dok	 100%
Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya penanaman nilai-nilai Pancasila pada Pranata			
Jumlah dokumen penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	Kerangka Pikir, Dimensi, Alternatif Indikator IAP	Kerangka Pikir, Dimensi, Alternatif Indikator IAP	 100%
Jumlah kelompok target yang melaksanakan aktualisasi Pancasila setelah pembudayaan	100 Kelompok	100 Kelompok	 100%

Tabel 5. Capaian IKU Penyelenggaraan pembudayaan ideologi Pancasila

Ruang lingkup capaian pembudayaan ideologi Pancasila adalah: penyusunan pola pemantapan pranata pada penyelenggara negara dan masyarakat; melaksanakan pembudayaan gotong-royong dalam melakukan pengarus-utamaan nilai Pancasila kepada masyarakat, komunitas, penggiat/pembakti kampung, dan jejaring; penyusunan Dokumen kerangka piker dan dimensi IAP.

Dukungan kegiatan dalam rangka memenuhi target indikator kinerja pembudayaan ideologi Pancasila, yaitu:

No	Aksi	Sasaran (orang)	Output	Outcome
1	Rapat awal dalam rangka penguatan budaya kerja	20 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja 2020
2	Pembahasan susur kampung, saling silang cerita Pancasila dan laku lampah, penggiat kampung, komunitas, jejaring	20 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja 2020

No	Aksi	Sasaran (orang)	Output	Outcome
3	Pemetaan praktik Pancasila, susur kampung dan kendala lapangan, saling silang cerita Pancasila dan laku lampah, penggiat kampung, komunitas, dan jejaring pada lokasi tertentu	20 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja 2020
4	kordinasi praktik baik nilai Pancasila dengan komunitas perempuan dan jejaring	20 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja 2020
5	Susur Kampung Pendidik Pancasila – Ruang pertemuan antara pendidik Pancasila, penggiat kampung, komunitas dan jejaring yang dilaksanakan	70 orang	Laporan kegiatan	Penguatan ekosistem potensi antar pendidik, pembakti kampung, komunitas dan jejaring di masing-masing kampung
6	Koordinasi dengan Kepala SMA PSDK 1 Jakarta dan siswa (<i>gamer e-sports</i>),	10 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja 2020
7	Daring kegiatan kebudayaan dan Indeks Aktualisasi Panncasila	5-15 orang	Laporan kegiatan selama WFH	Tindak lanjut rencana kerja 2020
8	Webinar BPIP dengan ANRI “membumikan Pancasila menyongsong new normal’	250 orang	Laporan kegiatan	Optimalisasi kebudayaan Pancasila dalam masa pandemic dan menghadapi new normal
9	Persiapan Awal Penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila, bersama BPS	15 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
10	Persiapan Awal Penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila,	15 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020

No	Aksi	Sasaran (orang)	Output	Outcome
	bersama Bappenas dan BPS			
11	Indeks Aktualisasi Pancasila, bersama tim penyusun IAP dan BPS	25 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
12	Indeks Aktualisasi Pancasila, bersama pimpinan dan Bappenas	26 orang	Laporan kegiatan	Optimalisasi IAP sebagai program prioritas nasional
13	Indeks Aktualisasi Pancasila, bersama tim penyusun IAP dan BPS	25 orang	Laporan kegiatan	Optimalisasi capaian IAP Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
14	Webinar dengan anggota Komisi 2 DPR RI dan Sestama BPIP	25 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja penyusunan pohon indeks
15	Webinar dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dan Kepala BPIP	20 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja penyusunan pohon indeks
16	Rapat Daring Indeks Aktualisasi Pancasila, Pembahasan Penyusunan Kerangka Pikir, Dimensi dan Indikator Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila	25 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
18	Indeks Aktualisasi Pancasila; Penyusunan Kerangka Pikir dan Dimensi Indeks Aktualisasi Pancasila	30 orang	Draf Kerangka Pikir, Dimensi dan Indikator Indeks Aktualisasi Pancasila	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020

No	Aksi	Sasaran (orang)	Output	Outcome
19	Indeks Aktualisasi Pancasila; pembahasan staf atas draf kerangka pikir dimensi dan indikator IAP dan pembahasan draf MoU BPIP dan BPS dan kerjasama penyusunan IAP.	30 orang	Draf Kerangka Pikir, Dimensi dan Indikator Indeks Aktualisasi Pancasila draf MoU BPIP dan BPS dan kerjasama penyusunan IAP	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
20	Indeks Aktualisasi Pancasila;	30 orang	Pembahasan atas draf Kerangka Pikir IAP dan finalisasi draf MoU	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
21	Indeks Aktualisasi Pancasila; pembahasan lanjutan draf kerangka pikir dimensi dan indikator IAP	30 orang	Pembahasan atas draf Kerangka Pikir IAP dan	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
22	Pembentukan Pola Pembudayaan Gotong Royong; Kunjungan Kerja ke Badung- Bali	40 orang	Laporan kegiatan	penanaman dan pembudayaan gotong royong dan nilai-nilai Pancasila dalam mencapai kemandirian
23	Indeks Aktualisasi Pancasila; menerima masukan dari dewan pengarah BPIP	40 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
24	Kegiatan Pembudayaan Pancasila Temu Wicara dengan Komunitas pelaku praktik baik nilai Pancasila dan komunitas seni budaya di Sumatera Selatan	40 orang	Laporan kegiatan	pembudayaan Pancasila melalui seni dan budaya kepada komunitas di Palembang - Sumatera Selatan
25	Penyusunan Kebijakan Teknis Inovasi Pembudayaan Ideologi Pancasila	20 orang	Draft awal pola/pedoman program strategis dan kebijakan	Tindak lanjut rencana kerja 2020

No	Aksi	Sasaran (orang)	Output	Outcome
			teknis inovasi kebudayaan	
26	Pembentukan Pola Kebudayaan Gotong Royong;	15 orang	Draft awal penyusunan kebijakan teknis dan strategis tentang pola pembentukan kebudayaan gotong royong	Tindak lanjut rencana kerja 2020
27	Pembentukan Pola Kebudayaan Gotong Royong; Kunjungan Kerja ke Semarang, Magelang, Wonosobo – Jawa Tengah	150 orang	Laporan kegiatan	Praktik baik nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Tindak lanjut rencana kerja 2020
28	Indeks Aktualisasi Pancasila; Rapat Penyusunan Kerangka Konseptual (Kerangka pikir), Dimensi dan Kerangka Indikator Aktualisasi Nilai Pancasila (IANP)	30 orang	Draft Kerangka Konseptual IAP	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
29	Rapat kelompok kerja pembahasan penyusunan pohon indeks nilai-nilai Pancasila	30 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja penyusunan pohon indeks
30	Penyusunan Indikator Kampung Pancasila dan Pemetaan Pembakti Kampung di Tengerang	30 orang	Laporan kegiatan	Indikator Kampung Pancasila dan Pemetaan Pembakti Kampung
31	Penyusunan Indikator Kampung Pancasila dan Pemetaan Pembakti Kampung di Tengerang	20 orang	Laporan kegiatan	Indikator Kampung Pancasila dan Pemetaan Pembakti Kampung
32	Penyusunan kebijakan teknis inovasi kebudayaan ideologi Pancasila	30 orang	Laporan kegiatan	Strategi kebudayaan

No	Aksi	Sasaran (orang)	Output	Outcome
33	Rapat Uji Publik IAP Kerangka Konsep IAP	30 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
34	Rapat IAP, Identifikasi Dimensi dan Indikator Penyusun IAP	30 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
35	Rapat IAP, penyusunan metodologi pengukuran IAP	30 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
36	Pembudayaan Gotong Royong di NTT	18 orang	Laporan kegiatan	Penguatan pemahaman nilai-nilai ideologi Pancasila
37	Pembentukan Pola Tradisi dan Kearifan Lokal	-	Materi pembudayaan nilai-nilai Pancasila	Tindak lanjut rencana kerja 2020
38	Penghitungan Indikator Penyusun Indeks Aktualisasi Pancasila	30 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
39	Persamuhan Nasional pembakti kampung, komunitas, dan jejaring	30 orang	Laporan kegiatan	Penguatan ideologi Pancasila bagi komunitas seni budaya, pembakti kampung dan jejaring
40	Penetapan Penimbang dan penghitungan Indeks Aktualisasi Pancasila	30 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
41	Penyusunan Publikasi Indeks Aktualisasi Pancasila	30 orang	Laporan kegiatan Draft penyusunan IAP 2020	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
42	penyusunan laporan Penghitungan Indeks Aktualisasi Pancasila	30 orang	Laporan kegiatan Hasil penghitungan IAP 2020	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
43	Identifikasi indikator penyusunan publikasi indeks aktualisasi Pancasila /Uji Publik	30 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020

No	Aksi	Sasaran (orang)	Output	Outcome
44	Uji publik dan penyusunan publikasi Indeks Aktualisasi Pancasila	30 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
45	Persamuan Lintas Generasi – memaknai nilai Pancasila	150 orang	Laporan kegiatan	Penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila pada generasi muda
46	Penyusunan publikasi indeks aktualisasi Pancasila	10 orang	Laporan kegiatan	Tindak lanjut rencana kerja IAP 2020
47	Acara Wacana 17an: Satu Tujuan Nasional	50 orang	Laporan kegiatan	Peningkatan persatuan dan kesatuan
48	Pembahasan Strategi Kebudayaan	30 orang	Laporan kegiatan Draft penyusunan strategi kebudayaan	Pola strategi kebudayaan ideologi Pancasila

Kilas peristiwa kegiatan pembudayaan ideologi Pancasila



Pembudayaan Gotong Royong di Kabupaten Badung, Bali

Penyusunan Kebijakan Teknis Inovasi Pembudayaan Ideologi Pancasila





Pembentukan Pola Pembudayaan Gotong Royong, Jawa Tengah

1. Mama Lidda, mantan Imam kepercayaan Marapu
2. Rato, Imam kepercayaan Marapu
3. Irene Camelyn Sinaga, Direktur Pembudayaan BPIP sedang berdiskusi dengan Mama Lidda
4. Penyerahan Plakat kepada Mama Lidda dan Rato oleh tim BPIP
5. Penyerahan Plakat kepada Pater Robert Ramone dan Umu Ignasius
6. Kunjungan ke Rumah Budaya Sumba



Pembudayaan Gotong Royong, Ende

Uji Publik IAP



1. Peserta kegiatan sebanyak 32 orang yaitu internal BPIP, POLRI, Kementerian Kesehatan, Komnas HAM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko PPNRB dan Badan Pusat Statistik.
2. Prof. Dr. Adj. Samakto, S.H., M.Hum, Pdt. Deputi Hubungan Antara Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP
3. Wisnu Bawa Tenaya, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP
4. Pdt. Andreas Anangguru Yewangoe, Anggota Dewan Pengarah BPIP
5. Sugeng Haryono, Staf Ahli Menteri Kementerian Dalam Negeri
6. Kundesputi Rudi Haryono, Kasubdit Binkitmas Ditbinbimas Korbinmas Baharkam POLRI
7. Ahmad Avenzora, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat
8. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi II DPR RI
9. KH Mansyudi Suhud, Ketua PB NU
10. Anis Masykhur, Kemenag





BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI TAHUN 2020



Halaman ini adalah ilustrasi. Tidak terkait langsung dengan penjelasan sebelum dan sesudah halaman ini.

POTRET KELUARAN TAHUN 2020



**DIREKTORAT PELEMBAGAAN
DAN REKOMENDASI**

SASARAN PROGRAM 2:

A.2. Internalisasi Dan Institusionalisasi Pancasila Di Bidang Hukum, Advokasi, Apresiasi, dan Pengawasan Regulasi

Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukum tersendiri yang secara terus menerus dilakukan internalisasi dan institusionalisasi. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Indikator keberhasilan sasaran program internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi adalah termanfaatkan dan ditindaklanjutnya capaian keluaran yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

Indikator SP 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	TARGET	REALISASI	Ket
Jumlah dokumen internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, serta pengawasan regulasi yang dimanfaatkan	9 Dok	9 Dok	 Dimanfaatkan K/L, peserta, internal BPIP
Jumlah rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	20 Rekomendasi	25 Rekomendasi	 ditindaklanjuti ke Kepala/Dewan Pengarah

Tabel 6. Capaian IKU Internalisasi Dan Institusionalisasi Pancasila Di Bidang Hukum, Advokasi, Apresiasi, dan Pengawasan Regulasi

25 Rekomendasi atas Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan nilai Pancasila, terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Terhadap Nilai-Nilai Pancasila.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/Pnps/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
10. Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 Tanggal 13 Desember 2019 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari Itikad Ahlussunnah Wal Jamaah Yang Bersumber Dari Hukum Mazhab Syafiiyah.
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Dan Mendirikan Shalat Bagi Anak Usia Sekolah Yang Beragama Islam.
13. Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Gerakan Sholat Subuh Berjamaah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengarustamaan Gender.
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemasaran Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Bengkulu.
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur
18. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah Di Kabupaten Pandeglang.

19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan Manokwari Daerah Injil.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 5 Tahun 2005 Tentang Pandai Baca Al-Qur'an Dalam Kabupaten Enrekang.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Kegiatan Yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan.
23. Peraturan Walikota Bima Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Jumat Khusus.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan Internalisasi Dan Institusionalisasi Pancasila Di Bidang Hukum, Advokasi, Apresiasi, dan Pengawasan Regulasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

A.2.1. Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional terhadap Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila sebagai paradigma dalam pengetahuan sebagai landasan dalam pembangunan nasional. Untuk mewujudkan dalam pembangunan, nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila harus ditempatkan sebagai nilai bersifat meta-yuridis yang melandasi lahirnya norma-norma hukum di bawah UUD NRI 1945 yang mengikat semua warga, kementerian dan lembaga.

Menyadari hal tersebut, sangat diperlukan pemahaman yang utuh dan mendasar terhadap kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil yang diharapkan dari pemahaman itu, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan modal oleh bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan nasional yang secara garis besar meliputi pembangunan di bidang : (a) mental, agama, dan sumber daya manusia; (b) bidang kemasyarakatan; (c) bidang ketatanegaraan dan (d) bidang ekonomi dan keuangan. Artinya, pembangunan nasional harus benar-benar merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berdaulat secara politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan dan bersendikan gotong royong.

Capaian kinerja langkah strategis analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila tahun 2020 yaitu :

1. Tersusunnya Peraturan BPIP tentang Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Indikator Nilai-nilai Pancasila.
2. Uji publik indikator nilai-nilai Pancasila bersama Kementerian/Lembaga dan tokoh agama, tokoh budaya, akademisi dan pakar di wilayah I (Pusat), wilayah II (Bagian Barat Indonesia), dan wilayah III Bagian Timur Indonesia). Urgensi penetapan indikator nilai-nilai Pancasila dalam perundang-undangan (regulasi) dan kebijakan adalah amanat bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2). Indikator nilai-nilai Pancasila akan menjadi alat dalam harmonisasi regulasi dan kebijakan sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham).

Indikator nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

Tabel 7. Indikator nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan

Sila	Butir Pancasila
Ketuhanan yang Maha Esa 	1. Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa setiap warga negara dapat mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya. 3. Peraturan perundang-undangan menjamin kebebasan dan penghormatan bagi tiap-tiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya. 4. Peraturan perundang-undangan menjamin setiap orang dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya selaras dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5. Peraturan perundang-undangan menjamin penghormatan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya.
Kemanusiaan yang adil dan beradab 	1. Peraturan perundang-undangan menjamin kemerdekaan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetaraan hubungan antar bangsa-bangsa di dunia. 2. Peraturan perundang-undangan menjamin hubungan antar bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. 3. Peraturan perundang-undangan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap mengingat kearifan bangsa dan menjaga hubungan antar bangsa yang sederajat, berkeadilan dan berkeadaban. 4. Peraturan perundang-undangan mencerminkan pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 5. Peraturan perundang-undangan berfungsi mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan suku, agama, kepercayaan, ras, dan antar golongan.

Sila	Butir Pancasila
Persatuan Indonesia 	1. Peraturan perundang-undangan menjamin persatuan bangsa, keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI serta mengembangkan kebudayaan. 2. Peraturan perundang-undangan menguatkan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam bingkai NKRI. 3. Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa setiap warga negara mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mengembangkan rasa cinta tanah air serta bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara bagi setiap warga negara. 5. Peraturan perundang-undangan mampu menumbuhkan semangat gotong royong, rasa kebanggaan berbangsa, dan bertanah air Indonesia.
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan 	1. Peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan bahwa NKRI bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia dengan mendasarkan penyelenggaraan negara pada permusyawaratan perwakilan. 2. Peraturan perundang-undangan memperhatikan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa demokrasi Indonesia berdasarkan permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. 4. Peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah/mufakat dan melaksanakan keputusan tersebut dengan i'tikad baik dan rasa tanggungjawab.

Sila	Butir Pancasila
	5. Peraturan perundang-undangan harus menjamin terselenggaranya demokrasi politik yang berkeadaban dan berkeadilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 	1. Peraturan perundang-undangan berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin. 2. Peraturan perundang-undangan menjamin perlindungan kepada setiap orang untuk menghargai proses cipta, karya, dan karsa secara bertanggungjawab demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. 3. Peraturan perundang-undangan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kesempatan berusaha serta penghidupan yang layak. 4. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 5. Peraturan perundang-undangan menjamin kegiatan perekonomian yang berkeadilan, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

3. Analisis dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah (25 peraturan perundang-undangan), yaitu:

- Wilayah I : 9 analisis dan sinkronisasi undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
- Wilayah II : 10 analisis dan sinkronisasi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di Wilayah II (Sumatera-Jawa-Bali);
- Wilayah III : 6 analisis dan sinkronisasi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di Wilayah III (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-NTB-NTT-Papua).

4. Inovasi analisis dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila berbasis elektronik.



Gambar 7. Ilustrasi Aplikasi SI-LaRas

INOVASI SI-LARAS MENJADI PROGRAM QUICKWIN RB-BPIP 2020

SI-LaRas adalah Sistem Informasi layanan sinkronisasi substansi rancangan dan/atau peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila.

Tujuan Program SI LaRas adalah untuk percepatan layanan sinkronisasi rancangan dan/atau Peraturan Perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Implementasi SI-LaRas telah dipraktekan pada sinkronisasi:

- 1) Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana non Alam Corona Virus Disease2 2019 (Covid-19).
- 2) Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana non Alam Corona Virus Disease2 2019 (Covid-19).

- 3) Peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua tas Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana non Alam Corona Virus Diseases2 2019 (Covid-19).

Capaian indikator kinerja utama keluaran analisis dan sinkronisasi hukum Nasional terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu :

Indikator Kegiatan 1.2			
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya analisis dan sinkronisasi nilai- nilai Pancasila terhadap hukum nasional			
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KET
Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila yang diselesaikan	3 Dok	3 Dok	 Wil.I, Wil.II, dan Wil.III (100%)

Tabel 8. Capaian IKU Analisis & Sinkronisasi Hukum Nasional terhadap Nilai-Nilai Pancasila

Kegiatan-kegiatan strategis yang telah mendukung capaian analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu:

- 1) Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Penyusunan Indikator Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan
 - 2) Pemantapan Indikator Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Finalisasi Indikator Nilai-nilai Pancasila Dalam Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Koordinasi Pemutakhiran Indikator Nilai-nilai Pancasila Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Rancangan Peraturan BPIP Tentang Indikator Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan dan Regulasi
 - 6) Perumusan Peraturan BPIP Tentang Pedoman Penyelarasan Nilai Pancasila Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Produk Hukum Daerah; Dan Peraturan BPIP Tentang Pemberian Rekomendasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Kebijakan

- 7) Pembentukan Tim Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020
 - 8) Koordinasi Kajian, Analisis dan Rekomendasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020
 - 9) Monitoring dan Evaluasi Kajian Analisis dan Rekomendasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020
 - 10) Presentasi Hasil Kajian, Analisis dan Rekomendasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020
 - 11) Implementasi Aplikasi *Quick Win* “Silaras”
- 2) Analisis dan Sinkronisasi Peraturan Perundangundangan
- a. Wilayah I (Pemerintah Pusat)
- 1) Kajian, Analisis, dan Rekomendasi atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 Kegiatan ini dikaji bersama Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjahmada dan menghasilkan analisis yaitu dalam menghadapi kelemahan-kelemahan penanggulangan bencana terutama untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, Pemerintah perlu membuat beberapa regulasi turunan undang-undang penanggulangan bencana yaitu perpres tentang status dan tingkatan bencana dan aturan lainnya mengenai analisa risiko bencana dan standar pelayanan minimal, dan lain sebagainya.
 - 2) Kajian, Analisis, dan Rekomendasi atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Nilai-Nilai Pancasila
 Kegiatan ini dikaji bersama Pusat Kajian Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menghasilkan analisis yaitu tidak semua indikator Nilai Pancasila tercantum secara tegas dalam UU Sisdiknas, khususnya dalam pemenuhan Sila Keempat, dengan menjamin adanya kebebasan demokrasi yang beradab, berkeadilan dan bertanggung jawab. Selain itu, diperlukan sejumlah penguatan yang dibutuhkan untuk memberikan karakter khas bagi pendidikan Indonesia dengan tidak memisahkan antara nilai keimanan dan ilmu pengetahuan (sains).
 - 3) Kajian, Analisis, dan Rekomendasi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Terhadap Nilai-Nilai Pancasila

Kegiatan ini dikaji bersama Pusat Kajian Hukum Konstitusi dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan menghasilkan analisis yaitu Paradigma hukum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi spirit reformasi hukum dalam pengaturan tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, keragaman budaya dan kesamaan dalam mewujudkan cita cita bangsa. Pengaturan Bendera Bahasa juga sekaligus harus dapat menjaga identitas NKRI sebagai pemersatu bangsa dan menjaga eksistensi simbol kedaulatan bangsa dari penyalahgunaannya. Selain itu, Peraturan perundang-undangan yang mengatur Bendera Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terkait dengan peraturan perundangan di sektor yang lain sektoral/ tersebar dan bahkan beberapa perundangan masih tidak harmonis dengan perundangan lain, maka oleh badan negara yang berwenang untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi antara perundang-undangan yang ada.

4) Kajian, Analisis, dan Rekomendasi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Kegiatan ini dikaji bersama Pusat Studi Pancasila Universitas Bangka Belitung dan menghasilkan analisis yaitu Pasal 7 ayat (2) secara nyata tidak selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang semestinya menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap mengingat kearifan bangsa dan menjaga hubungan antar bangsa yang sederhana, berkeadilan dan berkeadaban dan indikator Peraturan Perundang-undangan yang merujuk pada Pancasila sebagai cermin pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Asas kejelasan rumusan sebagai salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga tidak terwujud dalam Pasal ini.

5) Kajian, Analisis, dan Rekomendasi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dikajibersama Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember dan menghasilkan analisis yaitu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 15 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu untuk dipertahankan.

- 6) Kajian, Analisis, dan Rekomendasi atas Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Kegiatan ini dikaji bersama Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan menghasilkan rekomendasi yaitu Berdasarkan Uji Materiil yang ditolak oleh MK dengan pertimbangan (1) Fungsi Hukum (2) Sisi Hukum Pidana (3) Substansi Hukum, merupakan kebijakan final bahwa UU No 1/Pnps/1965 tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pasal 2 UU Nomor 1/Pnps/1965, baik ayat 1 maupun 2 seharusnya mengikutsertakan Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk keputusan bersama dalam menetapkan perbuatan seseorang sebagai kategori penodaan Agama.

- 7) Kajian, Analisis, dan Rekomendasi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Dikaitkan dengan Nilai-Nilai Pancasila

Kegiatan ini dikaji bersama Pusat Kajian Pancasila dan Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan menghasilkan analisis yaitu Pasal 21 ayat (1) UU SDA membuat air kembali dikomersialisasi. Padahal pemberian hak guna air sebagai sarana dalam melindungi hak konstitusional rakyat dalam hal pengelolaan air, harus dengan konsep *res commune* yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Sehingga Pasal 21 ayat (1) UU SDA dinilai bertentangan dengan Sila Keempat dan Sila Kelima.

- 8) Kajian, Analisis, dan Rekomendasi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kegiatan ini dikaji bersama Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta dan menghasilkan analisis yaitu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang di atur dalam UU Desa bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki kelemahan dari segi normatif bahwa sebagian materi muatannya cukup mereduksi asas pengaturan desa, terlihat dari adanya Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 yang pada satu sisi membuka kesempatan/peluang sebesar-besarnya bagi setiap warga negara untuk masuk dalam Pemerintahan Desa, namun pada sisi yang lain justru mengesampingkan

pengakuan hak asal-usul serta mereduksi nilai kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan warga desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa perlu dioptimalisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna mewujudkan desa yang mandiri.

9) Laporan Kajian, Analisis, dan Rekomendasi atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Kegiatan ini dikaji bersama Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan menghasilkan analisis terkait dengan pemenuhan nilai-nilai Pancasila dalam materi muatan UU Pemasyarakatan, kajian ini menemukan bahwa meski menyatakan akan membangun sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, UU Pemasyarakatan masih berisikan norma-norma yang belum lengkap atau tidak dirumuskan dengan jelas dan kuat terkait dengan sejumlah indikator. Paling banyak ditemukan adalah norma yang terkait dengan penjabaran indikator hak asasi manusia dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. UU Pemasyarakatan juga tidak memberikan perhatian untuk menguatkan rasa cinta tanah air sebagai pelaksanaan Sila Persatuan Indonesia kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), khususnya WBP terorisme dan separatisme. Selain itu, undang-undang ini tidak memuat ketentuan terkait tanggung jawab Pemerintah khususnya untuk menyediakan fasilitas yang memungkinkan hak-hak WBP untuk menjalankan Sila Kesatu, Kedua, dan Kelima dapat dipenuhi.

b. Wilayah II (Sumatera-Jawa-Bali)

1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.

Berkerjasama dengan Universitas Dr. Soetomo dan menghasilkan analisis yaitu Perda Pengarusutamaan Gender sebuah landasan hukum yang mengikat bagi provinsi Jawa Timur yang bertujuan memuliakan perempuan supaya persepsi diskriminasi perempuan hilang. Secara sosiologis, perda ini tidak ada hambatan dalam realitanya (ada gubernur provinsi perempuan, bupati perempuan).

2) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan 6 tahun 2010 tentang Kewajiban Pandai Baca Alquran dan Mendirikan Shalat Bagi Anak Usia Sekolah yang Beragama Islam.

Bekerjasama dengan Universitas Jambi menghasilkan analisis yaitu Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, Perda

ini dirasa tidak diperlukan lagi karena materi muatan baik secara prosedur dan substansial sudah dikoordinasi oleh dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta semua aturan pelaksanaannya. Secara konseptual perda ini bersifat eksklusif dan terkesan diskriminatif.

- 3) Peraturan Walikota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Gerakan Sholat Subuh Berjamaah.

Bekerjasama dengan Universitas Lampung menghasilkan analisis yaitu Perwali GSSB adalah produk hukum daerah yang melanggar asas kewenangan dan bertentangan kewenangan absout pemerintah sebagaimana di atur dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Materi muatan Perwali GSSB secara umum tidak berkoresponden, tidak koheren dan tidak konsisten dengan nilai-nilai Pancasila.

- 4) Qonun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

Bekerjasama dengan Universitas Malikkussaleh menghasilkan analisis yaitu materi muatan qonun tidak terdapat pertentangan antara materi muatan qonun dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke 2, kemanusiaan, yaitu pengakuan atas suatu harkat dan martabat manusia dengan segala hak serta kewajiban asasi yang dimiliki tiap orang.

- 5) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang.

Bekerjasama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menghasilkan analisis yaitu materi muatan Perbub ini terlalu berlebihan dan terlalu jauh menafsirkan substansi Ahmadiyah sebagai aliran yang mempunyai keyakinan/ideologi tertentu. Selain itu dari persepektif UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa agama merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat.

- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Bekerjasama dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta menghasilkan analisis yaitu secara keseluruhan perda ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi beberapa redaksi dan terminologi perlu diperbaiki karena berpotensi menimbulkan penafsiran yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga menghambat upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam diri para pendidik. Revisi dan

perbaikan meliputi dari rumusan redaksional konsideran dan rumusan beberapa pasal dari perda tersebut.

- 7) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur

Bekerjasama dengan Universitas Surabaya menghasilkan analisis yaitu Pergub ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi permodalan bagi masyarakat Jawa Timur. Pergub ini adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Hulu Hilir Agro Maritim di Jawa Timur memberikan makna bahwa produk hukum Pergub tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

- 8) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemasaran Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu.

Bekerjasama dengan Universitas Bengkulu menghasilkan analisis substansi Muatan Materi Pergub ini hanya sebagian materi yang di atur didalamnya telah mencerminkan nilai-nilai dasar kerangka bernegara yaitu nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam kelima silanya yang berkarakter ketuhanan, humanistik, demokratik, nasionalistik dan berkeadilan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

- 9) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut Perubahannya yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019.

Bekerjasama dengan Universitas Soegijapranata menghasilkan analisis yaitu secara substansi Pergub ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila baik sebagai *grundnorm*, nilai, cita hukum (*rechts-idea*) maupun landasan filosofis pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun beberapa pasal berpotensi bertentangan dengan hak konstitusional dan prinsip-prinsip HAM serta asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*).

- 10) Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21170 tanggal 13 Desember 2019 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari Itikad Ahlussunnah Wal Jamaah yang Bersumber dari Hukum Marzhab Syafiiyah.

Bekerjasama dengan Universitas Samudera Aceh menghasilkan analisis yaitu Surat Edaran Gubernur ini telah selaras dan sesuai dengan Pancasila khususnya Sila Pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini didasarkan kepada nilai kerukunan dan ketentraman yang tercipta di Aceh, sehingga keberadaan aturan hukum ini mencegah terjadi perpecahan umat dikemudian hari.

c. Wilayah III (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-NTB-NTT-Papua)

1) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur'an dalam Kabupaten Enrekang.

Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin dan menghasilkan analisis yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda Kab. Enrekang No. 5 Tahun 2005 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidaklah sesuai dengan indikator ke 2 dan 3 dari sila pertama ini, yakni:

- Peraturan perundang-undangan menjamin kebebasan dan penghormatan bagi tiap-tiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya.
- Peraturan perundang-undangan menjamin setiap orang dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya selaras dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap produk perundang-undangan yang dilahirkan haruslah menjamin penghormatan terhadap tiap-tiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan. Jika ketentuan kewajiban pandai baca Al- Qur'an dengan baik dan benar bagi yang beragama Islam dari kalangan PNS, karyawan/karyawati, murid/siswa SD, SLTP, dan SLTA, pelamar pekerjaan, calon pengantin, dan calon pejabat politik dengan beberapa ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perda Kab. Enrekang No. 5 Tahun 2005, maka perda ini pada akhirnya akan memberikan perlakuan yang diskriminatif bagi pemeluk agama Islam. Misalnya saja bagi PNS yang tidak pandai baca Al-Qur'an akan dikenakan sanksi berupa teguran sampai dengan berimplikasi pada penilaian DP3, sedangkan bagi pemeluk agama non-muslim tidak dapat dikenakan peraturan tersebut.

Belum lagi ketentuan bagi orang-orang Islam yang menjadi calon atas suatu jabatan politis diwajibkan untuk pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan dapat digugurkan jika tidak pandai. Ketentuan ini pastinya

dapat melanggengkan orang non-muslim yang menjadi calon karena tidak ada kewajiban bagi mereka untuk pandai membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

2) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Ramadan.

Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan menghasilkan analisis yaitu dalam Pasal 2 diatur tentang larangan setiap orang untuk “membuka warung, menjual makanan dan minuman serta sejenisnya disiang hari pada Bulan Ramadhan.” Bahkan lebih lanjut diatur bahwa setiap orang dilarang untuk “makan, minum dan atau merokok di siang hari pada bulan Ramadhan di tempat-tempat umum.” Tidak cukup hanya memberi larangan terhadap hak-hak fundamental warga negara untuk makan, minum dan berniaga, Perda ini lebih lanjut memberi larangan untuk “ membuka kegiatan tempat hiburan dan permainan selama bulan Ramadhan pada siang atau malam hari yang mengganggu ketentraman ibadah Ramadhan bagi kaum muslimin.”

Pasal 2 memberi penegasan bahwa semua larangan-larangan diatas dimaksudkan untuk menjaga ketentraman ibadah di bulan Ramadan bagi kaum muslimin. Hal tersebut jelas bermakna bahwa hukum negara dibuat untuk mengayomi satu agama saja. Praktek ini kerap disebut sebagai favoritism, dimana negara/pemerintah hanya memberi kemudahan dan kenyamanan kepada kelompok mayoritas semata.

Pasal 2 dan Pasal 3 yang memberi batasan waktu kapan warga negara dapat membuka restoran, warung makan, menjual makanan, minuman dan sejenisnya juga memberi pembatasan berniaga kepada warga negara secara tidak proporsional dan berpotensi melanggar hak dan kebebasan. Larangan ini berlebihan (tidak proporsional) karena abai terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan dan minum. Larangan ini tidak hanya mencederai hak-hak warga negara non-Muslim, namun juga kelompok rentan semisal perempuan dan anak, yang berpuasa karena berhalangan (untuk perempuan) dan belum cukup umur/tidak wajib berpuasa untuk anak-anak. Pasal ini secara jelas bertentangan dengan rumusan ICCPR yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menyatakan “... *persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group.*”

3) Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan Manokwari Daerah Injil.

Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dan menghasilkan analisis yaitu pelaksanaan Perda ini didasari oleh asas yang telah tercantum pada Pasal 2, sedangkan untuk penjelasan terhadap pasal-pasal tersebut tertera pada Pasal 1 angka 17 – 25.

Indikator Pancasila Indikator 1. Peraturan Perundang-undangan menjamin bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Penjelasan : Melalui Pasal 1 Angka 18, Perda ini mencerminkan nilai yang terkandung dalam indikator tersebut. Terutama pada Angka 18 yang menyatakan bahwa dalam kebenaran merupakan prinsip hidup yang mengacu pada firman Allah, dengan ini mempertimbangkan bahwa masyarakat mengakui Ke-Esa-an dari Allah yang dijadikan acuan pada prinsip-prinsip hidup.

Indikator 4. Peraturan Perundang-undangan menjamin setiap orang dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya selaras dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penjelasan: Indikator 4. Dengan mempertimbangkan bahwa Perda ini merupakan suatu penataan Manokwari sebagai suatu daerah injil maka pelaksanaannya dalam penataan daerah injil harus selaras dengan aspek kebangsaan yang tertera pada Pasal 1 Angka 20.

Indikator 5. Peraturan Perundang-undangan menjamin penghormatan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaan.

Penjelasan: Indikator 5. Melalui Pasal 1 Angka 23 dijaminnya suatu penghormatan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya dalam bentuk upaya non diskriminasi.

4) Peraturan Wali Kota Bima Nomor 71 Tahun 2019 tentang Jumat Khusyu.

Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram dan menghasilkan analisis yaitu dari segi materi muatan Perwal Kota Bima No. 71 Tahun 2019 tentang Jumat Khusyuk menunjukkan bahwa ada beberapa ketentuan Perwal tersebut yang belum berkesesuaian dengan indikator nilai Pancasila. "Pelaksanaan Jumat Khusyuk berlaku untuk seluruh masyarakat di wilayah Kota Bima". Keberadaan perwal tersebut berlaku untuk umat Islam, tetapi di sisi lain masyarakat yang non Islam harus tunduk dan tidak boleh melintas pada saat pelaksanaan shalat Jumat. Pasal 4 ini tidak sesuai dengan indikator sila-sila dalam Pancasila yang menyatakan: peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan semua golongan karena negara Indonesia

bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan tetapi semua yang bertanah air Indonesia.

5) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa

Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan menghasilkan analisis yaitu dihubungkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka materi muatan yang terkandung dalam Perda Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa tampak bahwa materi muatan Perda Kabupaten Majene tentang Pemerintah Desa tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Memiliki kekeliruan karena terdapat frasa "*Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Majene sedangkan judul Perda ialah Pemerinta Desa*."

Pada pasal 7 idealnya merupakan bunyi pasal yang menjadi materi muatan UU bukan perda karena terdapat perintah untuk mengatur penggabungan desa dengan perda.

Pada Pasal 9 ayat 2 Pasal idealnya merupakan bunyi pasal yang menjadi materi muatan UU bukan perda karena terdapat perintah mengatur lebih lanjut dengan Perda.

Pada Pasal 10 ayat 4 idealnya merupakan bunyi pasal yang menjadi materi muatan UU bukan perda karena terdapat perintah mengatur lebih lanjut dengan Perda.

6) Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan menghasilkan analisis yaitu dalam, pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 isinya bertentangan dengan sila ke 2 indikator ke IV karna dalam ketentuan tersebut tidak mengatur eksistensi orang yang memiliki kemampuan berbeda (difabel). Baik dalam hal menggunakan zebra cross maupun penggunaan halte. Hal tersebut tidak diatur secara khusus untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, lansia ataupun anak-anak yang seharusnya tidak dapat disamakan dengan orang pada umumnya. Analisis:

- ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Perda tersebut tidak memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk mengembangkan dirinya

dengan menciptakan kendaraan angkutan, merakit dan mengoprasikannya sebagai hasil proses cipta, karya dan karsa untuk meningkatkan kualitas hidupnya yang di jamin dalam UUD Tahun 1945 pasal 28 C ayat (1).

- ketentuan ayat (2) yang menimbulkan ketidakadilan dikarenakan terhadap hewan ternak dapat dilakukan pemotongannya diluar rumah pemotongan hewan karena keperluan peribadatan dan upacara-upacara adat, sedangkan terhadap unggas tidak boleh. Dari ketentuan dalam Pasal 28 tersebut kalau dikaitkan dengan ketentuan Sila ke V Indikator ke 4 dan Indikator ke 5.
- dengan berlandaskan pada Indikator Sila ke 5 dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 55 yang terdiri dari 5 ayat tersebut menimbulkan ketidakadilan antara orang muslim dengan non muslim dikarenakan larangan dan pengaturan bagi orang muslim untuk membuka restoran , rumah makan , warung, kedai, depot , café rombongan atau sejenisnya yang seharusnya PERDA Nomor 9 Tahun 2018 sebagai peraturan perundang-undangan berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat baik lahir maupun batin.

Kilas peristiwa strategis analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila.



Penyusunan Indikator Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan



Pembentukan Tim Narasumber Pengkajian Peraturan Perundang-Undang Tahun 2020



Paparan Hasil Kajian, Analisis dan Rekomendasi Peraturan Perundang-Undang Tahun 2020



Perkembangan implementasi *Quick Win* Silaras Tahun 2020



Pembentukan Tim Narasumber Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020

A.2.2. Advokasi PIP

Ruang lingkup kegiatan advokasi yang dilakukan oleh BPIP adalah meliputi : advokasi preventif, pendampingan, dan apresiasi PIP. Preventif PIP adalah kegiatan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Pendampingan merupakan kegiatan dalam bentuk mendampingi penanganan masalah dan kendala dalam PIP. Apresiasi merupakan pemberian penghargaan PIP sebagai bentuk Advokasi positif untuk mempengaruhi pandangan terhadap Ideologi Pancasila menjadi lebih baik.

Capaian kinerja advokasi PIP tahun 2020, adalah :

1. Penyusunan dan pelaksanaan preventif PIP.
2. Penyusunan dan pelaksanaan pendampingan PIP.
3. Penyusunan dan pelaksanaan apresiasi PIP.

capaian indikator kinerja utama keluaran advokasi PIP, yaitu :

Indikator Kegiatan 2.2

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penyusunan dan pelaksanaan advokasi PIP			
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	KET
Jumlah dokumen advokasi preventif PIP yang diselesaikan	1 Dok	1 Dok	 preventif (100%)
Jumlah dokumen Pendampingan yang diselesaikan	1 Dok	1 Dok	 pendampingan (100%)
Jumlah dokumen Apresiasi yang diselesaikan	1 Dok	1 Dok	 apresiasi (100%)

Tabel 9. Capaian IKU advokasi PIP

Kegiatan-kegiatan strategis yang telah mendukung capaian Advokasi PIP, yaitu :

a. Ruang lingkup preventif

- 1) Koordinasi penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan para Akademisi. Fokus pembahasan pada bab UMKM yang mana terdapat beberapa poin regulasi yang ditelaah dan disampaikan yaitu Pengaturan Penyederhanaan Perizinan, Pengaturan Persyaratan Investasi, dan Kemudahan dan Perlindungan UMKM.

- 2) Koordinasi Pembentukan BRIN (Badan Riset Dan Inovasi Nasional)

– Internalisasi Pembentukan Badan Baru agar sesuai dengan Ideologi Pancasila.

- Pemberian Rekomendasi dan Masukan kepada Pemerintah dan DPR terkait rencana pembentukan BRIN agar sesuai dengan Ideologi Pancasila.
 - Pelaksanaan Advokasi dalam rangka Pencegahan agar Pembentukan Badan sesuai dengan ideologi Pancasila baik dasar hukum pembentukannya maupun Organisasi BRIN itu sendiri.
- 3) Seminar Daring Pancasila dalam Tindakan – Upaya Masyarakat dalam Meningkatkan Kedaulatan Pangan di Masa Pandemi Covid-19.
- Mencegah perpecahan di masyarakat dikarenakan faktor ekonomi.
 - Menumbuhkan semangat kemandirian dalam rangka menghadapi krisis ekonomi di masa Pandemi.
 - Mendorong Pancasila sebagai pelopor ketahanan pangan melalui Pancasila dalam tindakan.
- 4) Seminar Daring Membumikan Pancasila - Membangun Ke-Indonesiaan dan Memperbarui Hukum: Bersama Menuju Normal Baru.
- Memperbarui Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan dinamika yang ada pada masa pandemi.
 - Mencegah produk hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
 - Memberikan masukan kepada para Akademisi dan pemangku kepentingan dalam menyusun produk hukum agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- 5) Seminar Pancasila - Penanaman Nilai Pancasila dalam Mencegah Sikap Intoleran dan Radikalisme pada Generasi Muda
- Persamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak terkait dengan Paham Rasikalisme dan Intoleransi yang mengancam keutuhan Bangsa.
 - Mencegah dan menekan berkembangnya Paham Radikalisme dan Intoleransi di lingkungan Universitas dan kaum milenial dalam mewujudkan kaum milenial yang berpancasila.
 - Memberikan rekomendasi penanganan Paham Radikalisme dan Intoleransi di kalangan milenial melalui Pancasila dalam Tindakan (perlunya figur yang mengimplementasikan Pancasila dalam tindakan).
- 6) Seminar Nasional - Pencegahan Politik Identitas dan Politik Uang dalam Rangka Menuju Pemilu yang Sesuai dengan Demokrasi Pancasila.

- Persamaan Pola Pikir dan Pola Sikap dan Pola Tindak utk Mencegah Politik Identitas dan Politik Uang dalam Pemilu 2020.
- Politik Uang dan Politik Identitas merupakan sikap yang tidak sesuai dengan Demokrasi Pancasila sehingga perlu diberantas bersama.
- Pemahaman bersama dan penanganan bersama memberantas Politik Uang dan Politik Identitas melalui pendidikan dan pengetahuan melalui pendidikan tentang Pemilu.
- BPIP menyerukan STOP terkait Politik Identitas dan Politik Uang.

7) Koordinasi Sinkronisasi Preventif Pembinaan Ideologi.

- Mapping permasalahan terkait pencegahan pembinaan ideologi Pancasila.
- Sinkronisasi program PIP dengan Pemerintah Daerah agar tepat sasaran.
- Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait di daerah dalam rangka pencegahan paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

8) Seminar Nasional - Eksistensi Pancasila dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa dan Intoleransi Melalui Bela Negara.

- Pencegahan terkait hilangnya semangat Bela Negara dan Cinta Tanah air di kalangan milenial.
- Persamaan pemahaman bahwa tidak hanya pendidikan saja yang perlu diutamakan melainkan semangat Bela Negara juga perlu ditanamkan sejak dini dan di bangku Pendidikan.
- Pemberian rekomendasi tentang perlu dimasukkannya materi tentang Bela Negara pada pelaksanaan pendidikan formal.

b. Ruang lingkup pendampingan

1) Pendampingan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri.

- Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah dan FH UNDIP.
- Internalisasi, sosialisasi dan enkulturasi – stop perkawinan anak, perkawinan siri dan perkawinan kontrak, perkawinan poligami terhadap anak.

- Rekomendasi dan sosialisasi kepada Kementerian Agama RI penting meningkatkan pelibatan tokoh agama untuk mencegah maraknya praktik perkawinan siri.
 - Rekomendasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI perlu mengembangkan program pencegahan nikah siri berbasis masyarakat.
 - Rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk pentingnya mengoptimalkan penguatan pendidikan keluarga bagi kelompok rentan nikah siri.
 - Mengadvokasi Pemerintah Daerah agar melakukan pencegahan secara intensif dan melakukan pemberdayaan masyarakat yang ramah anak dan perempuan, agar tidak menjadi korban dengan modus nikah siri.
 - BPIP mengawal dan memberikan pendampingan terhadap penguatan nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat guna melindungi anak dari eksploitasi seksual melalui nikah siri.
- 2) Pendampingan Permasalahan Siswa Tidak Hormat Kepada Bendera Merah Putih & Tidak Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Dalam Upacara Bendera.
- Bekerjasama dengan SMKN 4 Malang, Dinas Pendidikan dan Para Ahli dengan target peserta SMKN 4 Malang dan seluruh tenaga Pendidikan di Kota Malang.
 - Mengadvokasi pihak SMKN 4 Malang terkait dengan peristiwa yang terjadi yaitu adanya seorang siswi yang tidak berkenan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan tidak mau memberikan hormat kepada Bendera Negara Indonesia.
 - Sosialisasi kepada tenaga pendidik dan kepala sekolah di Kota Malang terkait penguatan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme pada siswa dan seluruh unsur Pendidikan.
 - Rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Tokoh Agama untuk melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme pada siswa dan seluruh unsur Pendidikan.
- 3) Pendampingan Pancasila, Moderasi Dan Kerukunan Umat Beragama.
- Bekerjasama dengan IAIN Curup Bengkulu dengan target peserta Pemda Bengkulu dan Masyarakat.
 - Melakukan advokasi dan memupuk tali silaturahmi dengan melakukan sosialisasi, memberikan pencerahan bagi masyarakat untuk memahami

makna dari nilai-nilai Pancasila serta mengenang arti penting sejarah kemerdekaan.

- Pemerintah melalui kerukunan umat beragama bermitra dengan lembaga terkait untuk menjaga kerukunan umat beragama.
- Mengapresiasi Desa Sindang Jati sebagai desa percontohan dalam kategori moderasi yang berkebangsaan. Penghargaan ini kita berikan sebagai wujud pbumian kerukunan umat beragama.
- Sosialisasi untuk mengajak masyarakat memaknai arti Moderasi yakni menyikapi agama secara moderat, tidak secara ekstrim dan mengajak masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan berbudaya.

4) Pendampingan Advokasi Positif : Pembekalan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Pegiat Kampung.

- Bekerjasama dengan Ikon Pancasila tahun 2017 Bambang Irianto dengan target peserta Pemda Lumajang, Masyarakat.
- Kegiatan Advokasi Positif BPIP bertajuk Pembekalan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Pegiat Kampung di Kabupaten Lumajang dan Sekitarnya diselenggarakan di Komplek Kantor Pemerintahan Kabupaten Lumajang Gedung Narariya Lantai III dan di Kampung Keramba, Desa Ditotrunan, Lumajang.
- BPIP memberikan advokasi positif kepada para pegiat kampung di Lumajang dan sekitarnya. Peran para pegiat kampung ini kita berikan apresiasi agar mereka bisa menjadi contoh para masyarakat di sekitarnya dan Negara mengakui kiprah mereka dengan memberikan sertifikat.
- Pendampingan advokasi positif BPIP terhadap masyarakat ini dengan Rekomendasi: Ikon Pancasila 2017 yaitu Bambang Irianto ke kampung-kampung tematik ini. Di mana, Bambang Irianto yang sudah lebih dulu membangun kampung tematik di Malang, ikut membina pendirian kampung-kampung tematik di sejumlah daerah seperti di Lumajang dan sekitarnya.

5) Advokasi Moderasi Dan Kerukunan Umat Beragama

- Bekerjasama dengan Pemda Minahasa Utara dan para Tokoh Lintas Agama dengan target peserta Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Pemerintah.
- Mengadvokasi masyarakat di Minahasa Utara dengan memaknai hubungan antar agama adalah keadaan hubungan umat beragama yang

dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai dalam pengamalan dalam berkehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

- Mengapresiasi keberhasilan masyarakat Minahasa Utara dalam menyelesaikan konflik khususnya dengan pendirian rumah ibadah dan toleransi moderasi dan beragama sangat baik.
- 6) Pendampingan Pembangunan Karakter Dan Ideologi Pancasila, Moderasi Dan Keberagaman Umat.
- Bekerjasama dengan Universitas Trunojoyo Bangkalan dan Pemda dengan target peserta Mahasiswa, Organisasi Sosial Masyarakat, Pemda dan Masyarakat.
 - Mengadvokasi para mahasiswa terkait pemahaman Pancasila saat ini untuk menumbuhkan keteladanan yang harus diambil mahasiswa dari kehidupan dengan mengarusutamakan Pancasila.
 - Mengadvokasi mahasiswa terkait akses pendidikan yang harus dimulai saat ini dengan mengajarkan kepada mahasiswa tentang Ideologi Pancasila, dimana saat ini masih belum ada di kurikulum mata kuliah mengenai pemahaman Pancasila yang wajib diketahui mahasiswa.
 - Sosialisasi peran BPIP untuk mengawal ideologi Pancasila di Indonesia.
- 7) Advokasi Positif : Menggali Nilai-Nilai Pancasila Dari Bumi Bung Karno
- Bekerjasama dengan Pemda Kota Blitar dengan target peserta Pemda dan Masyarakat serta Organisasi Sosial Masyarakat
 - Mengapresiasi Pemda Blitar Salah satu alasan mendapatkan penghargaan adalah lingkungan masyarakat dan Pemda Blitar telah melakukan aktivitas nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Blitar sebagai salah satu mitra BPIP dan akan menjadi contoh bagi daerah lain.
 - Penghargaan kepada Kota Blitar yang menjadi pelopor peringatan hari lahir Pancasila. Peringatan tersebut Kota Blitar menggelar tradisi Grebeg Pancasila sejak tahun 2000. Grebeg Pancasila sendiri menjadi agenda rutin Pemkot Blitar dalam memperingati hari lahir Pancasila setiap 1 Juni.
 - Mengadvokasi Kota Blitar dengan kampung-kampung tematik yang mendapat penghargaan sebagai Kampung Penggerak Pancasila dari BPIP.

8) Advokasi Kelompok Rentan (Perempuan Dan Anak) Sebagai Korban Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial.

- Bekerjasama dengan Pemda kota Singkawang, Kota Pontianak, dan Universitas Tanjungpura.
- Mengadvokasi masyarakat di Kota Singkawang dan Pontianak terkait pentingnya perlindungan terhadap hak anak dan perempuan khususnya tentang bahaya perdagangan orang dan penguatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.
- Melakukan pendampingan ke *shelter-shelter* calon buruh migran yang rentan dilakukan *trafficking*.
- Mengadvokasi dan mengapresiasi Pemda Singkawang yang telah memiliki Perda Kota Singkawang No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, Surat Keputusan Walikota Singkawang No. 474.24/114/DSPPPA.PP-A Tahun 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Agen Perubahan, Pencegahan dan Penangan TPPO sebagai langkah perlindungan terhadap masyarakat dan bentuk apresiasi terhadap implementasi Pancasila.

9) Advokasi Positif Keragaman, Toleransi Dan Ke-Indonesiaan.

- Bekerjasama dengan Komnas HAM.
- Mengadvokasi masyarakat tentang pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam upaya penghormatan HAM di Indonesia.
- Mengadvokasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam implementasi perlindungan HAM.

c. Ruang lingkup apresiasi

1) Monitoring Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2019 “Indra Sjafri”

- Koordinasi dengan PSSI untuk melakukan kegiatan monitoring sekaligus perekaman video bersama Ikon Prestasi Pancasila tahun 2019 “Indra Syafri”.
- Untuk melakukan monitoring terhadap Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2019 atas nama Indra Syafri dalam rangka mendokumentasikan kegiatan Ikon Prestasi 2019.
- Menjadikan hasil monitoring dan video motivasi dan inspirasi sebagai salah satu sarana dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

2) Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Pembentukan Ikon Prestasi Pancasila 2020

- Bekerjasama dengan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2017 dan 2019. Targetnya adalah memperoleh masukan dari Ikon Pancasila 2017 dan 2019 atas problematika pbumian ideologi pancasila di masyarakat dan saran atas penyelenggaraan penganugerahan apresiasi pancasila melalui pembentukan Ikon Prestasi Pancasila 2020. Diskusi dan monitoring dengan Ikon Pancasila 2017 dan 2019 atas problematika pengarusutamaan pancasila di masyarakat.
- Monitoring dengan Ikon Prestasi Pancasila 2017 dan 2019 atas capaian pengarusutamaan pancasila di masyarakat selama menjadi Ikon Prestasi Pancasila.
- Koordinasi pembahasan Pembentukan Ikon Prestasi Pancasila 2020 beserta teknis pelaksanaan kegiatan, syarat kandidat dan indikator pencapaiannya.
- Memperoleh skema pembentukan Ikon Prestasi Pancasila 2020.

3) Webinar dengan Ikon Pancasila Bidang Olahraga

- Bekerjasama dengan Ikon Prestasi Pancasila Bidang Olahraga. Targetnya adalah memperoleh masukan dari Ikon Pancasila Bidang Olahraga atas penyelenggaraan penganugerahan apresiasi pancasila melalui pembentukan Ikon Prestasi Pancasila 2020. Kegiatan ini menghasilkan:
- Monitoring dengan Ikon Pancasila bidang Olahraga atas capaian pengarusutamaan pancasila di masyarakat selama menjadi Ikon Prestasi Pancasila.
- Rapat Koordinasi pembahasan Pembentukan Ikon Prestasi Pancasila 2020 beserta teknis pelaksanaan kegiatan, syarat kandidat dan indikator pencapaiannya khususnya di bidang Olahraga.

4) Webinar dengan Ikon Pancasila Bidang Seni dan Budaya

- Bekerjasama dengan Ikon Prestasi Pancasila Bidang Seni dan Budaya. Target kegiatan Diskusi dan Pemerolehan Masukan dai Ikon Pancasila Bidang Seni dan Budaya atas penyelenggaraan penganugerahan apresiasi pancasila melalui pembentukan Ikon Prestasi Pancasila 2020.
- Monitoring dengan Ikon Pancasila bidang Seni dan Budaya atas capaian pengarusutamaan pancasila di masyarakat selama menjadi Ikon Prestasi Pancasila.

- Rapat Koordinasi pembahasan Pembentukan Ikon Prestasi Pancasila 2020 beserta pelaksanaan kegiatan, syarat kandidat dan indikator pencapaiannya khususnya di bidang Seni dan Budaya.
- 5) Penunjukan Tim Pelaksana Penyediaan data kandidat Penerima Ikon Prestasi Pancasila 2020.
- Bekerjasama dengan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika guna penyediaan Data kandidat penerima penghargaan Ikon Prestasi Pancasila.
 - Menyediakan data kandidat penghargaan ikon prestasi pancasila 2020 sebagai bentuk sinergitas dengan berbagai pihak termasuk perkumpulan atau aliansi.
 - Aliansi Nasional Bhineka tunggal Ika Mencari dan mengumpulkan data kandidat calon Ikon Prestasi pancasila 2020.
 - Aliansi Nasional Bhineka tunggal Ika Menelusur rekam jejak kandidat calon.
 - Aliansi Nasional Bhineka tunggal Ika melakukan pendampingan calon kandidat Ikon dan Ikon terpilih.
 - koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan Mengkomunikasikan teknis pelaksanaan kegiatan kepada 75 Ikon Prestasi Pancasila sebagai penerima penghargaan.
- 6) Penganugerahan Apresiasi Prestasi Pancasila 2020
- Ikon Prestasi Pancasila 2020 terpilih, 29 Agustus 2020, di stasiun TVRI dan media sosial Youtube. Target pemberian anugerah apresiasi pancasila 2020 dan mendokumentasikan serta menyiarkannya pada stasiun Televisi dan media sosial Youtube sebagai motivasi dan inspirasi bagi masyarakat dalam membumikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
 - Kerjasama dengan TVRI sebagai penyelenggara penganugerahan Apresiasi Prestasi Pancasila 2020.
 - Mendokumentasikan serta menyiarkan kegiatan penganugerahan Apresiasi Prestasi pancasila 2020 pada stasiun Televisi dan media sosial Youtube.
- 7) Koordinasi penerima Ikon Prestasi Pancasila 2020
- Target pengarusutamaan ideologi pancasila dengan Ikon Prestasi 2020, mendapatkan masukan dan penindaklanjutan pengarusutamaan Pancasila.

- Melakukan Diskusi dengan Ikon Prestasi 2020 terpilih atas problematika pengimplementasian nilai nilai Pancasila.
- Melakukan nota kesepahaman dalam rangka sosialisasi pengimplementasian nilai nilai pancasila di masyarakat.
- Mendapatkan saran dan masukan atas kegiatan lanjutan pengarusutamaan dan pengimplementasian nilai nilai Pancasila.

Kilas peristiwa strategis advokasi PJP



Advokasi nilai-nilai Pancasila



Advokasi positif kepada Pegiat Kampung Tematik



Pendampingan Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Sikap Intoleran dan Paham Radikalisme Pada Generasi Milenial



Pendampingan penanaman nilai-nilai Pancasila dengan Peran Pejabat Publik dalam tindakan efektif untuk membumikan Pancasila



Keberlanjutan apresiasi laku Pancasila/Ikon Pancasila

A.2.3. Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dan Rekomendasi Regulasi

Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum daerah berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dengan demikian semua Peraturan Perundang-undangan baik yang merupakan produk Lembaga Legislatif maupun Eksekutif, tidak boleh bertentangan dan harus berdasar pada Pancasila. Pasal 2 dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara. Konsekuensi logis diantarnya asas hierarkhi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah harus sesuai dan selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Tahapan yang harus dilalui dalam lahirnya suatu kebijakan atau produk perundang-undangan, adalah Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan atau Penetapan, Pengundangan dan Evaluasi, dimana nilai-nilai Pancasila sudah mulai diinternalisasi sejak awal sampai pada tahap implementasi.

Rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tidak hanya untuk menyelaraskan nilai-nilai Pancasila dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum daerah, melainkan juga untuk mewujudkan hukum yang berkualitas, memuat nilai-nilai budaya hidup dalam masyarakat, serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan global untuk kesejahteraan masyarakat sehingga dapat terwujud harapan dan cita-cita bangsa.

Capaian kinerja internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan rekomendasi regulasi tahun 2020, adalah:

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rekomendasi Regulasi tingkat pusat (wilayah I).
2. Penyusunan dan Pelaksanaan Rekomendasi Regulasi pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali (wilayah II/bagian barat Indonesia).

3. Penyusunan dan Pelaksanaan Rekomendasi Regulasi pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua (wilayah III/bagian timur Indonesia).
4. Penyusunan dan Pelaksanaan pelembagaan tingkat pusat (wilayah I).
5. Penyusunan dan Pelaksanaan pelembagaan pemerintah daerah wilayah II/bagian barat Indonesia).
6. Penyusunan dan Pelaksanaan pelembagaan pemerintah daerah (wilayah III/bagian timur Indonesia).

Capaian Indikator kinerja utama keluaran internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan Rekomendasi Regulasi tahun 2020, yaitu :

Indikator Kegiatan 2.3			
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam hukum Nasional			
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	KET
Jumlah dokumen hasil internalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan Perda yang diselesaikan	3 Dokumen	3 Dokumen	 Pelembagaan (100%)
Jumlah dokumen rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan	3 Dokumen	3 Dokumen	 Pengawasan regulasi (100%)

Tabel 10. Capaian IKU internalisasi & institusionalisasi Pancasila, Rekomendasi Regulasi

Kegiatan-kegiatan strategis yang telah mendukung capaian internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan Rekomendasi Regulasi, yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Rekomendasi Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila

Wilayah I (Pemerintah Pusat)

- 1) Rekomendasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila Dan Konstitusi Universitas Jember. Hasil rekomendasi adalah bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 tahun 2019 yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilakukan

penyesuaian terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 18 huruf g, Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2) dan (3), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 88 ayat (1), serta Pasal 89. Beberapa pasal juga dapat diselaraskan dengan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012

- 2) Rekomendasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Hasil rekomendasi adalah bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU No. 11 Tahun 2012 yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dan revisi terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (2), Pasal 19 ayat 1 *jo.* Pasal 97, Pasal 21 ayat (1), Pasal 28, Pasal 62 ayat (1) dan (2), Pasal 80 ayat (1) dan (4), Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (1), serta Pasal 107.

- 3) Rekomendasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Hasil rekomendasi adalah bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU No. 17 Tahun 2019 yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dan revisi terhadap Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 51, Pasal 58 ayat (1), serta Pasal 59.

- 4) Rekomendasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hasil rekomendasi adalah bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU No. 24 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dan revisi terhadap bagian Menimbang, Mengingat, Pasal 1, Pasal 7 ayat (3), Pasal 48, serta Pasal 54 ayat (1)

- 5) Rekomendasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Bekerjasama dengan Pusat kajian Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hasil rekomendasi adalah bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Salah satu pasal yang bertentangan adalah Pasal 50 ayat

(3). Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dan revisi terhadap Pasal 50 ayat (3) khususnya dengan Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012.

- 6) Rekomendasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang PNPS Pencegahan Penodaan Agama

Bekerjasama dengan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Hasil rekomendasi adalah UU No. 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama harus tetap dipertahankan dalam NKRI. Selain itu, juga harus dilakukan pembaharuan dengan tetap mempertahankan norma-norma yang ada di dalamnya

- 7) Rekomendasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Hasil rekomendasi adalah bahwa terdapat beberapa pasal di dalam UU No. 12 Tahun 1995. Beberapa pasal yang perlu disesuaikan dan direvisi substansinya agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah Pasal 1 angka 7, Pasal 3, Pasal 5 huruf d, serta Pasal 47.

- 8) Rekomendasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hasil rekomendasi adalah bahwa Pasal 25 – Pasal 66 mengenai Pemerintahan Desa sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga harus tetap dipertahankan. Sementara itu, Pasal 95 – Pasal 111 mengenai Lembaga Adat dan Desa adat, Pasal 87 – Pasal 90 mengenai Badan Usaha Milik Desa, serta Pasal 67 – Pasal 70 dan Pasal 110 mengenai Peraturan Desa pada dasarnya juga sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, akan tetapi diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- 9) Rekomendasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada. Hasil rekomendasi adalah: (i) perlu dibentuk beberapa regulasi turunan undang-undang penanggulangan bencana yaitu perpres tentang status dan tingkatan bencana dan aturan teknis lainnya mengenai analisa resiko bencana dan standar pelayanan minimum; (ii) perlu disusun kerangka pembiayaan risiko bencana yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendanaan penanggulangan bencana dalam jumlah besar dan mengubah pengelolaan pembiayaan risiko bencana ke dalam skema investasi sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah; (iii) perlu perubahan

skema mekanisme penanggulangan bencana lebih cepat, lebih terencana dan tepat sasaran; (iv) perlu upaya mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran masyarakat tentang bencana melalui sosialisasi terus menerus dan berkelanjutan; (v) perlu adanya koordinasi antar lembaga yang mendapat mandat penanggulangan bencana.

Wilayah II (Sumatera-Jawa-Bali)

- 1) Rekomendasi Terhadap Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 Tanggal 13 Desember 2019 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah yang Bersumber dari Hukum Mazhab Syafi'iyah

Bekerjasama dengan Universitas Samudra Aceh. Hasil rekomendasi adalah bahwa SE Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tanggal 13 Desember tahun 2019 selaras dan sesuai dengan Butir 4 Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, surat edaran ini perlu untuk dipertahankan.

- 2) Rekomendasi Terhadap Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Bekerjasama dengan Universitas Malikussaleh. Hasil rekomendasi adalah bahwa Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, keberadaan qanun ini harus dipertahankan.

- 3) Rekomendasi Terhadap Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemasaran Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu

Bekerjasama dengan Universitas Bengkulu. Hasil rekomendasi adalah bahwa pengawasan pemasaran dalam Pergub ini menunjukkan adanya kelemahan sehingga membuka celah kepada adanya kepentingan pengusaha. Pergub ini seharusnya memperhatikan bahwa wilayah Provinsi Bengkulu bukanlah mengacu kepada 1 golongan saja. Pengawasan pemasaran bukanlah meliputi masalah kuantitas hasil pertambangan saja, tetapi juga termasuk kualitas hasil dan juga terjaminnya lingkungan pasca kegiatan pertambangan. Apabila pengawasan sudah dijamin dengan baik maka Pergub bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang diamanahkan oleh Pancasila.

- 4) Rekomendasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Quran dan Mendirikan Sholat Bagi Anak Usia Sekolah yang Beragama Islam

Bekerjasama dengan Universitas Jambi. Hasil rekomendasi adalah bahwa seharusnya Peraturan Daerah ini dicabut, karena tidak mengandung nilai nilai nasionalisme dan jiwa kebangsaan. Perda ini juga berpotensi menimbulkan sifat diskriminatif, oleh karenanya Perda ini harus dicabut.

- 5) Rekomendasi Terhadap Peraturan Walikota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Gerakan Sholat Subuh Berjamaah

Bekerjasama dengan Universitas Lampung. Hasil rekomendasi adalah bahwa seharusnya Peraturan Daerah ini dicabut, karena bersifat diskriminatif yang artinya bertentangan dengan nilai persatuan dan keadilan. Selain itu, perda ini juga bertentangan dengan asas materi muatan berupa asas Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kebangsaan dan kenusantaraan. Perda ini juga memuat ketentuan yang melebihi kewenangan yang boleh diatur oleh pemda yakni mengatur mengenai agama.

- 6) Rekomendasi Terhadap Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang

Bekerjasama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil rekomendasi adalah bahwa mendefinisikan frasa “Ahmadiyah” sebagai sebuah ideologi adalah sesuatu yang berlebihan. Perda ini telah mengatur substansi yang tidak sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, yaitu menyangkut urusan agama. Dengan demikian, perlu dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap perda ini.

- 7) Rekomendasi Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah

Bekerjasama dengan Universitas Katolik Soegijapranata sebagai pengkaji rekomendasi. Hasil rekomendasi adalah bahwa Perda tersebut dapat digunakan sebagai sarana yang lebih efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam diri para peserta didik di wilayah provinsi Jawa Tengah.

- 8) Rekomendasi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Bekerjasama dengan Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta sebagai pengkaji rekomendasi. Hasil rekomendasi adalah bahwa Perda tersebut akan dapat digunakan sebagai sarana yang lebih efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam diri para peserta didik di wilayah provinsi Jawa Tengah.

- 9) Rekomendasi Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur

Bekerjasama dengan Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta sebagai pengkaji rekomendasi. Hasil rekomendasi adalah bahwa secara umum, telah sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangundangan lain yang secara khusus mengatur tentang pendidikan. Tidak dimasukkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Meski demikian, Pergub ini memiliki potensi melanggar Sila ke 1 butir 6, Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8 Sila ke-3 butir 5, butir 6, butir 8. Sila ke-4 butir 1, butir 5. Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 3, butir 6 butir 7 dan butir 8.

- 10) Rekomendasi Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender

Bekerjasama dengan Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta. Hasil rekomendasi adalah bahwa tidak ditemukan norma yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila/indikator nilai-nilai Pancasila. Rekomendasi yang diusulkan hampir secara keseluruhan menyangkut perlunya disiapkan perangkat peraturan turunan supaya Peraturan Daerah ini dapat secara efektif dilaksanakan utamanya terkait dengan anggaran berperspektif gender dengan sarana prasarana yang ada. Dalam pelaksanaan Perda ini utamanya dalam peraturan turunan harus tetap memperhatikan adanya keadilan gender sebagai wujud dari nilai-nilai persatuan, keadilan dan perikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender masih sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan tetap dapat dilaksanakan.

Wilayah III (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-NTB-NTT-Papua)

- 1) Rekomendasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Bekerjasama dengan Universitas Tanjung Pura sebagai pengkaji rekomendasi. Hasil rekomendasi yang dihasilkan adalah bahwa beberapa pasal dalam perda ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga perlu dilakukan revisi atau perbaikan.

- 2) Rekomendasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Ramadan

Bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat. Hasil rekomendasi adalah bahwa beberapa pasal dalam perda ini yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga perlu dilakukan revisi atau perbaikan, bahkan jika dimungkinkan perda ini dapat dicabut.

- 3) Penyusunan Rekomendasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pandai Baca Al Qur'an dalam Kabupaten Enrekang

Bekerjasama dengan Universitas Universitas Hasanuddin. Hasil rekomendasi adalah bahwa perda ini harus dicabut atau dihapus karena perda ini bernuansa diskriminatif serta sarat akan pembedaan suku, agama, ras dan golongan.

- 4) Penyusunan Rekomendasi Terhadap Peraturan Walikota Bima Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Jumat Khusus

Bekerjasama dengan Universitas Universitas Mataram. Hasil rekomendasi adalah bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Walikota Bima No. 71 Tahun 2019 tentang Jumat Khusus tidak berkesesuaian dengan nilai dasar Pancasila yakni Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (3), dan Pasal 11 ayat (1) huruf a. Oleh karena itu, perwalkot ini harus segera dicabut, atau setidaknya harus direvisi. Perwalkot bersifat egosentris keagamaan karena memberlakukan mengakomodasi kepentingan satu golongan tertentu dengan mewajibkan seluruh golongan untuk tunduk pada ketentuan ini, bahkan juga memberlakukan sanksi bagi semua pelanggar.

- 5) Penyusunan Rekomendasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan Manokwari Daerah Injil

Bekerjasama dengan Universitas Universitas Universitas Sam Ratulangi. Hasil rekomendasi adalah bahwa perda ini perlu direvisi di beberapa pasal. Salah satu pasal yang perlu direvisi adalah Pasal 10 poin e yang mewajibkan setiap warga yang beragama Kristen untuk tidak melakukan aktivitas bisnis dan sejenisnya pada hari raya agama Kristen dan hari minggu pada jam tertentu. Pasal ini melanggar HAM karena kegiatan yang tidak mengganggu peribadatan tetap tidak diizinkan dengan adanya Perda tersebut.

- 6) Penyusunan Rekomendasi Terhadap Perda Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa

Bekerjasama dengan Universitas Universitas Universitas Tadulako. Hasil rekomendasi adalah bahwa perlu dilakukan penyesuaian dan revisi terhadap bagian Menimbang, Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 35 ayat (2). Pada dasarnya, pasal-pasal tersebut memuat ketentuan mengenai desa yang seharusnya menjadi materi muatan di tingkat undang-undang, bukan perda. Bahkan jika diperkenankan, pencabutan perda ini bisa menjadi alternatif rekomendasi.

b. Institusionalisasi Pancasila dalam Hukum Nasional.

- 1) Kegiatan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam Hukum Nasional Wilayah I
 - Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Berlandaskan Pancasila. Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila
 - Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Sesuai dengan Pancasila. Tersusunnya tindak lanjut rekomendasi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan Pancasila
 - Internalisasi Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Internalisasi Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan Nilai Pancasila

2) Kegiatan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam Peraturan Daerah Wilayah II

- Institusionalisasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bangka Belitung. Tercapainya kesepakatan bersama melalui masukan dari para peserta khususnya para perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Provinsi Bangka Belitung dalam membentuk Peraturan Daerah agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Pancasila.
- Institusionalisasi dan Internalisasi Pancasila dalam Peraturan Daerah di Tanjung Pinang. Tercapainya kesepakatan bersama melalui masukan dari para peserta khususnya para perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Provinsi Bangka Belitung dalam membentuk Peraturan Daerah agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Pancasila.
- Institusionalisasi Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Jawa Barat. Tercapainya Kesepakatan dan pemahaman bersama tentang nilai Pancasila melalui masukan dari para peserta dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Barat agar selaras dengan nilai Pancasila dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat.
- Institusionalisasi Nilai Pancasila Dalam Peraturan Daerah Di Provinsi Bali. diskusi bersama dalam membentuk Peraturan Daerah agar selaras dengan nilai Pancasila dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat di daerah Provinsi Bali.

3) Kegiatan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam Peraturan Daerah Wilayah III

- Internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan di Nusa Tenggara Timur. Terlaksananya Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di bidang hukum. Pelaksanaan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila melalui perumusan arah kebijakan. Perumusan arah kebijakan pada Rancangan Peraturan Daerah (Khususnya Wilayah III). Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun melalui tahap-tahapan sebagai berikut, antara lain Perencanaan, Pembahasan, Pengharmonisasian dan Pengundangan. Pada tahap-tahapan ini dibutuhkan persamaan persepsi atau perumusan arah kebijakan agar Rancangan Peraturan

Daerah sesuai dengan Pancasila yakni melalui penyelenggaraan Institusionalisasi Pancasila terhadap Hukum Nasional agar selaras dengan dasar negara.

- Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlaksananya Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di bidang hukum. Pelaksanaan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila melalui perumusan arah kebijakan. Perumusan arah kebijakan pada Rancangan Peraturan Daerah (Khususnya Wilayah III). Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun melalui tahap-tahapan sebagai berikut, antara lain Perencanaan, Pembahasan, Pengharmonisasian dan Pengundangan. Pada tahap-tahapan ini dibutuhkan persamaan persepsi atau perumusan arah kebijakan agar Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Pancasila yakni melalui penyelenggaraan Institusionalisasi Pancasila terhadap Hukum Nasional agar selaras dengan dasar negara.
- Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Kalimantan Barat. Terlaksananya Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di bidang hukum. Pelaksanaan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila melalui perumusan arah kebijakan. Perumusan arah kebijakan pada Rancangan Peraturan Daerah (Khususnya Wilayah III). Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun melalui tahap-tahapan sebagai berikut, antara lain Perencanaan, Pembahasan, Pengharmonisasian dan Pengundangan. Pada tahap-tahapan ini dibutuhkan persamaan persepsi atau perumusan arah kebijakan agar Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Pancasila yakni melalui penyelenggaraan Institusionalisasi Pancasila terhadap Hukum Nasional agar selaras dengan dasar negara.

Kilas peristiwa strategis internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan Rekomendasi Regulasi tahun 2020



Institusionalisasi Pancasila pada peraturan perundang-undangan



Koordinasi Kegiatan Kajian, Analisis dan Rekomendasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020



Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Nasionalisme Melalui Penghormatan Kepada Lambang Negara RI



Perumusan Rekomendasi Hasil Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Pusat dan Daerah



Institusionalisasi dan Internalisasi Pancasila dalam Peraturan di Daerah



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI TAHUN 2020



*Halaman ini adalah ilustrasi. Tidak terkait langsung dengan penjelasan
sebelum dan sesudah halaman ini.*



DIREKTORAT ADVOKASI

B.Terwujudnya Arah Kebijakan PIP Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Secara Nasional

Indikator SS

Indikator keberhasilan **sasaran strategis** adalah :

Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden
(5 Rekomendasi-75%)



Hakikat pengembangan PIP merupakan bagian dari peneguhan kembali jalan ideologis, yang tidak terpisahkan dari upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Di dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau bebas korupsi, yaitu: kualitas informasi/data, transparansi, akuntabilitas, responsif dan responsibilitas, relevan, independen, tidak berpihak (*fairness*), serta pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana digariskan dalam RPJPN dan RPJMN.

BPIP sebagai salah satu lembaga yang ditugasi untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas berupaya menghasilkan arah kebijakan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam PIP secara Nasional. Ukuran kinerja terwujudnya arah kebijakan PIP adalah rekomendasi substansi atau rekomendasi kebijakan (peraturan perundang-undangan) yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Tahun 2020 indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional adalah sebagai berikut.

Substansi Rekomendasi	Tindaklanjut	Keterangan
Riset dan Inovasi Nasional yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila	Penyampaian Usulan Penyempurnaan RPerPres tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Telah diusulkan disampaikan ke Presiden melalui Dewan Pengarah BPIP. (nilai : 75)

Substansi Rekomendasi	Tindaklanjuti	Keterangan
Penguatan nilai Pancasila pada generasi Muda (melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka-Paskibraka)	Mendorong Usulan RPerPres PIP kepada Generasi Muda melalui Program Paskibraka	RPerPres telah disampaikan kepada Presiden RI. (nilai: 100)
Garis-garis besar haluan ideologi Pancasila	Usulan konsep GBHIP	dalam pertimbangan Dewan Pengarah. (nilai: 75)
Ekonomi berazas nilai-nilai Pancasila	Pembahasan dan penyusunan Naskah Kebijakan Ekonomi Pancasila	Penyusunan policy paper. (nilai: 25)
Aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui permainan tradisional	<i>Launching</i> Pancamain dengan keterlibatan Presiden RI	Presiden R.I sebagai Keynote Speaker (nilai: 100)
Nilai Kinerja : $(75+100+75+25+100) : 5 \times 100\% = 75\%$		

Ket nilai : Penyusunan (25), Draft final (50), disampaikan ke DP (75), disampaikan ke Presiden (100).

Ruang lingkup sasaran strategis arah kebijakan PIP adalah terlaksananya sasaran program pengkajian dan materi, pengendalian dan evaluasi PIP. Capaian sasaran program tersebut adalah sebagai berikut.



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KEDEPUTIAN BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI TAHUN 2020



Halaman ini adalah ilustrasi. Tidak terkait langsung dengan penjelasan sebelum dan sesudah halaman ini.

DIREKTORAT STANDARISASI MATERI DAN METODE
FORMAL, NONFORMAL, DAN INFORMAL

SASARAN PROGRAM 3:

B.1. Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, Dan Standardisasi Materi PIP

Pancasila sebagai ilmu pengetahuan mampu mengimbangi perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan kekinian. Oleh karena Pancasila sebagai ilmu pengetahuan perlu dilakukan sistematisasi atas sumber. Pancasila sebagai ilmu itu sendiri sangat terbuka untuk dikritisi dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dengan cara melakukan pengkajian Pancasila secara ilmiah dengan pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin; mendorong berbagai kajian dan paradigma keilmuan dengan inspirasi prinsip nilai Pancasila; mengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma Ilmu Pengetahuan; mengembangkan sistem pembelajaran Pancasila yang lebih tepat-guna, baik dari segi isi, metodologi, dan teknologi, sesuai dengan tingkat pendidikan, bidang profesi dan perkembangan zaman, agar lebih menarik, partisipatif dan efektif, dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan sebagai nara sumber.

Ukuran keberhasilan sasaran program terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP adalah:

Indikator SP 3			
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	KET
Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan	84% (11 kajian)	46% (6 kajian)	 Kinerja 55% (46/84) Dimanfaatkan Unsur Pimpinan dalam mempertimbangkan arah kebijakan PIP (100%=13 Kajian)

Tabel 11. Capaian IKU perumusan arah kebijakan, pengkajian, & standardisasi materi PIP

Langkah-langkah kegiatan strategis dalam rangka mewujudkan sasaran program Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP adalah sebagai berikut.

B.1.1. Pengkajian Materi Arah Kebijakan PIP

Capaian indikator kinerja utama Kegiatan (keluaran) pengkajian materi arah kebijakan PIP, yaitu :

Indikator Kegiatan 1.3

Sasaran Kegiatan : 1. Terlaksananya kajian filosofis & historis arah kebijakan PIP 2. Terlaksananya kajian kebijakan dan yuridis PIP 3. Terlaksananya kajian keilmuan PIP			
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET
Jumlah dokumen hasil kajian filosofis dan historis arah kebijakan PIP	7 Dok	2 Dok	 29% - Data Fil dan His di Ende, NTT - Ensiklopedia Pancasila
Jumlah dokumen hasil kajian kebijakan dan yuridis PIP	2 Dok	3 Dok	 150% - Sigma Pancasila - Arah Kebijakan PIP - Naskah Kebijakan Ekonomi Pancasila
Jumlah dokumen hasil kajian keilmuan PIP	4 Dok	1 Dok	 25% Ketuhanan Yang Maha Esa (Perspektif Lintas Iman)

Tabel 12. Capaian IKU pengkajian materi arah kebijakan PIP

Ruang lingkup capaian kegiatan pengkajian materi arah kebijakan PIP yang telah dilakukan adalah:

a) Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP)

GBHIP merupakan pedoman Pancasila untuk seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan rumusan pedoman dalam menyusun, menjalankan dan mengawasi kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan sebagai implementasi dari pembumian nilai-nilai Pancasila. Draft GBHIP telah dipaparkan pada para Dewan Pengarah dan pimpinan BPIP, dan telah di menjadi dokumen GBHIP pada tahun 2020, dan akan dibahas kemudian pada tahun 2021.

b) Arah Kebijakan PIP

Arah kebijakan PIP ini tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan strategi BPIP, dan kemudian tidak terlepas dalam pencapaian visi pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut maka salah satu misi pembangunan yang relevan dengan tugas dan fungsi BPIP adalah “mewujudkan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.” Visi dan Misi Pembangunan Nasional ini kemudian diejawantahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dan juga realisasi janji pemerintah untuk melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan bagi seluruh komponen bangsa. Proses penyusunan Arah Kebijakan PIP perlu juga mempertimbangkan sejumlah peraturan terkait dan tingkat ketercapaian program yang terukur. Sehingga, berbagai strategi dan pentahapan program yang dihadirkan di dalamnya nanti mampu di rujuk oleh berbagai stakeholder terkait guna menghasilkan program-program PIP yang efektif dan terencana sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. Maka dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut diatas, Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi BPIP berpikir perlu untuk melakukan kegiatan Arah Kebijakan PIP yang melibatkan seluruh Pimpinan Madya dan Pratama di BPIP sehingga Arah kebijakan nantinya mampu untuk menjawab seluruh tantangan yang akan di hadapi selama proses PIP.

3. Prosiding SIGMA PANCASILA

Penyusunan Prosiding SIGMA PANCASILA ini diawali dengan penyelenggaraan Simposium Nasional “Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma Pancasila” (SIGMA PANCASILA) merupakan kegiatan simposium yang menghimpun para pakar, tokoh, dan ilmuwan lintas agama untuk menghasilkan karya-karya tulis ilmiah mengenai Pancasila sebagai paradigma Ilmu Pengetahuan agama-agama di Indonesia. Dengan mengangkat topik: “Strategi Membangun Indonesia Yang Inklusif, Toleran, dan Moderat”, diharapkan berbagai rumusan materi yang dihasilkan melalui simposium ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi BPIP bersama dengan segenap pemangku kepentingan lain untuk membangun sebuah model nasional pengembangan studi dan relasi lintas agama di Indonesia yang berparadigma pada Pancasila. Satu ikhtiar yang diperlukan demi mewujudkan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan fenomena radikalisme agama, intoleransi, dan ideologi transnasional yang tengah bermekaran di

masyarakat. Untuk tahun anggaran 2020, SIGMA Pancasila dilaksanakan melalui pelaksanaan Simposium SIGMA Pancasila, kemudian dilanjutkan melalui penyusunan Prosiding SIGMA Pancasila dan Materi. Muatan Perpres SIGMA Pancasila dengan Kemenag, dan bekerjasama dengan Tim Konsorsium UIN Sunan Kalijaga untuk menyusun Materi PIP Lintas Agama.

4. Naskah Kebijakan (*Policy Paper*) Ekonomi Pancasila

Disadari bersama bahwa praktek penyelenggaraan ekonomi berideologikan Pancasila merupakan sebuah tuntutan yang cukup mendesak untuk segera dilakukan saat ini. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 kembali dinyatakan secara tegas bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan UUD NRI 1945 pada Pasal 33 bahwa sistem ekonomi merupakan suatu keseluruhan dari semua atau dipergunakan semua lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu negara atau bangsa untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, Ekonomi Pancasila merupakan suatu konsep sistem ekonomi berasaskan keadilan sosial dan bercirikan keselarasan dan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan bukan kemakmuran perorangan. Untuk itu dalam rangka pegejewantahan amanat UUD NRI 1945 sebagaimana tersebut di atas dan juga sebagai bentuk penjabaran tugas dan fungsi kelembagaan sebagaimana tersurat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi mengambil langkah strategis yang dianggap perlu untuk menyusun Naskah Kebijakan Ekonomi Berbasis Pancasila.

Naskah Kebijakan Ekonomi berbasis Pancasila dibagi ke dalam sub-sub tema sebagai berikut: (1) Landasan Filosofis; Historis; Politik Ekonomi Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (2) Gagasan Ekonomi Berkeadilan Sosial; (3) Pengarusutamaan Peran Koperasi dan UMKM dalam Tata Ekonomi; (4) Membangun Peran Koperasi dan UMKM dalam Era Ekonomi Digital; dan (5) Penjabaran Kehidupan Berbangsa Melalui Moderasi Beragama Melalui Kerjasama Ekonomi Antar Umat.

5. Buku Ketuhanan Yang Maha Esa-Perspektif Lintas Iman

Sebuah buku yang dapat dijadikan rujukan ilmiah dan penguatan diskursus tentang Sila Pertama Pancasila yang aksesibel dan relevan dalam kajian

lintas iman di Indonesia. Penyusunan Buku Materi PIP Lintas Iman ini adalah untuk memfinalkan Buku Materi PIP Lintas Iman II yang akan direkomendasikan oleh BPIP kepada Presiden.

6. Buku Materi Ensiklopedi Pancasila

Merupakan buku yang menghimpun visi serta pemikiran dari para pakar lintas keilmuan untuk menghasilkan Ensiklopedia yang mengupas beragam *term* atau istilah-istilah penting terkait Pancasila secara ilmiah dan sistematis berdasarkan abjad ke dalam tiga volume Ensiklopedia yang masing-masing memuat topik utama, yaitu: (1) Historisitas Pancasila, (2) Aktualitas sila-sila Pancasila, serta (3) kontekstualitas dan tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi pada masa kini dan akan datang.

Dalam perencanannya, kegiatan Penyusunan Ensiklopedia Pancasila akan dilaksanakan selama dua periode tahun anggaran, yakni 2020 dan 2021. Pada tahun anggaran 2020, kegiatan penyusunan hanya akan difokuskan pada perumusan sistematika topik dan penulisan materi *entry* ensiklopedia Pancasila.

7. Penelusuran Data Filosofis dan Historis Pancasila di Nusa Tenggara Timur

BPIP menelusuri data filosofis dan historis Pancasila di Provinsi NTT, untuk menyusun dokumen Filosofis Historis Pancasila Berbasis Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Timur. Penelusuran dilaksanakan dengan metode wawancara saksi sejarah dan narasumber terpilih serta studi lapangan pada situs-situs cagar budaya yang berkelindan terkait perenungan nilai-nilai *mutiara* Pancasila, serta peninggalan tokoh bangsa selama 1934-1938 di Ende dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kilas peristiwa strategis Pengkajian Materi Arah Kebijakan PJP



Proses Penyusunan Kajian Tahun 2020



Simposium Nasional Studi dan Relasi Lintas Agama berparadigma (SIGMA) Pancasila

B.1.2. Pelaksanaan Standardisasi Materi, Bahan Ajar, Dan Metode Pembelajaran Bagi Aparatur Negara

Capaian indikator kinerja utama Kegiatan (keluaran) standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran bagi aparatur negara, yaitu:

Indikator Kegiatan 2.3

Sasaran Kegiatan: 1. Terlaksananya standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara 2. Terlaksananya standardisasi materi, bahan ajar dan metode TNI dan POLRI 3. Terlaksananya standardisasi materi, bahan ajar dan metode Aparatur Sipil Negara			
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET
Jumlah dokumen standardisasi materi, bahan ajar dan metode pejabat negara	8 Dok	5 Dok	 63%
Jumlah dokumen standardisasi materi, bahan ajar dan metode TNI dan POLRI	5 Dok	5 Dok	 100%
Jumlah dokumen standardisasi materi, bahan ajar dan metode Aparatur Sipil Negara	5 Dok	5 Dok	 100%

Tabel 13. Capaian IKU standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran bagi aparatur negara

Rincian keluaran pelaksanaan standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran bagi aparatur negara, adalah:

1. Standar materi PIP bagi pejabat legislatif dan pemerintah daerah
2. Standar metode PIP bagi pejabat legislatif dan pemerintah daerah
3. Standar metode PIP bagi pejabat negara
4. Buku induk PIP bagi aparatur negara
5. Kompilasi dokumen sejarah hari lahir Pancasila bagi aparatur negara
6. Framework standarisasi materi dan metode PIP bagi TNI
7. Standar metode PIP bagi Polri
8. Materi bahan ajar PIP bagi Bintara Polri
9. Standar materi PIP bagi TNI
10. Standar metode PIP bagi TNI
11. Materi awal buku induk PIP bagi aparatur negara
12. Standar metode PIP bagi ASN
13. Standar bahan ajar PIP bagi ASN
14. Materi pokok PIP bagi ASN
15. Framework peraturan bahan mengenai standar materi bahan ajar dan metode PIP

Ruang lingkup capaian kegiatan standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran bagi aparatur negara yang telah dilakukan adalah:

a) Buku Induk PIP bagi Aparatur Negara

Penyusunan Buku Induk tersebut berangkat dari isu tidak adanya materi PIP untuk digunakan para aparatur negara yakni pejabat negara, TNI dan POLRI serta ASN di Indonesia dalam memahami Pancasila. Dalam penyusunannya, Standar Materi Induk Pancasila Dasar Negara dan Ideologi Bangsa bagi Aparatur Negara tersebut antara lain akan mencakup konten sejarah buku induk Pancasila, sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila, Pancasila dasar negara, Pancasila ideologi negara, Pancasila hidup bangsa, kandungan konseptual Pancasila pemikiran pendiri bangsa (Sukarno – Hatta) dan pengamalan Pancasila. Proses penyusunan standar ini melibatkan para sejarawan dan akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Tenaga Ahli MPR RI dan juga BPIP. Metode yang digunakan untuk menyusun standar materi induk adalah dengan diskusi kelompok terpumpun baik via daring maupun luring.

b) Penyusunan Standar Metode PIP bagi Pejabat Negara

Materi PIP bagi Aparatur Negara yang disusun kemudian perlu untuk dapat disampaikan dengan baik di kalangan aparatur negara. Karena hal tersebut, maka diperlukan standar metode PIP yang sesuai dengan karakteristik setiap aparatur negara, salah satunya adalah Pejabat Negara. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud Pejabat Negara adalah : Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR/DPR/DPD; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada MA dan para Hakim; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan Pejabat setingkat Menteri; Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; Walikota dan Wakil Walikota.

Pejabat negara memiliki peran penting dalam menghasilkan produk-produk kebijakan, produk-produk regulasi, produk-produk perundang-undangan dengan rasa ideologi Pancasila harus nampak. Pejabat negara mesti menjadi contoh teladan dan panutan bagi rakyat agar kembali menerapkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi negara. Untuk dapat menjadi teladan dan panutan, pejabat negara tentu saja mesti memiliki bekal yang cukup mengenai pemahaman akan Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai yang dikandung. Dengan bekal wawasan Pancasila yang dimiliki, pejabat negara diharapkan dapat menjalankan pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari dengan baik.

c) Peraturan BPIP tentang Kajian Materi dan Standar PIP bagi Aparatur Negara

Materi PIP bagi Aparatur Negara yang telah disusun memerlukan aturan hukum yang dapat memberikan dasar implementasinya pada institusi pemerintah. Peraturan BPIP tentang Kajian Materi dan Standar PIP bagi Aparatur Negara ini disusun bekerjasama dengan Biro Hukum dan Organisasi.

d) Standar Materi PIP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Standar Materi PIP bagi ASN yang telah selesai disusun ini akan menjadi rujukan bagi instansi yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi ASN, yaitu Lembaga Administrasi Nasional. Selain itu, materi ini dapat pula secara mandiri dikembangkan dalam bentuk bahan ajar dan metode ajar oleh seluruh kementerian dan lembaga dalam pengembangan dan pembinaan ASN tentang ideologi Pancasila. Penyusunan standar ini melibatkan instansi pemerintah terkait, para nara sumber dan para pakar di bidang PIP.

e) Standar Metode PIP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang telah dirumuskan dalam standar materi PIP bagi ASN secara nyata, perlu disusun metode yang sesuai untuk kalangan ASN agar memberikan dampak yang dapat diterapkan dalam praksis keseharian. Penyusunan standar metode PIP bagi ASN ini dilaksanakan dengan mengundang para pakar, dari kementerian/lembaga (KemenPANRB, Kemendagri, BPSDM, LAN) melalui diskusi kelompok terpumpun, baik secara daring maupun luring.

f) Standar Bahan Ajar PIP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyusunan bahan ajar PIP untuk ASN ini merupakan salah satu tugas yang diemban pada Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Sipil Negara. Tujuan utama dari penyusunan bahan ajar bagi ini adalah untuk memudahkan para ASN untuk mempelajari dan memahami kompetensi tertentu, dalam hal ini adalah bagaimana praksis nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Selain itu adalah untuk memperkaya informasi para widyaiswara dalam penyampaian materi PIP.

g) Standar Materi dan Metode PIP bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Penyusunan standar materi dan Metode PIP bagi TNI ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan beberapa institusi, dari DPR, akademisi, TNI serta narasumber lainnya sebagai bahan dalam penyusunan standar materi dan metode bahan ajar PIP bagi TNI.

Kilas peristiwa strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran bagi aparatur negara tahun 2020



Proses Penyusunan standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran bagi aparatur negara tahun 2020



Dokumen standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran bagi aparatur negara

B.1.3. Pelaksanaan Standardisasi Materi, Bahan Ajar Dan Metode Pembelajaran Formal, Nonformal, Dan Informal PIP

Capaian indikator kinerja utama Kegiatan (keluaran) standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran formal, nonformal, & informal PIP, yaitu:

Indikator Kegiatan 3.3

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Standardisasi Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Formal, Nonformal, dan Informal PIP			
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET
Jumlah dokumen Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Formal PIP yang terstandar	13 Dok	8 Dok	 62%
Jumlah dokumen Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Nonformal PIP yang terstandar	3 Dok	1 Dok	 33%
Jumlah dokumen Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Informal PIP yang terstandar	3 Dok	12 Dok	 400%

Tabel 14. Capaian IKU standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran formal, nonformal, & informal PIP

Rincian keluaran pelaksanaan standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran formal, nonformal, & informal PIP, adalah:

1. Standar materi dan metode PIP formal - PAUD/TK
2. Standar materi dan metode PIP formal – SD
3. Standar materi dan metode PIP formal – SMP
4. Standar materi dan metode PIP formal – SMA
5. Standar materi dan metode PIP formal – Perguruan Tinggi
6. Video pembelajaran PIP – PAUD/TK (3 video)
7. Video pembelajaran organisasi kemasyarakatan “Pancasila itu nyata”
8. Video pembelajaran bagi keluarga dan lingkungan “Selalu ada cinta”
9. Komik pembelajaran PIP untuk keluarga dan lingkungan (11 komik)

Ruang lingkup capaian kegiatan standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran formal, nonformal, & informal PIP, yang telah dilakukan adalah:

- a) Standar Materi dan Metode PIP untuk tingkat PAUD/TK sampai Perguruan Tinggi

Standar materi dan metode PIP untuk lingkungan formal (PAUD/TK sampai Perguruan tinggi) disusun sebagai bahan dasar untuk implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan siswa/mahasiswa. Penyusunan dokumen standar ini dilaksanakan sejak Februari 2020, dan baru dapat diselesaikan pada awal September 2020, dengan melibatkan praktisi pendidikan, pakar sejarah, akademisi (guru dan dosen) di bidang pendidikan kewarganegaraan/ Pancasila, dan perwakilan dari Kementerian yang terkait (Kemdikbud, Kemenag, Kemristek Dikti). Standar materi dan metode formal ini disusun dengan karakteristik pembelajaran sesuai dengan karakteristik para siswa/mahasiswa masa kini, metode pembelajaran abad 21, standar materi dan metode PIP untuk lingkungan formal ini akan dijadikan rujukan utama bagi dunia pendidikan dalam menyusun bahan ajar yang diterapkan di lingkungan PAUD/TK hingga Perguruan Tinggi. Sebagai acuan dalam penyusunan bahan ajar di pendidikan formal, maka dokumen standar materi dan metode PIP di lingkungan formal yang telah selesai disusun ini perlu untuk diperkuat dengan peraturan hukumnya, agar dapat dijadikan dasar kementerian dan lembaga lain dalam implementasi penyusunan bahan pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah/ perguruan tinggi. Materi dan metode yang telah selesai disusun pada tahun 2020 ini akan selalu dilakukan penyesuaian dan pembaruan mengikuti kebutuhan dan arah kebijakan ideologi Pancasila yang ada.

b) Bahan Ajar PIP untuk PAUD/TK – video

Penyusunan bahan ajar PIP untuk PAUD/TK ini merupakan salah satu tugas yang diemban pada Sub Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal. Tujuan utama dari penyusunan bahan ajar bagi siswa tingkat PAUD/TK ini adalah untuk memudahkan para peserta didik untuk mempelajari dan memahami kompetensi tertentu, dalam hal ini adalah bagaimana praksis nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Selain itu adalah untuk memperkaya informasi para guru pengajar dalam memberikan materi tentang nilai-nilai Pancasila pada siswa PAUD/TK.

c) Bahan Ajar PIP untuk SD (kelas 1 dan 2) – video

Penyusunan bahan ajar PIP untuk siswa SD kelas 1 dan kelas 2 ini merupakan bahan ajar untuk memperkuat materi PIP yang ada. Tujuan utama dari penyusunan bahan ajar bagi siswa tingkat SD ini adalah untuk memudahkan para peserta didik untuk mempelajari dan memahami kompetensi tertentu, dalam hal ini adalah bagaimana praksis nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Selain itu adalah untuk memperkaya informasi para guru pengajar dalam memberikan materi tentang nilai-nilai Pancasila pada siswa SD kelas 1 dan kelas 2. Pembuatan bahan ajar yang menarik dan inovatif adalah suatu hal yang sangat penting dan juga tuntutan bagi setiap

guru sebagai pendidik. Hal ini mengingat penyusunan bahan ajar memiliki kontribusi yang sangat besar bagi keberhasilan proses pembelajaran PIP yang kita lakukan.

d) Bahan Ajar PIP untuk SMP – komik

Materi PIP untuk tingkat SMP, dapat dielaborasi menjadi bahan ajar yang sesuai dengan usia anak tingkat SMP, dalam hal ini, antara lain dapat disusun dalam sebuah rangkaian seri komik. Dengan penyampaian materi PIP melalui bahan ajar yang menarik dan dapat diterima oleh anak didik usia 12-15 tahun, maka diharapkan komik-komik Pancasila ini akan diterima dengan baik di kalangan siswa SMP.

e) Standar Materi PIP untuk Nonformal

Standar materi PIP untuk kelompok masyarakat Nonformal ini disusun untuk menambah dan melengkapi pendidikan di lingkungan formal (PAUD/TK hingga Perguruan Tinggi). Kelompok masyarakat nonformal adalah masyarakat mempunyai ikatan tersendiri sebagai suatu organisasi yang terstruktur (seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi sosial dll). Penyusunan materi PIP untuk kelompok masyarakat NonFormal ini disusun dengan melibatkan para akademisi, nara sumber di bidangnya, pemuka masyarakat, dan perwakilan kemasyarakatan. Standar materi ini kemudian akan dapat disesuaikan metode dan bahan ajarnya sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat tertentu, kearifan lokal, isu yang berkembang dan kebutuhan lainnya.

f) Bahan Ajar PIP untuk Nonformal

Bahan ajar PIP untuk kelompok NonFormal ini merupakan bagian dari upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila pada seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. Materi PIP untuk kelompok NonFormal perlu diinternalisasikan pada masyarakat dengan menggunakan metode dan cara penyampaian yang sesuai. Salah satu metode yang direkomendasikan oleh tim penyusun standar metode PIP untuk NonFormal adalah pemanfaatan media elektronik, dengan penggunaan bahan ajar video pendek. Dengan menyusun bahan ajar internalisasi PIP bagi kelompok non formal maka diharapkan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, dan dapat dijadikan pula menjadi media untuk belajar dan sekaligus sebagai hiburan. Penyusunan bahan ajar PIP bagi kelompok NonFormal ini akan dilanjutkan dalam tahun-tahun mendatang, dengan memanfaatkan media elektronik.

g) Standar Metode PIP untuk Nonformal

Metode internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu juga mengidentifikasi dan memetakan cara dan metode yang sesuai dengan lingkungan kelompok-

kelompok NonFormal, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan. BPIP bekerjasama dengan para akademisi telah menyusun standar metode PIP untuk kelompok Nonformal.

h) Standar Bahan Ajar dan Metode PIP untuk Organisasi Politik

Metode internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi kelompok NonFormal juga mengidentifikasi metode dan bahan ajar yang sesuai bagi kelompok organisasi politik. Banyak kader-kader politik yang nantinya akan mempunyai pengaruh bagi masyarakat, dan perlu untuk menyediakan bahan ajar yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi politik yang ada di Indonesia. BPIP, dalam hal ini Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, NonFormal dan Informal telah menginisiasi kerjasama dengan para akademisi, dan telah selesai menyusun standar metode dan bahan ajar PIP untuk Nonformal, khususnya organisasi politik. Penyusunan ini dilakukan pada periode September-Desember 2020, dengan melibatkan beberapa nara sumber dari organisasi masyarakat, para pakar dan akademisi

i) Standar Materi dan Metode PIP untuk Informal

Standar materi PIP untuk kelompok masyarakat Informal ini disusun untuk mengisi materi PIP di lingkungan terdekat keluarga dan lingkungan sekitarnya (komunitas, kelompok diskusi, kelompok PKK dll.). Penyusunan materi PIP untuk kelompok ini dilakukan sejak bulan Agustus 2020 hingga pertengahan Desember 2020, dengan dibantu oleh kalangan akademisi, dan mengundang pula para praktisi, pemerhati, pakar dalam beberapa diskusi untuk memperkaya materi.

j) Bahan Ajar PIP untuk keluarga – video

Bahan ajar PIP untuk kelompok InFormal ini merupakan bagian dari upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila pada seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. Materi PIP untuk kelompok InFormal menyasar masyarakat di lingkup keluarga, dan lingkup sekitarnya. Perlu untuk memberikan bahan ajar yang sesuai bagi lingkungan keluarga, dengan menggunakan metode dan cara penyampaian yang dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga. Salah satu metode yang direkomendasikan oleh tim penyusun standar metode PIP untuk InFormal adalah pembuatan video pendek, yang menarasikan kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Dengan menyusun bahan ajar internalisasi PIP bagi kelompok in formal maka diharapkan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dan dapat dijadikan pula menjadi media untuk belajar dan sekaligus sebagai hiburan.

Kilas peristiwa strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran formal, nonformal, & informal PJP



Proses penyusunan standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran formal, nonformal, dan informal PIP.



Keluaran standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran formal, nonformal, dan informal PIP



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI TAHUN 2020

SiPendekar Pancasila
"Sistem Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Reguler Pembinaan Ideologi Pancasila"

Apa itu SiPendekar Pancasila?
SiPendekar Pancasila adalah sistem berbasis aplikasi yang berfungsi untuk memantau, mengelola, dan melaporkan kegiatan reguler pembinaan ideologi Pancasila di seluruh Indonesia.

Apa saja fiturnya?

- Basis data
- Modul laporan
- Fitur keaslian data dan data secara langsung
- Fitur untuk kegiatan dan laporan
- Fitur untuk laporan dan data

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Perisai Pancasila
"Sistem Informasi Pengawasan Indeks Kepatuhan di Masyarakat"

Apa itu Perisai Pancasila?
Perisai Pancasila adalah sistem berbasis aplikasi yang berfungsi untuk memantau, mengelola, dan melaporkan indeks kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila.

Apa saja fiturnya?

- Verifikasi data
- Dashboard pengguna
- Laporan
- Pengaturan

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

DELIMA RISET INFO

Infographic showing various research and information systems, including a section for "POTREK KELUARAN TAHUN 2020".

Serdadu Pancasila
"Sistem Elektronik Pengendalian Terpadu Pancasila"

Apa itu Serdadu Pancasila?
Serdadu Pancasila adalah sistem berbasis aplikasi yang berfungsi untuk memantau, mengelola, dan melaporkan kegiatan reguler pembinaan ideologi Pancasila di seluruh Indonesia.

Apa saja fiturnya?

- Sistem Operasional
- Info
- Pengendalian
- Laporan
- Kegiatan
- Berita

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Simpul Kendali
"Sistem Pemantauan Rutinan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila"

Apa itu Simpul Kendali?
Simpul Kendali adalah sistem berbasis aplikasi yang berfungsi untuk memantau, mengelola, dan melaporkan rutinan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh Indonesia.

Apa saja fiturnya?

- Profil Pengguna
- Info
- Pengendalian
- Laporan
- Kegiatan
- Berita

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Halaman ini adalah ilustrasi. Tidak terkait langsung dengan penjelasan sebelum dan sesudah halaman ini.

SASARAN PROGRAM 5:

B.2. Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi PIP

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan sasaran program Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi PIP adalah:

Indikator SP 5			
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	KET
Persentase dokumen Pengendalian Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang dimanfaatkan	40%	40%	 Kinerja =100% Dimanfaatkan K/L, BPIP, Pemda, Komunitas (4 substansi pengendalian), [100%=10 dok termanfaatkan)
Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang ditindaklanjuti	40%	40%	 Kinerja =100% Ditindaklanjuti Unit Teknis BPIP [100%=10 dok ditindaklanjuti) (4 substansi pengendalian di tindaklanjuti intern, 2 blm)
Persentase sistem pengendalian dan evaluasi terpusat berbasis elektronik yang termanfaatkan	100%	100%	 - 2 Aplikasi (Aplikasi Perisai dan SiPendekar) - 2 alur pikir dang kerangka logis (Serdadu dan simpul kendali), aplikasi dibuat oleh Pusdatin

Tabel 15. Capaian IKU Pengendalian Dan Evaluasi PIP

Realisasi capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian kebijakan strategis dan program teknis PIP yang dimanfaatkan.

Capaian	Substansi	Rekomendasi Untuk	Pemanfaatan	Keterangan
Hasil Pengendalian bidang Sosialisasi, Komunikasi, Jaringan, dan Hubungan antar lembaga	pengendalian dan Rekomendasi Pemanfaatan Pancamain untuk pembudayaan nilai-nilai Pancasila di masyarakat	BPIP dan Kementerian/ Lembaga lainnya	BNPP	Pancamain Indonesia dimanfaatkan oleh BNPP pada saat kegiatan menggali nilai-nilai Pancasila di Kawasan Perbatasan
			Perpusnas	Pancamain Indonesia di manfaatkan dengan menempatkan Pancamain Indonesia di ruang bermain anak di Gedung Perpustakaan nasional
Hasil Pengendalian bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	Laporan-laporan kegiatan pengendalian dan beberapa Rekomendasi PIP bidang Hukum, advokasi & wasreg	Deputi bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, BPIP	Deputi Bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi	Indikator-indikator nilai Pancasila dalam pengawasan regulasi telah disusun oleh Kedeputusan II BPIP
Hasil Pengendalian bidang Pengkajian Materi dan Pendidikan dan Pelatihan	1. Melakukan penyelesaian penyusunan kajian dan materi PIP, yang disinergikan dengan perencanaan diklat pendidikan dan pelatihan PIP sesuai dengan segmentasi pada	Deputi bidang Pengkajian dan Materi dan Deputi bidang Pendidikan dan Pelatihan, BPIP	Deputi bidang Pengkajian dan Materi dan Deputi bidang Pendidikan dan Pelatihan, BPIP	Telah dibuat MOU antara Deputi bidang Pengkajian dan Materi dan Deputi bidang Pendidikan dan Pelatihan, BPIP

Capaian	Substansi	Rekomendasi Untuk	Pemanfaatan	Keterangan
	amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018			
	2. Melakukan penyelesaian penyusunan kurikulum dan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP sesuai dengan segmentasi yang di amanatkan dalam Perpres 7/2018 secara terstruktur dan berkelanjutan	BPIP dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Belum dimasukkan ke dalam kurikulum
	3. Pemanfaatan permainan tradisional Indonesia sebagai alat PIP di kalangan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah	BPIP, K/L dan Pemda	K/L dan Pemda	
Hasil Pengendalian Aktualisasi nilai-nilai Pancasila	Dokumen yang berisikan laporan hasil kegiatan dan beberapa rekomendasi antara lain: 1. Rekomendasi membentuk tim kajian ekonomi Pancasila	BPIP	BPIP	Telah dibentuk tim kajian ekonomi Pancasila
	2. Rekomendasi pembangunan pasar digital bagi komunitas dengan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila	BPIP, K/L dan Komunitas	Komunitas	PPI akan membangun pasar digital bagi komunitas dengan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila

b. Persentase dokumen hasil evaluasi kebijakan strategis dan program teknis PIP yang ditindaklanjuti

Capaian	Substansi	Rekomendasi Untuk	Pemanfaatan	Keterangan
Dokumen Evaluasi pelaksanaan PIP bidang Sosialisasi, Komunikasi, Jaringan, dan Hubungan antar Lembaga	Hasil pelaksanaan pengukuran evaluasi PIP lingkungan Media.	Deputi bidang Sosialisasi, Komunikasi, Jaringan, dan Hubungan Antar Lembaga	BPIP	Telah diserahkan kepada Kepala BPIP sebagai usulan rekomendasi kebijakan bidang Sosialisasi, Komunikasi, Jaringan, dan Hubungan Antar Lembaga
Dokumen Evaluasi pelaksanaan PIP bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	Hasil Pelaksanaan pengukuran evaluasi PIP lingkungan ASN	Deputi bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, BPIP	BPIP	Telah diserahkan kepada Kepala BPIP sebagai usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi
Dokumen Evaluasi pelaksanaan PIP bidang Pengkajian Materi dan Pendidikan dan Pelatihan	Hasil pelaksanaan pengukuran evaluasi PIP lingkungan pemuda dan pendidikan	Deputi bidang Pengkajian dan Materi dan Deputi bidang Pendidikan dan Pelatihan, BPIP	BPIP	Telah diserahkan kepada Kepala BPIP sebagai usulan rekomendasi kebijakan bidang pengkajian materi dan Pendidikan dan pelatihan
Dokumen Evaluasi dan Penanganan	Hasil pelaksanaan pengukuran evaluasi PIP	BPIP	BPIP	Telah diserahkan kepada

Capaian	Substansi	Rekomendasi Untuk	Pemanfaatan	Keterangan
pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara	lingkungan pendidik dan tenaga kependidikan			Kepala BPIP sebagai dokumen Evaluasi dan Penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara
Dokumen Evaluasi dan Penanganan Penyelenggara Negara dan ASN yang menentang ideologi negara	Hasil pelaksanaan pengukuran evaluasi PIP di lingkungan ASN	BPIP	BPIP	Telah diserahkan kepada Kepala BPIP sebagai dokumen Evaluasi dan Penanganan ASN yang menentang ideologi Pancasila
Dokumen Evaluasi dan Penanganan Ormas, Organisasi dan Perusahaan serta media yang bertentangan dengan ideologi negara	Hasil pelaksanaan pengukuran evaluasi PIP lingkungan Ormas, Organisasi dan Perusahaan serta media yang bertentangan dengan ideologi negara	BPIP	BPIP	Telah diserahkan kepada Kepala BPIP sebagai Dokumen Evaluasi dan Penanganan Ormas, Organisasi dan Perusahaan serta media yang bertentangan dengan ideologi negara

c. Sistem Pengendalian dan Evaluasi terpusat berbasis elektronik yang termanfaatkan

Digital Platform Aplikasi yang dibangun	Jumlah Aplikasi	Pengguna	Keterangan	Penjelasan Keterangan Penggunaan
Sistem Pengendalian dan evaluasi kegiatan regular PIP (SiPendekar Pancasila)	1 buah	Kedeputan lingkup BPIP	Telah selesai dibangun dan telah diujicobakan	Telah digunakan oleh Deputi Pengendalian dan Evaluasi
Sistem Elektronik Pengendalian Terpadu PIP (Serdadu Pancasila)	1 buah	K/L	Telah selesai dibangun namun belum di gunakan	
Sistem Informasi Pemantauan dan Pelaporan Kegiatan Pengendalian (Simpul Kendali)	1 buah	Pemda dan Komunitas	Telah selesai dibangun namun belum di gunakan	
Pengukuran aktualisasi Pancasila (Perisai Pancasila)	1 buah	Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP	Telah selesai dibangun dan telah digunakan	Telah digunakan oleh Deputi Pengendalian dan Evaluasi

Langkah strategis dalam rangka mewujudkan sasaran program Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi PIP adalah sebagai berikut.

B.2.1. Pengendalian PIP

Capaian **indikator kinerja utama Kegiatan** (keluaran) pengendalian PIP, yaitu :

Indikator Kegiatan 1.5

Sasaran Kegiatan: 1. Terlaksananya pengendalian PIP 2. Terlaksananya pengendalian aktualisasi nilai-nilai Pancasila			
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET
Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan PIP	3 Dok	3 Dok	 100%
Jumlah pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian terpadu berbasis elektronik	1 Paket	1 Paket	 100% (aplikasi)
Jumlah dokumen Rekomendasi Kebijakan Strategis Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	1 Dok	1 Dok	 100%

Tabel 16. Capaian IKU Pengendalian PIP

Rincian keluaran pelaksanaan pengendalian PIP, adalah:

1. Dokumen hasil pengendalian PIP bidang SKJ dan HAL
2. Dokumen hasil pengendalian PIP bidang Hukum, advokasi dan Pengawasan regulasi
3. Dokumen hasil pengendalian PIP bidang kajian materi dan Diklat
4. Paket aplikasi yang dibangun adalah 'SiPendekar Pancasila'
5. Dokumen hasil pengendalian aktualisasi ekonomi Pancasila

Kegiatan-kegiatan strategis yang telah mendukung capaian pengendalian PIP, yaitu:

- Generasi Positive Thinking (Genposting) "Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila Di Kalangan ASN Dan Generasi Muda". Workshop Genposting memperteguh wawasan kebangsaan, terutama pada generasi muda dan ASN, tentang penanaman nilai-nilai luhur Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara. Mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk wajib menjaga, merawat, mengimplementasikan dan setia pada nilai-nilai Pancasila. ASN lebih bijak dalam bermedia sosial sesuai kewajibannya menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

- Refleksi Kinerja PIP di Daerah. Diperlukan strategi pembinaan yang tepat agar tugas PIP bisa berjalan efektif, dengan bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga terkait.
- Koordinasi Persiapan Pemetaan Isu-Isu Pengendalian PIP Dengan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah. Koordinasi bertujuan mengumpulkan informasi, mensinergikan para dan mengumpulkan informasi dan data terkait kegiatan organisasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal merawat kerukunan antar umat beragama yang sudah terjaga di Sulawesi Utara, Badan Kesbangpol memiliki mitra dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu TNI, Polri, BIN Daerah, FKUB, FKPT dan Perangkat Daerah lainnya. Sulawesi Utara sebagai tempat berdiamnya beberapa etnis asli seperti etnis Sangihe Talaud, etnis Minahasa dan etnis Bolaang Mongindouw, memiliki beberapa jenis permainan tradisional yaitu ceklen atau biasa disebut bekel, tumbu-tumbu blanga, dodorobe, engrang, tali dan koko. Ketua KPOTI Sulawesi Utara berkomitmen untuk memajukan permainan dan olahraga tradisional di Sulawesi Utara. Permainan tradisional berfungsi sebagai alat pengendalian PIP dari Kedeputan Pengendalian dan Evaluasi BPIP.
- Pancasila Dalam Tindakan Webinar Dalam Rangka Peringatan Hari Kartini 2020 Bersama “Kartini” Masa Kini. Kegiatan ini sebagai pelaksanaan Pengendalian PIP di lingkungan perempuan untuk masukan dalam penyusunan strategi PIP. Memberikan pemahaman Pancasila dalam Tindakan kepada masyarakat melalui keteladanan, prestasi dan semangat dalam berkarya tokoh Kartini masa kini. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk membangun kreativitas dan produktivitas para perempuan Indonesia sesuai minat dan bakat agar gotong-royong membangun kekuatan bersama menghadapi masa pandemi Covid-19. Sebagai aksi nyata Pancasila dalam tindakan.

Menyasar berbagai segmentasi umur, masih dalam rangka Peringatan Hari Kartini Tahun 2020, mengadakan webinar “Bincang Bareng Kartini Muda Yuk”. Dialog diikuti 75 peserta yang berasal dari masyarakat umum sebagai wujud pengendalian PIP di lingkungan generasi muda. Generasi milenial yang berprestasi diharapkan menjadi inspirasi dan keteladanan kepada generasi muda Indonesia melalui para kartini muda yang sukses di bidangnya untuk menggelorakan semangat berprestasi berkarya di tengah pandemi covid-19. Melalui kegiatan ini diharapkan akan hadir teladan-teladan muda baru di masyarakat yang memberikan contoh Pancasila dalam Tindakan dengan cara kekinian.

- Pancasila Dalam Tindakan Melalui Olahraga Senam Kreasi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. Di tengah pandemi covid-19, masyarakat di himbau agar terus menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan imunitas

untuk mencegah terserang virus covid-19. Dalam rangka pengendalian PIP dan mendukung himbauan pemerintah, kegiatan webinar Olah Raga Senam Kreasi Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia (IOSKI) merupakan salah satu bentuk kreasi penggiat senam yang memiliki kreativitas dan juga kecintaan kepada Indonesia. Senam kreasi, selain bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh di tengah pandemi COVID-19 ini, juga dapat mengurangi resiko stres dan merileksasi otot melalui gerakan-gerakannya yang dinamis diiringi musik daerah yang dimodifikasi sedemikian rupa agar menimbulkan perasaan senang dan bahagia.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebugaran di tengah pandemi Covid19 dengan cara yang menyenangkan dan tentunya olah raga ini juga bisa meningkatkan kecintaan terhadap budaya Indonesia melalui lagu daerah dan gerakan tari daerah yang diangkat. Peran anak muda adalah penting untuk mempopulerkan senam kreasi sebagai salah satu wujud Pancasila dalam Tindakan.

- Pancasila Dalam Tindakan Gotong Royong Peran Keluarga Besar Polri Dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Menggandeng beberapa komunitas atau organisasi masyarakat untuk menjadi mitra BPIP khususnya sebagai pasukan pengendalian. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terjalinnya sinergi yang baik antara BPIP dengan KBPPP dalam rangka pengendalian PIP dan penerapan Pancasila dalam tindakan memutus rantai penyebaran COVID-19. BPIP mengajak seluruh Keluarga Besar Putra Putri Polri untuk melaksanakan Pancasila dalam Tindakan, dengan salah satu caranya adalah mengangkat contoh-contoh positif di dalam ruang publik. Kondisi sosial media saat ini yang banyak menampilkan hal-hal yang negatif menyebabkan masyarakat kehilangan sosok teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contoh-contoh positif ini bisa dibudayakan dan ditularkan guna menjadi energi bangsa dan memperkuat modal sosial dalam pengamalan Pancasila termasuk dalam mengatasi covid 19.
- Gotong Royong Angkatan Muda Muhammadiyah Menghadapi Covid-19. BPIP bersama Ikatan Pelajar Muhammadiyah melaksanakan kegiatan Diskusi Kebangsaan Pancasila Dalam Tindakan dengan tema “Gotong Royong Angkatan Muda Muhammadiyah Menghadapi Covid-19”. Tujuannya adalah mempererat kerjasama antara BPIP dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah dalam rangka PIP yang telah berlangsung sejak tahun 2019.
- Menanamkan Nilai Moral Dan Karakter Anak Melalui Dongeng Dan Permainan Tradisional. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional

Tahun 2020. Kegiatan dilaksanakan sebagai Pengendalian PIP kepada Organisasi Masyarakat dalam masa pandemi. Hasil kegiatan ini menjadi masukan dalam penyusunan strategi PIP agar terwujudnya penanaman nilai moral dan karakter anak Indonesia melalui dongeng dan permainan tradisional. Tujuannya membentuk moral dan karakter serta akhlak yang terpuji anak-anak Indonesia melalui pemberian edukasi kepada orang tua dan tenaga pendidik tentang cara dan metode menanamkan nilai dan karakter Pancasila pada anak.

- Koordinasi Pengendalian PIP Dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Dalam rangka pelaksanaan pengendalian PIP yang lebih besar lagi cakupannya, khususnya pada pelajar/pemuda/milenial yang memiliki keanggotaan cukup banyak, hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI untuk menyasar kepada generasi milenial. IPNU memiliki anggota kurang lebih 5 juta dan IPPNU yang memiliki kurang lebih 3 juta anggota di seluruh Indonesia mulai dari tingkat pusat, wilayah/provinsi, cabang/kabupaten/kota, anak cabang/kecamatan, ranting/kelurahan/desa, dan komisariat/sekolah/ perguruan tinggi. Keanggotaan IPNU dan IPPNU memiliki peran strategis sebagai jejaring pengendalian untuk dapat menyentuh masyarakat hingga ke pelosok-pelosok nusantara. Di sisi lain, pemanfaatan media sosial yang sudah menjadi bagian kehidupan manusia saat ini, khususnya generasi muda, dapat ditingkatkan. Melihat kepada pengikut (followers) instagram PP IPNU yang berjumlah 46.900 dan PP IPPNU yang berjumlah 45.200 pada masa pandemi saat ini, adalah penting untuk mensosialisasikan konten-konten positif untuk menggelorakan kembali nilai-nilai gotong-royong mewujudkan Pancasila dalam Tindakan.
- Koordinasi Pengendalian PIP Bersama Badan Kesbangpol di Wilayah Sumatera. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian PIP di wilayah Pulau Sumatera dilaksanakan rapat koordinasi dengan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar terjalinnya sinergitas yang kuat antara BPIP dengan Badan Kesbangpol wilayah dimaksud, sehingga diperoleh informasi terkait kendala dan permasalahan yang terdapat di wilayahnya masing-masing guna pengendalian PIP dan sebagai bahan untuk penyusunan strategi PIP. Sebagai wujud pemantapan dan aktualisasi PIP di daerah, Badan Kesbangpol melakukan pembinaan pembauran kebangsaan kepada masyarakat yang belum mengerti arti dan aktualisasi nilai - nilai Pancasila, memberikan penguatan pendidikan karakter dan kesadaran bela negara kepada masyarakat terkait pentingnya bela negara khususnya bagi kaum milenial. PIP merupakan upaya pembangunan karakter bangsa sebagai proses regenerasi bangsa untuk membangun

kepribadian anak bangsa yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

- Membangun ikon animasi dan film pendek sebagai alat pengendalian PIP yang kekinian dengan sasaran anak-anak dan generasi muda. Pembuatan ikon animasi ini diharapkan dapat selesai dan diluncurkan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ikon animasi dapat menjadi tokoh ikon Pancasila sebagai teman bermain anak-anak sekaligus menjadi sarana edukasi nilai-nilai Pancasila, sehingga perlu dibangun karakter animasi yang menarik dan dapat dijadikan idola oleh anak Indonesia. Film pendek memasukkan konten pariwisata sebagai promosi wisata Indonesia dan sebagai salah satu membangun kecintaan tanah air di kalangan anak-anak dan generasi muda.
- Koordinasi Pengendalian PIP Bersama Badan Kesbangpol Wilayah Jawa. Maraknya isu-isu yang sedang berkembang pada masyarakat perihal politik identitas, hoax, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme dan terorisme menjadi fokus yang harus segera ditangani agar tidak berdampak kepada generasi muda Indonesia. BPIP mengajak seluruh elemen bergotong royong mewujudkan Pancasila dalam tindakan, khususnya menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa di saat pandemi.
- Pengendalian PIP Bersama Kementerian/Lembaga sebagai upaya perwujudan dan pelaksanaan Pancasila dalam Tindakan untuk terjalinnya sinergi program kegiatan antara BPIP dengan K/L terkait, sehingga strategi dan langkah-langkah dalam pelaksanaan PIP di masyarakat lebih masif dengan tergabungnya kekuatan antar lintas kementerian.
- Pengendalian PIP Melalui Kiat- Kiat Mengisi Ruang Publik Dengan Konten Positif Di Masa Pandemi Covid-19. Sesuai dengan arahan Presiden RI pada *Presidential Lecturer* kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk fokus menyasar kepada generasi milenial. Generasi milenial merupakan kelompok yang strategis dalam memerangi isu-isu negatif (*hoax, hate speech, bullying*) karena karakteristiknya yang memiliki pemikiran kritis. Hal ini merupakan modal dasar sebagai warga muda Indonesia untuk dapat membantu pemerintah dalam memerangi isu negatif. Di tengah pandemi covid-19, media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak muda harus berperan membantu pemerintah dalam menyampaikan ajakan, himbauan, serta informasi melalui konten-konten kreatif yang memberikan pemahaman kepada masyarakat luas untuk tetap menjalankan protokol, tetap produktif walaupun berada di rumah, berjuang bersama agar dapat segera keluar dari kondisi pandemi.
- Pengendalian PIP Penyusunan Usulan Langkah Strategis Di Bidang Kebudayaan Bersama Organisasi Masyarakat. Kegiatan dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan pengendalian PIP kepada organisasi

masyarakat, untuk mendapatkan masukan penyusunan usulan langkah strategis di bidang hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta terciptanya gotong royong antara pemerintah dan masyarakat agar pembinaan dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan masukan masyarakat.

- Koordinasi Pengendalian PIP Dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Membahas rencana program kegiatan BPIP dengan IPNU untuk penguatan PIP di masyarakat. IPNU yang memiliki keanggotaan di seluruh Indonesia dan terdiri dari anak-anak muda yang memiliki nasionalisme dan rasa cinta tanah air dianggap memiliki peran penting untuk menjadi perpanjangan tangan BPIP di tengah masyarakat. Sinergitas dengan berbagai organisasi masyarakat terus dilakukan oleh Kedeputian Pengendalian dan Evaluasi dalam rangka membangun pasukan pengendalian yang bisa merembes langsung ke dalam masyarakat untuk melakukan PIP.
- Penyusunan Usulan Strategi Program/Kegiatan PIP. Keluaran yang dicapai yaitu tersusunnya *Standard Operating Procedure* Direktorat Pengendalian, *Logical Framework* atau kerangka berpikir logis usulan langkah dan strategi PIP, serta kompilasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut strategi penyusunan *tools* pengendalian.
- Strategi Mempopulerkan Permainan Tradisional Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM Sebagai Bentuk Implementasi Pancasila Dalam Tindakan. Dalam rangka mewujudkan mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19. Kegiatan dilaksanakan agar terjalin sinergi BPIP dengan penerima Apresiasi Prestasi Pancasila, untuk mempopulerkan permainan tradisional sekaligus pemberdayaan UMKM. Penerima apresiasi prestasi Pancasila merupakan orang-orang pilihan yang memiliki teladan Pancasila dalam Tindakan sesuai bidang keahliannya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan muncul gagasan/ide tentang strategi mempopulerkan permainan tradisional Indonesia (Panca main Indonesia).
- Koordinasi Pengendalian PIP di Ende, Nusa Tenggara Timur. Koordinasi di Ende, Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Kabupaten Ende, Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Kelompok Du'Anyam, terkait dengan Tata Kelola Pariwisata dan Pemberdayaan UMKM di Flores NTT dalam rangka implementasi ekonomi Pancasila. Koordinasi ini juga dilaksanakan dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah dan terkait kegiatan organisasi masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk pemetaan isu PIP. Pandemi covid-19 berdampak besar di Kabupaten Ende baik di sektor pariwisata dan UMKM, perlunya penguatan dukungan ekonomi dan penguatan psikologi untuk masyarakat Ende. Terdapat situs bersejarah rumah pengasingan Bung Karno dan Taman renungan Bung Karno tempat dimana Bung Karno merenungkan konsep

dasar negara Indonesia Pancasila sambil duduk di bawah pohon sukun menghadap ke laut. BPIP berkoordinasi dengan Bupati Nagekeo dalam hal pengembangan UMKM sebagai salah satu bentuk implementasi ekonomi Pancasila, dimana BPIP berkolaborasi dengan Du'Anyam untuk pengembangan UMKM terutama dalam hal pemberdayaan perempuan di daerah.

- Penguatan PIP di kalangan generasi muda, BPIP menginisiasi Peraturan Presiden tentang program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Guna membahas isi Peraturan Presiden, BPIP mengadakan rapat dengan Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia.
- Peran Pemuda Dalam Menjaga Persatuan Indonesia Pada Situasi Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Pancasila Dalam Tindakan Gotong Royong. Memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-92, penting untuk menggugah kembali semangat pemuda Indonesia untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa salah satunya dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- PIP dengan target usia anak-anak melalui membuat karakter animasi bernama "Etus dan Elsi" yang akan menjadi teman bermain anak-anak Indonesia. Karakter Etus dan Elsi diambil dari burung elang jawa (Nisaetus Bertelsi) yang berisikan ajakan untuk berbuat kebaikan. Pada karakter ini dijelaskan bahwa Etus dan Elsi tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Mereka hanya dapat dilihat oleh anak yang melakukan kebaikan untuk sekitarnya. Semakin banyak kebaikan yang dilakukan seorang anak, maka semakin jelas Etus dan Elsi tampak terlihat oleh anak tersebut dan menularkan kekuatan supernya. Karakter ini digunakan sebagai salah satu alat pengendalian PIP dengan target anak-anak.
- BPIP membumikan Pancasila kepada generasi milenial melalui pendekatan kekinian yang sesuai dengan minat generasi muda saat ini. Karakter Animasi Etus dan Elsi (tokoh super hero), PancaMain Indonesia (permainan tradisional Indonesia), dan film pendek Mangut Lele dan Merah Putih merupakan hasil kerjasama dengan Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Purna Paskibraka Indonesia, dan Kinarya Coop. Produk ini bertujuan agar terciptanya tokoh karakter Pancasila yang disukai anak-anak sehingga terwujudnya peningkatan kualitas karakter anak sejak dini serta sebagai alat pengendalian yang dibangun untuk sarana pembelajaran Pancasila dengan cara yang menyenangkan menyasar mulai dari anak-anak hingga kalangan dewasa. Bapak Presiden Joko Widodo melalui video menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam ideologi bangsa harus terus ditanamkan kepada anak agar memiliki akhlak yang baik, memiliki sopan santun dan mau menghargai pendapat orang lain. Sejak kecil, anak-anak harus menanamkan nilai persaudaraan,

sikap toleransi dalam perbedaan agama, perbedaan suku dan golongan, saling tolong-menolong dan saling peduli. Perilaku tersebut harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari serta harus diinternalisasikan di dalam hati dan pikiran melalui dunia bermain. Presiden menyatakan, dengan bermain, anak-anak diharapkan dapat bergembira serta bersenang-senang bersama teman-temannya untuk mengenal lingkungan sekitarnya dan sekaligus membentuk mental dan karakter serta internalisasi nilai-nilai Pancasila.

- Sebagai langkah membangun pasukan pengendalian melalui komunitas binaan BPIP dan penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda, khususnya IPNU, harus mulai aktif berkontribusi untuk membangun bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- Peluncuran PancaMain Indonesia merupakan rangkaian dari kegiatan Perkenalan PancaMain Indonesia kepada lintas K/L. PancaMain Indonesia bukan hanya dalam konteks pelestarian budaya namun juga sebagai sarana pembelajaran Pancasila yang kekinian bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Pengembangan permainan tradisional dapat membantu permasalahan ekonomi di masa pandemi saat ini dengan mendorong UMKM, yaitu para pengrajin.
- Koordinasi Dengan Kabupaten Gianyar Dalam Rangka Pengembangan Produk Pancamain Indonesia. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadinya sinergitas antara BPIP dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gianyar serta pelaku UMKM pengrajin permainan tradisional di Gianyar. BPIP merekomendasikan Kabupaten Gianyar sebagai salah satu daerah yang akan menjadi sentra produksi PancaMain Indonesia melihat banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gianyar.
- Koordinasi Pengendalian PIP dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Koordinasi merupakan tindak lanjut pelaksanaan Ekonomi Pancasila di masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan dalam penyusunan usulan strategi dan arah kebijakan PIP yang dilaksanakan oleh BPIP di antaranya melalui penerapan pembangunan aplikasi *marketplace* hasil kerjasama BPIP dengan Purna Paskibraka Indonesia. Pusat Teknologi UGM menyambut baik kebijakan program BPIP khususnya dalam mengangkat ekonomi Pancasila yang disesuaikan dengan perkembangan digitalisasi, agar terimplementasi Ekonomi Pancasila di masyarakat. Saat ini Pusat Teknologi UGM turut mendampingi 11 Pasar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur dengan 2 (dua) pasar yang telah menerapkan digitalisasi pasar melalui penggunaan *website*, membentuk paguyuban sebagai bentuk organisasi pasar tersebut, dan koperasi sebagai keanggotaannya. Setiap pesanan yang masuk akan digilir kepada setiap penjual sehingga terjadi

pemerataan. Hal ini sebagai perwujudan gotong royong institusi pendidikan dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan ekonomi Pancasila melalui pengembangan ekonomi digital mulai dari bawah seperti pasar yang menimbulkan potensi ekonomi baru di masyarakat.

- Pemantauan penyusunan indikator nilai-nilai Pancasila dalam hukum Nasional. Indikator nilai-nilai Pancasila ini merupakan proses internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam hukum nasional dan peraturan daerah. Indikator ini sendiri akan digunakan sebagai standar dan kriteria pada evaluasi peraturan perundang-undangan, hukum nasional, dan peraturan daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
- Koordinasi PIP di Palu. Melalui koordinasi ini terjalin sinergitas dengan para pihak dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Kota Palu saat ini sedang bergerak menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam masyarakat melalui berbagai program, salah satunya melalui Satuan Tugas K-5 yaitu Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan. Banyaknya konflik yang bermunculan di masyarakat, salah satunya adalah perkelahian antar kampung/desa, Pemerintah Kota Palu memberdayakan Tokoh-Tokoh Informal dalam melakukan pendekatan sehingga saat ini konflik-konflik tersebut sudah mulai menghilang. Hal ini yang menjadi konsentrasi Pemkot Palu untuk menjaga nilai-nilai kekeluargaan, toleransi dan gotong royong dapat terinternalisasi ke dalam kehidupan bermasyarakat.
- Koordinasi Penyusunan Alur Pikir Dan Kerangka Logis Sistem Informasi Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Reguler PIP (Sipendekar Pancasila). Pandemi covid-19 sangat mempengaruhi kondisi masyarakat global khususnya masyarakat Indonesia yang mengakibatkan adanya pembatasan sosial sehingga seluruh kegiatan dilakukan dari rumah untuk mencegah penyebaran virus. Hal ini tentunya mengakibatkan pelaksanaan pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan menjadi tantangan bagaimana melaksanakan PIP agar tetap berjalan efektif dan berdampak positif.
- Dalam rangka mendukung pemerintah membangkitkan UMKM di masa pandemi covid-19, BPIP bekerja sama dengan Bukalapak dan menyasar para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. UMKM dan Pedagang Online Sebagai Benteng Ekonomi Pancasila di Masa Pandemi Covid-19 diharapkan dapat meningkatkan Aktualisasi Ekonomi Pancasila. Dampak Covid-19 sangat berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia, salah satunya yaitu mengubah perilaku masyarakat dan aktifitas ekonomi dari pola perdagangan *offline* ke *online* yang tentunya sangat berdampak kepada pedagang kecil. Sinergi peran pemerintah dalam pemulihan ekonomi KUKM yaitu dengan bantuan sosial, relaksasi dan restrukturisasi

kredit, insentif pajak, digitalisasi UMKM, pembiayaan modal kerja, aktivasi dan perluasan penyerapan pasar, dan konsolidasi brand. Terjadinya pandemi menghasilkan “Menuju Ekonomi dengan Basis Teknologi” dimana untuk UMKM dengan teknologi dapat menjalankan proses bisnisnya dan meningkatkan keuntungan dengan memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, dan juga membantu efisiensi usaha. Sedangkan untuk masyarakat umum, dengan adanya teknologi mampu mentransformasi kehidupan masyarakat dengan kemudahan akses informasi produk yang dibutuhkan masyarakat.

- Kontekstualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Dunia Pendidikan Di Kota Palu. Pentingnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan khususnya di generasi Z, di tingkat SD dan SMP, memahami bagaimana metode pendidikan karakter pancasila yang dilaksanakan, dan untuk memperoleh usulan langkah dan strategi bagi BPIP dalam menyusun kebijakan PIP.
- Koordinasi camat perbatasan di Batam sebagai tindak lanjut kerja sama BPIP dengan BNPP. Camat memiliki peran yang sangat strategis dan vital sebagai perangkat terdepan dalam konteks pengelolaan perbatasan negara dalam hal pelaksanaan urusan pelayanan kepada masyarakat, maupun urusan pemerintahan umum, yang meliputi PIP, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional. Oleh sebab itu penting untuk meningkatkan pemahaman terkait aktualisasi nilai-nilai Pancasila, agar ideologi Pancasila selalu menjadi bintang penuntun bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di perbatasan.
- Koordinasi camat perbatasan di Manado sebagai tindak lanjut kerja sama BPIP dengan BNPP. Dalam rangka memperkuat ideologi Pancasila di wilayah perbatasan Indonesia, BPIP bekerja sama dengan BNPP melaksanakan koordinasi Camat perbatasan di Manado, Sulawesi Utara. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat menjadi fokus BPIP sebagai bentuk upaya pencegahan paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Kondisi geografis Sulawesi Utara memiliki 12 pulau terluar yang berbatasan laut dengan negara Filipina, dengan kondisi beberapa pulau yang memiliki jarak lebih dekat ke Filipina dibandingkan dengan kota Manado ibukota Sulawesi Utara. Wilayah perbatasan laut Sulawesi Utara merupakan wilayah rawan perlintasan peredaran narkoba dan jaringan terorisme yang berafiliasi dengan Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Kompleksnya permasalahan yang ada dan vitalnya peran wilayah perbatasan sebagai benteng pertahanan NKRI, maka penting untuk dilaksanakannya penguatan PIP. Pemerintah khususnya melalui camat-camat di perbatasan,

harus memiliki upaya dalam menjaga keutuhan NKRI, ideologi Pancasila, dan nasionalisme masyarakatnya.

Camat perbatasan memiliki peran penting dalam melindungi negara, menjaga kedaulatan ekonomi kawasan perbatasan, penguatan PIP, dan implementasi Pancasila dalam kedaulatan pangan, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Camat harus bisa menjadi teladan dalam mengadaptasikan nilai-nilai pancasila di tengah-tengah masyarakatnya dengan pendekatan yang tepat dan kekinian.

- Kerjasama BPIP dan BNPP dalam Menggali Mutiara Pancasila Di Kawasan Perbatasan, Sambas. Sebagai tindak lanjut kerja sama BPIP dengan BNPP, melaksanakan kegiatan Menggali Mutiara Pancasila di Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. PIP di masyarakat saat ini dilakukan tidak lagi melalui indoktrinasi tetapi melalui pengenalan Pancasila dengan cara kekinian. BPIP memperkenalkan PancaMain Indonesia sebuah produk permainan tradisional Indonesia hasil kerjasama dengan KPOTI. Tujuan dari PancaMain Indonesia yaitu agar semua anak kembali bermain di lapangan, bergembira tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi. Dalam rangka mempersiapkan pasukan pengendalian di daerah-daerah, Kedeputan Pengendalian dan Evaluasi turut melaksanakan pertemuan dengan pengurus KPOTI dan PPI Provinsi Kalimantan Barat. Bertujuan untuk mensosialisasikan arah kebijakan Pengendalian PIP melalui permainan tradisional dan program pengendalian aktualisasi ekonomi Pancasila melalui pembangunan digital platform market place berbasis komunitas dengan prinsip nilai-nilai ekonomi Pancasila. Melalui permainan tradisional untuk mencegah diskriminasi dan perbedaan, serta internalisasi nilai-nilai pancasila yang terkandung didalamnya sejak usia dini.
- Pengendalian Aktualisasi Ekonomi Pancasila Di Kalangan Komunitas. Dalam rangka mencapai Indonesia yang mandiri dan teraktualisasinya ekonomi Pancasila, Komunitas yang berperan serta adalah : Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP), Perkumpulan Pengusaha dan Profesional NU (P2NU), dan Komite Permainan dan Olahraga Tradisional (KPOTI). Komunitas memiliki peran penting dalam membantu Kedeputan Pengendalian dan Evaluasi melaksanakan pengendalian aktualisasi ekonomi Pancasila di kalangan komunitasnya masing-masing serta membantu pemerintah mensosialisasikan dukungan legislasi melalui omnibus law, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Pemahaman tentang ekonomi Pancasila bukan hanya perihal ekonomi yang berkeadilan tetapi juga merupakan

gotong royong yang merupakan aktualisasi nilai-nilai ekonomi Pancasila di masyarakat

- Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian PIP Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui koordinasi ini Pemprov. Jawa Tengah dapat memahami arah kebijakan pengendalian aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui pengembangan permainan dan olahraga tradisional yang dikemas dalam konsep PancaMain Indonesia. Selain itu dukungan Pemprov. Jawa Tengah untuk memperkenalkan PancaMain Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung didalamnya kepada masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Konsep pembangunan PancaMain Indonesia, bukan hanya sebagai sarana pembelajaran Pancasila melainkan juga sebagai sarana pengembangan usaha untuk para pengrajin yang dapat berdampak terhadap ekonomi masyarakat khususnya pada kondisi pandemi saat ini. Gubernur Jawa Tengah menyambut baik kebijakan program BPIP, khususnya dalam mengangkat kembali permainan dan olahraga tradisional, untuk menjadi sarana pembentukan karakter bagi anak-anak Indonesia terutama anak-anak di Jawa Tengah.
- Pendidikan Kepemimpinan Berkarakter Komite Permainan Rakyat & Olahraga Tradisional Indonesia di Jawa Barat. Kegiatan Pendidikan Kepemimpinan Berkarakter adalah dalam rangka untuk membangun insan yang berkarakter kuat dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Melalui Pendidikan Kepemimpinan berkarakter ini diharapkan bisa mencetak pribadi yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang berkarakter kuat dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila agar bisa menjadi tauladan dalam berperilaku di tengah-tengah masyarakat.
BPIP mendorong KPOTI untuk menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dalam hal pembinaan atau pendampingan bagi UMKM permainan tradisional. KPOTI harus bisa menjadi pelaku UMKM yang bisa bertahan dengan inovasi-inovasi yang dilakukan. Pembuat produk mainan adalah pengrajin yang tergabung dalam koperasi. Dengan pendampingan dari pemuda-pemuda yang kreatif maka diharapkan para pengrajin tersebut dapat selalu berinovasi dalam membuat permainan tradisional sesuai dengan perkembangan masyarakat di era kekinian.
- Gotong Royong Membumikan Pancasila dan Nilai SGDs. Banyak hal dan cara kekinian yang digunakan untuk penyampaian aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda salah satunya yaitu melalui film yang merupakan salah satu alat pengendalian PIP. Sosialisasi dalam rangka pembuatan film yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan ajakan kepada masyarakat generasi milenial untuk bergotong royong dalam pembuatan film tersebut. Melalui film ini maka para pihak yang terlibat akan mengerti

pentingnya gotong-royong dan para penonton juga akan disuguhkan dengan perilaku-perilaku gotong royong yang terkandung di dalam film-film tersebut. Makna gotong royong yang sangat strategis dalam upaya perubahan mental seluruh masyarakat Indonesia khususnya di kalangan milenial, merupakan usaha dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Melalui pembuatan film juga merupakan wadah untuk generasi milenial yang mempunyai bakat terpendam dalam pembuatan film namun kesulitan untuk menyalurkan bakat terpendam tersebut. Gerakan 1000 mengajak para generasi milenial untuk bergotong royong dalam membuat 17 film tersebut di 17 provinsi yang akan dibuat oleh para pemuda dari berbagai wilayah Indonesia.

- Penguatan Karakter Kebangsaan Bagi Generasi Muda Melalui Permainan Rakyat Dan Olahraga Tradisional di Kalimantan Barat. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka penguatan karakter kebangsaan bagi generasi muda melalui permainan rakyat dan olahraga tradisional sehingga terciptanya generasi muda Pontianak yang berkarakter kuat dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila agar bisa menjadi tauladan dalam berperilaku yang sejalan dengan program BPIP menyasar generasi muda. Permainan tradisional yang merupakan salah satu alat pengendalian PIP, mengajarkan pentingnya gotong-royong. Jika ditelaah lebih dalam, permainan tradisional yang kita mainkan mengandung filosofi yang sangat dalam, bagaimana leluhur-leluhur kita menciptakan ragam permainan tradisional dengan menyisipkan makna yang sangat dalam untuk mendidik generasi penerusnya dengan cara mengaplikasikan ke dalam sebuah permainan. Melalui permainan tradisional, anak-anak di asah untuk menjadi lebih kreatif dan menjadi pribadi yang toleran dengan sesama serta sikap gotong-royong.
- Koordinasi Kasus Perundungan Siswi SMP Muhammadiyah Butuh Kabupaten Purworejo Dan Insiden Susur Sungai SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman. Pelaksanaan kegiatan koordinasi kasus perundungan siswi SMP Muhammadiyah Butuh Kabupaten Purworejo dan insiden susur sungai SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman dalam rangka menggali informasi mengenai kasus tersebut dan mengetahui implementasi pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan SMP Muhammadiyah Butuh dan SMPN 1 Turi sebagai bentuk pengendalian PIP. Koordinasi dilaksanakan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, SMPN 1 Turi Kab Sleman, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab Purworejo, dan SMP Muhammadiyah Butuh Kab Purworejo. Melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman didapatkan informasi bahwa banyak siswa yang tidak bersikap sempurna pada saat upacara ataupun saat

menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan tidak himat saat mengheningkan cipta. Berkaitan dengan peristiwa susur sungai yang memakan korban, Dinas Pendidikan menghadirkan sekitar 120 psikolog untuk memberikan pendampingan kepada siswa/i dan orang tua untuk menghilangkan trauma. Koordinasi dilanjutkan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga Kab Purworejo terkait dengan kasus perundungan dan PIP di kab Purworejo. Didapatkan informasi bahwa disana banyak tenaga pengajar yang sudah terpapar paham radikal dan mengajarkan ini kepada para siswa, diperlukan adanya *screening* terhadap tenaga pengajar dan pemberlakuan sanksi. Terkait dengan kasus perundungan disampaikan bahwa 3 (tiga) orang pelaku perundungan memiliki latar belakang keluarga yang *broken home*. Dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya pembangunan karakter anak sejak dini.

- Di tengah pandemi covid-19, BPIP ingin agar masyarakat tetap semangat dalam berkarir dan bisa mengambil sikap teladan dari tokoh-tokoh inspiratif untuk bisa bersama-sama lepas dari pandemi dan tentunya untuk mewujudkan Indonesia Maju. Pancasila mengajarkan kita untuk pantang menyerah selalu giat dan gigih untuk mewujudkan cita-cita tanpa menjadikan pandemi sebagai hambatan untuk tetap berkarya. Berkaitan dengan Hari Kartini, peringatan ini tidak cukup hanya sebatas acara seremonial saja tetapi masyarakat dituntut untuk bisa memaknai semangat perjuangan Kartini yang dapat diterapkan sebagai pemicu agar emansipasi dan kesetaraan gender bisa diterapkan di semua bidang.
- Sehat, Bahagia, Dan Berbudaya Di Rumah Melalui Permainan Dan Olahraga Tradisional. Dalam rangka pengendalian dan penyusunan usulan langkah dan strategi PIP di bidang pengkajian dan materi melalui giat permainan dan olahraga tradisional pada masa pandemi covid-19 melalui kegiatan dialog. Pandemi covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah saja membuat perasaan jenuh, BPIP dan KPOTI mengajak masyarakat untuk bermain permainan tradisional di rumah agar tetap merasa bahagia walau hanya berada di rumah.
- Belajar Pancasila Melalui Dongeng Dan Permainan Tradisional (BPIP – KPOTI - Global Sevilla School). Pentingnya membangun pemahaman aktualisasi nilai-nilai Pancasila sedini mungkin guna pengembangan karakter anak yang Pancasila. Banyaknya nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam dongeng dan permainan tradisional, dianggap menjadi media pengendalian PIP yang tepat di kalangan anak-anak. Masa pandemi covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah saja merupakan momen yang tepat untuk mempopulerkan kembali permainan tradisional dan dongeng.

- Koordinasi Pengendalian Dan Penyusunan Usulan Langkah Dan Strategi Di Bidang Pengkajian Dan Materi. Menyasar kepada pendidikan Pancasila di kalangan anak dan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2020. Tujuannya adalah mendorong keluarga untuk menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Untuk mewakili permainan tradisional dari setiap provinsi maka akan dipilih 34 permainan tradisional yang dimana BPIP akan menyisipkan nilai-nilai Pancasila pada 34 permainan tradisional tersebut. Melalui permainan tradisional diharapkan masyarakat akan mengerti makna di balik permainan-permainan tersebut sehingga akan berdampak positif terhadap keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu dengan permainan tradisional juga diharapkan tidak ada lagi individu-individu intoleran yang memperuncing perbedaan-perbedaan yang ada guna meminimalisir terjadinya konflik sosial.
- Koordinasi uji coba Panca Main Indonesia di Sumatera Selatan. Panca Main Indonesia digunakan sebagai alat pengendalian PIP di generasi muda dan sebagai pelestarian budaya agar generasi muda lebih mudah memahami nilai-nilai Pancasila yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
- Penyusunan Kajian Panca Main Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka review video pendek permainan tradisional yang akan ditayangkan pada peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020 dan membangun sinergitas antara BPIP dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan amanat Presiden untuk bekerja *extra ordinary*, terutama dalam mendukung program Bangga Buatan Indonesia. BPIP memandang bahwa permainan tradisional diperlukan sebagai media penerapan nilai-nilai Pancasila yang menarik untuk anak-anak. Berkaitan dengan Peringatan Hari Anak Nasional, BPIP akan meluncurkan Panca Main Indonesia pada momen tersebut dengan mengajak kementerian/Lembaga terkait untuk saling bergotong royong. Adapun Panca Main Indonesia terdiri dari Panca Gasing, Papancakan (Falling Sink Stone), Bola Lima (engkrak), Balap Jajar/Catur Jawa, dan Catur Teuku Umar. Terkait dengan promosi Panca Main Indonesia, Perpustakaan Nasional menyampaikan bahwa terdapat perpustakaan di 34 Provinsi dan 524 kab/kota yang memiliki ruang anak dan akan mendukung ke *market place*. Selain itu dari destinasi wisata hal ini juga bisa dikaitkan dengan komunitas pemuda-pemuda maritim dalam mempromosikan permainan tradisional.
- Panca Main Indonesia Kepada Kementerian/Lembaga. Perkenalan Panca Main Indonesia kepada Kementerian/Lembaga terkait yaitu: Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Perpustakaan Nasional. BNPT berpendapat bahwa Panca Main Indonesia sangat bagus untuk menangkal paham radikal, banyak anak-anak yang telah dicuci otaknya untuk membenci orang yang bukan dari kelompoknya dan telah diajarkan memainkan senjata dan membunuh. Hadirnya Panca Main Indonesia diharapkan anak-anak tersebut bisa memahami indahnyanya hidup bersama walaupun berbeda latar belakang. Kementerian PPPA mendukung Panca Main Indonesia. Permainan ini dapat membuat anak-anak Indonesia memiliki karakter yang kuat, berintegritas, dan hidup rukun tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dari usia sedini mungkin pentingnya mengajarkan anak untuk memiliki rasa cinta tanah air agar ke depannya negara Indonesia bisa terus ada dan abadi selamanya.

- Pembekalan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Paskibraka Tahun 2020. Pendidikan dan pelatihan Paskibraka bukan hanya sekedar latihan baris berbaris, mengibarkan dan menurunkan Bendera Pusaka, namun terdapat materi-materi untuk membangun pola pikir, wawasan, jiwa kepemimpinan para Paskibraka. Salah satu materi yang disampaikan yaitu sistem pembinaan Desa/Keluarga Bahagia yang bertujuan untuk mewujudkan kebiasaan hidup ber-Pancasila dengan keluarga bahagia, yang para anggotanya di tata atas dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa, serta memperoleh kemungkinan untuk mengembangkan sikap hidup positif, seperti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tertib, disiplin, gotong royong dengan penuh rasa kekeluargaan. Terdapat 5 (lima) sikap yang wajib diimplementasikan oleh Paskibraka yaitu beriman, disiplin, tanggung jawab, jujur dan loyal dan 5 (lima) perilaku yaitu bersahaja, tenggang rasa, saling menghormati, gotong royong dan tolong menolong yang semuanya merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila.
- Kajian Muatan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Peserta Sekolah Didik Dasar Dalam RPJMN Dan Renstra Kemendikbud. BPIP sangat mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud mengingat pentingnya penanaman nilai-nilai karakter anak sejak usia dini agar menciptakan generasi penerus yang bangga menjadi dan mencintai secara utuh adat istiadat, kebiasaan dan budayanya. Sebagai upaya agar pembelajaran mudah mudah dicerna dan dipahami serta sesuai dengan minat kebiasaan

anak, maka pendekatan yang harus dilakukan oleh pendidik yaitu dengan menggunakan alat seperti permainan tradisional, dongeng, cerita-cerita pendek, film animasi tokoh dan lain sebagainya. BPIP mengajak para pendidik di lingkungan Kemendikbud untuk berpikir kreatif dalam menciptakan karya yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran anak didik. Pembelajaran kreatif dapat dimulai dari melihat potensi daerahnya dan turut mengimplementasikan materi pembelajaran bagi anak didik dengan menjalankan 5 (lima) Program Aksi Nyata Revolusi Mental yaitu Indonesia Melayani, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, Indonesia Bersih, dan Indonesia Bersatu.

- Penyempurnaan produk Panca Main Indonesia. BPIP menggandeng komunitas untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat khususnya anak-anak terkait permainan tradisional yang sudah lama ditinggalkan dengan cara yang kekinian. Panca Main Indonesia sangat prospektif dilakukan di lingkungan keluarga. Melalui permainan ini diharapkan anak-anak bukan sekedar hanya bermain tetapi bisa menemukan Indonesia dan mencintai Indonesia. Panca Main Indonesia juga diharapkan bisa mengangkat perekonomian Indonesia serta bisa merambah dunia UMKM sesuai dengan jargon saat ini “Bangga Buatan Indonesia”.
- Perkenalan Pancamain Indonesia Dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Panca Main Indonesia merupakan sarana belajar menanamkan nilai Pancasila yang sarat dengan karakter budaya Indonesia. Melalui permainan ini diharapkan masyarakat Indonesia akan lebih mudah memahami nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga PancaMain Indonesia dibangun untuk melestarikan permainan tradisional yang berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk inovasi dalam PIP, diharapkan permainan tradisional dapat masuk ke dalam kurikulum sekolah sebagai model pembelajaran yang cair dan kekinian guna membangun karakter anak bangsa Indonesia..
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam rangka mensinergikan program kegiatan Tahun 2020 dan Tahun 2021.
- Pancasila Menjawab Tantangan Zaman Now. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas jaringan pengendalian PIP dengan media, melihat pentingnya peran media untuk membangun karakter generasi milenial yang cinta Pancasila. Lomba puisi diikuti oleh 250 peserta yang terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu siswa SMP dan siswa SMA/SMK/MA se-Sumatera Selatan. Melalui lomba ini diharapkan dapat menumbuhkan kembali pemahaman dan rasa cinta generasi milenial terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai bentuk

- apresiasi terhadap semangat para peserta, rencananya karya puisi yang dikirimkan oleh peserta akan dibukukan dalam bentuk buku antologi. Lomba Baca Puisi Virtual didukung penuh Disdik Provinsi Sumsel, Disdik Kota Palembang, BPIP, Pertamina EP, PT Pusri, Bank SumselBabel, dan PTBA.
- Perkenalan Panca Main Indonesia di Provinsi Bali. Kegiatan ini bertujuan agar terjadinya sinergitas antara BPIP dengan Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI), Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Purna Paskibraka Indonesia wilayah Bali. Sebagai wujud dari internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui budaya Indonesia yang kekinian, BPIP mengharapkan adanya sebuah destinasi wisata atau wahana permainan yang berisikan permainan tradisional Indonesia. Ada 2 K/L yang menjadi sasaran terkait dengan PancaMain Indonesia yaitu :
 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : dapat menjadi bagian kurikulum untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap warisan budaya Indonesia
 2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : dapat berkolaborasi dengan Taman Nusa Bali untuk dapat menjadi pusat pembelajaran permainan tradisional di Indonesia.
 - Pancamain Indonesia sebagai Bahan Pengendalian PIP dan Pembinaan serta Pengembangan UMKM dalam rangka Membangun Sinergi Lintas K/L/D guna Mewujudkan Ekonomi Pancasila, di Jawa Barat. ISBI Bandung memiliki dosen-dosen yang sejak lama telah menaruh perhatian besar terhadap permainan rakyat dan olahraga tradisional terbukti dari sejumlah riset terkait hal tersebut, dengan berbagai latar belakang keilmuan di bidang seni budaya yang mengkaji Pancasila. Berdasarkan hasil riset ISBI Bandung memandang perlu untuk mendirikan LEKASILA MAGATRA (Lembaga Kajian Nilai-Nilai Pancasila dalam Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional). BPIP mendorong pelaku usaha kecil menengah sektor kerajinan permainan tradisional bisa berperan dalam rantai pasok global. Dalam memacu daya saing usaha kecil menengah di sektor kerajinan dibutuhkan langkah sinergi bersama dari para pemangku kepentingan dalam bentuk *pentahelix*, yaitu akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media. Guna membuat produk industri yang kompetitif perlu adanya ketersediaan bahan baku, pemanfaatan teknologi, penguatan kualitas SDM, dan alur distribusi ke pasar yang lancar.

Kilas peristiwa strategis pelaksanaan pengendalian PJP



Kegiatan Pengendalian PIP



Keluaran Pengendalian PIP

B.2.2. Evaluasi PIP

Capaian **indikator kinerja utama Kegiatan** (keluaran) evaluasi PIP, yaitu :

Indikator Kegiatan 2.5			
Sasaran Kegiatan: 1. Terlaksananya Evaluasi PIP 2. Terlaksananya Evaluasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila			
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET
Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan PIP	3 Dok	3 Dok	 100%
Jumlah pembangunan dan pengembangan sistem evaluasi terpadu berbasis elektronik	1 Paket	1 Paket	 100% (aplikasi "Perisai Pancasila")
Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang Ideologi Negara	1 Dok	1 Dok	 100%
Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan Penyelenggara Negara dan ASN yang menentang ideologi negara	1 Dok	1 Dok	 100%
Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan Ormas, organisasi dan perusahaan asing, serta media yang bertentangan dengan Ideologi Negara/Pancasila	1 Dok	1 Dok	 100%

Tabel 17. Capaian IKU Evaluasi PIP

Rincian keluaran pelaksanaan evaluasi PIP, adalah:

1. Dokumen hasil evaluasi PIP bidang SKJ dan HAL
2. Dokumen hasil evaluasi PIP bidang Hukum, advokasi dan Pengawasan regulasi
3. Dokumen hasil evaluasi PIP bidang kajian materi dan diklat
4. Pengembangan aplikasi Perisai belum dapat dilaksanakan
5. Dokumen hasil evaluasi penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara
6. Dokumen hasil evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara
7. Dokumen hasil evaluasi dan penanganan organisasi masyarakat, organisasi dan perusahaan asing serta media yang bertentangan dengan ideologi negara/Pancasila

Kegiatan-kegiatan strategis yang telah mendukung capaian evaluasi PIP, yaitu:

- Pengukuran PIP di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai-nilai Pancasila sangat penting diterapkan bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara baik di pusat maupun di daerah. Untuk mengetahui adanya penyimpangan di kalangan Penyelenggara Negara dan ASN terhadap ideologi Pancasila, maka diperlukan adanya Evaluasi Pengukuran PIP bagi ASN. Perlunya sinergitas antara BPIP dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pelaksanaan pengukuran ASN di daerah dan perlunya adanya sosialisasi bagi Bakesbangpol di daerah sebagai mitra BPIP untuk pengambilan data pengukuran.
- Pengukuran PIP di lingkungan Perempuan. Perempuan memiliki peran strategis sebagai agen pemberi informasi yang benar kepada masyarakat khususnya di masa pandemi saat ini. Sebagai salah satu cara untuk mengetahui aktualisasi Pancasila kaum perempuan Indonesia, maka diperlukan adanya evaluasi PIP di lingkungan Perempuan. Pengukuran ini penting untuk pemetaan bagi BPIP agar dapat melaksanakan PIP dengan tepat sasaran.
- Pengukuran PIP di lingkungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jakarta. Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila bagi Pekerja Migran Indonesia mulai dari persiapan keberangkatan, saat bekerja di luar negeri sampai kembali ke Indonesia menjadi latar belakang pelaksanaan pengukuran di lingkungan PMI. Setiap Pekerja Migran harus memiliki jiwa Pancasila sehingga nasionalisme mereka tidak berkurang walaupun berada di luar negeri. Penguatan nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan sehingga tidak tergerus dengan nilai-nilai yang berlaku di negara dimana mereka bekerja.
- Koordinasi Pelaksanaan Pengukuran PIP di lingkungan Pekerja Migran Indonesia di Kepulauan Riau. Perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat yaitu BP2MI Tanjung Pinang, Badan Kesbangpol Prov Kepulauan Riau dan RPTC Tanjung Pinang guna kelancaran kegiatan. BP2MI Tanjung Pinang bertugas memberikan bantuan terhadap permasalahan PMI di Kepulauan Riau dan membantu memperlancar proses pemulangan PMI yang di deportasi dari Malaysia maupun Singapura. RPTC adalah lembaga di bawah koordinasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang memberikan layanan perlindungan awal, pemulihan psikososial, dan pemulihan kondisi traumatis yang dialami korban tindak kekerasan.
- Pancasila Dalam Tindakan, Gotong Royong Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru di Jawa Barat. Pentingnya peran perempuan khususnya yang tergabung di dalam organisasi

persatuan istri PNS/TNI/Polri seperti Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari, Jalasenastri, Persit Kartika Chandra Kirana, dan PIA Ardhya Garini. Dalam adaptasi kebiasaan baru, perempuan memiliki tugas yang multifungsi dan peran yang sangat penting bagi keluarga, lingkungan bahkan negara. Perempuan juga dapat berperan dalam membangun konten-konten positif untuk meredam berita bohong yang merebak di media sosial.

- Penyempurnaan Alat Ukur PIP. Diperlukan adanya pemutakhiran referensi dan literasi agar alat ukur PIP, bukan hanya untuk pengukuran indeks tapi juga bisa memotret kehidupan aktualisasi individu sebagai warga negara dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Pemanfaatan alat ukur agar bisa menjadi referensi untuk mengetahui seberapa efektif PIP yang telah dilakukan baik dari BPIP ataupun yang telah dilakukan oleh K/L lain. Diperlukan adanya reformulasi dari nilai-nilai yang ada dengan konteks yang terjadi pada saat ini.
- Pancasila Dalam Tindakan, Gotong Royong Meningkatkan Peran ASN Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru di DIY. Kegiatan ini dalam rangka menjalankan amanat dari prioritas nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara. Dilakukan pengukuran PIP di lingkungan Aparatur Sipil Negara kepada 100 peserta yang berasal dari pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan BKN Regional 1 Yogyakarta. Diharapkan peran penting ASN menjadi teladan bagi masyarakat dalam menyuarakan pesan positif untuk mematuhi protokol kesehatan. ASN harus menjadi insan Pancasila yang berkeadaban, berkebudayaan, kesadaran keberagaman, hingga bekerja untuk membangun dan merawat bangsa.
- Pancasila Dalam Tindakan, Peran ASN Dalam Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19", di Prov. Bangka Belitung. Evaluasi terhadap Penyelenggara Negara dan ASN yang menentang ideologi Pancasila, sekaligus untuk menjaring masukan terkait peran dan fungsi ASN sebagai teladan dalam pembumih nilai-nilai Pancasila melalui pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kapasitas ASN, khususnya di Provinsi Bangka Belitung.
- Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Lingkungan BP2MI Depok. Kegiatan menekankan agar pekerja migran Indonesia tidak lupa kepada Tanah Air Indonesia, khususnya harus tetap membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari walaupun sudah bekerja di luar negeri. Dilakukan

pengukuran PIP dengan pengisian kuesioner guna evaluasi PIP di lingkungan pekerja migran Indonesia.

- Aktualisasi Nilai Pancasila Di Lingkungan ASN Tenaga Pendidik Sebagai Teladan Pelayanan Masyarakat, pada Provinsi Gorontalo. Dalam rangka melaksanakan evaluasi PIP di lingkungan ASN dilakukan pengisian alat ukur di lingkungan ASN yang hasilnya adalah pemetaan aktualisasi nilai-nilai Pancasila oleh ASN di wilayah Gorontalo dan dijadikan sebagai bahan dalam menyusun rekomendasi PIP sebagaimana mandat RPJMN tahun 2020–2024.
- Aktualisasi Nilai Pancasila Di Lingkungan ASN Tenaga Pendidik Sebagai Teladan Dalam Bermasyarakat pada Provinsi Maluku. Dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan peran dan fungsi Tenaga Pendidik (guru-guru) dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan sebagai tauladan terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik dan lingkungan sekitarnya, dilakukan pengisian survei evaluasi PIP di lingkungan ASN.
- Aplikasi Serdadu Pancasila dan Simpul Kendali. Aplikasi-aplikasi ini merupakan salah satu wujud pemanfaatan teknologi di BPIP yang akan digunakan baik untuk internal ataupun eksternal BPIP. Aplikasi SiPendekar Pancasila untuk internal BPIP, Serdadu Pancasila akan digunakan untuk 18 K/L terkait sesuai program prioritas RPJMN PIP, dan aplikasi Simpul Kendali untuk PIP di lingkungan Kesbangpol Pemda.
- Penyusunan Interpretasi Data Evaluasi PIP. Didapati bahwa masing-masing alat ukur memiliki ciri khasnya tersendiri. Pelaksanaan pengukuran PIP pada tahun 2021 perlu peningkatan jumlah data yang diambil guna menunjang validitas data.
- Pengukuran Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Lingkungan Pemuda, di Sumatera Barat. Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dan Pengurus Karang Taruna Tingkat Provinsi Sumatera Barat mensinergikan informasi dan data terkait organisasi massa dan pemuda guna pengukuran aktualisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pemuda pada provinsi Sumatera Barat.
- Pengukuran PIP Di Lingkungan Pendidikan di Jakarta. Dalam rangka pelaksanaan pengukuran pelembagaan PIP di lingkungan pendidikan Tim ahli alat ukur di lingkungan pendidikan memberikan beberapa saran sebagai alternatif yaitu:
 1. Pelaksanaan pengukuran perlu dibiaskan/disamarkan agar hasil data yang didapatkan adalah murni jawaban yang ada di lingkungan pendidikan saat ini;
 2. Diperlukan adanya permohonan izin kepada para rektor universitas atau sekolah-sekolah yang dituju.

3. Diperlukan adanya stimulus menarik dengan contoh metode pengundian hadiah kepada target responden terutama pelajar dan mahasiswa agar mereka tertarik dan mengisi semua pertanyaan dengan jawaban murni. Alat ukur di lingkungan pemuda bertujuan untuk mengukur ideological rating dari responden terkait dengan aspek perilaku, kognitif, dan afektif untuk kemudian bisa dihitung berapa skala yang dihasilkan dari responden yang telah dipilih. Dalam menentukan letak sebaran survey sangat penting untuk dibagi menjadi 3 wilayah yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur agar data yang didapat tidak bias. Selain itu, pembagian 3 wilayah juga bertujuan agar sebaran survey dapat terpenuhi serta data yang diambil akan valid untuk mewakili subjek responden yang akan di analisa. Hasil dari pengukuran di lingkungan pemuda dan organisasi masyarakat didorong ke Kemenpora untuk dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembinaan pemuda Indonesia.
- Aktualisasi Nilai Pancasila Generasi Milenial Dalam Menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru di Jawa Barat. Pentingnya pembekalan kepada generasi milenial terkait aktualisasi nilai-nilai Pancasila terutama dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemic Covid 19 dengan tujuan membangkitkan rasa nasionalisme, cinta tanah air dan membangun kesadaran generasi milenial terkait perannya dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Evaluasi PIP di Lingkungan Pemuda yang diikuti 103 peserta berasal dari anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Purna Paskibaraka Indonesia (PPI), Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU), Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI).
 - Peran Lembaga Dalam Aktualisasi Nilai Pancasila Generasi Milenial Di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengukuran lingkungan pemuda di Provinsi Sumatera Barat, tujuannya adalah mendapatkan masukan terkait dengan peran dan fungsi suatu Lembaga ataupun Organisasi dalam melakukan arahan, bimbingan, pelaksanaan dan tauladan tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada kaum muda
 - Pancasila Sebagai Pendidikan Karakter Bagi Tenaga Pendidik di DIY. Merupakan tindak lanjut pengukuran PIP di lingkungan Pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diperlukan adanya masukan terkait peran dan fungsi dari Tenaga Pendidik (guru-guru) dalam melakukan pelaksanaan kegiatan belajar dan tauladan tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, dilakukan pengukuran PIP kepada 100 peserta yaitu guru-guru SMA se-Yogyakarta.

- Kontekstualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Dunia Pendidikan Palu. Dialog dan pengukuran dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan terkait peran dan fungsi dari Tenaga Pendidik (guru-guru) dalam melakukan pelaksanaan kegiatan belajar dan tauladan tentang kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan, juga sebagai pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai amanat RPJMN 2020-2024.
- Partisipasi BPIP dalam 30 Tahun Ratifikasi Konvensi Hak Anak Dan Peringatan Hari Anak Sedunia. Sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi antara BPIP dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, sebagaimana arahan Presiden RI dalam Peluncuran PancaMain Indonesia pada peringatan Hari Anak Sedunia sebagai hadiah untuk teman bermain anak-anak Indonesia.
- Aktualisasi Nilai Pancasila di Lingkungan ASN Tenaga Pendidik Sebagai Teladan Pelayanan Masyarakat di Provinsi Gorontalo. Partisipasi 100 orang yang berasal dari ASN Dinas Kesbangpol Provinsi Gorontalo dan ASN Tenaga Pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo pada pengisian alat ukur di lingkungan ASN dan di lingkungan pendidikan yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi PIP.
- Aktualisasi Nilai Pancasila di Kalangan Mahasiswa Dalam Merawat Kebhinekaan di Masyarakat di Jawa Barat. Tujuannya adalah memperkuat pemahaman ideologi Pancasila, meneguhkan karakter, dan jati diri bangsa di kalangan generasi muda. Partisipasi dan peran strategis Mahasiswa dalam upaya mewujudkan Pancasila dalam tindakan yang dilakukan dalam kerja nyata, dikaitkan dengan Revolusi Mental. Dilakukan pengukuran PIP kepada mahasiswa sebagai data untuk diolah pada evaluasi tenaga pendidik yang menentang ideologi Pancasila.
- Aktualisasi Nilai Pancasila di Lingkungan Pendidik Sekolah Tingkat Menengah di Kabupaten Jember. Ddalam rangka tindaklanjut pengukuran lingkungan Pendidik dan Tenaga Pendidik di Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan sebelumnya dimana dianggap perlu adanya peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik khususnya pada tingkat sekolah menengah. Dilakukan kembali pengukuran PIP di lingkungan pendidikan yang akan digunakan sebagai data untuk diolah pada evaluasi tenaga pendidik yang menentang ideologi Pancasila.
- Survei pelembagaan Pancasila pada Camat Perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara. Survei dilaksanakan untuk mengetahui pemahaman para Camat dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan untuk pengayaan data bagi BPIP sebagai dasar penyusunan kebijakan PIP.
- Koordinasi Membangun Sinergi Lembaga Daerah Dalam Pelaksanaan PIP di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koordinasi dengan Balai Rehabilitasi

Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramita di Mataram dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pelaksanaan PIP. Koordinasi dilaksanakan untuk membangun sinergi dan kerjasama antara BPIP dengan lembaga-lembaga di daerah khususnya dengan lembaga pengembangan sumber daya manusia maupun pusat-pusat pendidikan dan pelatihan. Rencana kerjasama yang akan dibangun adalah dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan bersama, pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki, serta pemanfaatan para widyaiswara. BRSAMPK Paramita adalah Unit Pelayanan Teknis di bawah Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial yang bertugas untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan jangkauan wilayah tugas meliputi Nusa Tenggara Barat, Bali dan Sulawesi Barat. Selanjutnya tim berkunjung ke Badan Pengembangan Sumber.

Kilas peristiwa strategis pelaksanaan evaluasi PJP



Kegiatan-kegiatan Evaluasi PIP



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PRODUK DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI TAHUN 2019



Halaman ini adalah ilustrasi. Tidak terkait langsung dengan penjelasan sebelum dan sesudah halaman ini.



DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

C. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Indikator SS

Indikator keberhasilan **sasaran strategis** adalah :

Penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila (Kerangka Pikir dan Dimensi Indikator Aktualisasi nilai-nilai Pancasila - 100%)

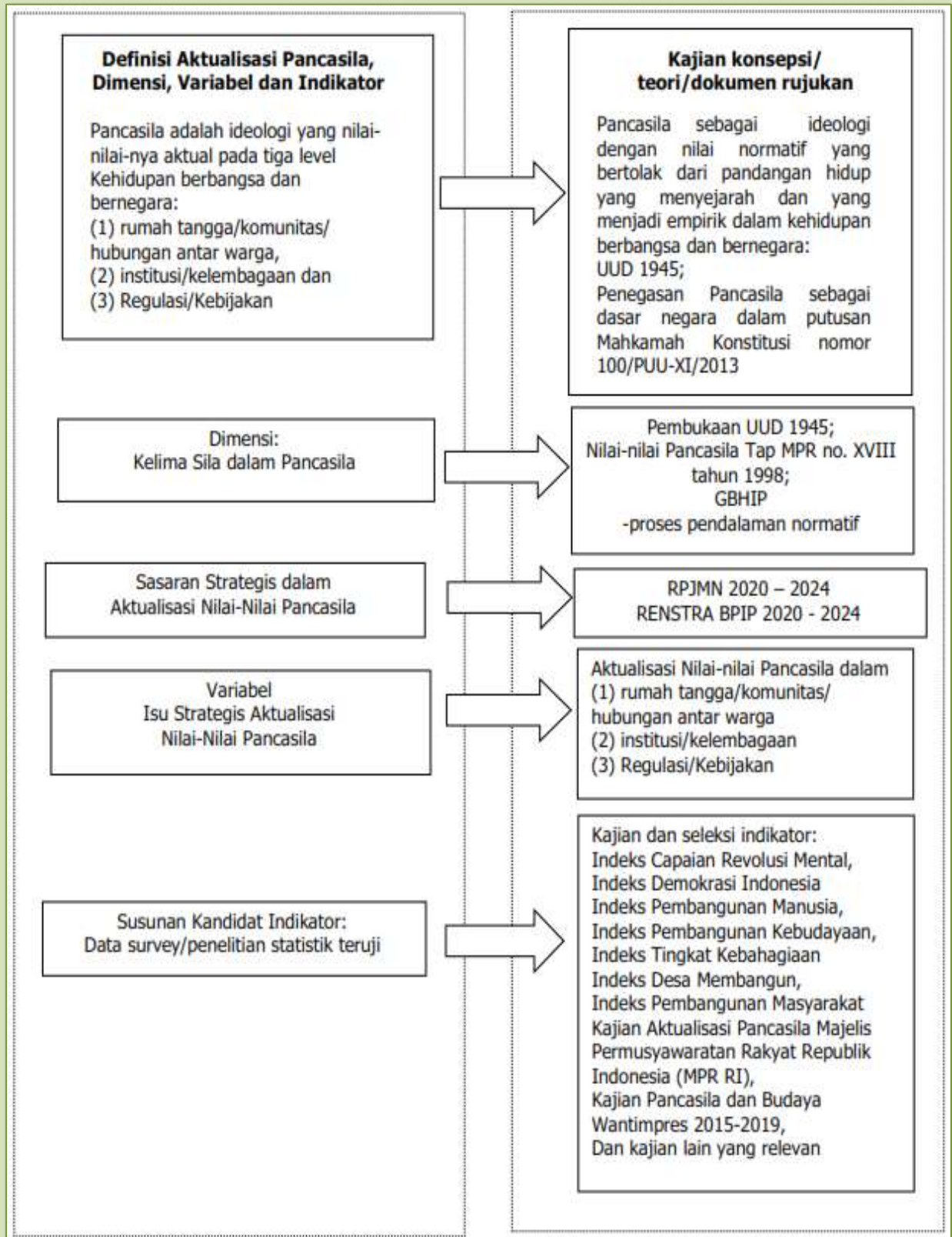


Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai situasi dan kondisi terkini pengamalan (laku hidup, habituasi) Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan tersebut akan dilihat dari aspek realisasi nilai dan persepsi yang akan dibuat dalam bentuk indeks. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kerangka konsep IAP akan secara operasional didefinisikan sebagai: Ideologi yang nilai-nilai-nya aktual pada 3 lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: (1) rumah-tangga/komunitas/hubungan antar warga, (2) kelembagaan negara (hubungan antar kelembagaan negara), dan (3) regulasi/kebijakan.

Dalam lingkup rumah tangga/komunitas/hubungan antar warga, kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dicermati dalam hubungan dan interaksi antar warga, bagaimana “merdeka-bersatu-berdaulat-adil-makmur” diperjuangkan. (Hubungan antar warga ini juga dinilai dalam bandingannya dengan beberapa pengukuran yang diselenggarakan oleh kementrian/lembaga, dengan berbagai konsep, istilah, dan kualifikasi).

Dalam lingkup kelembagaan negara, upaya mencapai tujuan berbangsa dan bernegara dicermati dalam struktur, kepemimpinan dan pelayanan sebagaimana yang dimandatkan oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam regulasi/kebijakan (produk dan proses), upaya mencapai tujuan berbangsa dan bernegara dicermati dalam regulasi dimana kemaslahatan- kebahagiaan bersama (al-masalahah al-ammah, bonum commune) diperjuangkan dalam suatu masyarakat bangsa yang majemuk.

Sistematika konsep dan rujukan penyusunan IAP adalah:



Gambar 7. Sistematika Kerangka Penyusunan IAP

Proses seleksi indikator dimaksudkan untuk menentukan indikator-indikator mana yang akan masuk sebagai penyusun Indeks agar dapat diperoleh IAP dengan komponen penyusun yang sederhana namun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari mulai level individu/rumah tangga, institusi/kelembagaan hingga Regulasi/Kebijakan.

Proses seleksi indikator tidak hanya berbasis pada teknik statistik dengan analisis faktor, melainkan juga dengan diskusi kelompok terpumpun bersama para ahli untuk menilai validitas teori di dalam indikator-indikator tersebut (*expert judgement*).

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, metodologi yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei opini publik terhadap masyarakat secara nasional yang terpilih menjadi responden. Penggunaan pendekatan kuantitatif dimaksudkan untuk memetakan opini responden dan menggali lebih dalam faktor-faktor yang ikut memengaruhi persepsi, sikap dan perilaku dalam mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipetakan melalui survei (kandidat indikator IAP, terlampir).

SASARAN PROGRAM 4:

C.1. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal

Pengembangan kebijakan/regulasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya Sistem Nasional Pendidikan dan PIP yang terstruktur, sistemik, dan masif sehingga perlu dirumuskan pengaturan yang komprehensif. Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan PIP merupakan implementasi dari Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan. Perumusan program teknis dilakukan untuk memastikan advokasi kebijakan strategis yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni terwujudnya pembumih Pancasila sebagai dasar negara sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan nasional, serta kehidupan bermasyarakat. Program teknis tersebut perlu dielaborasi dalam program jangka panjang Sistem Nasional Diklat PIP dalam rangka mendukung terwujudnya pembumih Pancasila bagi aparatur negara dan seluruh komponen bangsa menuju sumber daya manusia unggul pada saat Indonesia Emas Tahun 2045. Sedangkan program teknis jangka menengah, jangka pendek, serta tahunan dielaborasi secara komprehensif dan cascading dimana secara agregat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang tersebut. Sumber daya manusia Indonesia Emas tahun 2045 diharapkan mempunyai kecerdasan yang lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain untuk mendukung Indonesia sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban dunia. Pembangunan SDM unggul tersebut perlu dilakukan secara paripurna, tidak hanya membangun kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga membangun iman dan taqwa serta budaya sehingga menjadi insan-insan pembangunan yang religius, menguasai iptek, serta berbudaya luhur.

Salah satu upaya untuk membangun SDM unggul tersebut dilakukan dengan menyemai nilai-nilai luhur Pancasila sebagai hasil kristalisasi nilai-nilai luhur yang ada dalam praktik kehidupan keseharian bangsa Indonesia. Penyemaian nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi penerus bangsa,

terutama generasi milenial, dalam era Revolusi Industri 4.0 serta tahapan revolusi industri selanjutnya memerlukan strategi yang adaptif dengan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi. Interaksi generasi muda penerus bangsa dengan berbagai media sosial secara dalam jaringan (daring), seperti facebook, twitter, youtube, Instagram, whatsapp, telegram, dan lain-lain sudah sedemikian masif dan sudah bersenyawa dalam aktifitas kehidupan keseharian PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan sasaran program terselenggaranya pendidikan dan pelatihan PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal adalah:

Indikator SP 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	KET
Persentase hasil perencanaan dan kerja sama Diklat PIP yang ditindaklanjuti (dokumen perencanaan kebijakan strategis dan program teknis)	100%	100%	
Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	100% (120 guru PAUD)	97% (116 guru PAUD)	
Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	40% (100%=217 peserta)	96% (207 peserta)	
Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi (ToT)	40%	-	belum melakukan sertifikasi 
Sarana Diklat PIP yang dimanfaatkan	1 Paket	-	belum mempunyai sarana atau bekerjasama dengan balai diklat lain 

Tabel 18. Capaian IKU Pendidikan dan Pelatihan PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal

Realisasi capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerja Sama Diklat.

2. Dokumen Cetak Biru Sistem Nasional Diklat PIP bagi Orsospol dan Komponen Masyarakat Lainnya.
3. Terdapat 116 guru PAUD yang mengikut diklat dengan memanfaatkan standar dan kurikulum Diklat.
4. Peserta yang mengumpulkan aktualisasi sebanyak 207 (96%) orang dari sejumlah 217 (100%) peserta yang mengikuti diklat.

Langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan sasaran program terselenggaranya pendidikan dan pelatihan PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal adalah sebagai berikut.

C.1.1. Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Diklat PIP

Capaian indikator kinerja utama Kegiatan (keluaran) Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Diklat PIP, yaitu:

Indikator Kegiatan 1.4			
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pengendalian PIP			
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET
Jumlah dokumen perencanaan dan kerja sama Diklat	3 Dok	3 Dok	 100% (i) koordinasi perencanaan dan kerjasama diklat PIP (ii) kebijakan strategis dan program teknis perencanaan dan kerja sama diklat PIP (iii) dokumen cetak biru sistem nasional diklat PIP bagi orsospol dan komponen masyarakat lainnya

Tabel 19. Capaian IKU Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Diklat PIP

Kegiatan-kegiatan strategis yang telah mendukung capaian Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Diklat PIP, yaitu:

- Audiensi Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI:
Materi yang dibahas terkait dengan Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP serta rencana kerja sama dengan Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI).
- Audiensi Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP dengan Lembaga Administrasi Negara RI, tanggal 5 Februari 2020:
Materi yang dibahas terkait dengan Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP serta rencana kerja sama.
- Audiensi Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan RI:
Materi yang dibahas terkait dengan Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP serta rencana kerja sama.
- Audiensi Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI:

- Materi yang dibahas terkait dengan Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP serta rencana kerja sama.
- Audiensi Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri:
Materi yang dibahas terkait dengan Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP serta rencana kerja sama.
 - Kunjungan Kerja KPK ke BPIP terkait Tindak Lanjut Penyusunan MoU dan PKS antara BPIP dengan KPK tentang Kampanye Antikorupsi:
Materi yang dibahas terkait dengan Tindak Lanjut Penyusunan MoU dan PKS antara BPIP dengan KPK tentang Kampanye Antikorupsi.
 - Koordinasi Penyusunan/Arah Kebijakan Strategis dan Program Teknis Diklat PIP bagi Aparatur Negara (PNS):
Materi yang dibahas yakni Koordinasi Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP.
 - Audiensi Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri RI:
Materi yang dibahas terkait dengan koordinasi persiapan penyelenggaraan Diklat PIP bagi Praja IPDN.
 - Kunjungan Kerja IPDN ke BPIP terkait Tindak Lanjut Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP:
Materi yang dibahas terkait dengan Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP
 - Konsep Pemikiran Substansi Sistem Nasional Diklat PIP:
Materi yang dibahas terkait dengan Form Kerja Diskusi Kelompok Terpumpun (Konsep Pemikiran Substansi Sistem Nasional Pendidikan dan Pelatihan PIP).
 - Koordinasi Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Diklat:
Materi yang dibahas terkait dengan Laporan Triwulan I, list peserta Diklat PIP IPDN, sinkronasi RUP, identifikasi peserta dan narsum DKT.
 - Koordinasi Penyusunan Draf *Project Management*:
Materi yang dibahas terkait dengan Project Management.
 - Koordinasi Revisi SOP, Realokasi TOR/RAB Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Diklat Tahun 2020 terkait Pandemi Covid-19:
Materi yang dibahas terkait dengan Revisi SOP dan Realokasi TOR serta RAB Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Diklat Tahun 2020 terkait Pandemi Covid-19.
 - Koordinasi Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Diklat:
Materi yang dibahas terkait dengan Penyusunan POK Daring.
 - Koordinasi Kedeputan Bidang Diklat:
Materi yang dibahas terkait dengan pelaksanaan Koordinasi dan Program Kegiatan Deputi Bidang Diklat selama Pandemi Covid-19.

- Koordinasi Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Diklat:
Materi yang dibahas terkait dengan pelaksanaan webinar, Hari Lahir Pancasila, SOP Penyusunan kontributor, SOP Webinar.
- Koordinasi TOR dan RAB Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama untuk Renstra BPIP Tahun 2020-2024
Materi yang dibahas terkait dengan koordinasi TOR dan RAB Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Diklat untuk Renstra BPIP Tahun 2021-2024.
- Koordinasi Hari Lahir Pancasila:
Materi yang dibahas terkait dengan koordinasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila.
- Ngobrol Santai Alumni Diklat PIP:
Materi yang dibahas terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, kesulitan mengaktualisasikan, solusi aktualisasi, kondisi lingkungan yang menggambarkan atau bertentangan dengan Pancasila, masukan serta saran dari alumni Diklat PIP.
- Koordinasi dan Realokasi TOR dan RAB Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Diklat Tahun 2021
Materi yang dibahas terkait dengan TOR dan RAB Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Diklat Tahun 2021.
- Pengembangan Sistem Nasional Diklat PIP:
Perencanaan dan Kerja Sama Pengembangan Sistem Diklat PIP bagi Guru, Tenaga Pengajar, dan Dosen:
Materi yang dibahas terkait dengan pengembangan sistem nasional Diklat PIP khususnya perencanaan dan kerja sama Diklat bagi guru, tenaga pengajar, dan dosen.
- Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Kelembagaan Sistem Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara:
Materi yang dibahas terkait dengan perencanaan dan kerja sama aspek kelembagaan sistem pendidikan dan PIP bagi Aparatur Sipil Negara.
- Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Jejaring Kerja Sistem Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara:
Materi yang dibahas terkait dengan Perencanaan dan Kerja Sama Aspek Jejaring Kerja Sistem Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara.
- Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Standardisasi Penyelenggaraan Pelatihan untuk Pelatih (ToT) PIP bagi Aparatur Sipil Negara:
Materi yang dibahas terkait dengan perencanaan kebijakan program dan kerja sama standardisasi penyelenggaraan pelatihan untuk pelatih (ToT) PIP bagi Aparatur Sipil Negara.
- Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Kelembagaan dan Jejaring Kerja Sistem Diklat PIP bagi TNI dan Polri:

Materi yang dibahas terkait dengan perencanaan kebijakan program dan kerja sama aspek kelembagaan dan jejaring kerja sistem Diklat PIP bagi TNI dan Polri.

- Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Sumber Daya Sistem Diklat PIP bagi TNI dan Polri:

Materi yang dibahas terkait dengan perencanaan kebijakan program dan kerja sama aspek sumber daya sistem pendidikan dan pelatihan PIP bagi TNI dan Polri.

- Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Standardisasi Penyelenggaraan Pelatihan untuk Pelatih (ToT) PIP bagi TNI dan Polri:

Materi yang dibahas terkait dengan perencanaan kebijakan program dan kerja sama aspek standardisasi penyelenggaraan pelatihan untuk pelatih (ToT) PIP bagi TNI dan Polri.

- Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Kelembagaan dan Jejaring Kerja Sistem Diklat PIP bagi Organisasi Sosial:

Pembahasan materi dan tersedianya dokumen masukan terkait dengan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Kelembagaan dan Jejaring Kerja Sistem Diklat PIP bagi Organisasi Sosial.

- Penyusunan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Standardisasi Penyelenggaraan Diklat PIP:

Pembahasan materi dan tersedianya dokumen masukan terkait dengan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Standardisasi Penyelenggaraan Diklat PIP.

- Penyusunan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Kelembagaan dan Jejaring Kerja Sistem Diklat PIP Bagi Generasi Muda:

Pembahasan materi dan tersedianya dokumen masukan terkait dengan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Standardisasi Penyelenggaraan Diklat PIP.

- Perumusan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP:

Pembahasan materi dan tersedianya dokumen masukan terkait draf Perumusan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerja Sama Diklat PIP.

- Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Sistem Diklat PIP bagi Lembaga Media Massa:

Pembahasan materi dan tersedianya dokumen masukan terkait dengan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Sistem Diklat PIP bagi Lembaga Media Massa.

- Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Kelembagaan dan Jejaring Kerja Sistem Diklat PIP bagi Komponen Masyarakat Lainnya:

Pembahasan materi dan tersedianya dokumen masukan terkait dengan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Kelembagaan dan Jejaring Kerja Sistem Diklat PIP bagi Komponen Masyarakat Lainnya.

- Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Sumber Daya dan Standardisasi Sistem Diklat PIP bagi Komponen Masyarakat Lainnya:

Pembahasan materi dan tersedianya dokumen masukan terkait dengan Perencanaan Kebijakan Program dan Kerja Sama Aspek Sumber Daya dan Standardisasi Sistem Diklat PIP bagi Komponen Masyarakat Lainnya.

- Penyusunan draft Sistem Nasional Diklat PIP bagi Orsospol dan Komponen Masyarakat Lainnya:

Hasil rumusan Kebijakan Strategis dan Program Teknis yang terkait dengan perencanaan dan kerja sama di bidang Diklat PIP dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- Audiensi kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kalimantan Selatan dan Persiapan Lokakarya Nasional Sistem Nasional Diklat PIP Pelaksanaan kegiatan ini akan menjadi bahan yang harus ditindaklanjuti oleh BPIP khususnya Kedeputian Bidang Diklat melalui Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Diklat.

- Draft Sistem Diklat PIP:

Pelaksanaan kegiatan difokuskan untuk menghasilkan keluaran (output) utama yakni laporan hasil lokakarya berupa dokumen draft Sisnas Diklat PIP dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- Perencanaan Program Kerja Deputi Bidang Diklat Tahun 2021:

Pelaksanaan kegiatan difokuskan untuk menghasilkan keluaran (output) utama yakni laporan perencanaan program kerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021 yang terkait dengan perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan.

Kilas peristiwa strategis Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Diklat PJP



Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Diklat PJP.

C.1.2. Penyusunan Standardisasi dan Kurikulum Diklat PIP

Capaian indikator kinerja utama Kegiatan (keluaran) Penyusunan Standardisasi dan kurikulum Diklat PIP, yaitu :

Indikator Kegiatan 2.4			
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya standardisasi dan kurikulum Diklat PIP untuk Lokus I (Tk. Pusat), Lokus II (Sumatera-Jawa-Bali), dan Lokus III (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-NTB-NTT-Papua)			
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET
Jumlah dokumen standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	10 Dok	10 Dok	 100%

Tabel 20. Capaian IKU Standardisasi dan Kurikulum Diklat PIP

Penyusunan Standardisasi dan Kurikulum Diklat PIP menghasilkan dokumen pedoman pendidikan dan pelatihan PIP yang terdiri dari: (1) Aparatur Sipil Negara, (2) TNI, (3) Polri, (4) Organisasi Kemasyarakatan, (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, (6) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, (7) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi, (8) Pendidik dan Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (9) Generasi Milenial, dan (10) Komponen Masyarakat Lainnya. Keluaran tersebut tertuang dalam Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pendidikan dan Pelatihan PIP.

Kegiatan-kegiatan strategis yang telah mendukung capaian Penyusunan Standardisasi dan Kurikulum Diklat PIP, yaitu:

- Persiapan Penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi Generasi Milenial
- Persiapan Penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi Lembaga Pendidikan Formal
- Rapat Dalam Kantor Pembuatan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi Lembaga Negara, TNI, dan Polri Serta Pendidikan NonFormal (organisasi kemasyarakatan)
- Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi Lembaga Negara, TNI, dan Polri Serta Pendidikan Nonformal (organisasi kemasyarakatan)
- Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Menengah serta Pendidikan Tinggi

- Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan PIP bagi Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Generasi Milenial dan Komponen Masyarakat Lainnya
- Evaluasi Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi & Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan tahun 2020
- Harmonisasi antara BPIP dengan Kementerian Hukum dan HAM menghasilkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pendidikan dan Pelatihan PIP.

Kilas peristiwa strategis Penyusunan Standardisasi dan Kurikulum Diklat PJP



Kegiatan-kegiatan penyusunan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP.

C.1.3. Penyelenggaraan Diklat PIP

Capaian indikator kinerja utama kegiatan (keluaran) penyelenggaraan Diklat PIP, yaitu :

Indikator Kegiatan 3.4

Sasaran Kegiatan:

1. Terlaksananya layanan penyelenggaraan Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal & informal
2. Tersedianya tenaga pengajar Diklat PIP
3. Tersedianya sarana dan prasarana Diklat PIP

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET
Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan	1 Layanan (6 Diklat)	1 Layanan (2 Diklat)	33% Diklat bagi Guru SMU/SMK pelajaran PPKn, Diklat bagi anggota ormas provinsi DIY
Jumlah tenaga pengajar yang mengikuti ToT	100 Peserta	-	belum dilakukan ToT
Jumlah sarana dan prasarana Diklat PIP yang tersedia	1 Paket	-	belum mempunyai sarana atau bekerjasama dengan balai diklat lain

Tabel 21. Capaian IKU penyelenggaraan Diklat PIP

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020, khususnya penyelenggaraan Diklat banyak kendala yang dihadapi akibat adanya pandemi COVID-19 sejak triwulan I tahun 2020. Kebijakan-kebijakan pemerintah Pusat berupa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tiap provinsi maupun kabupaten serta penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penularan Covid-19, *social-distancing* berdampak pada pelaksanaan Diklat.

Diklat PIP merupakan Diklat yang menekankan pada pendidikan perubahan mental/sikap perilaku individu sehingga dapat memberikan teladan sosial di lingkungan sekitar. Penyampaian materi lebih bersifat interaktif dan native sehingga perlu adanya media tatap-muka langsung dan aktivitas lapangan. Beberapa kendala yang terjadi atas rencana Diklat antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Pembatalan pelaksanaan diklat bagi praja IPDN yang sedianya akan diikuti oleh 800 peserta para praja IPDN di Jatinangor, Bandung, Jawa Barat.
- b) Pembatasan peserta oleh pihak penyedia sarana-prasarana, akibat kebijakan PSBB dari pemerintah setempat.
- c) Kebijakan dari sekolah terhadap guru yang akan mengikuti diklat PIP, sebagai wujud kepatuhan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah setempat.

Hal tersebut di atas, berdampak pada perubahan tata-waktu dan perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang berakibat tidak tercapainya realisasi fisik dan penyerapan anggaran secara optimal.

Kilas peristiwa strategis penyelenggaraan Diklat PJP



Diklat PIP bagi Guru SMU/SMK di Bogor, Jawa Barat (5-7 Agustus 2020)



Pelaksanaan Diklat bagi organisasi masyarakat di provinsi DI Yogyakarta (9-11 Sept 2020)

D. Monitoring dan Pengendalian Realisasi Program oleh Dewan Pengarah BPIP

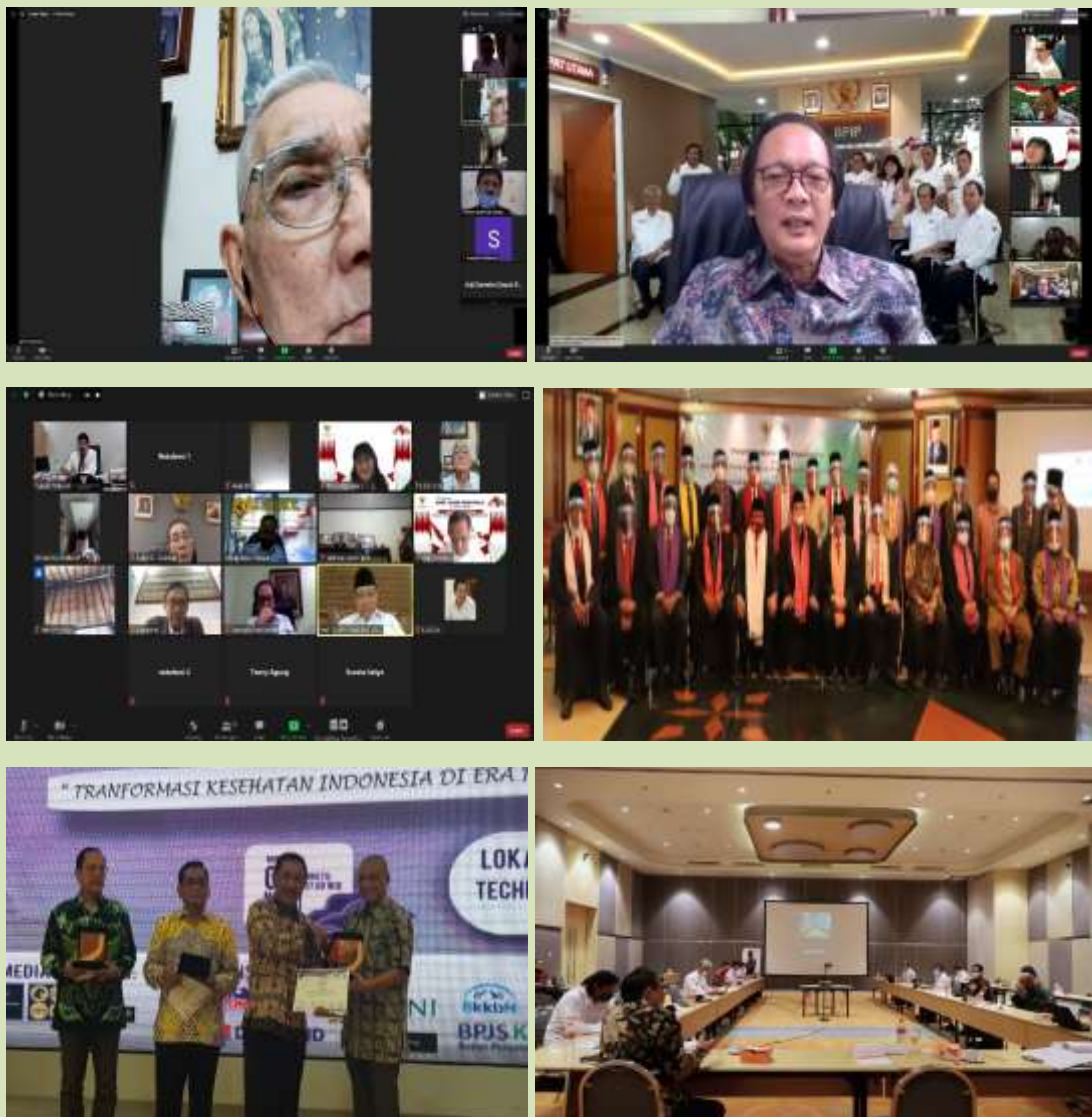
Dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP, serta realisasi program dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, Dewan Pengarah, Kepala BPIP, dan jajaran Pimpinan, serta Staf Khusus Dewan Pengarah melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pendampingan kepada unsur-unsur pelaksana BPIP. Secara rutin Dewan pengarah, dan Unsur Pimpinan, serta Staf Khusus Dewan Pengarah melakukan rapat terbatas dan rapat pleno.

Peran Dewan Pengarah BPIP sangat strategis dalam memberikan arah pada unsur Pelaksana BPIP terkait arah kebijakan PIP. Dewan Pengarah BPIP saat ini berjumlah 8 (delapan) orang, yang terdiri atas unsur tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, dan tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia.

Beberapa kilas peristiwa aktivitas Dewan Pengarah BPIP dalam memastikan jalannya PIP:







Rapat terbatas, rapat pleno, dan turun langsung Unsur Pimpinan dalam pelaksanaan PIP.

E. Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola BPIP yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya meliputi kegiatan Kesekretariatan yang diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Ukuran keberhasilan terwujudnya penyelenggaraan tata kelola BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel adalah:

Indikator SP Dukungan Manajemen BPIP

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET
Nilai Reformasi Birokrasi	81	44,14 (penilaian mandiri)	Peningkatan Tata Kelola BPIP 
Indeks Sistem Merit	0,61	316.5 (penilaian mandiri)	Penataan manajemen SDM BPIP (250-324) atau Indeks (0,61-0,8)=BAIK 
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Per-UU-an 
Nilai SAKIP	BB	B (penilaian mandiri)	Implementasi akuntabilitas kinerja organisasi 
Indeks Profesionalisme ASN	81	30	Mengukur kualifikasi, kompetensi, kinerja, disiplin ASN BPIP https://ip-jasn.bkn.go.id (diolah) 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	Tahap penyusunan peraturan juknis	Belum dilakukan Survey terhadap stakeholder yang mendapatkan manfaat dari BPIP

Tabel 22. Capaian IKU penyelenggaraan tata kelola BPIP

Peningkatan *learn and growth* (pembelajaran dan pertumbuhan) kapasitas organisasi, didukung oleh berbagai layanan yang diberikan kepada pihak internal BPIP dan K/L Pembina sebagai mitra BPIP dalam upaya penguatan kelembagaan, yaitu:

1. Layanan Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaaahlian;
2. Layanan Perencanaan dan Keuangan;
3. Layanan Hukum dan Organisasi;
4. Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia;
5. Layanan pengawasan Internal; dan
6. Layanan data dan informasi.

Indikator keberhasilan tata kelola BPIP menjadi perhatian (i) Kementerian PAN dan RB, KASN, BKN, Bappanas, BPK, dan Kementerian Keuangan dengan dengan berbagai ukuran, antara lain yaitu: indeks RB, nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), nilai sistem merit, nilai profesionalisme ASN, opini pada laporan keuangan, dan monitoring perencanaan dan keuangan, serta nilai-nilai lain yang tercakup pada dimensi hasil komponen penunjang implemtasi reformasi birokrasi. Capaian strategis tata kelola BPIP tahun 2020, yaitu:

a. Penataan organisasi

- Penyusunan desain organisasi yang sesuai Rencana Strategis, Peraturan BPIP Nomor 1 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP;
- Proses pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yg berpotensi dialihkan;
- Proses penyusunan kelompok jabatan fungsional yg sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi;
- Evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan, Peraturan Kepala BPIP No 79 tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis;

b. Penataan peraturan perundang-undangan

- Inventarisasi Peraturan BPIP yang telah diterbitkan, dan identifikasi tidak harmonis Peraturan BPIP yang telah terbit;
- Penyusunan peraturan dan SOP tentang pembentukan produk hukum BPIP;
- Pembentukan peraturan BPIP dan/atau produk hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan BPIP;
- Dereglasi produk hukum yang tidak harmonis;
- Digitalisasi produk dan informasi hukum yang siap *published* secara elektronik, dan penyediaan jaringan dokumentasi informasi hukum;

c. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
- Pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman disiplin;
- Seleksi pegawai tidak tetap;
- Penyusunan standar kompetensi jabatan;

- Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Nasional Tingkat I;
 - Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Penyusunan Peta Jabatan
- d. Penataan Tata Laksana
- Penyusunan dan Penetapan Peta Proses Bisnis
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- e. Penguatan Pengawasan
- Penyusunan kebijakan pengaduan masyarakat, dan *whistle blowing system*;
 - Penyusunan kebijakan penanganan gratifikasi;
 - Penyusunan kebijakan benturan kepentingan;
 - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - Pembangunan zona Integritas;
 - Partisipasi diklat/seminar/workshop dilaksanakan secara paralel dengan tugas pengawasan dalam rangka penguatan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP);
 - Pengembangan aplikasi Si-PION (Sistem Informasi Pengendalian Intern Online);
- f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Penyusunan peta strategi BPIP;
 - Penetapan produk hukum Indikator Kinerja Utama BPIP;
 - Monitoring dan evaluasi capaian kinerja (pengelolaan dan pengukuran kinerja) berbasis aplikasi Kementerian Keuangan dan Bappenas;
 - Penyusunan pedoman pengelolaan kinerja di lingkungan BPIP;
- g. Manajemen Perubahan
- Tim Reformasi Birokrasi;
 - Penetapan *Quick Win* BPIP;
 - Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 s.d. 2024;
 - Penetapan *agent of change*;
- h. Kualitas Pelayanan Publik
- Penyusunan Standar Pelayanan;
 - Peningkatan kapasitas manusia dalam mengimplementasikan budaya pelayanan prima;
 - Penyusunan pengelolaan pengaduan pelayanan;
 - Persiapan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan BPIP

Indikator kinerja masing-masing layanan pada program dukungan manajemen adalah terpenuhinya layanan sesuai tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama BPIP. Ruang lingkup capaian mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan BPIP yang bersih, efektif,

transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah sebagai berikut.

Layanan Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian

1. Notulensi Rapat Pimpinan dan notulensi Rapat Pleno bagi unsur pimpinan di lingkungan BPIP. Notulensi yang diberikan berupa ringkasan notulensi dan verbatim.
2. Pendampingan disetiap kegiatan yang dihadiri oleh Dewan Pengarah dan Staf Khusus Dewan Pengarah. Pendampingan tersebut merupakan pendampingan protokoler.
3. Membuat ringkasan berita yang dihadiri Staf Khusus Dewan Pengarah.
4. Dukungan administrasi kerumahtanggaan Dewan Pengarah dan Staf Khusus Dewan Pengarah

Layanan Hukum dan Organisasi

Penyusunan Produk Hukum:

- Peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Paskibraka
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan BPIP
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai BPIP
- Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020 - 2024
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Indikator Nilai Pancasila
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan BPIP
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Pedoman Pengukuran PIP
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP No. 2 Tahun 2018 tentang Kelompok Ahli
- Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan PIP
- Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan BPIP
- Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah

- Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower
- Dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BPIP
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan BPIP
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPIP
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Jaringan dan Dokumentasi Hukum BPIP
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Pelayanan Publik
- Rancangan Peraturan BPIP tentang Layanan Informasi Publik
- Peraturan Organisasi Paskibraka
- Produk Hukum Lainnya (Non Peraturan Perundang-undangan): 54 Keputusan, 14 Surat edaran, 56 Nota Kesepahaman, dan 11 Perjanjian Kerjasama

Penetapan, Pengundangan, dan Pendokumentasian Produk Hukum :

- Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020 - 2024;
- Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan PIP;
- Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan BPIP;
- Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah;
- Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila;
- Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP;
- Peraturan BPIP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPIP;
- Peraturan BPIP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai BPIP;

- Peraturan BPIP Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BPIP;
- Pembangunan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP (JDIH BPIP);
- Pemrakarsa Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2020 tentang JDIH BPIP;
- Terintegrasinya website JDIH BPIP dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Organisasi dan Tata Laksana:

- Draft Rancangan Revisi Struktur Organisasi BPIP
- Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan BPIP;
- Keputusan Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim RB di Lingkungan BPIP Tahun 2020;
- Keputusan Kepala BPIP Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peta Jalan(Road Map) Reformasi Birokrasi BPIP 2020 – 2024;
- Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 43 tahun 2020 tentang Tim PMPRB BPIP;
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPIP sampai dengan 31 Agustus 2020;
- Keputusan Kepala BPIP Nomor 81 Tahun 2020 tentang Agen Perubahan RB BPIP;
- Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
- Keputusan Kepala BPIP Nomor 79 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis BPIP;
- Keputusan Kepala BPIP Nomor 80 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan BPIP;
- Dokumen Pencanangan Zona Integritas BPIP;
- Dokumen dan Data dukung lainnya pada 8 area perubahan Reformasi Birokrasi;
- Laporan Kinerja Pokja Manajemen Perubahan;
- Laporan Kinerja Pokja Penataan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
- Laporan Kinerja Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi;
- Laporan Kinerja Pokja Penataan Tata Laksana;
- Laporan Kinerja Pokja Penataan SDM;
- Laporan Kinerja Pokja Penguatan Akuntabilitas;
- Laporan Kinerja Pokja Penguatan Pengawasan;
- Laporan Kinerja Pokja Kualitas Pelayanan Publik; dan

- Laporan Kinerja Capaian Quick wins RB tahun 2020.

Layanan Perencanaan, Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja

- Layanan perbankan berbasis non-tunai (cash management system);
- Layanan verifikasi pembayaran dan perbendaharaan;
- Penyusunan Laporan Keuangan BPIP TA 2019 dan Interim TA 2020;
- Pemutakhiran Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) TA 2021;
- Penyusunan Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024;
- Revisi DIPA BPIP TA 2020 dalam rangka penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 dan dalam rangka penyelesaian tunggakan pembayaran kegiatan TA 2019, dan Revisi regular;
- Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) BPIP Tahun 2021;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja 2020, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, dan Laporan Kinerja 2019; dan
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan menggunakan Aplikasi e-monev Bappenas dan SMART-DJA.

Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia

- Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
- Pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman disiplin;
- Seleksi calon pegawai negeri sipil BPIP, dan pegawai tidak tetap;
- Penyusunan standar kompetensi jabatan;
- Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Nasional Tingkat I, II, dan Pengawas;
- Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian;
- Penyusunan Peta Jabatan;
- Administrasi Kenaikan pangkat dan gaji berkala;
- Tata kelola gaji dan tunjangan kinerja pegawai;
- Pencegahan penularan Covid-19 melalui pengadaan rapid test dan swab test, pemberian dan penyemprotan disinfektan di lingkungan BPIP, pemberian masker, vitamin c, dan hand sanitizer;
- Pemenuhan kebutuhan keperluan perkantoran dan barang persediaan dan dicatat dan diinput menggunakan aplikasi SIMAK Persediaan;
- Keperluan operasional kendaraan dinas yang diperuntukan bagi unsur pimpinan yaitu kepala, wakil kepala, dan operasional kendaraan di lingkungan BPIP dengan cara bekerja sama dengan pihak Pertamina retail untuk melakukan pengadaan Voucher BBM tersebut;
- Pelayanan Service Kendaraan merupakan salah satu kegiatan pelayanan pemeliharaan untuk aset BPIP oleh karena itu servis kendaraan

mobil dinas merupakan sesuatu yang penting menjaga asset yang dimiliki dengan bekerja sama dengan pihak dealer terkait;

- Pembayaran Keperluan Kantor Berupa kebutuhan sehari – hari kantor yaitu pembayaran , jasa pembuangan sampah, internet kantor maupun rumah dinas unsur pimpinan;
- Pemeliharaan gedung kantor berupa perawatan berkala seperti kerusakan ac, toilet;
- Jamuan rapat merupakan aktivitas yang sangat sering dilakukan setiap hari untuk mengakomodasi dan mendukung kegiatan rapat dengan pegawai internal maupun lintas instansi yang melaksanakan rapat di lingkungan BPIP;
- Dana Operasional Kepala BPIP dan operasional BPIP dalam anggaran layanan perkantoran guna mendukung kegiatan kepala BPIP;
- Melakukan pengamanan terhadap lingkungan BPIP dengan cara menggunakan bantuan Bagian Keamanan Dalam untuk menjaga kantor untuk memastikan keamanan di lingkungan BPIP;
- Melakukan kegiatan keprotokolan umum untuk memudahkan koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP, khususnya ketika ada kegiatan rapat unsur pimpinan yaitu dewan pengarah dan juga kepala maupun wakil kepala BPIP, dan berkoordinasi dengan protokol lintas instansi untuk menjalin kemudahan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan BPIP maupun di luar instansi BPIP;
- Adminstrasi dan tata kelola persuratan unit kerja di lingkungan BPIP; dan
- Layanan pengelolaan aset dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPIP.

Pengawasan Internal

- Pengelolaan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan BPIP;
- Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal;
- Reviu Laporan Kinerja BPIP Tahun 2019;
- Pengawasan Pelaksanaan SKD CPNS BPIP Tahun 2020;
- Implementasi SPIP di lingkungan BPIP;
- Implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan BPIP;
- Evaluasi SAKIP BPIP Tahun 2019;
- Pengenalan program pengendalian gratifikasi di lingkungan BPIP;
- Evaluasi Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun Anggaran 2019 (BA 122) di Lingkungan BPIP

- Percepatan Penyelesaian Evaluasi Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun Anggaran 2019 (BA 122) di Lingkungan BPIP dalam Rangka Persiapan Audit Laporan Keuangan BPIP oleh BPK;
- Reviu Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN BPIP TA 2019 oleh BPKP;
- Reviu Laporan Keuangan BPIP TA 2019;
- Koordinasi dan Penguatan Tindak Lanjut Hasil reviu BPKP atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada BPIP TA. 2019 ;
- Verifikasi Tunggakan BPIP TA 2019 (BA 122);
- Reviu Atas Revisi Anggaran BPIP TA 2020; dan
- Reviu Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Belanja Modal BPIP Tahun 2020.

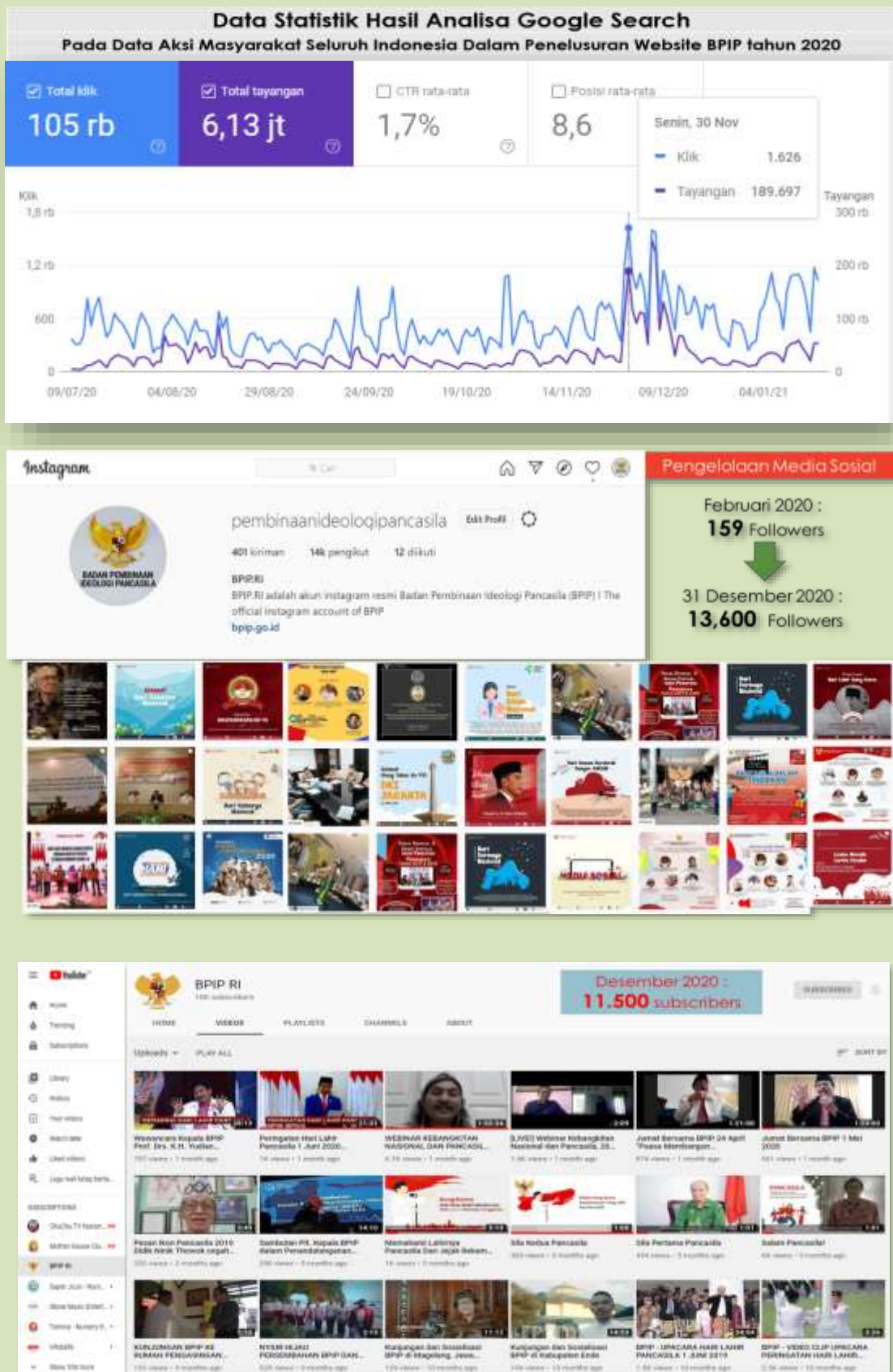
Pusat dan dan Informasi

- a) Layanan Jaringan berbasis wireless;
- b) Layanan informasi melalui website resmi BPIP dan e-mail resmi BPIP;
- c) Dukungan instalasi hardware dan software;
- d) Dukungan peliputan dan publikasi kegiatan-kegiatan di lingkungan BPIP; dan
- e) Pengembangan aplikasi guna penerapan e-government di lingkungan BPIP.

1. BPIP Portal (www.bpip.go.id)
2. BPIP Portal Backend (www.bpip.go.id/bpip/backend)
3. Email BPIP (<https://mail.bpip.go.id/>)
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum / JDIH (<https://jdi.bpip.go.id/>)
5. Aplikasi Pengukuran Indeks Pancasila BPIP (<http://perisai.bpip.go.id/>)
6. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis / SIKD BPIP (<http://sikd.bpip.go.id/>)
7. Sistem SDM BPIP RI (<http://sdm.bpip.go.id/>)
8. Absensi Fabiola NG (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fabiola>)
9. FNG Backend System (<https://app.bpip.go.id/fng/public/>)
10. Cloud Drive System BPIP (<http://cloud.bpip.go.id/>)
11. Sistem Informasi Agenda Kerja / SiAJA (<https://app.bpip.go.id/siaja/>)
12. Sistem Informasi Arsip Data Pegawai / SiATAP (<https://siatap.bpip.go.id/>)
13. Sistem Informasi Jurnal Kinerja / SiJUKI (<https://app.bpip.go.id/sijuki/>)
14. Sistem Informasi Perjalanan Dinas (<https://app.bpip.go.id/siperjadin/>)
15. Sistem Informasi Penyelarasan (<https://app.bpip.go.id/silaras/>)
16. Sistem Informasi Pembentukan dan Peraturan (<http://snipper-bpip.id/>)
17. Sistem Informasi Perhitungan Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai (<http://223.27.146.163:81/>)
18. SAS System (Desktop Application)
19. Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran (<https://sipa.bpip.go.id>)
20. Aplikasi Soal Pancasila – seleksi CPNS

Dukungan sistem informasi dan aplikasi berbasis online mendukung e-government BPIP.

Gambar 8. Profil Website dan Media Sosial BPPI



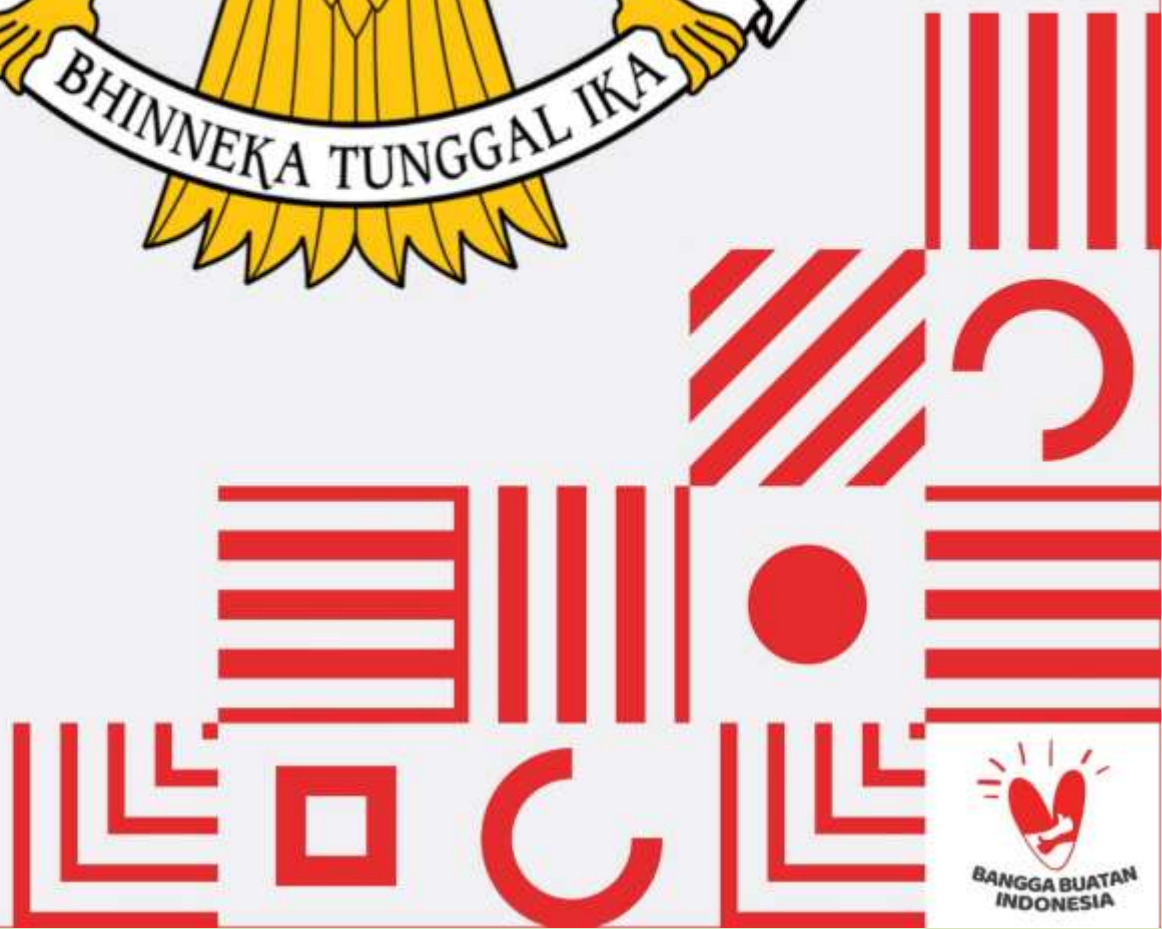
Gambar 9. Dashboard Aplikasi BPIP berbasis Web/Jaringan (Online)



Kilas peristiwa kegiatan dukungan manajemen BPJP

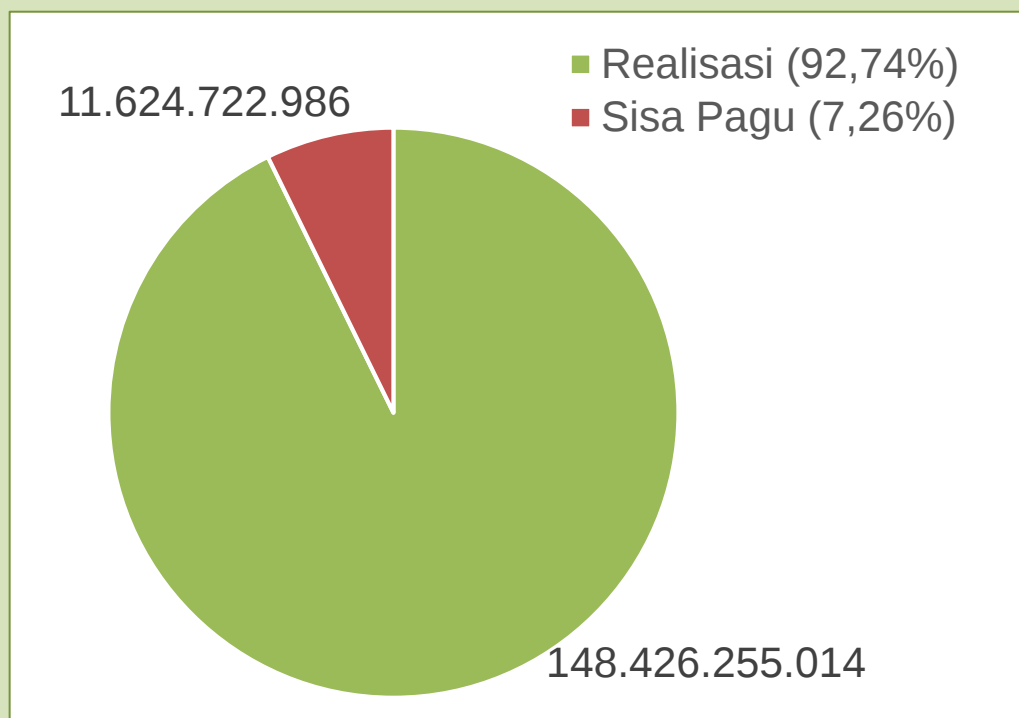






BAB IV | Kinerja Anggaran

BPIP mengelola alokasi anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 secara selektif dan efisien. Pagu awal sebesar Rp. 216.998.054.000 direvisi menjadi Rp. 160.050.978.000,- guna mendukung kebijakan refokusing anggaran pemerintah dalam rangka penanganan dan pemulihan wabah Covid-19. Dengan pagu anggaran yang relatif kecil BPIP turut menjadi bagian stimulasi ekonomi Nasional yang tengah lesu akibat Pandemi Covid-19. Hingga akhir Tahun Anggaran 2020 perbandingan antara sisa alokasi dengan realisasi anggaran adalah sebagai berikut.

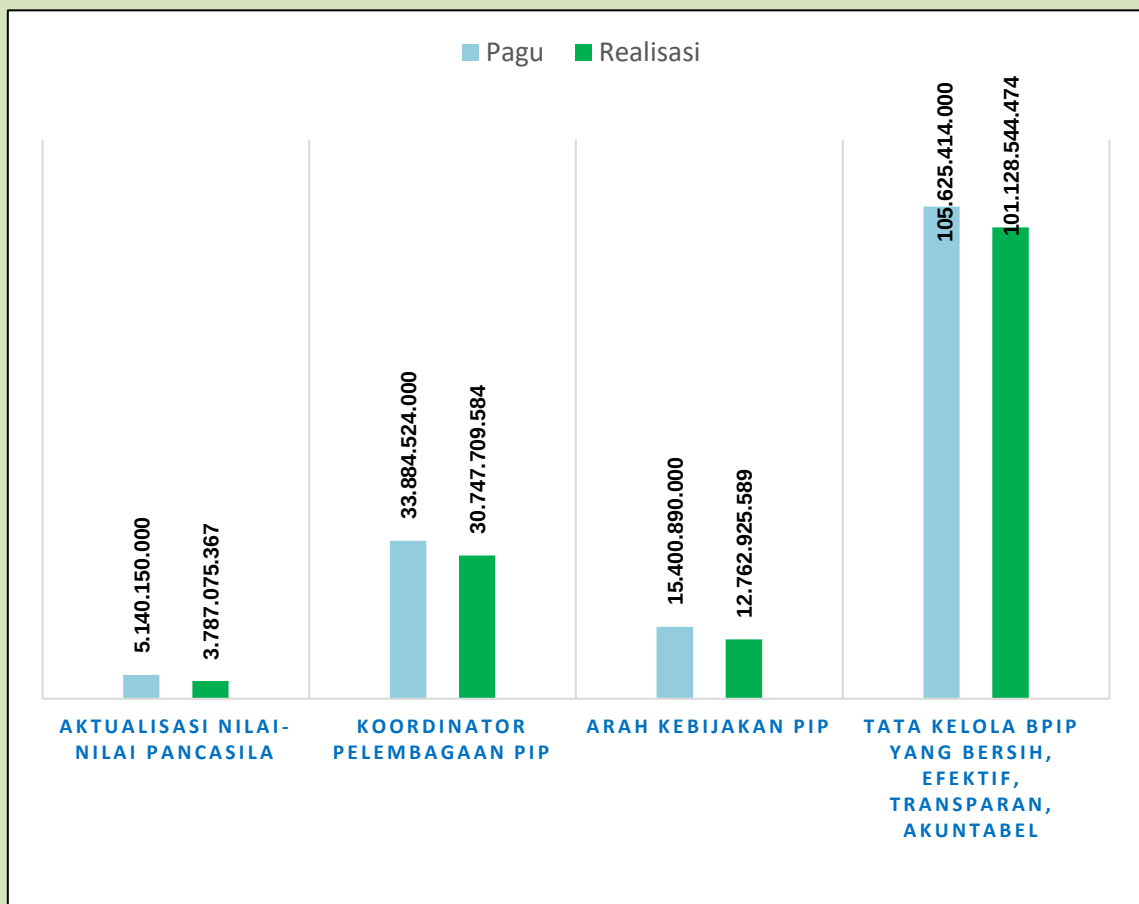


Gambar 10. Grafik Penyerapan dan Sisa Pagu Anggaran BPIP TA 2020

Setelah dilakukan efisiensi untuk program refokusing anggaran secara nasional, dari alokasi pagu yang ada, terealisasi sebesar Rp.148.426.255.014 atau 92,74%.

Pengelompokan realisasi anggaran sasaran strategis didukung oleh pelaksanaan program PIP. Kinerja anggaran dalam mewujudkan sasaran strategis perspektif stakeholder adalah sebagai berikut:

1. SS Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah implementasi dari penyelenggaraan pendidikan dan diklat PIP. Kinerja anggaran 74%.
2. SS Koordinator Pelembagaan PIP adalah implementasi dari hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, jaringan, pembudayaan, hukum, pengawasan regulasi, advokasi, dan apresiasi. Kinerja anggaran 91%.
3. SS Arah Kebijakan PIP yang terstruktur dan sistematis adalah implementasi dari pengkajian dan materi, pengendalian dan evaluasi PIP. Kinerja anggaran 83%.
4. SS Tata kelola BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel adalah implementasi dari program dukungan manajemen. Kinerja anggaran 96%.



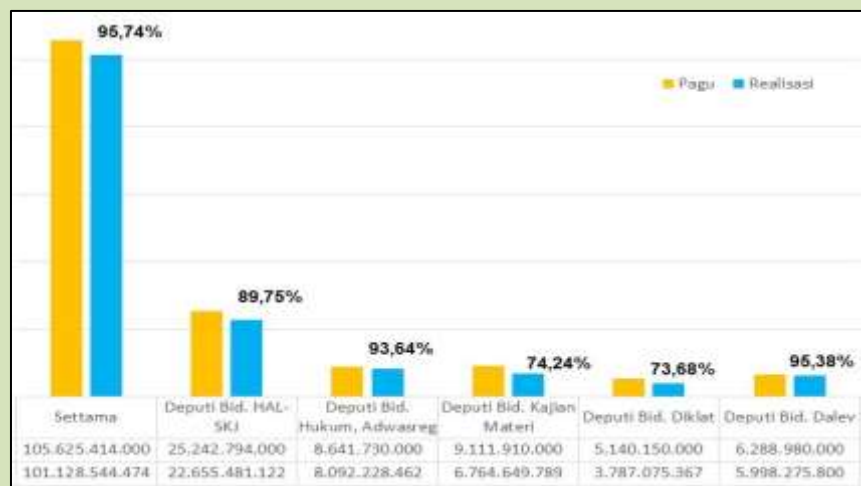
Gambar 11. Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Perspektif Stakeholder

Kinerja anggaran per program tahun 2020 dibanding tahun 2019 adalah sebagai berikut.

PROGRAM	PAGU (dlm ribuan)		REALISASI (dlm ribuan)		% Realisasi	
	TA 2019	TA 2020	TA 2019	TA 2020	TA 2019	TA 2020
Program PIP	198.219.284	54.425.564	77.899.431	47.297.710	39%	87%
Program Dukungan Manajemen	114.398.712	105.625.414	63.564.530	101.128.544	56%	96%
Total Anggaran	312.617.996	160.050.978	141.463.962	148.426.255	45%	93%

Tabel 23. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2020 dan 2019

Realisasi anggaran per sasaran program (Kedeputian/ Sekretariat Utama) adalah sebagai berikut.



Gambar 12. Grafik Alokasi & Penyerapan Anggaran Per Sasaran Program

Adapun perkembangan realisasi per triwulan selama TA 2020 adalah sebagai berikut.



Gambar 13. Grafik Perkembangan Penyerapan Anggaran per Triwulan Tahun 2020

Realisasi anggaran per kegiatan atau unit kerja eselon II TA 2020 adalah sebagai berikut.

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
Sekretariat Utama		105.625.414.000	101.128.544.474	95,74%	4.496.869.526
1	Biro Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaaahlian	1.700.000.000	1.481.979.563	87,18%	218.020.437
2	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	90.325.414.000	86.441.177.819	95,70%	3.884.236.181
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	4.600.000.000	4.488.690.854	97,58%	111.309.146
4	Biro Hukum dan Organisasi	2.000.000.000	1.886.600.055	94,33%	113.399.945
5	Biro Pengawasan Internal	1.000.000.000	969.623.941	96,96%	30.376.059
6	Pusat Data dan Informasi	6.000.000.000	5.860.472.242	97,67%	139.527.758
Kedeputian Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan		25.242.794.000	22.655.481.122	89,75%	2.587.312.878
1	Direktorat Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama	5.172.657.000	4.618.894.973	89,29%	553.762.027
2	Direktorat Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	14.910.339.000	13.993.609.195	93,85%	916.729.805
3	Direktorat Pembudayaan	5.159.798.000	4.042.976.954	78,36%	1.116.821.046
Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi		8.641.730.000	8.092.228.462	93,64%	549.501.538
1	Direktorat Analisis dan Sinkronisasi	2.698.808.000	2.653.907.130	98,34%	44.900.870
2	Direktorat Advokasi	2.607.685.000	2.459.045.568	94,30%	148.639.432
3	Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi	3.335.237.000	2.979.275.764	89,33%	355.961.236
Kedeputian Bidang Pengkajian Materi		9.111.910.000	6.764.649.789	74,24%	2.347.260.211
1	Direktorat Pengkajian dan Materi	3.021.636.000	2.360.825.125	78,13%	660.810.875
2	Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara	3.146.541.000	2.229.696.940	70,86%	916.844.060
3	Direktorat Standardisasi Materi, Bahan Ajar dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal	2.943.733.000	2.174.127.724	73,86%	769.605.276
Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan		5.140.150.000	3.787.075.367	73,68%	1.353.074.633
1	Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan	1.353.450.000	1.123.750.399	83,03%	229.699.601
2	Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	903.150.000	785.273.300	86,95%	117.876.700
3	Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2.883.550.000	1.878.051.668	65,13%	1.005.498.332
Kedeputian Bidang Pengendalian dan Evaluasi		6.288.980.000	5.998.275.800	95,38%	290.704.200
1	Direktorat Pengendalian	2.764.750.000	2.666.695.080	96,45%	98.054.920
2	Direktorat Evaluasi	3.524.230.000	3.331.580.720	94,53%	192.649.280
		160.050.978.000	148.426.255.014	92,74%	11.624.722.986



BAB V Evaluasi Dan Upaya Perbaikan

A. Nilai Kinerja Organisasi

Skema penilaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pengelolaan Kinerja BPIP yang saat ini sedang dalam tahap harmonisasi Kemenkumham membagi nilai kinerja entitas lembaga menjadi tiga, yaitu:

- Nilai Kinerja Instansi (NKI) rerata nilai kinerja dari indikator kinerja Sasaran Strategis BPIP;
- Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah rerata nilai kinerja dari indikator kinerja tingkat pimpinan tinggi madya atau indikator kinerja sasaran program unit eselon I; dan
- Nilai Kinerja Unit Kerja (NKUK) adalah rerata nilai kinerja dari indikator kinerja tingkat pimpinan tinggi pratama atau indikator kinerja sasaran kegiatan.

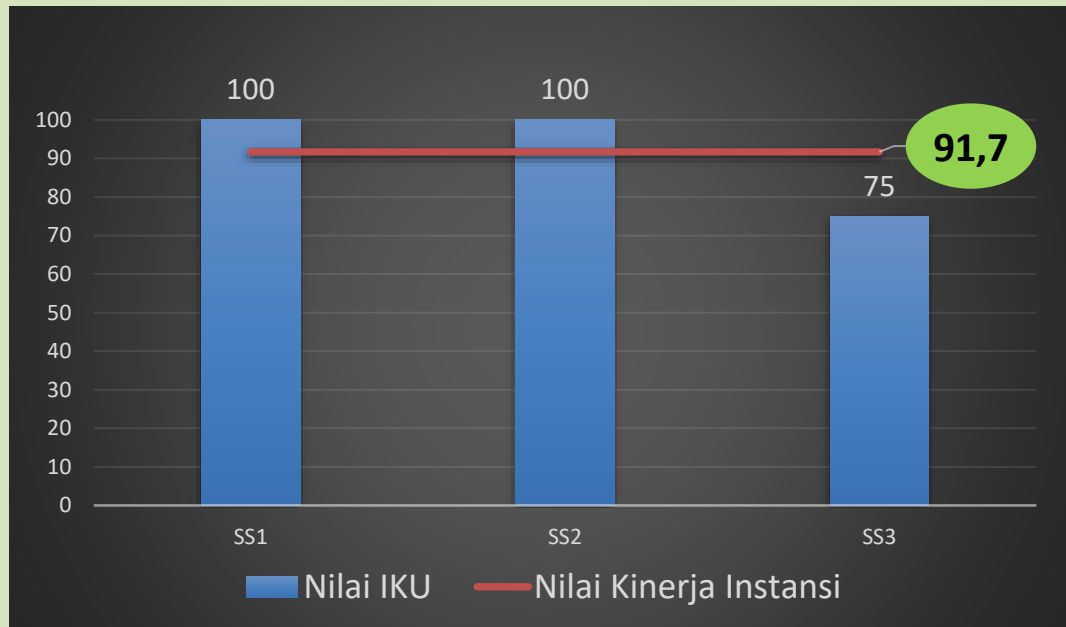
Rangkungan jumlah indikator kinerja utama dan status capaiannya hingga akhir tahun 2020 tampak pada dashboard berikut.



Gambar 14. Dashboard Jumlah Indikator dan Status Capaian Indikator

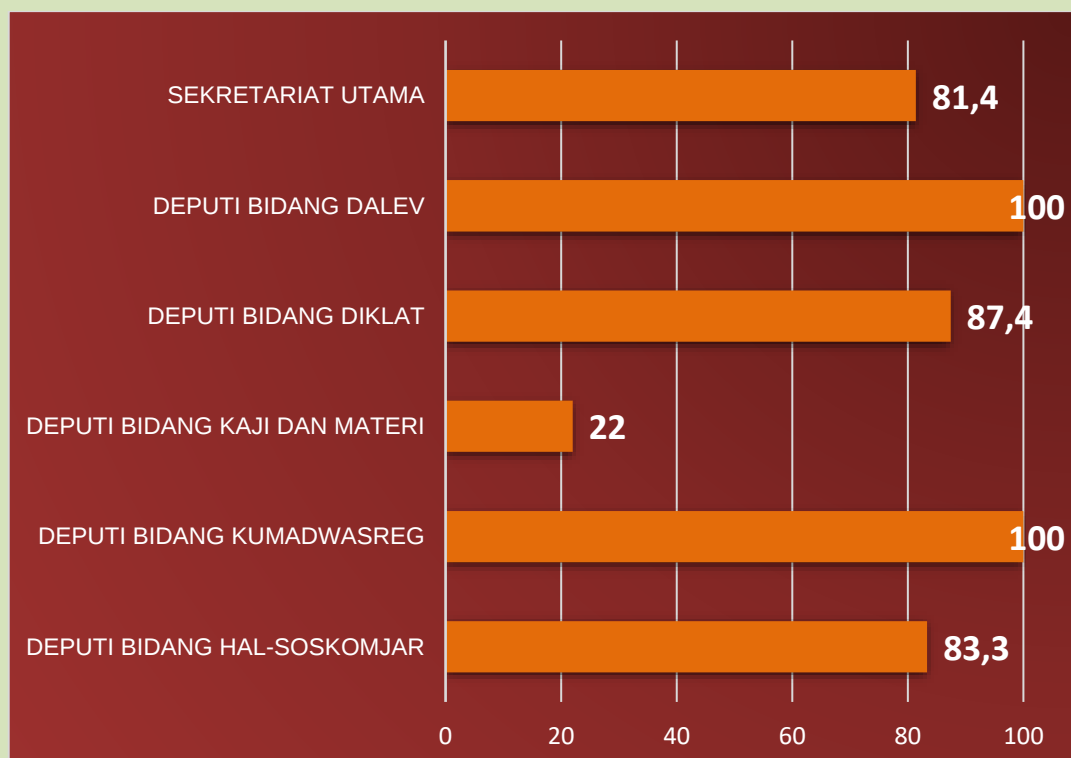
Berdasarkan capaian indikator kinerja masing-masing sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, maka nilai kinerja organisasi sebagaimana grafik berikut. (kertas kerja perhitungan nilai kinerja organisasi pada lampiran 4 laporan ini)

a. Nilai Kinerja Instansi/BPIP=91,7



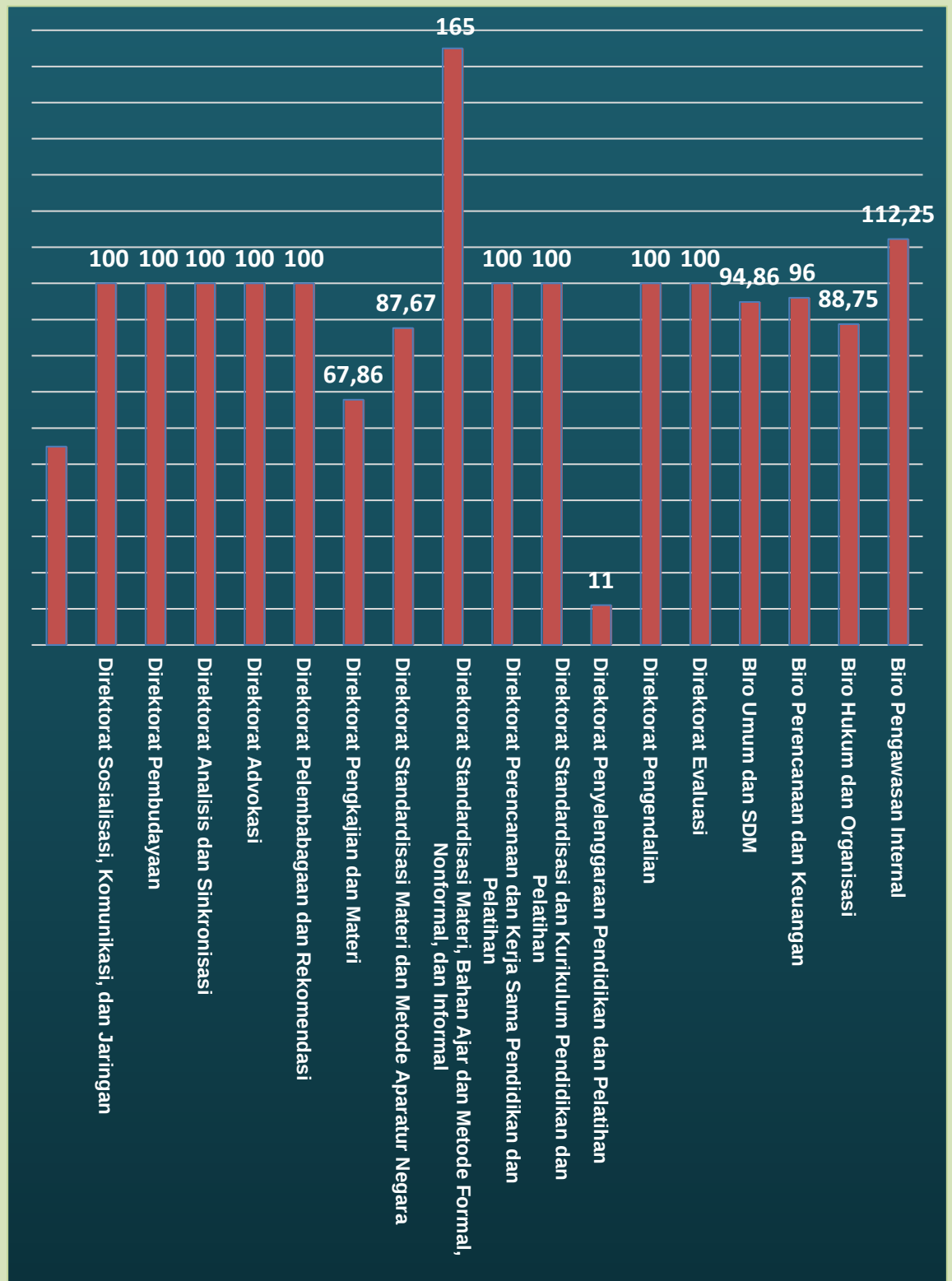
Gambar 15. Nilai Kinerja Instansi/NKI

b. Nilai Kinerja Organisasi/Tingkat Eselon I)



Gambar 16. Grafik Nilai Kinerja Organisasi/NKO

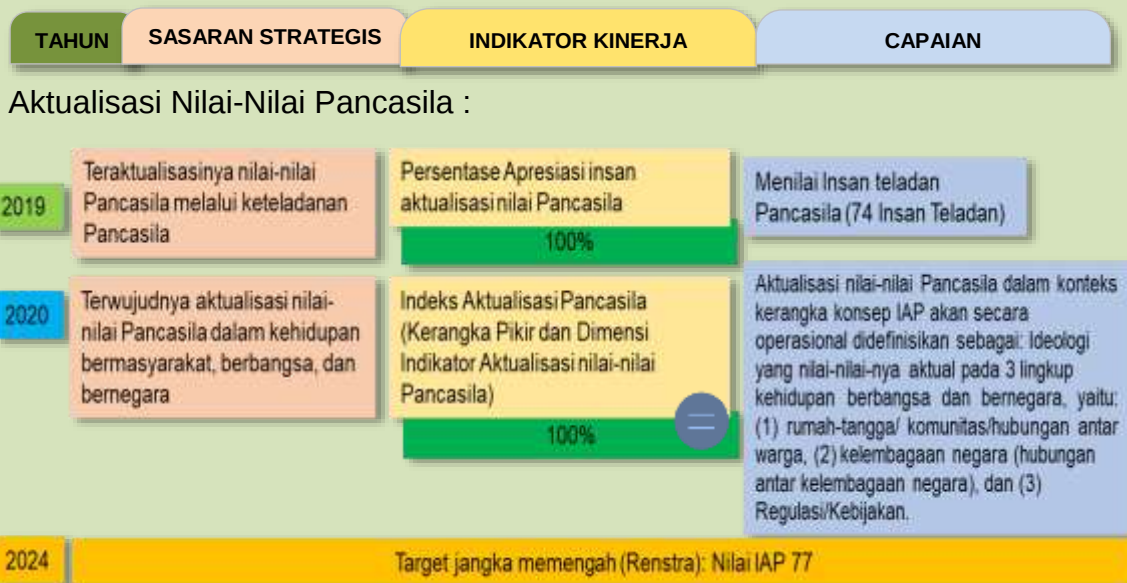
c. Nilai Kinerja Unit Kerja/Tingkat Eselon II



Gambar 17. Grafik Nilai Kinerja Unit Kerja/NKUK

B. Perbandingan Capaian Kinerja (tahunan, kontribusi sasaran Nasional)

Evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun, membandingkan tahun 2019 dan 2020. Tahun 2020 adalah masa transisi periode pembangunan 2020-2024. Tahun 2019 fokus strategi BPIP adalah bagaimana membumikan pancasila langsung ke masyarakat dengan kegiatan-kegiatan penanaman nilai-nilai pancasila melalui sosialisasi, seminar, dan penghargaan. Tahun 2020, strategi tersebut ditambah dengan upaya penguatan BPIP sebagai lembaga baru dengan prioritas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Merintis strategi kerjasama, rekomendasi, arah kebijakan, diklat, pengendalian dan evaluasi sehingga terwujud PIP yang terstruktur, sistematis, dan massif secara Nasional. Perbandingan kinerja 2020 dengan 2019 dan target jangka menengah (Renstra) adalah sebagai berikut.



Koordinator Pelembagaan PIP:

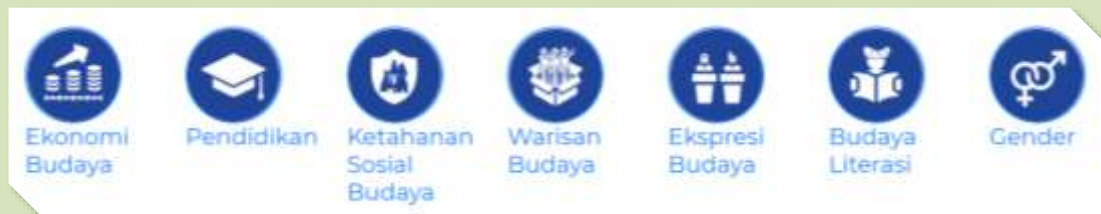


Arah Kebijakan PIP



Gambar 18. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahunan dan Target Renstra

BPIP melakukan penyesuaian arah kebijakan dan strategi mengikuti RPJMN 2020-2024. Pembinaan ideologi Pancasila terkait erat dengan visi peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui arah dan strategi Nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter. Salah satu indikator keberhasilan sasaran Nasional pembangunan karakter melalui strategi revolusi mental dan PIP adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK terdiri dari 7 dimensi yaitu:



Gambar 19. Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

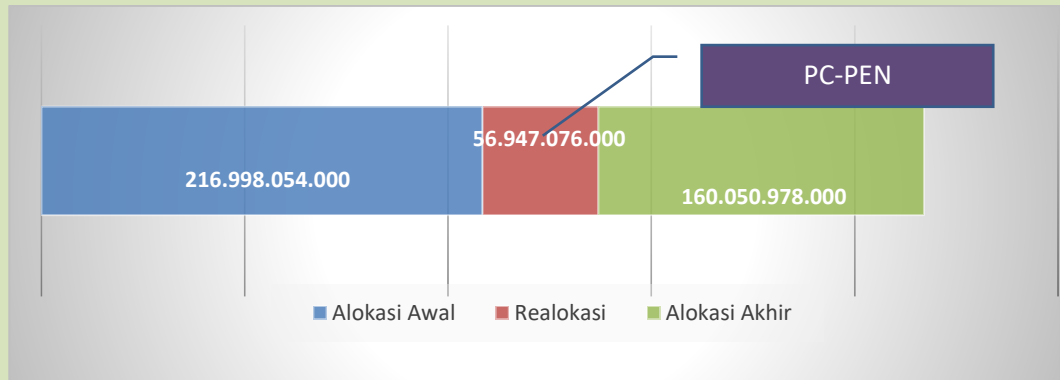
BPIP saat ini sedang menyusun Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) yang akan menjadi basis ukuran keberhasilan PIP secara Nasional. Sebelum IAP tersebut dapat digunakan dan diformalkan secara Nasional, program PIP yang dilaksanakan oleh BPIP memberikan kontribusi pada IPK khususnya dimensi Ketahanan Sosial Budaya. Capaian IPK sebagai baseline RPJMN 2020-2024 adalah 53,74 dengan distribusi nilai yaitu: ekonomi budaya (30,55), pendidikan (69,97), ketahanan sosial budaya (72,84), warisan budaya

(41,11), ekspresi budaya (36,57), budaya literasi (55,03), dan gender (54,97). Capaian terbesar adalah pada dimensi ketahanan sosial budaya.

C. Efisiensi Sumber Daya

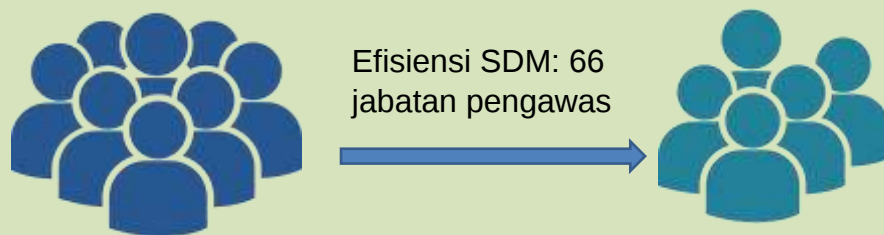
Tahun 2020 terdapat 3 upaya strategis BPIP dalam mewujudkan kinerja PIP dan dukungan manajemen, yaitu:

- a. Realokasi anggaran guna kepentingan nasional dalam rangka PC-PEN (Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional)

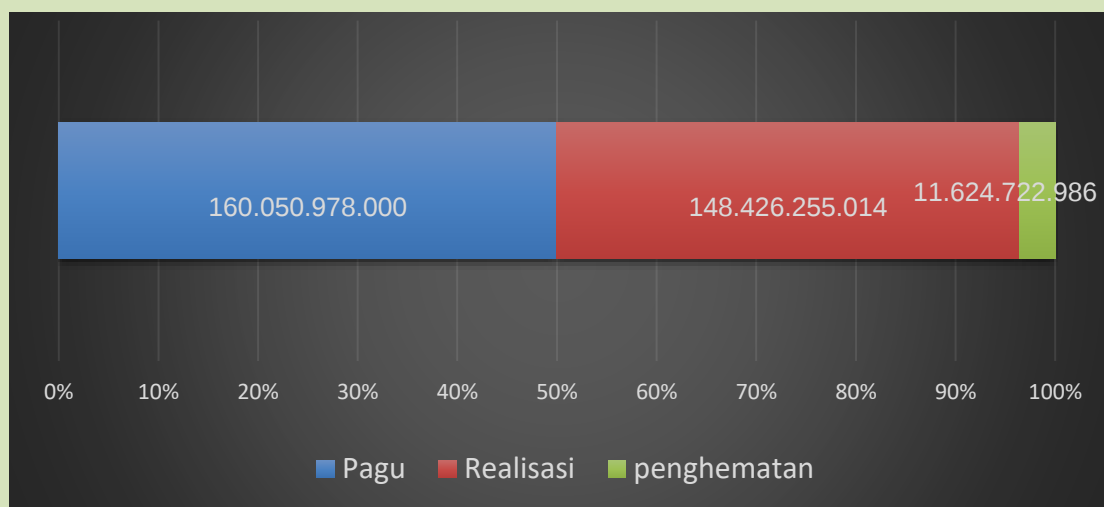


Gambar 20. Efisiensi Anggaran untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

- b. Struktur organisasi substantif tanpa pejabat pengawas



- c. Penghematan anggaran tahun 2020



Gambar 21. Penghematan Anggaran TA 2020

D. Kendala/Hambatan dan Tindaklanjut

Dari hasil monitoring dan evaluasi masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi unit kerja dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan. Terhadap kendala tersebut dilakukan upaya tindaklanjut. Usulan rekomendasi merupakan upaya perbaikan guna peningkatan kinerja di waktu mendatang. Kendala dan tindak lanjut, serta rekomendasi atau usulan perbaikan dikelompokkan per sasaran program.

- I. Kendala dan rencana tindak lanjut terwujudnya hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP:

Kendala	Tindak Lanjut
Dari 12 Kementerian Lembaga/ Orsospol ini hanya Balai Pustaka saja yang belum dilakukan akselerasi kerjasama/tindaklanjut ruang lingkupnya, sehingga jumlah persentase capaian program sudah dilakukan sebesar 100 %.	Dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Balai Pustaka
Target 17 komunitas pemberdayaan belum ada kegiatan yang direalisasikan dikarenakan rasionalisasi dan pengurangan anggaran	Jumlah target kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga yang menerima bantuan perlu dikurangi menjadi sebesar 7 Kelompok masyarakat sesuai alokasi anggaran yang tersedia
Sosialisasi Pancasila di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah/Masyarakat, dan pertemuan bulanan dengan pihak redaksi dan media tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka disebabkan situasi pandemi Covid-19	Sosialisasi Pancasila di Lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah dilakukan secara daring Pembuatan materi sosialisasi dalam bentuk video yang disebarluaskan melalui media sosial BPIP Pertemuan Bulanan dengan Pemimpin Redaksi/Wartawan/Pegiat Media Sosial dilakukan secara daring

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja terwujudnya hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP, yaitu:

- a) Upaya peningkatan kinerja ke depan diarahkan kepada peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak mulai dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan PIP;
- b) Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dan menyusun langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran, serta kesiapan penyesuaian bila terjadi optimalisasi/refocusing anggaran;
- c) Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan secara optimal terutama pantauan capaian kinerja dan penyerapan anggaran setiap bulannya sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi kegiatan rutin dilakukan agar setiap permasalahan yang terjadi dapat dilakukan perbaikan dengan cepat dan tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal;
- d) Peningkatan kompetensi SDM terutama untuk kompetensi yang menunjang kerja sama, antara lain kemampuan *legal drafting*, penyiapan kertas posisi, komunikasi, negosiasi dan diplomasi.
- e) Perlu disusunnya standar sosialisasi PIP, sehingga tersedianya materi sosialisasi PIP
- f) Perlu strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan *rating viewer* video-video pendek nilai-nilai Pancasila dan infografis yang sudah diproduksi dan telah diunggah pada media sosial BPIP sehingga sesuai dengan yang diharapkan.
- g) Perlu perhatian Pimpinan BPIP terkait implementasi IAP, dan koordinasi dengan BPS, serta pihak-pihak terkait guna penyusunan tahapan pelaksanaan kegiatannya.
- h) Penguatan nilai-nilai Pancasila perlu terus dilakukan secara berkelanjutan dalam upaya pembudayaan Pancasila (*bukan hit and run*), sehingga perlu melibatkan segenap potensi yang dimiliki.

II. Kendala dan rencana tindak lanjut terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi:

Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Revisi realokasi dan <i>refocusing</i> DIPA untuk percepatan penanggulangan dampak Covid-19 mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang telah direncanakan	Pengoptimalisasian SDM dengan menambah Pegawai Tetap

Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Koneksi dan alat penunjang daring yang tidak memadai seperti sinyal yang tidak kuat dan sering hilang serta <i>webcam</i> yang jumlahnya tidak memadai	usulan pengadaan alat untuk menunjang daring seperti penguat sinyal dan <i>webcam</i>
Fasilitas penunjang yang kurang memadai akibat keterbatasan alat penunjang kerja, khususnya bagi kegiatan yang berbasis internet/aplikasi seperti Penyelarasan (SiLaras).	Perlu adanya pengadaan alat penunjang kerja seperti komputer/ <i>laptop</i>
Kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) menyebabkan terjadinya perlambatan pendelegasian tugas sehingga mempengaruhi capaian kinerja	Mendorong Sekretariat Utama BPIP agar hasil lelang jabatan segera direalisasikan
Koordinasi dan komunikasi antara BPIP dengan pemerintah daerah masih kurang efektif	Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah secara berkala dan sinergi sehingga terjalin komunikasi dan kerjasama yg baik dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulas, yaitu: penguatan aktualisasi Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan guna membangun pelebagaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga tercipta pelebagaan Pancasila yang diarahkan pada ranah kebudayaan, politik, dan ekonomi. Pelebagaan Pancasila sangat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila sebagai habitus dalam penyelenggaraan negara dan partisipasi kewargaan. Proses pelebagaan dicermati dengan menilai dan mengolah penyelenggaraan negara dan partisipasi warga, serta membuatnya menjadi praktik berkelanjutan dengan sinergitas antar stakeholders.

- III. Kendala dan rencana tindak lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP:

Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Belum adanya acuan definitif terkait materi-materi pokok dalam standar yang akan dihasilkan.	Penyusunan Peraturan Badan tentang Materi Induk PIP.

Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Penerimaan K/L , Ormas/ Komponen Masyarakat Lainnya terhadap standar materi dan metode yang dihasilkan.	Pelaksanaan kegiatan akseptasi terhadap hasil standar materi dan metode yang telah disusun.

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP, yaitu: perlu sinergi dan integrasi dengan K/L yang terlebih dahulu berkaitan dengan ideologi Pancasila, sehingga perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP menjadi komprehensif dan dapat diterima.

IV. Kendala dan rencana tindak lanjut terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal

Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Tidak terlaksana agenda Diklat, terkendala akibat kebijakan pemerintah yang menerapkan metoda belajar bagi sekolah dan perguruan tinggi secara daring (online).	Melakukan kerjasama dan koordinasi teknis serta mengukur kapasitas sarpras dan jumlah peserta yang dapat mengikuti diklat sesuai aturan protokol kesehatan dan prinsip <i>social-distancing</i>
Beberapa peserta terkendala oleh ijin tugas oleh sekolah yang bersangkutan, terutama alasan PSBB di daerah maupun intruksi internal.	Membangun komunikasi dengan unit kerja pendidikan dan dinas pendidikan daerah dalam mensosialisasikan pelaksanaan diklat.
Adanya himbauan dari Pemda untuk tidak melakukan kegiatan dalam satu tempat lebih dari 50 orang	Melakukan koordinasi lebih intens dengan para pihak terutama dalam memberikan info kesiapan panitia khususnya dalam penerapan standar prokes selama pelaksanaan acara.

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/ keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal adalah:

- Menindaklanjuti hasil penyusunan dokumen cetak biru sistem Diklat PIP; dan
- Sebelum mendidik dan melatih pihak eksternal maka sebaiknya terlebih dahulu mendidik dan melatih pihak internal.

V. Kendala dan rencana tindak lanjut terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP

Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Belum adanya Pedoman Pengendalian PIP	Penyelesaian pedoman pengendalian akan dilaksanakan secepatnya
Kurangnya Pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi	Konsolidasi internal untuk penyamaan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi
SOP dan Standar Pelayanan yang belum terimplementasi dengan baik	Mendorong SOP yang telah disusun Sekretariat Utama agar disosialisasikan di lingkungan BPIP
Belum adanya arah kebijakan PIP.	Mendorong percepatan penetapan <i>roadmap</i> (peta jalan) PIP (GBHIP), sebagai acuan program BPIP sehingga dapat lebih terfokus dan terarah.
Belum adanya materi untuk pelaksanaan Diklat PIP.	Mendorong percepatan penyelesaian materi diklat PIP dengan pembentukan Tim Khusus Nasional Penyusunan Materi PIP dengan melibatkan Internal BPIP serta <i>stakeholder</i> K/L sebagai tim ahli penyusunan materi dengan mempertimbangkan kebutuhan materi dari masing-masing segmen
Kurangnya pemahaman terhadap Tusi dan tanggungjawab dari unit kerja.	Penguatan pengetahuan dari tugas dan fungsi unit kerja, koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi program kegiatan antar ke deputian sehingga dapat terjadi harmonisasi dalam menjalankan PIP secara keseluruhan.
Belum adanya panduan materi khusus untuk sosialisasi PIP secara umum.	Mendorong penyusunan panduan materi untuk sosialisasi Pancasila yang dapat digunakan oleh seluruh unit kerja di Kedeputian BPIP.
Belum tersusunnya standar materi untuk kalangan anak dan remaja secara eksklusif.	Mendukung penyusunan standar materi yang digemari oleh anak-anak dan remaja melalui film, musik, komik dan olahraga dan konten-konten kreatif lainnya.
Kurangnya khasanah dan perspektif tentang pelaksanaan dari Diklat PIP.	Mendorong pelibatan <i>stakeholder</i> yang telah lebih dahulu melakukan Pendidikan dan pelatihan tentang Pancasila, sehingga BPIP bisa mendapatkan masukan, pengayaan materi dari luar yang dapat dipadukan dengan sumber yang berasal dari internal.

Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Pelaksanaan kegiatan lebih bersifat sporadis dan kurang terfokus pada waktu dan output kinerja yang telah ditetapkan.	Monitoring kegiatan melalui Time Line yang telah dibuat, sehingga untuk kegiatan yang tertunda dapat ditindaklanjuti oleh para pimpinan Lembaga, terutama yang menjadi kinerja utama.
Target/segmen dari Diklat belum menjangkau sasaran yang strategis.	Mendorong pelaksanaan Diklat ToT (<i>Training of Trainee</i>) secara berjenjang & berkesinambungan terhadap beberapa segmen yaitu: (i) pendidikan formal, untuk tenaga pendidik dan kependidikan mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi; (ii) pendidikan non formal dan informal; (iii) ASN dan TNI-POLRI, terhadap para widyaiswara yang mengampu Diklatsar, manajemen, diklat PIM dan Sekolah Kedinasan serta Balai Diklat; (iv) Ormas dengan rujukan daftar ormas yang telah terdaftar di Bakesbangpol termasuk Parpol
Tingkat pemahaman terhadap Pancasila dan PIP dilingkungan BPIP yang beragam.	Mendorong program peningkatan kapasitas pengetahuan SDM dalam kegiatan <i>Capacity Building</i> tingkat internal BPIP secara berjenjang agar setiap pegawai internal BPIP punya tingkat pemahaman yang sama tentang Pancasila dan PIP;
Belum adanya pedoman Evaluasi PIP.	Mendorong disahkannya Pedoman Evaluasi PIP sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan.
Pelibatan Kedeputan Pengendalian dan Evaluasi di kedeputan I-IV yang masih kurang optimal.	Pelibatan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi untuk mengoptimalkan kinerja Badan dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP khususnya dalam tugas pengendalian & evaluasi PIP;
Belum dimanfaatkannya hasil pengukuran pemahaman Pancasila adanya koordinasi yang optimal dari penyusunan renja kedeputan.	Pemanfaatan hasil analisis data pengukuran pemahaman Pancasila dari berbagai responden yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagai masukan dalam pembuatan rencana kerja tahun berikutnya dan menentukan segmen, wilayah atau tujuan prioritas tahun selanjutnya.

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan sasaran program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

1. Penerbitan pedoman instrument untuk mengevaluasi kegiatan di kedeputan bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi untuk menilai atau mengukur tingkat keefektifan atau hambatan yang terjadi dalam suatu kegiatan;
2. Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Advokasi Pendampingan Kepada Masyarakat sebagai bentuk penanganan secara teknis terhadap ASN yang menentang Ideologi Negara;
3. Penerbitan Standar Operational Prosedur Pelaporan untuk Ikon Pancasila dari Masyarakat;
4. Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Direktorat Evaluasi, diperlukan kegiatan koordinasi lintas Kedeputan secara regular, dalam rangka memetakan (*mapping program*) dari kedeputan lain. sehingga dapat diukur keberhasilan atau hambatan pelaksanaan program/ kegiatan yang telah dilakukan oleh Kedeputan lain; dan
5. Penyusunan jadwal proses revisi anggaran, sehingga pemenuhan revisi anggaran dapat tersampaikan tepat pada waktunya.

BAB VI | Penutup

Laporan Capaian Program dan Kegiatan BPIP disusun sebagai potret pelaksanaan rencana kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020. Laporan Capaian ini merupakan laporan pelaksanaan tahun kedua setelah BPIP mempunyai alokasi anggaran secara mandiri

Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan ditengah status pandemi wabah Covid-19 yang melanda dunia. Sepanjang tahun 2020 isu-isu aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat terus ada. BPIP berupaya mengisi ruang-ruang publik melalui media offline maupun online agar Pancasila dapat menjadi pandangan hidup dan laku hidup masyarakat Indonesia. Lebih jauh upaya dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPIP memberikan kontribusi pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Kontribusi Sasaran Strategis BPIP ditujukan kepada revolusi mental dan PIP untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, melalui:

- a) PIP, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara, pada Sasaran Program 4.
- b) peningkatan peran dan fungsi BPIP sebagai perumus kebijakan umum PIP, pada Sasaran Program 1 dan 3.
- c) harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pada Sasaran Program 2.
- d) membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara, pada Sasaran Program 5.

Sangat disadari bahwa masih terdapat tantangan dalam mewujudkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara Nasional. Untuk itu, BPIP yang mengemban amanat PIP harus terus berbenah diri, khususnya dalam hal penguatan kelembagaan dan substansi PIP. Beberapa langkah dan rencana aksi perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja, antara lain:

1. Memperkuat budaya organisasi dan pola pikir bekerja berbasis kinerja, sehingga menghasilkan BPIP yang lincah (*agile*) dan dinamis, serta dapat menyesuaikan diri dengan tantangan.
2. Melakukan penyelarasan antar sasaran program pada tingkat Eselon I, dan sasaran kegiatan pada tingkat Kegiatan, dengan sasaran strategis dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sehingga tercipta keterpaduan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kepada *stakeholder*.
3. Membudayakan pelaksanaan dialog kinerja pada tingkat unit organisasi (Pimpinan) untuk memastikan capaian output dan realisasi anggaran yang pada ujungnya membarikan dampak dan manfaat kepada masyarakat.

Laporan Capaian Program dan Kegiatan BPIP ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian *output/outcome* dan realisasi anggaran, serta strategi organisasi dalam mengemban tugas dan fungsi yang diamanatkan. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja BPIP, sehingga berdampak positif mewujudkan Peningkatan SDM Indonesia.

SALAM PANCASILA!



Lampiran-Lampiran

Lampiran I PK 2020

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yudian Wahyudi

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Juni 2020

Kepala BPPI,

Yudian Wahyudi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020
Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis dan masif secara nasional (Laporan Rekomendasi Arah Kebijakan PIP)	Rekomendasi arah kebijakan yang disampaikan kepada Presiden	5 Rekomendasi
Terwujudnya BPPI sebagai Koordinator dalam pelebagaan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah	Persentase K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	20%
Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila	Pedoman Indikator IAP
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi	81
	Indeks Sistem Merit	0,61
	Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Nilai SAKIP	BB
	Indeks Profesionalisme ASN	81
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%

Program : Pembinaan Ideologi Pancasila

Anggaran : Rp. 160.050.978.000,-

Jakarta, Juni 2020

Kepala BPPI,

Yudian Wahyudi

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Lampiran II KANDIDAT INDIKATOR INDEKS AKTUALISASI PANCASILA

No.	INDIKATOR-INDIKATOR
SILA 1 KETUHANAN YANG MAHA ESA	
1.	Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggal dalam tiga bulan terakhir
2.	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya
3.	Persentase rumah tangga yang setuju terhadap keberadaan atau rencana pembangunan tempat ibadah agama lain di lingkungan sekitar tempat tinggal
4.	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal
5.	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda agama
6.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
SILA 2 KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB	
1.	Persentase rumah tangga yang berpersepsi setuju tentang pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara cepat, tidak bertele-tele, dengan biaya yang jelas dan tanggap melayani keluhan atau permintaan masyarakat
2.	Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir

No.	INDIKATOR-INDIKATOR
3.	Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
4.	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah
5.	Persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan
6.	Persentase desa dengan kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir
SILA 3 PERSATUAN INDONESIA	
1.	Persentase rumah tangga yang mengibarkan/memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia
2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional
3.	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku
4.	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya
5.	Persentase desa yang memiliki kearifan lokal
6.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak
SILA 4 KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN	
1.	Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah
2.	Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar
3.	Persentase desa yang Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan melakukan kegiatan musyawarah desa/kelurahan selama tahun 2017
4.	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat

No.	INDIKATOR-INDIKATOR
5.	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu
6.	Persentase anggota perempuan DPRD provinsi
SILA 5 KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA	
1.	Persentase desa yang memiliki koperasi yang masih aktif/beroperasi
2.	Persentase rumah tangga yang berpersepsi setuju tentang peningkatan jumlah usaha baru (usaha mikro/ kecil/rumah tangga dan sejenisnya) di wilayah tempat tinggal dalam 6 bulan terakhir
3.	Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik sendiri
4.	Persentase penduduk miskin
5.	Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang memiliki tabungan/simpanan berupa uang baik di lembaga keuangan ataupun di non lembaga keuangan
6.	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (JKN (BPJS dan Jamkesda))

Lampiran III | DOKUMENTASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MEDIA (ONLINE)

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
1.	Try Sutrisno mendukung pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP)	- https://republika.co.id/berita/qcudk1396/tri-sutrisno-dan-purnawirawan-harap-ruu-pip-disahkan-jadi-uu - https://republika.co.id/berita/qcub8u396/purnawirawan-usulkan-perubahan-nama-ruu-hip-jadi-ruu-pip - https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/02/try-sutrisno-harap-ruu-pip-jadi-undang-undang - https://jayakartanews.com/try-sutrisno-dan-purnawirawan-tni-berharap-ruu-pip-jadi-undang-undang/ - https://republika.co.id/berita/qcxg1u349/try-sutrisno-empat-poin-penting-ruu-pip - https://nasional.sindonews.com/read/90078/12/dukung-penguatan-pancasila-try-sutrisno-beberkan-4-poin-penting-ruu-pip-159382487
2.	Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah telah menunda pembahasan Rencana Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).	- https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/06/sikapi-demo-soal-ruu-hip-mahfud-md-tidak-apa-apa-asal-jangan-merusak-dan-ikuti-protokol-kesehatan - https://www.merdeka.com/politik/mahfud-md-terbit-atau-tidaknya-uu-hip-kan-sudah-ada-bpip.html - https://news.detik.com/berita/d-5082828/pemerintah-tegaskan-tunda-pembahasan-ruu-hip - https://republika.co.id/berita/qd3rey428/kata-mahfud-soal-usulan-ruu-hip-jadi-ruu-pembinaan-ideologi - https://www.liputan6.com/news/read/4298226/mahfud-md-perbolehkan-gelar-demo-penolakan-ruu-hip-asal-ikuti-protokol-kesehatan - https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200716121526-32-525393/pemerintah-dan-dpr-ubah-ruu-hip-jadi-ruu-bpip
3.	BPIP dan UNHAN sepakati nota kesepahaman	- https://www.inanews.co.id/2020/07/bpip-dan-unhan-sepakati-nota-kesepahaman-tentang-pelaksanaan-ideologi-pancasila/

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
	tentang pelaksanaan ideologi Pancasila	
4.	75 tahun-RI merdeka Megawati sesalkan agama masih dipertentangkan dengan Pancasila	- https://nasional.sindonews.com/read/136858/12/75-tahun-ri-merdeka-megawati-sesalkan-agama-masih-dipertentangkan-dengan-pancasila-1597734538 - https://nasional.tempo.co/read/1377103/megawati-masih-ada-yang-pertentangkan-agama-dan-pancasila - https://www.antaranews.com/berita/1675614/megawati-masih-ada-yang-pertentangkan-agama-dan-pancasila - https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35675415/megawati-sebut-masih-ada-pihak-yang-mempertentangkan-pascasila-dan-agama - https://m.merdeka.com/peristiwa/megawati-heran-masih-ada-yang-pertentangkan-agama-dan-pancasila.html - https://www.inews.id/news/nasional/megawati-prihatin-masih-banyak-orang-pertentangkan-agama-dengan-pancasila
5.	BPIP Berikan Anugerah ke 75 Ikon Prestasi Pancasila	- https://rmco.id/baca-berita/government-action/45832/bpip-berikan-anugerah-ke-75-ikon-prestasi-pancasila

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
6.	Maruf Pancasila terbukti mampu jaga kerukunan seluruh bangsa	- https://www.liputan6.com/news/read/4352785/maruf-pancasila-terbukti-mampu-jaga-kerukunan-seluruh-bangsa - https://www.teropongsenayan.com/116031-maruf-amin-pancasila-adalah-kalimatun-sawa-dan-al-mitsaq - https://www.viva.co.id/berita/nasional/1300875-maruf-amin-ingatkan-pancasila-jangan-sampai-dipahami-menyimpang - https://www.teropongsenayan.com/116029-simposium-sigma-pancasila-maruf-amin-sampaikan-4-upaya-pemersatu-umat-beragama - https://www.pantau.com/topic/nasional/gelar-simposium-di-uin-banten-bpip-target-awal-mahasiswa? - http://nasional.kompas.com/read/2020/09/10/12305901/maruf-amin-pancasila-harus-dipahami-secara-utuh-dan-komprehensif - https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/10/maruf-nilai-nilai-terkandung-dalam-agama-dan-pancasila-harus-dipahami-menyeluruh - https://kabar24.bisnis.com/read/20200910/15/1289847/wapres-paparkan-empat-pendekatan-untuk-mencegah-konflik - https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/wapres-minta-masyarakat-pahami-nilai-agama-dan-pancasila-tidak-parsial - https://nasional.sindonews.com/read/160180/94/apresiasi-sigma-pancasila-wapres-pancasila-tak-boleh-diganti-ideologi-lain-1599721752 - https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/10/maruf-sebut-pancasila-terbukti-mampu-jaga-kerukunan-dan-integrasi-nasional
7.	BPIP Pilkada jadi momentum untuk perkuat nilai nilai pancasila dengan persatuan	- https://biz.kompas.com/read/2020/08/08/141636428/bpip-pilkada-jadi-momentum-untuk-perkuat-nilai-nilai-pancasila-dengan-persatuan

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
8.	Romo Benny Pancasila harusnya menjadi kebiasaan hidup bukan lagi doktrinal	- https://nasional.sindonews.com/read/144562/14/romo-benny-pancasila-harusnya-menjadi-kebiasaan-hidup-bukan-lagi-doktrinal-159842208 - https://www.inews.id/news/nasional/pancasila-pondasi-kuat-mewujudkan-cita-cita-bangsa - https://www.liputan6.com/news/read/4340124/bpip-pancasila-bukan-doktrin-tapi-pondasi-kehidupan-masyarakat
9.	BPIP tertibkan pengubah lambang garuda Pancasila	- https://news.detik.com/berita/d-5164682/bpip-tertibkan-pengubah-lambang-garuda-pancasila
10.	BPIP Inpres protokol kesehatan diperlukan untuk mendisiplinkan masyarakat	- https://www.tribunnews.com/corona/2020/09/05/bpip-inpres-protokol-kesehatan-diperlukan-untuk-mendisiplinkan-masyarakat
11.	Kuatkan nilai Pancasila BPIP perlu payung hukum undang-undang	- https://www.liputan6.com/news/read/3614655/kuatkan-nilai-pancasila-bpip-perlu-payung-hukum-undang-undang
12.	Pakar BPIP perlu payung hukum berupa UU	- https://www.beritasatu.com/politik/654551/pakar-bpip-perlu-payung-hukum-berupa-uu
13.	BPIP tekan nota kesepahaman dengan 23 PTKIN se-Indonesia	- https://strategi.id/bpip-tekan-nota-kesepahaman-dengan-23-ptkin-se-indonesia/ - https://rmco.id/baca-berita/nasional/40851/bumikan-pancasila-di-kampus-bpip-gandeng-23-perguruan-tinggi-islam-negeri - https://m.republika.co.id/berita/qdg8sp430/bpip-23-ptkin-tekan-nota-kesepahaman%20a0 - https://kumparan.com/bpip/bpip-gandeng-23-perguruan-tinggi-islam-sosialisasikan-pancasila-1tnfZwAPeF5/full

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- http://www.teropongsenayan.com/114486-bpip-rangkul-23-perguruan-tinggi-islam-bumikan-pancasila-di-kampus - https://watyutink.com/topik/infotink/BPIP-Teken-Nota-Kesepahaman-dengan-23-PTKIN-Se-Indonesia - https://kumparan.com/bpip/bpip-gandeng-23-perguruan-tinggi-islam-sosialisasikan-pancasila-1tnfZwAPeF5/full - https://www.kompasiana.com/brandstories/5f0dba2f097f366778753d72/bpip-teken-nota-kesepahaman-dengan-23-ptkin-se-indonesia - http://bergelora.com/nasional/politik-indonesia/14196-mantap-nih-bpip-dan-23-perguruan-tinggi-siapkan-implementasi-tehnis-pancasila.html - https://www.bangkitlah.com/bpip-dan-23-perguruan-tinggi-siapkan-implementasi-tehnis-pancasila/ - https://rmco.id/baca-berita/nasional/40943/gadeng-ptkin-rektor-uin-antasari-bpip-terbuka-dalam-pembinaan-pancasila - http://asaberita.com/bpip-dan-uinsu-medan-sepakati-nota-mou-pembumian-pancasila/
14.	Datangi istana masyarakat Dayak dukung RUU PIP	- http://www.beritasatu.com/nasional/655895/datangi-istana-masyarakat-dayak-dukung-ruu-pip - https://www.jpnn.com/news/sambangi-istana-begini-aspirasi-perwakilan-masyarakat-dayak - https://joernalinakor.com/datangi-istana-masyarakat-dayak-sampaikan-dukungan-pada-ruu-pembinaan-ideologi-pancasila/ - https://www.opininews.com/nasional/1086/tokoh-suku-dayak-duduki-gedung-istana-negara-jakarta.html - https://www.bangkitlah.com/ini-upaya-masyarakat-dayak-mendukung-ruu-pembinaan-ideologi-pancasila/ - https://strategi.id/datangi-istana-masyarakat-dayak-sampaikan-dukungan-pada-ruu-pembinaan-ideologi-pancasila/ - https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/15/sambangi-bpip-perwakilan-masyarakat-dayak-sampaikan-dukungan-pada-ruu-pip

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://lensautara.id/2020/07/15/datangi-istana-masyarakat-dayak-sampaikan-dukungan-pada-ruu-pembinaan-ideologi-pancasila/
15.	Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono meminta kepada Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk mendukung BPIP bila sepakat dengan pancasila	- https://www.wartaekonomi.co.id/read295564/dirongrong-pa-212-bpip-dukung-pancasila-dukung-kami-juga-dong
16.	BPIP diperkuat pakar apa iya Pancasila milik rezim tertentu	- https://www.mediaindonesia.com/read/detail/330325-bpip-diperkuat-pakar-apa-ia-pancasila-milik-rezim-tertentu
17.	Temui kepala BPIP GM FKPPi siap kawal pembahasan RUU BPIP	- https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/23/temui-kepala-bpip-gm-fkppi-siap-kawal-pembahasan-ruu-bpip - https://www.teropongsenayan.com/114768-temui-yudian-gm-fkppi-siap-kawal-ruu-bpip - https://kumparan.com/bpip/generasi-muda-fkppi-siap-kawal-ruu-bpip-1trcMK0KPZ7 - https://m.mediaindonesia.com/read/detail/331070-temui-yudian-gerakan-muda-fkppi-siap-kawal-ruu-bpip - https://www.pantau.com/berita/gm-fkppi-dukung-pengokohan-bpip-demi-program-implementasi-nilai-pancasila? - https://m.mediaindonesia.com/read/detail/331070-temui-yudian-gerakan-muda-fkppi-siap-kawal-ruu-bpip

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://www.jpnn.com/news/terima-kasih-pp-gm-fkppi-turut-membumikan-pancasila-lewat-pengokohan-bpip - https://www.suara.com/news/2020/07/23/202948/gm-fkppi-mendukung-penuh-pembahasan-ruu-bpip - https://www.timesjakarta.com/berita/138865/bpip-terima-audiensi-pengurus-pusat-gm-fkppi-terkait-ruu-bpip
18.	KNPI Nilai Kehadiran BPIP Sangat Strategis	- https://m.republika.co.id/berita/gdy1hk430/knpi-nilai-kehadiran-bpip-sangat-strategis - https://kumparan.com/bpip/knpi-duku-g-bpip-tanamkan-pancasila-pada-generasi-muda-1trcYf3sZMQ/full - https://rmco.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/41938/sejalan-dengan-bpip-knpi-siap-bumikan-pancasila - https://www.teropongsenayan.com/114779-temui-bpip-knpi-siap-bantu-bumikan-pancasila-untuk-kalangan-pemuda#.XxorODw5JMY.whatsapp
19.	Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Universitas Pertahanan	- https://www.pantau.com/berita/bpip-masuk-universitas-pertahanan-try-sutrisnopancasila-pemersatu bangsa - https://rmco.id/baca-berita/government-action/42014/bpip-gandeng-unhan-pak-try-pembinaan-pancasila-idealnya-dilakukan-sedini-mungkin - https://www.idu.ac.id/berita/unhan-bersama-badan-pembinaan-ideologi-pancasila-bpip-tanda-tangani-nota-kesepahaman-tentang-pelaksanaan-pembinaan-ideologi-pancasila.html - https://www.kumparan.com/bpip/bpip-unhan-jalin-kerjasama-implementasikan-nilai-nilai-pancasila-1ts1eetpn6o/full
20	BPIP resmikan kampung gotong-royong	- https://www.pantau.com/berita/bpip-resmikan-kampung-gotong-royong - https://www.teropongsenayan.com/114917-resmikan-kampung-gotong-royong-bpip-tempat-yang-mensinergikan-kampung-dengan-kampus - https://rmco.id/baca-berita/government-action/42434/bpip-resmikan-kampung-gotong-royong

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://adadimalang.com/wakil-kepala-bpip-ri-resmikan-kampung-wonosari-go-green/
21.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila membumikan Pancasila untuk milenia	TV one
22.	Kementerian Agama dan BPIP kerukunan keberagaman harus dijaga	- https://www.viva.co.id/berita/nasional/1294657-menag-dan-bpip-kerukunan-keberagaman-harus-dijaga - https://bpip.go.id/bpip/berita/988/132/menag-dan-bpip-sepakat-jaga-kerukunan-keberagamaan.html - https://www.teropongsenayan.com/115477-jelang-tahun-baru-hijriah-kemenag-dan-bpip-imbau-jaga-kerukunan-umat-beragama - https://m.timesjatin.com/berita/143522/menag-ri-negara-dalam-mengatur-agama-bukan-intervensi-tapi-melayani - https://bpip.go.id/bpip/berita/988/140/bpip-pancasila-ada-kemiripan-dengan-piagam-madinah.html - https://nasional.sindonews.com/read/138736/94/menag-dan-bpip-kerukunan-beragama-perlu-dijaga-1597889311 - https://www.pantau.com/topic/nasional/menag-dan-bpip-kerukunan-beragama-perlu-dijaga
23.	BPIP Beri Penghargaan Desa Moderasi ke Warga Sindang Jati	- https://www.republika.co.id/berita/qfm0u7349/bpip-beri-penghargaan-desa-moderasi-ke-warga-sindang-jati - https://www.teropongsenayan.com/115588-masyarakat-desa-sindang-jati-percontohan-hidup-rukun - https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/513521-kakanwil-kemenag-bpip-dan-iain-curup-siap-lahirkan-desa-pancasila-baru-di-bengkulu - https://nusadaily.com/nusantara/kepala-bpip-kunker-ke-bengkulu-sempatkan-mampir-ke-rumah-pengasingan-bung-karno.html

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://strategi.id/bpip-hangatnya-ikatan-dan-relasi-sosial-antar-warga-merupakan-ciri-kerukunan-beragama/
24.	Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menghadiri secara daring seminar Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)	- https://strategi.id/wakil-kepala-bpip-hadiri-seminar-daring-pa-gmni/ - https://m.watutink.com/topik/infotink/Wakil-Ketua-BPIP-Hadiri-Seminar-Daring-PA-GMNI
25.	Wakil kepala BPIP kunjungi kota kasih kupang	- https://strategi.id/wakil-kepala-bpip-kunjungi-kota-kasih-kupang/
26.	BPIP raih opini WTP dari BPK	- https://www.inews.id/news/nasional/mantap-bpip-raih-opini-wtp-dari-bpk - https://rmco.id/baca-berita/nasional/46126/cihuy-bpip-raih-opini-wtp-dari-bpk - https://m.mediaindonesia.com/read/detail/341326-keren-bpip-raih-opini-wtp-dari-bpk - http://www.teropongsenayan.com/115785-keren-bpip-raih-opini-wtp-dari-bpk - https://kumparan.com/bpip/keren-bpip-raih-opini-wtp-dari-bpk-1u7GAV9tcXk/full - https://www.tirtayasa.id/laporan-keuangan-2019-bpip-raih-opini-wtp/ - https://republika.co.id/berita/qfzbx2349/meski-lembaga-baru-bpip-raih-opini-wtp-dari-bpk - https://www.pantau.com/topic/nasional/keren-bpip-raih-opini-wtp-dari-bpk
27.	Badan BPIP memperkuat sinergi dengan	- http://republika.co.id/r/qg15at349

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
	BNPTguna menangkal radikalisme dan terorisme untuk anak muda serta kaum milenial	
28.	Kepala BPIP Dorong Generasi Muda Manfaatkan Media Sosial untuk Bela Negara	- https://www.pantau.com/topic/nasional/kepala-bpip-dorong-generasi-muda-manfaatkan-media-sosial-untuk-bela-negara - https://nasional.sindonews.com/read/153372/94/kepala-bpip-dorong-generasi-muda-manfaatkan-media-sosial-untuk-bela-negara-1599131378 - https://kumparan.com/bpip/yudian-dorong-generasi-muda-manfaatkan-media-sosial-untuk-bela-negara-1u7ywYY3ZJI - https://yogya.inews.id/berita/kepala-bpip-ajak-generasi-muda-manfaatkan-media-sosial-untuk-bela-negara - http://www.teropongsenayan.com/115850-kepala-bpip-dorong-generasi-muda-manfaatkan-media-sosial-untuk-bela-negara - https://serikatnews.com/kepala-bpip-dorong-generasi-muda-maksimalkan-medsos-untuk-bela-negara/ - https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/2448/kepala-bpip--generasi-muda-harus-bisa-maksimalkan-media-sosial-untuk-bela-negara - https://m.rri.co.id/go/VHmg0Lh
29.	Kepala BPIP puncak dari kesadaran nasionalisme Indonesia dimotori para anak muda	- https://kumparan.com/bpip/kepala-bpip-puncak-kesadaran-nasionalisme-dimotori-anak-muda-1u8qc6YY2ug/full - https://republika.co.id/berita/gg69dj349/kepala-bpip-pemuda-harus-tebarkan-narasi-kebangsaan - https://m.rri.co.id/go/DRfjaWm - https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kepala-bpip-pemuda-harus-tebarkan-narasi-kebangsaan/ar-BB18Jd3t?ocid=msedgdhp - https://www.inews.id/news/nasional/kepala-bpip-puncak-kesadaran-nasionalisme-dimotori-anak-muda

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://jogja.tribunnews.com/2020/09/05/jadi-pembicara-di-uin-sunan-kalijaga-kepala-bpip-pemuda-harus-tebarkan-narasi-kebangsaan - http://www.teropongsenayan.com/115889-yudian-wahyudi-puncak-kesadaran-nasionalisme-dimotori-anak-muda - https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/pemuda-harus-tebarkan-narasi-kebangsaan/
30.	Kepala BPIP maksimalkan media sosial untuk bela negara	- https://www.antaranews.com/berita/1704706/kepala-bpip-maksimalkan-media-sosial-untuk-bela-negara - https://jogja.tribunnews.com/2020/09/03/kepala-bpip-generasi-muda-harus-gunakan-media-sosial-untuk-bela-negara - https://jogja.suara.com/read/2020/09/03/192000/kepala-bpip-generasi-muda-harus-manfaatkan-media-sosial-untuk-bela-negara - https://jogja.antaranews.com/berita/448754/kepala-bpip-minta-maksimalkan-media-sosial-untuk-bela-negara - https://nusadaily.com/news/kepala-bpip-dorong-generasi-muda-gunakan-media-sosial-untuk-bela-negara.html
31	Gelar Simposium SIGMA Pancasila BPIP bangun interkoneksi umat beragama di Indonesia	- https://nkriku.com/gelar-simposium-sigma-pancasila-bpip-bangun-interkoneksi-umat-beragama-di-indonesia/ - https://kumparan.com/kumparannews/bpip-proklamasi-satukan-42-negara-jadi-republik-indonesia-1uAiKWQNcEm - https://www.inews.id/news/nasional/berlangsung-hanya-59-detik-kepala-bpip-sebut-proklamasi-sebagai-mukjizat-politik
32.	Kepala BPIP budayakan Pancasila birokrat perkuat bela negara	- https://nasional.sindonews.com/read/165452/94/kepala-bpip-budayakan-pancasila-birokrat-perkuat-bela-negara-1600168165
33.	Penerapan implementasi	- https://nasional.sindonews.com/read/166432/94/wakil-kepala-bpip-masyarakat-sudah-menerapkan-

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
	Pancasila di masa pandemi	implementasi-pancasila-di-masa-pandemi-1600243781 - https://republika.co.id/share/ggqzux423 - https://nusadaily.com/news/wakil-kepala-bpip-pancasila-falsafah-hidup-bangsa-sehingga-harus-dijaga.html
34.	BPIP: Butuh Keluwesan Saat Sosialisasi Aktualisasi Pancasila	- https://www.pantau.com/topic/nasional/butuh-keluwes-dalam-sosialisasi-aktualisasi-pancasila? - https://republika.co.id/berita/qh622h349/bpip-butuh-keluwes-saat-sosialisasi-aktualisasi-pancasila - https://rmco.id/baca-berita/nasional/48733/butuh-keluwes-untuk-sosialisasikan-pancasila - https://regional.inews.id/berita/bpip-minta-camat-di-batam-lebih-luwes-aktualisasikan-pancasila - https://www.teropongsenayan.com/116410-camat-harus-merakyat-dalam-mensosialisasikan-pancasila# - https://kumparan.com/bpip/bpip-camat-berperan-penting-lindungi-negara-dan-jaga-kedaulatan-ekonomi-1uGY6Xo1z4P/full - https://nusadaily.com/nusantara/butuh-keluwes-dalam-sosialisasi-aktualisasi-pancasila.html - https://nawacita.co/index.php/2020/09/25/bpip-sosialisasi-peningkatan-integritas-masyarakat-perbatasan-di-batam/ - https://mediaindonesia.com/read/detail/347961-adaptasikan-pancasila-dalam-kehidupan
35.	BPIP beri advokasi positif untuk penggiat kampung Lumajang	- https://republika.co.id/berita/qhbh7w430/bpip-beri-advokasi-positif-untuk-pegiat-kampung-di-lumajang - https://jatim.inews.id/berita/bpip-beri-advokasi-positif-untuk-pegiat-kampung-di-lumajang - https://mediaindonesia.com/read/detail/348282-bpip-beri-advokasi-positif-untuk-pegiat-kampung-di-lumajang - https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGJgZVx - https://malangpariwara.com/2020/09/27/bpip-beri-apresiasi-19-pegiat-kampung-tematik-se-jawatimur

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
36.	BPIP dorong produk perundang-undangan sesuai nilai Pancasila	- https://republika.co.id/berita/qh99zw415/bpip-dorong-produk-perundangundangan-sesuai-nilai-pancasila
37.	Tangkal radikalisme BNPT, BPIP, dan Kemendes bangun desa Pancasila di Gorontalo	- https://news.detik.com/berita/d-5179968/tangkal-radikalisme-bnpt-bpip-kemendes-bangun-desapancasila-di-gorontalo
38.	Kemenag dan BPIP serukan toleransi lewat keluarga dan agama	- https://watyutink.com/topik/infotink/Keluarga-Tangguh - https://www.teropongsenayan.com/114405-kemenag-dan-bpip-serukan-toleransi-lewat-keluarga-dan-agama
39.	BPIP adakan diskusi bersama pembudayaan gotong royong di Badung	- https://www.suaradewata.com/read/202007240019/bpip-lihat-secara-langsung-nilai-nilai-gotong-royong-di-badung.html - https://katabali.com/2020/07/bpip-lihat-secara-langsung-nilai-nilai-gotong-royong-di-badung/ - http://metroballi.com/bpip-adakan-diskusi-bersama-pembudayaan-gotong-royong-di-kedonganan/
40.	BPIP dan TNI AL gelar internalisasi Penataran Pancasila	- https://nasional.sindonews.com/read/117392/14/r-aturan-prajurit-tni-al-ikut-sosialisasi-bpip-1596028048 - https://www.pantau.com/berita/diikuti-ratusan-prajurit-tni-al-bpip-sosialisasnilainilaipancasila? - https://tni.mil.id/view-183114-komandan-kodiklatal-dan-pejabat-utama-ikuti-penataran-pancasila-melalui-vicon.html - https://koarmada2.tnial.mil.id/2020/07/29/pangkoa-rmada-ii-ikuti-vicon-internalisasi-penataran-pancasila-bersama-kasal/ - https://tni.mil.id/view-183140-taruna-dan-perwira-pertama-aal-ikuti-internalisasi-penataran-pancasila-perwira-tni-al-secara-daring.html

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- http://seskoal.tnial.mil.id/berita/1754/DANSESKO-AL-IKUTI-ACARA-INTERNALISASI-PENATARAN-PANCASILA-BAGI-PRAJURIT-TNI-AL-DI-MABESAL/ - http://peloporwiratama.co.id/2020/07/29/perkuat-nilai-nilai-pancasilla-komandan-beserta-personil-lantamal-x-ikuti-internalisasi-penataran-pancasila/
41.	BPIP dorong koperasi dan UKM sebagai perwujudan ekonomi Pancasila	- https://nasional.sindonews.com/read/166408/94/bpip-dorong-koperasi-dan-ukm-sebagai-perwujudan-ekonomi-pancasila-1600243767
42.	Pembumian Pancasila melalui olahraga	- https://watyutink.com/topik/infotink/Perkuat-Nasionalisme-dengan-Olahraga - http://bergelora.com/nasional/kesra/14217-mantap-olahraga-memperkuat-nasionalisme.html - https://strategi.id/perkuat-nasionalisme-dengan-olahraga/ - https://olewopost.com/2020/07/19/olahraga-memperkuat-nasionalisme-bangsa/ - https://bergelora.com/2020/07/19/olahraga-memperkuat-nasionalisme-bangsa/
43.	Kesenian senjata ampuh bumikan Pancasila	- https://www.beritasatu.com/nasional/659185/kesenian-senjata-ampuh-bumikan-pancasila - https://investor.id/nasional/kesenian-senjata-ampuh-membumikan-pancasila - https://sinarharapan.net/2020/07/keberagaman-bagian-hidup-bangsa-indonesia - https://www.teropongsenayan.com/114825-kesenian-senjata-kuat-bumikan-pancasila - https://headtopics.com/id/kesenian-senjata-ampuh-bumikan-pancasila-14565031 - https://rmco.id/baca-berita/nasional/42101/seniman-siap-kolaborasi-untuk-membumikan-pancasila - https://nasional.sindonews.com/read/113380/15/miliki-nilai-pancasila-bpip-sebut-seniman-radikal-intoleran-langka-1595686035?showpage=all

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://kumparan.com/bpip/musisi-dan-seniman-siap-kolaborasi-dengan-bpip-1tsGz25eYOX - https://olewopost.com/2020/07/26/keberagaman-bagian-hidup-bangsa-indonesia/
44.	Ikon Pancasila	- https://www.pinisi.co.id/inspiratif-rafa-jafar-cucu-jafar-hafsah-raih-pemuda-ikon-prestasi-pancasila-kategori-wirausaha-sosial/ - http://www.kompas.com/edu/read/2020/08/31/151855271/peduli-sampah-elektronik-rafa-jafar-jadi-ikon-prestasi-pancasila-2020 - https://www.antaraneews.com/berita/1696966/tiga-peneliti-lipi-terpilih-sebagai-bagian-75-ikon-prestasi-pancasila?utm_medium=mobile - https://faktabanten.co.id/blog/2020/08/29/juara-film-pendek-bpip-pemuda-pandeglang-jadi-ikon-prestasi-pancasila/ - https://bantenhits.com/2020/08/23/bareng-joe-taslim-susi-pujiastuti-hingga-reza-rahadian-kades-warungbanten-lebak-jadi-ikon-prestasi-pancasila/ - https://portal-indonesia.com/2020/08/29/dari-susi-puji-astuti-hingga-kades-karangpatihan-eko-mulyadi-raih-75-ikon-apresiasi-prestasi-pancasila-tahun-2020/ - https://www.penamerdeka.com/495993/kampung-anggur-di-kota-tangerang-raih-apresiasi-prestasi-pancasila-dari-bpip.html - https://nasional.tempo.co/read/1380685/bpip-akan-berikan-anugerah-kepada-75-ikon-apresiasi-prestasi-pancasila-2020 - https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200902173406-199-542094/ayu-savitri-doktor-muda-lulusan-jerman-peneliti-keong-darat - https://kaltara.prokal.co/read/news/34431-sri-tiawati-pendiri-saps-raih-penghargaan-75-ikon-apresiasi-pancasila-2020.html
45.	BPIP Contoh Gaya Ganjar Dalam Menyampaikan Ideologi	- https://semarangku.pikiran-rakyat.com/semarangan/pr-31750355/gaya-ganjar-pranowo-saat-sampaikan-ideologi-pancasila-ke-masyarakat-jadi-contoh-buat-bpip

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
	Pancasila Kepada Masyarakat	- https://melihatindonesia.id/2020/09/17/bpip-contoh-gaya-ganjar-dalam-menyampaikan-ideologi-pancasila-ke-masyarakat/ - https://sigijateng.id/2020/bpip-puji-cara-dan-gaya-ganjar-sampaikan-ideologi-pancasila-ke-masyarakat/ - https://www.cendananews.com/2020/09/pancasila-perlu-diterjemahkan-dengan-konten-kreatif.html - https://www.teropongsenayan.com/116249-bpip-bakal-tiru-gaya-komunikasi-ganjar-untuk-edukasi-pancasila-seperti-apa-sih - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-tertarik-tiru-gaya-edukasi-implementasi-pancasila-dari-ganjar-pranowo - https://wartakota.tribunnews.com/2020/09/17/ganjar-sarankan-bpip-lebih-kreatif-jelaskan-ideologi-dan-nilai-nilai-pancasila - https://republika.co.id/share/qgtzhh349
46.	Dialog Kebangsaan Pancasila di Jamanku generasi Muda Bicara Pancasila	Tempo.co
47.	Pancasila dan 75 tahun kemerdekaan Indonesia	Kompas TV
48.	BPIP- Kemenkop UKM Arusutamakan Peran Koperasi di Masa De	- https://nasional.sindonews.com/read/119406/15/bpip-kemenkop-ukm-arusutamakan-peran-koperasi-di-masa-depan-1596197252 - https://headtopics.com/id/bpip-kemenkop-ukm-arusutamakan-peran-koperasi-di-masa-depan-14696409 - https://kumparan.com/bpip/mengarusutamakan-peran-koperasi-di-masa-depan-1tuaBw1useW - https://rmco.id/baca-berita/government-action/42682/bpipkemenkop-umkm-sinergi-tingkatkan-peran-koperasi-di-masa-depan

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://www.antaranews.com/berita/1642122/teten-masduki-tegaskan-perlunya-koperasi-pangan-diperkuat-di-indonesia - https://www.pantau.com/berita/sinergi-bpip-kemenkop-umkm-mengarusutamakan-peran-koperasi-di-masa-depan - http://www.teropongsenayan.com/114996-mengarusutamakan-peran-koperasi-di-masa-depan - https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200730212012-92-530875/kemenkop-akan-hubungkan-koperasi-dengan-bumn-dan-warung-makan - https://akurat.co/ekonomi/id-1183777-read-menkop-teten-koperasi-pangan-perlu-diperkuat - https://m.merdeka.com/uang/menkop-ukm-tegaskan-perlunya-koperasi-pangan-di-indonesia-diperkuat.html
49.	BPIP susun draf standarisasi materi pembinaan ideologi pancasila bagi pejabat negara	- https://strategi.id/bpip-susun-draf-standarisasi-materi-pembinaan-ideologi-pancasila-bagi-pejabat-negara/ - https://kumparan.com/bpip/kepala-bpip-pancasila-harus-menjadi-kompetensi-dasar-aparatur-negara-1uFRiji1ZBG - https://www.teropongsenayan.com/116363-susun-materi-pembinaan-bpip-aparatur-negara-punya-tanggungjawab-aktualisasikan-pancasila - https://www.teropongsenayan.com/116364-yudian-wahyudi-pancasila-harus-jadi-kompetensi-dasar-aparatur-negara
50.	Kedeputan Diklat Gelar DKT Perencanaan dan Kerja Sama Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Aparatur Negara	- https://watyutink.com/topik/infotink/Kedeputan-Diklat-BPIP-Gelar-DKT-Perencanaan-dan-Kerja-Sama-Diklat-Pembinaan-Ideologi-Pancasila-untuk-Aparatur-Negara

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
51.	BPIP dorong guru PPKN sebagai duta penggerak Pancasila	- https://www.pantau.com/berita/bpip-dorong-guru-ppkn-sebagai-duta-penggerak-pancasila - https://www.teropongsenayan.com/115082-guru-ppkn-lokomotif-pendidikan-pancasila-di-sekolah - https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/105/bpip-dorong-guru-ppkn-sebagai-duta-penggerak-pancasila.html - https://nasional.sindonews.com/read/123096/144/bpip-dorong-guru-ppkn-sebagai-duta-penggerak-pancasila-1596578936 - https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2020/08/05/bpip-dorong-guru-ppkn-sebagai-duta-penggerak-pancasila - https://bogor-today.com/diklat-pembinaan-ideologi-pancasila-bagi-guru-ppkn-sejabodetabek/ - https://www.kompasiana.com/sorotkompasiana6576/5f2a6cf23cf9ef4304685c23/bpip-dorong-guru-ppkn-sebagai-duta-penggerak-pancasila - https://terbaiknews.net/edukasi/bpip-dorong-guru-ppkn-sebagai-duta-penggerak-pancasila-4443544.html - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-dorong-guru-ppkn-sebagai-duta-penggerak-pancasila - http://harakatuna.com/guru-sebagai-penggerak-pancasila.html
52.	Webinar UMKM dan Pedagang Online Sebagai Benteng Ekonomi Pancasila di masa Covid-19	Bukalapak.com
53.	BPIP mensosialisasi kan aplikasi berbasis website yaitu SiPendekar	- https://nasional.sindonews.com/read/147542/94/bpip-sosialisasikan-sipendekar-pancasila-1598630913

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
	Pancasila di lingkungan internal	
54.	BPIP akan memutakhirkan alat ukur Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang saat ini sudah berjalan di tingkat pendidikan dan juga pemuda	- https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-matangkan-alat-ukur-pip-untuk-pemuda-dan-pendidikan? - http://www.teropongsenayan.com/116011-bpip-akan-ukur-pemahaman-pancasila-asn-lewat-aplikasi-perisai-pancasila - https://republika.co.id/berita/qgcn7q423/bpip-matangkan-alat-ukur-pip-untuk-pemuda-dan-pendidikan
55.	BPIP Deputy Pengendalian dan Evaluasi menggelar Diskusi Kebangsaan Kontekstualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Dunia Pendidikan di Kota Palu	- https://nasional.sindonews.com/read/167842/94/dunia-pendidikan-palu-yang-tanamkan-toleransi-dan-kekeluargaan-1600333785 - https://sulteng.antaranews.com/berita/153562/wali-kota-tema-pembangunan-palu-mengangkat-budaya-dalam-konteks-nilai
56.	Hari Kesaktian Pancasila	- https://www.kedaipena.com/kepala-bpip-pancasila-anugerah-terbesar-tuhan-kepada-bangsa-indonesia/ - https://www.inews.id/news/nasional/bpip-hari-kesaktian-pancasila-menguatkan-ideologi-negara - https://m.medcom.id/nasional/peristiwa/Wb7xIDak-bpip-dorong-aktualisasi-pancasila-lewat-kebijakan-publik - https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201001091929-32-553026/bpip-dorong-rekonsiliasi-di-momentum-hari-kesaktian-pancasila

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://nasional.okezone.com/read/2020/10/01/337/2286481/isu-g30s-pki-selalu-mencuat-ini-tanggapan-bpip
57.	Kepala BPIP membekali ratusan penerima Beasiswa LPDP	- https://republika.co.id/berita/qhh3wu423/bpip-bekali-penerima-beasiswa-lpdp-semangat-bela-negara
58.	BPIP Gerakan komunitas kampung	- https://strategi.id/wakil-kepala-bpip-gerakan-komunitas-kampung-berpotensi-bagi-pengaktualisasian-nilai-nilai-pancasila/ - https://www.teropongsenayan.com/116655-prof-hariyono-gerakan-komunitas-kampung-jadi-alternatif-pengaktualisasian-pancasila#.X3lOTSGxXtE.whatsapp - https://www.inews.id/news/nasional/wakil-kepala-bpip-gerakan-komunitas-kampung-berpotensi-bagi-pengaktualisasian-nilai-nilai-pancasila - https://republika.co.id/berita/qhnmwql349/bpip-gkk-jadi-tempat-aktualisasi-nilai-pancasila - https://watyutink.com/topik/infotink/Wakil-Kepala-BPIP-Gerakan-Komunitas-Kampung-Berpotensi-bagi-Pengaktualisasian-Nilai-nilai-Pancasila - https://www.inews.id/news/nasional/dpr-dukung-penuh-langkah-bpip-membumikan-pancasila-di-tengah-masyarakat - https://www.teropongsenayan.com/116655-prof-hariyono-gerakan-komunitas-kampung-jadi-alternatif-pengaktualisasian-pancasila
59.	Kemendes Bersama BPIP Perkokoh Pembangunan Desa dengan Pancasila	- https://nasional.sindonews.com/read/187396/15/kemendes-bersama-bpip-perkokoh-pembangunan-desa-dengan-pancasila-1601968258 - https://www.teropongsenayan.com/116711-membangun-desa-dengan-berpijak-pada-nilai-nilai-pancasila - https://nusadaily.com/metro/kemendes-dan-bpip-perkokoh-pembangunan-desa-dengan-pancasila.html

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://www.inews.id/news/nasional/akademisi-ungkap-6-tantangan-implementasi-nilai-nilai-pancasila-di-desa
60.	Desa Pancasila, Perkuat Fondasi Ekonomi Nasional	- https://www.pantau.com/topic/nasional/desa-pancasila-perkuat-fondasi-ekonominasional - https://www.inews.id/news/nasional/kepala-bpip-di-desa-kita-menemukan-nilai-nilai-pancasila - https://republika.co.id/berita/qhrwgl380/desa-pancasila-perkuat-fondasi-ekonomi-nasional - https://rmco.id/baca-berita/nasional/50030/desa-pancasila-perkuat-pondasi-ekonomi-nasional - https://www.teropongsenayan.com/116720-perkuat-pondasi-ekonomi-nasional-lewat-desa-pancasila - https://nasional.sindonews.com/read/188016/94/desa-pancasila-perkuat-fondasi-ekonomi-nasional-1601997050 - https://nusadaily.com/metro/desa-pancasila-perkuat-fondasi-ekonomi-nasional.html - https://m.republika.co.id/berita/qhtzt2423/desa-berperan-dalam-episentrum-pembangunan-sosial-ekonomi
61.	BPIP Gandeng Kemendes PDTT Sosialisasikan Desa Pancasila untuk Tangkal Radikalisme	- https://www.kompas.tv/article/114177/bpip-gandeng-kemendes-pdtt-sosialisasikan-desa-pancasila-untuk-tangkal-radikalisme - https://m.mediaindonesia.com/read/detail/350762-negara-perlu-desa-sosialisasikan-pancasila - https://nasional.okezone.com/amp/2020/10/06/337/2289487/bpip-ajak-pemuka-desa-jaga-keharmonisan-umat-beragama#aoh=16020710763383&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
62.	Pancasila Tidak hanya soal Toleransi, tapi Prestasi	- https://www.pantau.com/topic/nasional/prof-hariyono-pancasila-tidak-hanya-soal-toleransi-tapi-juga-prestasi - https://sulut.inews.id/berita/wakil-kepala-bpip-hariyono-pancasila-tidak-hanya-soal-toleransi-tapi-prestasi

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://nasional.sindonews.com/read/190272/94/p-rof-hariyono-pancasila-tidak-hanya-soal-toleransi-tapi-juga-prestasi1602155422?_ga=2.16489142.1019949642.1601998871-1271642760.1600182133
63.	Implementasi Pancasila dalam Kedaulatan Pangan	- https://www.teropongsenayan.com/116775-implementasi-pancasila-dalam-kedaulatan-pangan - https://republika.co.id/berita/ghvu4w423/implementasi-pancasila-dalam-kedaulatan-pangan
64.	BPIP agendakan penguatan Pancasila di Manado	- https://nasional.sindonews.com/read/190112/94/b-pip-agendakan-penguatan-pancasila-di-manado-1602148222
65.	BPIP pentingnya saling berbagi saat pandemi	- https://www.pantau.com/topic/nasional/kepala-bpip-yudian-wahyudi-ingatkan-pentingnya-saling-berbagi-saat-pandemi?utm_source=whatsapp&utm_medium=buttonshare#.X4q6KSmKitM.whatsapp
66.	BPIP: Watak Masyarakat Bisa Berubah untuk Peduli Lingkungan	- https://watyutink.com/topik/infotink/BPIP-Watak-Masyarakat-Bisa-Berubah - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-watak-masyarakat-bisa-berubah-untuk-peduli-lingkungan - https://nasional.sindonews.com/read/198420/94/b-pip-watak-masyarakat-bisa-berubah-1602835820
67.	BPIP usulkan Kampung Pancasila Tangerang jadi laborototium sosial akademisi	- https://www.teropongsenayan.com/116991-perubahan-inovatif-kampung-di-kota-tangerang-jadi-sorotan-bpip - https://www.pelitabanten.com/78040/2020/10/16/kampung-pancasila-di-kota-tangerang-inovasi-pengenalan-hidup-berprilaku/ - https://banten.antaranews.com/berita/134433/bpip-usulkan-kampung-pancasila-tangerang-jadi-laborototium-sosial-akademisi
68.	Ikon Prestasi Pancasila Penggerak Kampung	- https://republika.co.id/berita/qibjox430/ikon-prestasi-pancasila-penggerak-kampung-tertib-lalu-lintas

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
	Tertib Lalu Lintas	- https://kumparan.com/bpip/ikon-prestasi-pancasila-penggerak-kampung-tertib-lalu-lintas-1uPGqquzW08 - https://www.teropongsenayan.com/117004-belajar-dengan-subari-penggerak-kampung-tertib-lalu-lintas-yang-meraih-ikon-prestasi-pancasila - https://nusadaily.com/news/ikon-prestasi-pancasila-penggerak-kampung-tertib-lalu-lintas.html - https://nasional.sindonews.com/read/199172/94/ikon-prestasi-pancasila-penggerak-kampung-tertib-lalu-lintas-1602904249 - https://www.pantau.com/topic/nasional/ikon-prestasi-pancasila-penggerak-kampung-tertib-lalu-lintas
69.	Hari Santri, BPIP Dorong Kemajemukan dan Bangun Kemandirian Bangsa	- https://www.inews.id/news/nasional/kepala-bpip-yudian-wahyudi-santri-itu-gelar-pahlawan - https://www.teropongsenayan.com/117148-mutualisme-santri-dan-negeri - https://www.teropongsenayan.com/117153-hari-santri-nasional-ini-penjelasan-prof-hariyono-soal-inklusivitas-santri - https://kumparan.com/bpip/kepala-bpip-dua-aspek-kesetiaan-santri-keagamaan-dan-kenegaraan-1uRjyHq4S37 - https://nasional.sindonews.com/read/205150/94/pekuat-santri-indonesia-kuat-1603372259/ - https://nusadaily.com/news/kepala-bpip-dua-aspek-kesetiaan-santri-keagamaan-dan-kenegaraan.html - https://nasional.sindonews.com/read/206008/15/hari-santri-bpip-dorong-kemajemukan-dan-bangun-kemandirian-bangsa-1603437024?showpage=al - https://republika.co.id/berita/qin805349/kepala-bpip-dua-aspek-kesetiaan-santri-agama-dan-negara - https://www.inews.id/news/nasional/said-aqil-hari-santri-sangat-mulia-karena-sarat-sejarah - https://www.teropongsenayan.com/117154-kearifan-lokal-titik-temu-santri-dengan-pancasila

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://www.teropongsenayan.com/117162-hari-santri-menjaga-kemajemukan-dan-membangun-nilai-kemandirian-bangsa - https://nawacita.co/index.php/2020/10/23/kepala-bpip-dua-aspek-kesetiaan-santri-keagamaan-dan-kenegaraan - https://www.inanews.co.id/2020/10/kepala-bpip-santri-miliki-peran-penting-mengisi-kemerdekaan-nkri/
70.	Jejaring Pancamandala upaya BPIP membumikan Pancasila	- https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/23/jejaring-pancamandala-upaya-bpip-membumikan-pancasila
71.	BPIP Gandeng UI dan AGPAII Gelorakan Pelajar Penggiat Pancasila	- https://kumparan.com/bpip/bpip-gandeng-ui-dan-agpaa-gelorakan-pelajar-penggiat-pancasila-1uTMYTy6xI5/full - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-gandeng-ui-dan-agpaa-gelorakan-pelajar-penggiat-pancasila?utm_source=whatsapp&utm_medium=buttonshare#.X5f2OMy18HE.whatsapp - https://nusadaily.com/advertorial/peringati-hari-sumpah-pemuda-bpip-gandeng-ui-dan-agpaa-gelorakan-pelajar-penggiat-pancasila.html - https://www.inews.id/news/nasional/peringati-hari-sumpah-pemuda-bpip-gandeng-ui-dan-agpaa-gelorakan-pelajar-penggiat-pancasila - https://republika.co.id/berita/qiux28349/bpip-gandeng-ui-dan-agpaa-gelorakan-penggiat-pancasila - https://nasional.sindonews.com/read/210662/94/p-eringati-hari-sumpah-pemuda-bpip-gandeng-ui-dan-agpaa-gelorakan-pelajar-penggiat-pancasila-1603793420?_ga=2.138049456.1035386016.1603544130-1869669525.1602921270 - https://www.teropongsenayan.com/117230-peringati-hari-sumpah-pemuda-bpip-gandeng-ui-dan-agpaa-gelorakan-pelajar-penggiat-pancasila

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
72.	Bukan Hanya Corona, Pilkada dibayangi Politik Identitas	- https://www.pantau.com/topic/nasional/bukan-hanya-korona-pilkada-juga-dibayangi-politik-identitas - https://www.inews.id/news/nasional/bukan-hanya-corona-pilkada-dibayangi-politik-identitas - https://nusadaily.com/metro/bukan-hanya-corona-pilkada-dibayangi-politik-identitas.html - https://republika.co.id/berita/qiuzgy380/bukan-hanya-corona-pilkada-dibayangi-politik-identitas - https://nasional.sindonews.com/read/211032/94/bukan-hanya-corona-pilkada-dibayangi-politik-identitas-1603807820
73.	Pancamandala kunci BPIP membangun sinergi membumikan Pancasila	- https://www.kompas.tv/article/118364/pancamandala-kunci-bpip-membangun-sinergi-membumikan-pancasila
74.	Aparatur Negara Paling Dituntut untuk Melaksanakan Pancasila	- https://utaratimes.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-119911537/prof-hariyono-aparatur-negara-paling-dituntut-laksanakan-nilai-pancasila - https://watyutink.com/topik/infotink/Waka-BPIP-Aparatur-Negara-Paling-Dituntut-untuk-Melaksanakan-Pancasila - https://www.inews.id/news/nasional/wakil-kepala-bpip-aparatur-negara-paling-dituntut-melaksanakan-pancasila - https://www.pantau.com/topic/nasional/waka-bpip-aparatur-negara-paling-dituntut-untuk-melaksanakan-pancasila - http://teropongsenayan.com/117382-wakil-kepala-bpip-prof-hariyono-asn-wajib-untuk-melaksanakan-pancasila - https://nasional.sindonews.com/read/220902/94/aparatur-negara-paling-dituntut-melaksanakan-pancasila-1604560296
75.	Wakil Kepala BPIP: Teladani Bung Karno dengan	- https://m.republika.co.id/berita/qjcter430/wakil-kepala-bpip-teladani-bung-karno-dengan-membaca-buku

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
	Membaca Buku	- https://jatim.inews.id/berita/wakil-kepala-bpip-teladani-bung-karno-dengan-membaca-buku - https://www.pantau.com/topic/nasional/wakil-kepala-bpip-prof-hariyono-teladani-bung-karno-dengan-membaca-buku - https://nusadaily.com/advertorial/wakil-kepala-bpip-teladani-bung-karno-dengan-membaca-buku.html
76.	BPIP memberikan penghargaan Kampung Pembakti Pancasila	- https://m.republika.co.id/berita/qjegc8430/bpip-beri-penghargaan-untuk-empat-desa-di-blitar
77.	BPIP deklarasikan jejaring Pancamandala	- https://nusadaily.com/advertorial/bpip-deklarasikan-jejaring-pancamandala.html - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-gelar-deklarasi-jejaring-pancamandala-di-diy - https://republika.co.id/berita/qjzcyb430/sri-sultan-hamengkubowono-x-dukung-deklarasi-pancamandala - https://www.teropongsenayan.com/117649-disaksikan-sultan-hamengkubuwono-x-pancamandala-di-yogyakarta-resmi-dideklarasikan - https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5260457/bpip-deklarasi-pancamandala-di-yogya-sultan-pancasila-selalu-digoyang
78.	Disintegrasikan bangsa jangan hanya dilihat dari kacamata politik	- https://www.inews.id/news/nasional/wakil-kepala-bpip-disintegrasikan-bangsa-jangan-hanya-dilihat-dari-kacamata-politik?page=all
79.	Hari Anak Dunia, Kepala BPIP: Kegembiraan Anak-Anak Berubah Saat Pandemi Covid-19	- https://www.pantau.com/topic/nasional/hari-anak-dunia-kepala-bpip-kegembiraan-anak-berubah-saat-pandemi-korona - https://www.teropongsenayan.com/117695-hari-anak-dunia-kepala-bpip-kegembiraan-anak-anak-berubah-saat-pandemi-covid-19

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://nasional.okezone.com/read/2020/11/20/337/2313146/hari-anak-internasional-bpip-luncurkan-panca-main-indonesia - http://riau1.com/berita/riau/1605927380-peluncuran-pancamain-indonesia-jendri-salmon-nilai-nilainya-harus-diterapkan-dalam-hidup - https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/11/21/bemain-sembari-belajar-pancasila-dengan-menyenangkan/ - https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/11/21/bemain-sembari-belajar-pancasila-dengan-menyenangkan/ - http://riaugreen.com/view/Pekanbaru/56035/Perkenalkan-Nilai-Pancasila-Pada-Anak-Sejak-Dini.html#.X7kU9xqxdkw - https://lifestyle.okezone.com/read/2020/11/20/612/2313174/jokowi-nilai-dan-ideologi-pancasila-harus-terselip-di-permainan-tradisional - https://mediakaltara.com/tanamkan-jiwa-pancasila-pada-anak-indonesia-dengan-pancamain/ - https://kumparan.com/bpip/jokowi-apresiasi-inisiatif-bpip-menghadirkan-pancamain-indonesia-1udxtx7qITJ - https://nusadaily.com/metro/presiden-apresiasi-pancamain-bpip-kenalkan-pancasila-kepada-anak.html - https://beritakaltim.co/pancamain-pembumihan-pancasila-lewat-permainan-tradisional/ - https://www.inews.id/news/nasional/hari-anak-dunia-kepala-bpip-kegembiraan-anak-anak-berubah-saat-pandemi-covid-19 - https://nasional.sindonews.com/read/240086/15/hari-anak-dunia-kepala-bpip-pandemi-covid-19-renggut-kegembiraan-mereka-1605892301 - https://nusadaily.com/news/hari-anak-kepala-bpip-kegembiraan-anak-anak-berubah-saat-pandemi-covid-19.html

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://www.nusabali.com/berita/84898/permainan-tradisional-lawan-corona-semarakkan-hari-anak-sedunia
80.	BPIP 'Titip' Pancasila Kepada Generasi Muda Pangandaran	- https://www.inews.id/news/nasional/bpip-titipkan-pancasila-kepada-generasi-muda-pangandaran - https://nusadaily.com/news/bpip-titip-pancasila-kepada-generasi-muda-pangandaran.html - http://teropongsenayan.com/117859-bpip-titipkan-pancasila-kepada-generasi-muda-pangandaran - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-titipkan-pancasila-kepada-generasi-muda-pangandaran - https://republika.co.id/berita/qkhv59380/bpip-titipkan-pancasila-kepada-generasi-muda-pangandaran
81.	Kepala BPIP Ajak Ulama Se-Priyangan dan Pemda Pangandaran Sosialisasikan Nilai Pancasila	- https://republika.co.id/berita/qki5k1380/kepala-bpip-sukarno-teladani-perjuangan-nabi-muhammad - http://www.faktualjabar.com/pjs-bupati-pangandaran-dampingi-kepala-bpip-ri-dalam-kunjungannya-ke-pesantren-riyadussolikin/ - https://nusadaily.com/advertorial/kepala-bpip-ajak-ulama-se-priyangan-dan-pemda-pangandaran-sosialisasikan-nilai-pancasila.html - http://teropongsenayan.com/117879-kepala-bpip-soekarno-teladani-perjuangan-nabi-muhammad
82.	Pancasila Membutuhkan Khalifah Dalam Setiap Bidang Ilmu Pengetahuan	- https://www.pantau.com/topic/nasional/pancasila-membutuhkan-khalifah-dalam-setiap-bidang-ilmu-pengetahuan - https://jateng.inews.id/berita/pancasila-butuh-khalifah-dalam-setiap-ilmu-pengetahuan - https://m.republika.co.id/berita/qklql349/pancasila-butuh-khalifah-di-tiap-bidang-ilmu-pengetahuan - http://teropongsenayan.com/117907-pancasila-membutuhkan-khalifah-dalam-setiap-bidang-ilmu-pengetahuan

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
83.	BPIP Gandeng Fatayat NU Gelorakan Jihad Pangan di Yogyakarta	- https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-gandeng-fatayat-nu-gelorakan-jihad-pangan-di-yogyakarta - https://nusadaily.com/advertorial/bpip-fatayat-nu-gelorakan-jihad-pangan-di-jogja.html - https://m.republika.co.id/berita/qkuuym349/bpip-fatayat-nu-gelorakan-jihad-pangan-di-yogya - https://yogya.inews.id/berita/bpip-dan-fatayat-nu-gelorakan-jihad-pangan-di-yogyakarta
84.	Cegah Korupsi lewat penanaman Nilai Pancasila	- https://politik.rmol.id/read/2020/12/08/464801/Cegah-Korupsi-Lewat-Penanaman-Nilai-Pancasila,-KPK-Gandeng-BNN,-BNPT,-Dan-BPIP-
85.	BPIP: Alim Ulama Panutan Agar Indonesia Maju	- https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/12/halaqah-kebangsaan-bpip-fkub-kabnganjuk-alim-ulama-panutan-agar-indonesia-maju - https://nusadaily.com/regional/alim-ulama-panutan-agar-indonesia-maju.html - https://www.pantau.com/topic/nasional/halaqah-kebangsaan-bpip-fkub-nganjuk-alim-ulama-panutan-agar-indonesia-maju - https://republika.co.id/berita/ql80ck349/bpip-alim-ulama-panutan-agar-indonesia-maju
86.	BPIP : Pancasila Tidak Tergantikan Ideologi Apapun	- https://kumparan.com/bpip/rikard-bagun-pancasila-tidak-tergantikan-ideologi-apapun-1uJRsk5mW5t/full - https://www.inews.id/news/nasional/bpip-pancasila-tidak-tergantikan-ideologi-apa-pun - https://republika.co.id/berita/qhkh92423/rikard-bagun-pancasila-tidak-tergantikan-ideologi-apapun
87.	BPIP: Penggerak Masyarakat Jadi Kunci Keberhasilan UMKM	- https://www.inews.id/finance/makro/bpip-penggerak-masyarakat-jadi-kunci-pengembangan-koperasi-dan-umkm - https://www.teropongsenayan.com/117124-bpip-penggerak-masyarakat-jadi-kunci-keberhasilan-umkm

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://www.kompas.tv/article/118380/bpip-penggerak-masyarakat-jadi-kunci-memajukan-koperasi-dan-umkm - https://nusadaily.com/news/bpip-penggerak-masyarakat-jadi-kunci-pengembangan-koperasi-dan-umkm.html - https://nasional.sindonews.com/read/204222/94/bpip-penggerak-masyarakat-jadi-kunci-pengembangan-koperasi-dan-umkm-1603325437 - https://republika.co.id/berita/qijwe8349/bpip-masyarakat-jadi-kunci-pengembangan-koperasi-dan-umkm - https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/23/bpip-penggerak-masyarakat-jadi-kunci-pengembangan-koperasi-dan-umkm - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-penggerak-masyarakat-jadi-kunci-pengembangan-koperasi-dan-umkm
88.	Peringati Hari Santri Nasional, Said Aqil: Santri Simbol Perlawanan Penjajahan	- https://nasional.tempo.co/read/1398558/peringati-hari-santri-nasional-said-aqil-santri-simbol-perlawanan-penjajahan - https://www.demokrasi.co.id/2020/10/peringati-hari-santri-nasional-said.html - https://www.teras.id/news/pat-2/272162/peringati-hari-santri-nasional-said-aqil-santri-simbol-perlawanan-penjajahan - https://news.idtoday.co/peringati-hari-santri-nasional-said-aqil-santri-simbol-perlawanan-penjajahan/ - https://www.kontenislam.com/2020/10/said-aqil-siradj-santri-jadi-simbol.html?m=1 - https://www.cmbcindonesia.com/2020/10/said-aqil-siradj-santri-jadi-simbol.html - https://mediaindonesia.com/read/detail/355163-akses-informasi-untuk-mendorong-santri-berkontribusi-bagi-negara
89.	Megawati beri konsep	- https://nasional.sindonews.com/read/240980/15/megawati-beri-konsep-gotong-royong-berskala-dunia-di-china

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
	gotong-royong dunia di China	
90.	Momentum Hari Kesaktian Pancasila	- https://nasional.okezone.com/read/2020/10/01/337/2286479/hari-kesaktian-pancasila-bpip-bangsa-ini-harus-dewasa-selesaikan-masa-lalu - https://www.kedaipena.com/momentum-hari-kesaktian-pancasila-begini-pesan-bpip/ - https://www.teropongsenayan.com/116590-seruan-bpip-di-1-oktober-2020-peneguhan-pancasila-hingga-rekonsiliasi-peristiwa
91.	BPIP : Minta Elit Politik Dewasa Sikapi Komunisme	- https://nasional.sindonews.com/read/182318/12/hari-kesaktian-pancasila-bpip-minta-elite-politik-dewasa-sikapi-komunisme-1601529059 - https://republika.co.id/berita/qhxxq8354/bpip-minta-elite-politik-dewasa-sikapi-isu-komunisme - https://republika.co.id/berita/qhxxq8354/bpip-minta-elite-politik-dewasa-sikapi-isu-komunisme
92.	Pemerintah harus dewasa sikapi isu Komunisme	- https://mediaindonesia.com/read/detail/349343-pemerintah-harus-dewasa-sikapi-isu-komunisme - https://republika.co.id/berita/qhis40423/stafsus-bpip-mimpikan-rekonsiliasi-peristiwa-q30s - http://nasional.kompas.com/read/2020/10/01/18474181/bpip-minta-masyarakat-melapor-apabila-temukan-gerakan-komunisme
93.	Pesan BPIP di Hari Sumpah Pemuda: Anak Muda Harus Berwawasan Global, Bertindak Lokal	- https://www.liputan6.com/news/read/4394613/pesan-bpip-di-hari-sumpah-pemuda-anak-muda-harus-berwawasan-global-bertindak-lokal
94.	BPIP Kritik Keras Kegaduhan Elite Politik di Tengah Pandemi	- https://nasional.tempo.co/read/1392661/pilkada-saat-pandemi-bpip-minta-elit-politik-tak-saling-serang-dan-menjatuhkan - https://www.kedaipena.com/bpip-minta-elit-politik-jaga-kondusifitas-di-tengah-covid-19/ - https://www.suara.com/news/2020/10/04/085258/bpip-minta-elit-politik-tak-bikin-gaduh-saat-pandemi-covid-19

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://merahputih.com/post/read/bpip-sindir-elit-politik-yang-suka-buat-keributan-di-tengah-pandemi-corona - https://mediaindonesia.com/read/detail/350073-masyarakat-terhimpit-covid-19-elite-wajib-jaga-kondusivitas
95.	BPIP jadikan Pancasila sebagai gugus insting	- https://nusadaily.com/metro/dewan-pengarah-bpip-jadikan-pancasila-sebagai-gugus-insting.html
96.	BPIP: Penguatan Literasi Adalah Kunci Hadapi Intoleransi	- https://www.pantau.com/topic/nasional/stafsus-bpip-penguatan-literasi-adalah-kunci-hadapi-intoleransi? - https://m.republika.co.id/berita/qi0xeq380/stafsus-bpip-penguatan-literasi-kunci-hadapi-intoleransi - https://kaltimtara.com/kiat-hadapi-intoleransi-dari-bpip-perkuat-literasi-dan-logika/ - https://news.detik.com/berita/d-5209545/bpip-sebut-intoleransi-timbul-karena-pemahaman-budaya-yang-kurang-utuh
97.	Nilai Pancasila Solusi Penyelesaian Konflik	- https://www.medcom.id/nasional/daerah/GNGWV8pN-nilai-pancasila-solusi-penyelesaian-konflik - https://jendelanasional.id/headline/demonstrasi-yang-merusak-bisa-hancurkan-keadaban-kehidupan-bangsa/ - https://independensi.com/2020/10/15/cari-solusi-bukan-anarki/
98.	BPIP kecam pernyataan presiden macron	- https://mediaindonesia.com/read/detail/357213-tokoh-katolik-indonesia-kecam-pernyataan-presiden-macron - https://nasional.okezone.com/read/2020/11/02/337/2302532/kecam-macron-berikut-pernyataan-menohok-dari-romo-benny
99.	BPIP: Lindungi Diri dan Sesama Bukti Kecintaan kepada Tuhan	- https://jakartanews.id/2020/11/06/pandemi-dalam-perspektif-agama-patuh-protokol-kesehatan-bukti-kecintaan-kepada-tuhan/ - https://republika.co.id/berita/qjdavq349/bpip-lindungi-diri-dan-sesama-bukti-kecintaan-kepada-tuhan

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://telusur.co.id/detail/untuk-kepentingan-bersama-masyarakat-harus-patuhi-protokol-kesehatan - https://www.inews.id/news/nasional/pandemi-dalam-perspektif-agama-lindungi-diri-dan-sesama-bukti-kecintaan-kepada-tuhan - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-kepatuhan-protokol-kesehatan-adalah-bentuk-kecintaan-kepada-tuhan - https://www.kedaipena.com/hikmah-covid-19-bpip-bangkitkan-kebersamaan-dan-gotong-royong/
100.	BPIP Beberkan Tiga Poin Utama Untuk Dapat Memperkuat Nilai Mutiara Pancasila Di Kawasan Perbatasan	- https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/12/bpip-ungkap-tiga-poin-utama-perkuat-nilai-mutiara-pancasila-di-kawasan-perbatasan - http://teropongsenayan.com/117531-bpip-beberkan-tiga-poin-utama-untuk-dapat-memperkuat-nilai-mutiara-pancasila-di-kawasan-perbatasan - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-sebut-3-poin-utama-untuk-perkuat-nilai-mutiara-pancasila-di-perbatasan - https://nasional.sindonews.com/read/229564/94/bpip-beberkan-tiga-poin-utama-mutiara-pancasila-di-kawasan-perbatasan
101.	BPIP tegaskan kepala daerah wajib tegakan protokol kesehatan	- https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/nasional/699269/bpip-tegaskan-kepala-daerah-wajib-tegakkan-protokol-kesehatan
102.	BPIP Pendidikan karakter modal awal nilai Pancasila	- https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/23/bpip-pendidikan-karakter-modal-awal-tanamkan-nilai-pancasila - https://nusadaily.com/news/pendidikan-karakter-modal-awal-tanamkan-nilai-pancasila.html - https://www.beritamometer.com/benny-susetyo-asn-benteng-dalam-penanaman-nilai-pancasila/ - https://jakartanews.id/2020/11/23/pendidikan-karakter-moral-awal-tanamkan-pancasila/

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://www.kedaipena.com/bpip-tekan-peran-penting-asn-tanamkan-nilai-pancasila/
103.	Nilai ham melekat di Pancasila	- https://www.kedaipena.com/nilai-nilai-ham-melekat-di-pancasila/ - https://jakartanews.id/2020/12/10/hari-ham-kultur-penghormatan-martabat-manusia-harus-menjadi-habitus-bangsa/
104.	BPIP dan Tokoh Lintas Agama Susun Buku Pembinaan Ideologi Pancasila	- https://news.detik.com/berita/d-5244382/bpip--tokoh-lintas-agama-susun-buku-pembinaan-ideologi-pancasila - https://nasional.sindonews.com/read/222382/94/buku-pembinaan-ideologi-pancasila-referensi-aktualisasikan-nilai-pancasila-1604653892 - https://yogya.inews.id/berita/bpip-dan-tokoh-lintas-agama-susun-buku-pembinaan-ideologi-pancasila - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-dan-tokoh-lintas-agama-susun-buku-pembinaan-ideologi-pancasila
105.	Di Hari Pahlawan, BPIP Gencarkan Pembudayaan Nilai Ideologi Pancasila	- https://nasional.sindonews.com/read/227678/94/bpip-meneladani-nilai-nilai-luhur-para-pahlawan-1605060704 - https://www.pantau.com/topic/nasional/di-hari-pahlawan-bpip-gencarkan-pembudayaan-nilai-ideologi-pancasila - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-sampaikan-nilai-ideologi-pancasila-lewat-karya-seni-di-pameran-bazarti - https://republika.co.id/berita/qjm4p5380/bpip-gencarkan-pembudayaan-nilai-dan-ideologi-pancasila - https://republika.co.id/berita/qjlxxt380/bpip-pancasila-dapat-hidup-lewat-karya-seni - https://www.inews.id/news/nasional/peringati-hari-pahlawan-bpip-gencarkan-pembudayaan-nilai-nilai-ideologi-pancasila - https://nusadaily.com/advertorial/bpip-buka-pameran-bazarti-gembrongseni-sampaikan-nilai-ideologi-pancasila-lewat-karya-seni.html

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://news.okezone.com/read/2020/11/11/1/2308079/peringati-hari-pahlawan-bpip-gencarkan-pembudayaan-nilai-nilai-ideologi-pancasila - https://nasional.sindonews.com/read/228446/94/peringati-hari-pahlawan-bpip-gencarkan-pembudayaan-ideologi-pancasila-1605093110
106.	Orang Banyak Terjebak Bicara Pancasila, Tapi Melupakan Substansi	- https://kumparan.com/bpip/adji-samekto-orang-banyak-terjebak-bicara-pancasila-tapi-melupakan-substansi-1ube5cHatzS - https://www.teropongsenayan.com/117622-adji-samekto-orang-banyak-terjebak-bicara-pancasila-tapi-melupakan-substansi#.X7Nz9PYAiHs.whatsapp
107.	Golong Gilig, Jurus BPIP-Kemendagri Bumikan Pancasila di Yogyakarta	- https://yogya.inews.id/berita/golong-gilig-jurus-bpip-kemendagri-bumikan-pancasila-di-yogyakarta - https://republika.co.id/berita/qjxsss430/jejaring-pancamandala-bentuk-forum-golong-gilig
108.	BPIP Gandeng Komunitas Adat Sumba untuk Wujudkan Pembudayaan Pancasila	- https://edukasi.sindonews.com/read/243056/211/bpip-gandeng-komunitas-adat-sumba-untuk-wujudkan-pembudayaan-pancasila-1606155100?showpage=all - https://www.teropongsenayan.com/117760-bpip-gandeng-komunitas-adat-sumba-untuk-wujudkan-pembudayaan-pancasila - https://nusadaily.com/nusantara/bpip-gandeng-komunitas-adat-sumba-untuk-wujudkan-pembudayaan-pancasila.html - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-gandeng-komunitas-adat-sumba-untuk-wujudkan-pembudayaan-pancasila
109.	BPIP Gandeng Lima Segmentasi dan Kesbangpol, Bumikan Pancasila di	- https://nusadaily.com/nusantara/bpip-gandeng-lima-segmentasi-dan-kesbangpol-bumikan-pancasila-di-bandar-lampung.html - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-bumikan-pancasila-di-bandar-lampung - https://republika.co.id/berita/ql6md5349/

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
	Bandar Lampung	- https://www.laraspostonline.com/2020/12/bpip-pancamandala-menjadi-kekuatan-baru.html
110.	BPIP dorong pemerintah daerah kolaborasi amalkan Pancasila	- https://nusadaily.com/news/bpip-dorong-pemerintah-daerah-kolaborasi-amalkan-pancasila.html - https://www.inews.id/news/nasional/pemda-didorong-kolaborasi-amalkan-nilai-nilai-pancasila
111.	'Bumi Segantang Lada' Siap Dijadikan Pusat Persatuan Kawasan	- https://republika.co.id/berita/qii1qi423/bumi-segantang-lada-siap-dijadikan-pusat-persatuan-kawasan - https://www.pantau.com/topic/nasional/bumi-segantang-lada-siap-dijadikan-pusat-persatuan-kawasan - https://rmco.id/baca-berita/nasional/51495/bumi-segantang-lada-siap-jadi-pusat-persatuan-kawasan - https://nusadaily.com/advertorial/bumi-segantang-lada-siap-dijadikan-pusat-persatuan-kawasan.html
112.	BPIP: Institusionalisasi Pancasila Jadi Solusi Penataan Regulasi Daerah	- https://regional.inews.id/berita/bpip-institusionalisasi-pancasila-jadi-solusi-penataan-regulasi-daerah - https://republika.co.id/berita/qijomh423/institusionalisasi-pancasila-kunci-penataan-regulasi-daerah - https://nusadaily.com/advertorial/bpip-gelar-forum-institusionalisasi-pancasila-solusi-penataan-regulasi-daerah.html
113.	Program Elevasi BPIP Tujuannya Mengangkat Energi Positif Masyarakat	- https://republika.co.id/berita/qjcwe9430/alasan-bpip-terus-menggali-nilai-nilai-positif-di-masyarakat - https://nawacitapost.com/nasional/2020/11/07/program-elevasi-bpip-tujuannya-mengangkat-energi-positif-masyarakat/ - https://jatim.inews.id/berita/bpip-terus-menggali-nilai-nilai-positif-di-masyarakat-ini-alasannya - https://nasional.sindonews.com/read/222252/94/alasan-bpip-terus-menggali-nilai-nilai-positif-di-masyarakat-1604646707

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
		- https://republika.co.id/berita/qjcz1430/penguatan-pancasila-oleh-bpip-sesuai-perkembangan-zaman
114.	Rilis Silaras, BPIP Kawal Perundang-Undangan	- https://www.inews.id/news/nasional/bpip-rampungkan-kajian-analisis-dan-rekomendasi-peraturan-perundang-undangan - https://nusadaily.com/metro/bpip-rampungkan-kajian-analisis-dan-rekomendasi-peraturan-perundang-undangan.html - https://nasional.sindonews.com/read/230112/94/bpip-rampungkan-kajian-analisis-dan-rekomendasi-peraturan-perundang-undangan-1605193903?showpage=all - https://www.pantau.com/topic/nasional/silaras-jadi-upaya-bpip-kawal-perundang-undangan - https://rmco.id/baca-berita/government-action/54263/rilis-silaras-bpip-kawal-perundangundangan - https://nusadaily.com/metro/rilis-silaras-bpip-kawal-perundang-undangan.html - https://www.inews.id/news/nasional/luncurkan-silaras-bpip-kawal-peraturan-perundang-undangan
115.	Internalisasi dan Institusionalisasi nilai Pancasila di Kalimantan Barat	- https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4525-internalisasi-dan-institusionalisasi-nilai-pancasila-di-provinsi-kalimantan-barat
116.	Pembentukan produk hukum di Provinsi Jawa Barat harus berdasarkan Pancasila	- https://zonabandung.com/bandung-raja/4256/kepala-bpip-pembentukan-produk-hukum-di-prop-jabar-harus-bernafaskan-pancasila.html
117.	75 persen masyarakat rindu pedoman penghayatan dan pemalan Pancasila	- https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/24/bpip-sebut-75-persen-masyarakat-rindu-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila-era-orde-baru

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
118.	BPIP: Terimplementasikannya Nilai-nilai Pancasila, Ending dari PIP	- https://watyutink.com/topik/infotink/Deputi-Bidang-Pengkajian-dan-Materi-BPIP-Terimplementasikannya-Nilai-nilai-Pancasila-Ending-dari-PIP - https://www.teropongsenayan.com/117232-bpip-terimplementasikannya-nilai-nilai-pancasila-ending-dari-pip#.X5jIcmHxFVw.whatsapp
119.	Kembalikan Pancasila sebagai Pengarah Kebijakan, Ini Kata Deputi Pengkajian Dan Materi BPIP	- https://nusadaily.com/metro/prof-adji-samekto-pip-mandat-bpip-aplikasikan-nilai-pancasila.html - https://utaratimes.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-119881355/kembalikan-pancasila-sebagai-pengarah-kebijakan-ini-kata-deputi-pengkajian-dan-materi-bpip - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-ending-dari-pip-adalah-terimplementasikannya-nilai-pancasila - https://republika.co.id/berita/qiwh1v349/bpip-implementasi-nilainilai-pancasila-adalah-akhir-pip - https://www.inews.id/news/nasional/bpip-tujuan-pip-implementasi-nilai-pancasila
120.	Meneladani Pahlawan	- https://sinarharapan.net/2020/11/meneladani-pahlawan/ - https://m.republika.co.id/berita/qjknq423/meneladani-pahlawan - https://m.antaranews.com/berita/1830612/meneladani-pahlawan
121.	Solusi agar Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari	- https://www.pantau.com/topic/nasional/beberapa-solusi-agar-pancasila-diamalkan-dalam-kehidupan-sehari-hari
122.	Kasus Intoleransi Terjadi di Jateng, BPIP Sasar Generasi Muda	- https://5news.co.id/berita/2020/11/27/bpip-pancasila-bukan-masa-lalu-tapi-masa-depan/ - https://www.suaramerdeka.com/regional/semarang/248082-kasus-intoleransi-terjadi-di-jateng-bpip-sasar-generasi-muda

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
123.	BPIP Ajak Guru Kreatif Bangun Pelajar Pancasila	- https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-apresiasi-guru-nu-bersiap-diri-bangun-pelajar-pancasila - https://nusadaily.com/metro/bpip-ajak-guru-kreatif-bangun-pelajar-pancasila.html - http://teropongsenayan.com/117888-bpip-dorong-guru-tingkatkan-kreatifitas-untuk-bangun-pelajar-pancasila - https://www.inews.id/news/nasional/bpip-ajak-guru-kreatif-bangun-pelajar-pancasila
124.	BPIP: Produk-produk Pendidikan Pancasila Perlu Disinkronkan	- https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-produk-produk-pendidikan-pancasila-perlu-disinkronkan - https://strategi.id/bpip-produk-produk-pendidikan-pancasila-perlu-disinkronkan/ - https://watyutink.com/topik/infotink/BPIP-Produk-produk-Pendidikan-Pancasila-Perlu-Disinkronkan
125.	Rangkul Lembaga Pemerintah, BPIP Susun Cetak Biru Sistem Nasional Diklat PIP	- https://republika.co.id/berita/qi8yx0349/bpip-susun-cetak-biru-sistem-nasional-diklat-pip - https://www.teropongsenayan.com/116972-rangkul-lembaga-pemerintah-bpip-susun-cetak-biru-sistem-nasional-diklat-pip - https://nasional.sindonews.com/read/197740/94/bpip-menyusun-cetak-biru-sistem-nasional-diklat-pip-1602771019 - https://www.inews.id/news/nasional/bpip-susun-cetak-biru-sistem-nasional-diklat-pip - https://nusadaily.com/news/bpip-susun-cetak-biru-sistem-nasional-diklat-pip.html - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-susun-cetak-biru-sistem-nasional-diklat-pip - https://kumparan.com/bpip/bpip-susun-cetak-biru-sistem-nasional-diklat-pip-1uOqIITrc72/full
126.	BPIP gelar lokakarya Nasional Cetak Biru Sistem Nasional Diklat PIP	- https://nusadaily.com/advertorial/bpip-gelar-lokakarya-nasional-cetak-biru-sistem-pendidikan-dan-pelatihan-pembinaan-ideologi-pancasila.html

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
127.	BPIP Mendorong Panca Main Masuk Kurikulum Sekolah	- https://nasional.sindonews.com/read/201260/94/bpip-dukung-panca-main-masuk-kurikulum-sekolah-1603105801 - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-mendorong-panca-main-masuk-kurikulum-sekolah - https://www.inanews.co.id/2020/10/bpip-dorong-panca-main-masuk-kurikulum-sekolah/ - https://m.republika.co.id/berita/qig3lj423/bpip-mendorong-panca-main-masuk-kurikulum-sekolah - https://www.teropongsenayan.com/117061-bpip-dorong-panca-main-masuk-kurikulum-pendidikan - https://bali.inews.id/berita/bpip-dorong-panca-main-masuk-kurikulum-sekolah-untuk-tanamkan-nilai-nilai-pancasila - https://kumparan.com/bpip/bpip-mendorong-panca-main-masuk-kurikulum-sekolah-1uQSojNPLd4
128.	BPIP gandeng Komnas perempuan tertibkan perda diskriminatif	- https://bpip.go.id/bpip/berita/990/277/tertibkan-perda-diskriminatif-bpip-gandeng-komnas-perempuan.html
129.	BPIP: Penanaman Nilai Pancasila Harus Dilakukan Sejak Usia Dini	- https://m.republika.co.id/berita/qjprjs380/bpip-penanaman-nilai-pancasila-harus-dilakukan-sejak-usia - https://kalbar.inews.id/berita/bpip-penanaman-nilai-pancasila-harus-dilakukan-sejak-usia-dini - https://www.teropongsenayan.com/117539-bpip-aktualisasi-nilai-pancasila-harus-dengan-pendekatan-yang-mudah-dipahami - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-penanaman-nilai-pancasila-harus-dilakukan-sejak-usia-dini - https://nusadaily.com/advertorial/bpip-penanaman-nilai-pancasila-harus-dilakukan-sejak-usia-dini.html
130	BPIP bangun sinergi dengan Lekasila Magatra ISBI	- https://literasinews.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-92976281/bpip-ri-bangun-sinergi-dengan-lekasila-magatra-isbi-bandung-bahas-pembinaan-ideologi-pancasila

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
131.	BPIP Pendidikan Karakter Modal Awal Tanamkan Nilai Pancasila	- https://telusur.co.id/detail/bpip-pendidikan-karakter-modal-awal-tanamkan-nilai-pancasila
132.	Kesaktian Pancasila Pengukuhan Ideologi Negara	- https://www.teropongsenayan.com/116569-bpip-dan-seluruh-pejabat-negara-peringati-hari-kesaktian-pancasila - https://nasional.sindonews.com/read/182238/94/hari-kesaktian-pancasila-pengukuhan-ideologi-negara-1601525412 - https://www.pantau.com/topic/nasional/kepala-bpip-yudian-wahyudi-melalui-pancasila-kita-bisa-mengatasi-perbedaan - https://republika.co.id/berita/qhid4j349/bpip-hari-kesaktian-pancasila-perkuat-ideologi-negara - https://nusadaily.com/metro/kepala-bpip-dorong-generasi-pahami-sejarah-pancasila.html
133.	Luncurkan Zona Integritas, Kepala BPIP: Reformasi Birokrasi adalah Keniscayaan	- https://m.republika.co.id/berita/qhtx2u423/kepala-bpip-reformasi-birokrasi-adalah-keniscayaan - https://www.inews.id/news/nasional/luncurkan-zona-integritas-kepala-bpip-reformasi-birokrasi-adalah-keniscayaan - https://www.pantau.com/topic/nasional/kepala-bpip-yudian-wahyudi-reformasi-birokrasi-adalah-keniscayaan - https://www.teropongsenayan.com/116744-kepala-bpip-reformasi-birokrasi-adalah-keniscayaan - https://nasional.sindonews.com/read/189198/94/kepala-bpip-reformasi-birokrasi-adalah-keniscayaan-1602079811 - https://investor.id/nasional/pancasila-jadi-habitus-bangsa-dalam-pencegahan-korupsi
134.	Seminar BPIP-GP Ansor, Gus Yahya: Hentikan Perbedaan	- https://www.timesindonesia.co.id/read/news/306335/bekerjasama-dengan-bpip-gp-ansor-gelar-seminar-internasional-pancasila

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
	Pandangan, Mari Bersatu	- https://www.timesindonesia.co.id/read/news/306343/seminar-bpipgp-ansor-gus-yahya-hentikan-perbedaan-pandangan-mari-bersatu - https://www.liputan6.com/news/read/4394620/peringatan-sumpah-pemuda-semua-pihak-diminta-kawal-tegaknya-pancasila - https://republika.co.id/berita/qiwwgc314/seminar-internasional-rangkaian-hari-santri-internasional - https://www.jpnn.com/news/peringati-hari-sumpah-pemuda-semua-pihak-diminta-kawal-tegaknya-pancasila - https://www.voaindonesia.com/a/amerika-ajak-indonesia-perkuat-penegakan-ham/5638845.html - https://kumparan.com/bpip/kepala-bpip-dengan-pancasila-indonesia-menjadi-contoh-peradaban-dunia-1uTzi4NMTU9/full - https://www.kompas.tv/article/119656/bpip-dan-gp-ansor-gelar-seminar-internasional-peringati-hari-santri-dan-sumpah-pemuda
135.	BPIP RI Tunjuk Kalsel Sebagai Tuan Rumah Lokakarya	- https://nasional.sindonews.com/read/219920/94/bpip-akan-menggelar-lokakarya-pancasila-di-kalsel-1604488299 - https://m.republika.co.id/berita/qj9x0t423/bpip-ri-tunjuk-kalsel-sebagai-tuan-rumah-lokakarya
136.	Sestama BPIP Nilai Omnibus Law Sesuai dengan Pancasila	- https://kumparan.com/bpip/sestama-bpip-omnibus-law-cukup-pancasila-banget-1ubdy1FOhvV - https://www.inews.id/news/nasional/sestama-bpip-omnibus-law-cukup-pancasila-banget - https://www.pantau.com/topic/nasional/sestama-bpip-omnibus-law-pancasila-banget - https://inforial.tempo.co/read/1003994/sestama-bpip-nilai-omnibus-law-sesuai-dengan-pancasila - https://nusadaily.com/advertorial/sestama-bpip-omnibus-law-pancasila-banget.html - https://rmco.id/baca-berita/government-action/54336/sestama-bpip-omnibus-law-pancasila-banget

No.	Tema/Pokok Substansi	Media
137.	BPIP: Sinergi Publikasi Antar Humas Pemerintah Harus Terus Diupayakan	- https://republika.co.id/berita/qk1u4h380/sestama-bpip-sinergi-publikasi-antar-humas-terus-diupayakan - https://www.teropongsenayan.com/117689-sestama-bpip-selain-hadang-hoaks-sinergi-humas-pemerintah-berperan-beri-citra-positif-nkri - https://www.pantau.com/topic/nasional/bpip-sinergi-publikasi-antar-humas-pemerintah-harus-terus-diupayakan - https://nusadaily.com/metro/sinergi-publikasi-antar-humas-pemerintah-harus-terus-diupayakan-untuk-mewangikan-nkri.html

Lampiran IV PERHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI

No.	Unit	Indikator Kinerja (IK)	Perhitungan Capaian IK [Realisasi/Target*100%]	Perhitungan Nilai Kinerja (NK) Unit [Rata-Rata Capaian IK]	NK Unit	Ket
	BPIP	Kerangka Pikir IAP	$1/1 \times 100\% = 100\%$	$(100\% + 100\% + 75\%) / 3 = 100$	91,67	NKI
		% K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP	$61/61 \times 100\% = 100\%$			
		Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden	$(75 + 100 + 75 + 25 + 100) / 5 \times 100\% = 75\%$			
	DEPUTI BIDANG HAL-SOSKOMJAR	% penilaian atas efektivitas hubungan antar lembaga dan kerjasama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	$12/24 \times 100\% = 50\%$	$(50\% + 100\% + 100\%) / 3 = 100$	83,33	NKO
		Efektivitas metode/media sosialisasi, komunikasi dan jaringan Media TV Media Cetak Media Online	viewer lebih dari 1jt orang = 100%			
		Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila (efektivitas = jumlah komunitas yang melakukan aktivitas aktualisasi Pancasila setelah kegiatan pembudayaan)	$20/20 \times 100\% = 100\%$			
DI	Direktorat Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama	Jumlah dokumen kerjasama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya yg diselesaikan	$45/41 \times 100\% = 109,8\%$	$(109,8\% + 271\%) / 2 \times 100$	190%	NKUK
		Jumlah kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga yang menerima bantuan	$46/17 \times 100\% = 271\%$			
	Direktorat Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	Jumlah dokumen pelaksanaan sosialisasi yang diselesaikan	$4/4 \times 100\% = 100\%$	$(100\% + 100\% + 100\%) / 3 \times 100$	100	NKUK
		Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan komunikasi yang diselesaikan	$4/4 \times 100\% = 100\%$			
		Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan Jaringan yang diselesaikan	$2/2 \times 100\% = 100\%$			
	Direktorat Pembudayaan	Jumlah Dokumen kebijakan strategis dan program teknis pematapan pranata	$1/1 \times 100\% = 100\%$	$(100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 4 \times 100$	100	NKUK
		Jumlah Dokumen kebijakan strategis dan program teknis inovasi pembudayaan	$1/1 \times 100\% = 100\%$			
		Jumlah dokumen penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila	$1/1 \times 100\% = 100\%$			
		Jumlah kelompok target yang melaksanakan aktualisasi Pancasila setelah pembudayaan	$100/100 \times 100\% = 100\%$			
	DEPUTI BIDANG KUMADWASREG	Jumlah dokumen internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, serta pengawasan regulasi yang dimanfaatkan	$9/9 \times 100\% = 100\%$	$(100\% + 125\%) / 2 \times 100$	100	NKO
		Jumlah rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	$25/20 \times 100\% = 125\%$			
D2	Direktorat Analisis dan Sinkronisasi	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila yang diselesaikan	$3/3 \times 100\% = 100\%$	$100\% \times 100$	100	NKUK
	Direktorat Advokasi	Jumlah dokumen advokasi preventif pembinaan ideologi Pancasila yang diselesaikan	$1/1 \times 100\% = 100\%$	$(100\% + 100\% + 100\%) / 3 \times 100$	100	NKUK
		Jumlah dokumen Pendampingan yang diselesaikan	$1/1 \times 100\% = 100\%$			
		Jumlah dokumen Apresiasi yang diselesaikan	$1/1 \times 100\% = 100\%$			
	Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi	Jumlah dokumen hasil internalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan Perda yang diselesaikan	$3/3 \times 100\% = 100\%$	$(100\% + 100\%) / 2 \times 100$	100	NKUK
		Jumlah dokumen rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan	$3/3 \times 100\% = 100\%$			

No.	Unit	Indikator Kinerja (IK)	Perhitungan Capaian IK [Realisasi/Target*100%]	Perhitungan Nilai Kinerja (NK) Unit [Rata-Rata Capaian IK]	NK Unit	Ket
	DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI	Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan	$6/11 \times 100\% = 55\%$	$(55\% + 33\% + 0\% + 0\%) / 4 \times 100$	22	NKO
		Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	$1/3 \times 100\% = 33\%$			
		Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	$0\% / 100\% \times 100\% = 0\%$			
		Persentase penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat yang diselesaikan	$0\% / 100\% \times 100\% = 0\%$			
D3	Direktorat Pengkajian dan Materi	Jumlah dokumen hasil kajian filosofis dan historis arah	$2/7 \times 100\% = 29\%$	$(29\% + 150\% + 25\%) / 3 \times 100$	67,86	NKUK
		Jumlah dokumen hasil kajian kebijakan dan yuridis Pembinaan Ideologi Pancasila	$3/2 \times 100\% = 150\%$			
		Jumlah dokumen hasil kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila	$1/4 \times 100\% = 25\%$			
	Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara	Jumlah dokumen standardisasi materi, bahan ajar dan	$5/8 \times 100\% = 63\%$	$(63\% + 100\% + 100\%) / 3 \times 100$	87,67	NKUK
		Jumlah dokumen standardisasi materi, bahan ajar dan metode TNI dan POLRI	$5/5 \times 100\% = 100\%$			
		Jumlah dokumen standardisasi materi, bahan ajar dan metode Aparatur Sipil Negara	$5/5 \times 100\% = 100\%$			
	Direktorat Standardisasi Materi, Bahan Ajar dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal	Jumlah dokumen Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Formal PIP yang terstandar	$8/13 \times 100\% = 62\%$	$(62\% + 33\% + 400\%) / 3 \times 100$	165	NKUK
		Jumlah dokumen Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Nonformal PIP yang terstandar	$1/3 \times 100\% = 33\%$			
		Jumlah dokumen Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Informal PIP yang terstandar	$12/3 \times 100\% = 400\%$			
	DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase hasil perencanaan dan kerja sama Diklat PIP yang ditindaklanjuti (dokumen perencanaan kebijakan strategis & program teknis)	$3/3 \times 100\% = 100\%$	$(100\% + 97\% + 240\% + 0\% + 0\%) / 5 \times 100$	87,40	NKO
		Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	$97\% / 100\% \times 100\% = 97\%$			
		Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	$96\% / 40\% \times 100\% = 240\%$			
		Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi (ToT)	0%			
		Sarana Diklat PIP yang dimanfaatkan	0%			
D4	Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen perencanaan dan kerjasama Diklat PIP	$3/3 \times 100\% = 100\%$	100% / 1*100	100	NKUK
		Jumlah dokumen standardisasi & kurikulum Diklat PIP (Kurikulum dan Metode)	$10/10 \times 100\% = 100\%$			
	Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan	$2/6 \times 100\% = 33\%$	$(33\% + 0 + 0) / 3 \times 100$	11	NKUK
		Jumlah tenaga pengajar yang mengikuti TOT	0			
		Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan PIP yang tersedia	0			

No.	Unit	Indikator Kinerja (IK)	Perhitungan Capaian IK [Realisasi/Target*100%]	Perhitungan Nilai Kinerja (NK) Unit [Rata-Rata Capaian IK]	NK Unit	Ket
	DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Persentase dokumen Pengendalian Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang dimanfaatkan	$100\%/40\%*100\%=250\%$	$(100\%+100\%+100\%)/3*100$	100	NKO
		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang ditindaklanjuti	$100\%/40\%*100\%=250\%$			
		Persentase sistem pengendalian dan evaluasi terpusat berbasis elektronik yang dimanfaatkan	$100\%/100\%*100\%=100\%$			
	Direktorat Pengendalian	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	$3/3*100\%=100\%$	$(100\%+100\%+100\%)/3*100$	100	NKUK
		Jumlah pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian terpadu berbasis elektronik	$1/1*100\%$			
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Strategis Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	$1/1*100\%$			
	Direktorat Evaluasi	Jumlah Dokumen evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	$3/3*100\%=100\%$	$(100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/5*100$	100	NKUK
		Jumlah pembangunan dan pengembangan sistem evaluasi terpadu berbasis elektronik	$1/1*100\%=100\%$			
		Jumlah Dokumen evaluasi dan penanganan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menentang Ideologi Negara	$1/1*100\%=100\%$			
		Jumlah Dokumen evaluasi dan penanganan Penyelenggara Negara dan ASN yang menentang Ideologi Negara	$1/1*100\%=100\%$			
		Jumlah Dokumen evaluasi dan penanganan Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang bertentangan dengan Ideologi Negara/Pancasila	$1/1*100\%=100\%$			
	SEKRETARIAT UTAMA	Nilai Reformasi Birokrasi	$44,14/81*100\%=55\%$	$(55\%+127\%+100\%+88\%+37\%)/5*100$	81,4	NKO
		Indeks Sistem Merit	$316,5/240*100\%=127\%$			
		Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP=100%			
		Nilai SAKIP	$B/BB*100\%=70/100*100\%=70\%$			
		Indeks Profesionalisme ASN	$30/81*100\%=37\%$			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	#NA			
SU	Biro Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaaahlian	Persentase tingkat kepuasan terhadap dukungan teknis dan administrasi layana Biro Fas.DPTA	pemberian layanan 106 keg=100%	blm survei	blm survei	NKUK
	Biro Umum dan SDM	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan Biro Umum dan SDM	#NA	$(127\%+37\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/7*100$	94,86	NKUK
		Indeks Merit	127%			
		Indeks Profesionalisme ASN	37%			
		Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	$1/1*100\%=100\%$			
		Layanan manajemen Barang Milik Negara	$1/1*100\%=100\%$			
		Layanan Umum	$1/1*100\%=100\%$			
		Layanan Perkantoran	$1/1*100\%=100\%$			
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	$1/1*100\%=100\%$			
	Biro Perencanaan dan Keuangan	Layanan Perencanaan	$1/1*100\%=100\%$	$(100\%+100\%+88\%)/3*100$	96	NKUK
		Opini Laporan Keuangan oleh BPK/ Layanan Manajemen Keuangan	WTP=100%			
		Nilai SAKIP/ Layanan Pemantauan dan Evaluasi	88%			
	Biro Hukum dan Organisasi	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan produk hukum, organisasi dan tata laksana, dan RB	#NA (blm survei)	$(55\%+100\%+100\%+100\%)/4*100$	88,75	NKUK
		Nilai Reformasi Birokrasi	55%			
		Layanan Hukum	$1/1*100\%=100\%$			
		Layanan Manajemen Organisasi	$1/1*100\%=100\%$			
		Layanan Reformasi Birokrasi	$1/1*100\%=100\%$			
	Biro Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	$87,50\%/100\%*100\%=87,50\%$	$(87,50\%+137\%)/2*100$	112,25	NKUK
		Nilai Tingkat Maturnitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	$2,75/2*100\%=137\%$			
	Pusat Data dan Informasi	tingkat Maturnitas SPBE/Layanan data dan informasi	pemberian layanan TIK=100% (blm penilaian)	blm penilaian	blm penilaian	NKUK



JL. VETERAN III NO.2, KECAMATAN GAMBIR,
KOTA JAKARTA PUSAT , PROVINSI DKI JAKARTA
KODE POS 10110



PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



BPIP RI



@BPIPRI